



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# Kajian Fiskal Regional

Provinsi Kepulauan Riau



Triwulan III

2024

Prepared by:  
Kanwil DJPb Provinsi Kepri





# Kajian Fiskal Regional

Provinsi Kepulauan Riau





# Foreword Kata Pengantar



**Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh,  
Para pembaca dan stakeholders yang kami hormati,**

Sege nap puji dan syukur kami panjatkan kepada Alloh Subhanahu Wata'ala, yang atas izin dan karunia-Nya sehingga Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

KFR sebagai salah satu output Regional Chief Economist disusun untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) eksternal maupun internal yang menyajikan potret perkembangan perekonomian daerah, kondisi fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengembangan ekonomi daerah, serta rekomendasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi para perumus kebijakan serta seluruh stakeholders lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Penyusunan KFR dilakukan melalui sinergi antar stakeholders yang bersama-sama berkontribusi dalam mengoptimalkan kualitas perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). KFR triwulan III Tahun 2024 mencakup informasi Perkembangan Perekonomian Regional, Kinerja Fiskal Regional (APBN, APBD dan Konsolidasian), serta analisis tematik atas "Implementasi Strategi Penguatan Local Taxing Power sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD".

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan KFR ini, terutama kepada Gubernur Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepri, OJK Provinsi Kepri, BPS Provinsi Kepri, Kanwil DJP Kepri, Kanwil



*Budiman*

DJBC Kepri, KPU BC Batam, KPKNL Batam, Dr. Suyono Saputro selaku Local Expert dan akademisi dari Universitas Internasional Batam, dan seluruh jajaran pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepri.

Kami berharap, sinergi yang telah terbangun dengan baik ini dapat semakin kita tingkatkan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan KFR ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas kajian kedepannya.

Besar harapan kami bahwa KFR yang disusun ini dapat memberikan manfaat untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Kepri pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

**Tanjungpinang, November 2024**



**Budiman**  
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepri





# Kajian Fiskal Regional Tim Penyusun

## Penanggung Jawab

**Budiman**

(Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau)

## Ketua Tim

**Anisah Alfada**

(Kepala Bidang PPA II)

## Kontributor

**Muhadi**

(Kepala Seksi PPA II B)

**Budi Indrawan**

(Kepala Seksi PPA II C)

**Lorensia Kristina Br. S.**

(Pelaksana Seksi PPA II A)

**Erika Krissanta**

(Pelaksana Seksi PPA II B)

**Muhammad Rizki**

**Firdaus**

(Pelaksana Seksi PPA II C)

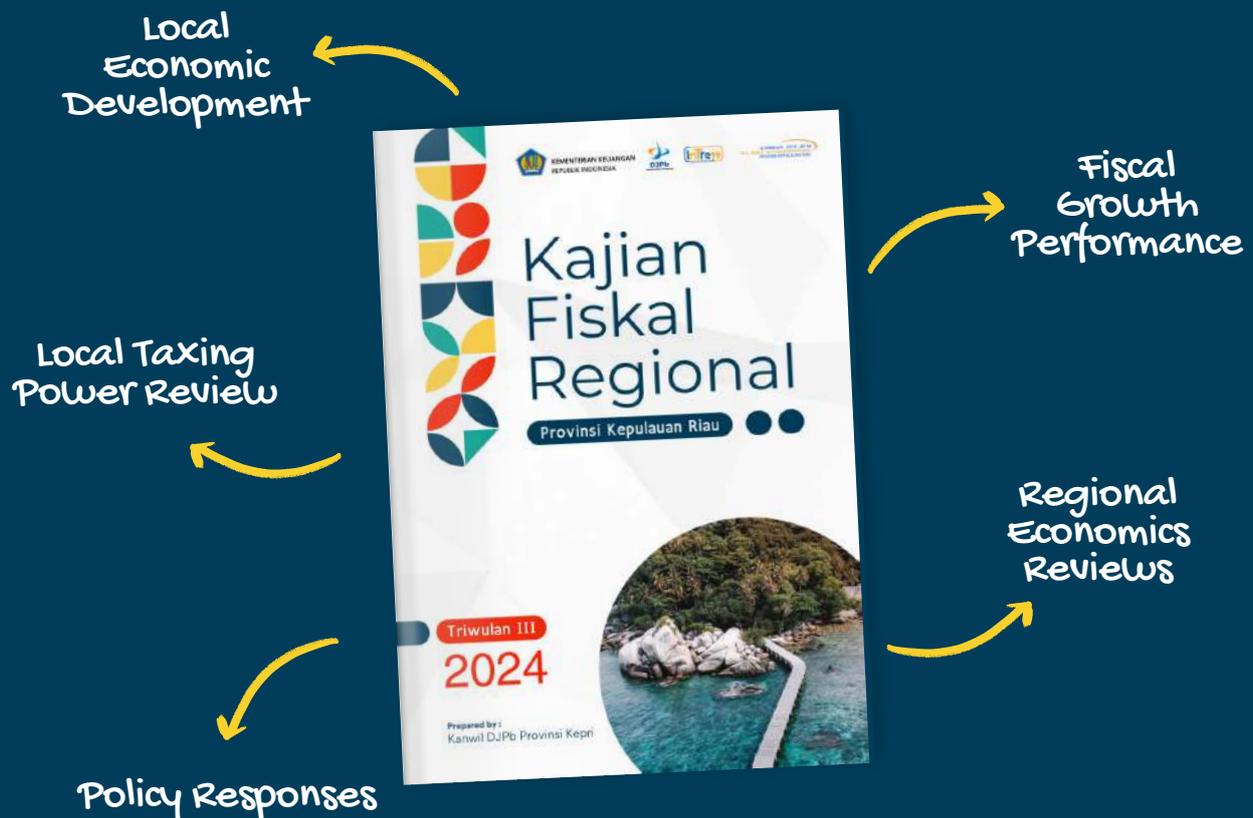
## Design dan Layout

**Erika Krissanta**

## Stakeholders Terkait

- *Local Expert* Mitra Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau
- Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kepulauan Riau
- Kemenkeu Satu Regional Kepulauan Riau (Kanwil DJP, Kanwil DJBC, KPU BC, PSO BC, Kanwil DJKN)
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
- Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau
- Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup Kepri
- Akademisi (UMRAH dan UIB)
- Satuan Kerja dan BLU Wilayah Provinsi Kepri
- BMKG Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
- BPKP Perwakilan Kepri
- KPPN Batam dan KPPN Tanjungpinang

“ Berlayar di Kapal Ferry yang Melaju  
Di tengah bersih dan segar nya udara  
Bersama kita wujudkan Kepri Maju  
Demi Masa Depan Cerah Sejahtera ”



## Korespondensi

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II  
Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau  
Jalan Sultan Muhammad Syah Dompok  
Kota Tanjungpinang, Prov. Kep. Riau, 29124  
[djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/](http://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/)

 @djpbkepri

 Kanwil DJPb Kepulauan Riau

 @djpbkepri





# Table of Content

## Daftar Isi



### Pembukaan

- |           |                    |            |                     |
|-----------|--------------------|------------|---------------------|
| <b>ii</b> | Kata Pengantar     | <b>vii</b> | Daftar Grafik       |
| <b>v</b>  | Daftar Isi         | <b>ix</b>  | Daftar Istilah      |
| <b>vi</b> | Daftar Tabel       | <b>xv</b>  | Dashboard           |
| <b>vi</b> | Daftar Special Box | <b>xix</b> | Ringkasan Eksekutif |

### BAB I

## 01

### Analisis Ekonomi Regional

- 1** Analisis Indikator Makro Ekonomi
- 9** Analisis Indikator Kesejahteraan

### BAB II

## 18

### Analisis Fiskal Regional

- 18** Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi
- 38** Pelaksanaan APBD Konsolidasi di Provinsi Kepulauan Riau
- 51** Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian Triwulan III 2024
- 53** Analisis Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah

### BAB III

## 58

### Pengembangan Ekonomi Daerah: Pemberdayaan UMKM Kepri

- 58** Gambaran Umum UMKM di Kepulauan Riau
- 60** Kendala yang Dihadapi UMKM dan Pemberdayaan yang Sesuai bagi UMKM
- 61** Dukungan Pemerintah terhadap Pemberdayaan UMKM
- 68** Analisis Kendala UMKM, Kebutuhan Pemberdayaan UMKM, dan Dukungan Pemberdayaan yang Diberikan oleh Pemerintah

### BAB IV

## 70

### Analisis Tematik: Strategic Penguatan *Local Taxing Power* Sesuai UU No 1 Tahun 2022 dan PP No 35 Tahun 2023

- 70** Pendahuluan
- 71** Perkembangan Penyelesaian Perda PDRD oleh Pemerintah Daerah
- 75** Ringkasan Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Pengaturan dalam Perda PDRD beserta tindak lanjut Pemerintah Daerah
- 78** Reviu Strategi Daerah dalam Penguatan *Local Taxing Power*
- 80** Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah: Realisasi PAD dan Local Tax Ratio (LTR) sejak 2017 s.d. September 2024

### BAB V

## 89

### Kesimpulan dan Rekomendasi

- 89** Kesimpulan
- 94** Rekomendasi

### Daftar Pustaka





## List of Tables Daftar Tabel



Tabel 1.1 – Rincian Andil Infasi Bulan September 2024 per Komoditas (%yoy)	6
Tabel 2.1 – Pagu dan Realisasi I-Account APBN di Kepri Triwulan III, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)	18
Tabel 2.2 – Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri Triwulan III, 2023 s.d. 2024	20
Tabel 2.3 – Perkembangan Perpajakan di Kepri Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	21
Tabel 2.4 – Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan di Kepri Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	22
Tabel 2.5 - Kontribusi Realisasi Pajak Sektorial terhadap PDRB Kepri Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	23
Tabel 2.6 – Perkembangan Bea dan Cukai di Kepri, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	24
Tabel 2.7 - Realisasi Bea Masuk per Sektor Kanwil DJBC Kepri dan KPU BC Batam, Triwulan III 2024	26
Tabel 2.8 - Kontribusi Realisasi Bea Keluar per Sektor Kanwil DJBC Kepri dan KPU BC Batam, Triwulan III 2024	26
Tabel 2.9 – Perkembangan PNBP KPKNL di Kepri Triwulan III, 2023 - 2024 (dalam Miliar Rupiah)	26
Tabel 2.10 – Perkembangan Tax Ratio 2021 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)	26
Tabel 2.11 – Prognosis Pendapatan Negara s.d. Akhir Tahun (dalam Miliar Rupiah)	27
Tabel 2.12 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah per Fungsi, Triwulan III 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)	29
Tabel 2.13 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah 10 K/L Realisasi Terbesar, 2023 – 2024	31
Tabel 2.14 – Kontribusi Belanja Pemerintah Triwulan III, 2023-2024 terhadap PDRB (dalam Miliar Rupiah)	33
Tabel 2.15 – Kontribusi Belanja Pemerintah per Kapita Triwulan III, 2023 – 2024 (dalam rupiah)	33
Tabel 2.16 – Capaian Output pada Belanja Sektorial/Program Strategis, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	34
Tabel 2.17 – Kinerja Anggaran dan Capaian Output pada Belanja PN, Triwulan III 2024	35
Tabel 2.18 – Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)	37
Tabel 2.19 - I-Account APBD Konsolidasi Provinsi Kepulauan Riau	38
Tabel 2.20 – Perkembangan Tax Ratio Kepri	42
Tabel 2.21 – Indeks Kemandirian Fiskal	43
Tabel 2.22 - Perkembangan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) I Triwulan III 2023 dan Triwulan III 2024	44
Tabel 2.23 - Analisis Kontribusi Belanja Daerah Terhadap PDRB Triwulan III 2023 dan 2024	48
Tabel 2.24 - Analisis Belanja Daerah Perkapita Triwulan III 2023 dan 2024	49
Tabel 2.25 - Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian Triwulan III 2023 dan 2024	51
Tabel 2.26 - Analisis Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Triwulan III 2023 dan 2024	53
Tabel 2.27 - Belanja Modal Triwan IV 2023 s.d. Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	55
Tabel 2.28 - Realisasi PNBP KPKNL Batam Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	56
Tabel 2.29 Realisasi PNBP KPKNL Batam Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	57
Tabel 3.1 – Sebaran UMKM per Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, 2019-2022	58
Tabel 3.2 – Serapan Tenaga Kerja UMKM per Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, 2019-2022	59
Tabel 3.3 – Sebaran UMKM per Sektor/Klasifikasi Industri di Kepulauan Riau, 2020-2022	59
Tabel 3.4 – Serapan Tenaga Kerja UMKM per Sektor/Klasifikasi Industri di Kepulauan Riau, 2020-2022	60
Tabel 3.5 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L untuk Pemberdayaan UMKM	65
Tabel 3.6 – Pagu dan Realisasi Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM di Kepri (dalam Miliar Rupiah)	66
Tabel 3.7 – Pagu dan Realisasi Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM di Kepri (dalam Miliar Rupiah)	66
Tabel 4.1 - Perkembangan Penyelesaian Perda PDRD oleh Pemerintah Daerah	72
Tabel 4.2 - Ringkasan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Pengaturan Perda PDRD Lingkup Kepri	75
Tabel 4.3 - Strategi Pemerintah Daerah Lingkup Kepri Dalam Penguatan Local Taxing Power	78
Tabel 4.4 - Pendapatan PDRD Pemerintah Provinsi Kepri (dalam Miliar Rupiah)	84
Tabel 4.5 - Pendapatan PDRD Konsolidasian Lingkup Pemerintah Kab/Kota (dalam Miliar Rupiah)	85
Tabel 1.1 – Rincian Andil Infasi Bulan September 2024 per Komoditas (%yoy)	6
Tabel 2.1 – Pagu dan Realisasi I-Account APBN di Kepri Triwulan III, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)	18
Tabel 2.2 – Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri Triwulan III, 2023 s.d. 2024	20
Tabel 2.3 – Perkembangan Perpajakan di Kepri Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	21
Tabel 2.4 – Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan di Kepri Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	22
Tabel 2.5 - Kontribusi Realisasi Pajak Sektorial terhadap PDRB Kepri Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	23



## List of Special Box Daftar Special Box

- 1 Peluang Investasi di Provinsi Kepri, The Largest Archipelagic Region in Indonesia** - Pengembangan Budidaya Udang Vannamei di Wilayah Bintang Buyu, Teluk Bintang
- 2 Komparasi Studi - Pajak Daerah di China**  
Teori dan Pengukuran Kapasitas Pajak dan Upaya Pemungutan Pajak
- 3 Pajak Daerah – Studi Komparasi Internasional**  
Penerapan di Beberapa Negara OECD
- 4 Analysis Of The Relationship**  
Between Local Taxes, Investment, And Government Spending on Regional Gross Domestic Product Of The Tourism Sector In The Riau Islands





# List of Graphs Daftar Grafik



Grafik 1.1 – Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepulauan Riau Tahun 2019 – Q3 2024 (%yoy)	1
Grafik 1.2 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepulauan Riau Tahun 2019 – Q3 2024 (%qtq)	1
Grafik 1.3 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepulauan Riau Tahun 2019 - 2024 (% ctc)	1
Grafik 1.4 – Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan III 2024 (%ctc)	1
Grafik 1.5 – Perkembangan Nominal PDRB ADHK dan ADHB Kepulauan Riau Tahun 2019-Q3 2024	2
Grafik 1.6 – Share PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan III 2024 (%yoy)	2
Grafik 1.7 – Share PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan III 2024 (%yoy)	3
Grafik 1.8 – Kontribusi Belanja APBN dan APBD Terhadap Sektor Riil Ekonomi Kepri Triwulan III 2024	5
Grafik 1.9 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (yoy)	5
Grafik 1.10 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (mtm)	6
Grafik 1.11 – Inflasi pada Provinsi di Regional Sumatera per Maret 2024 (%yoy)	7
Grafik 1.13 – Perkembangan Ekspor Kepri Bulanan Tahun 2022-2024 (mtm)	9
Grafik 1.14 – Perkembangan Impor Provinsi Kepri Bulanan Tahun 2022-2024 (mtm)	9
Grafik 1.15 – Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kepri Tahun 2019-2024 (ribu jiwa)	10
Grafik 1.16 – Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan Kepri Tahun 2020-2024	10
Grafik 1.17 – Perkembangan Indeks P1 dan P2 Kepri Tahun 2020-2024 (persen)	11
Grafik 1.18 – Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Regional Sumatera Tahun 2020-2024 (persen)	11
Grafik 1.19 – Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri per Tahun 2020-2024	12
Grafik 1.20 – Angka TPT Per Provinsi di Regional Sumatera bulan Februari 2024 (persen)	12
Grafik 1.21 – Porsi Penyerapan Tenaga Kerja per Lapangan Usaha di Kepri Tahun 2023-2024 (persen)	12
Grafik 1.23 – Ketimpangan di Regional Sumatera per Februari 2024 (persen)	13
Grafik 1.24 – Perkembangan NTP di Kepulauan Riau Tahun 2022 – Q3 2024	14
Grafik 1.25 – Perkembangan NTN di Kepri Tahun 2022 – Q3 2024	14
Grafik 1.26 - Perkembangan IPM Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2024	16
Grafik 1.27 - Perkembangan IPM Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2020-2024	16
Grafik 1.28 – Nilai IPM Kabupaten/Kota di Kepri per Kategori IPM Tahun 2020 – 2024	16
Grafik 1.29 – Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kepri Tahun 2020-2023	17
Grafik 2.1 – Pagu dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Triwulan III, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)	19
Grafik 2.2 - Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Triwulan III, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)	19
Grafik 2.3 – Porsi Realisasi Pendapatan Negara, Triwulan III 2024	20
Grafik 2.4 – Realisasi Penerimaan Perpajakan Triwulan III, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)	21
Grafik 2.5 – Porsi Penerimaan Perpajakan Triwulan III, 2024	21
Grafik 2.6 – Pagu dan Realisasi Belanja Negara Triwulan III, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)	28
Grafik 2.7 – Realisasi Belanja Triwulan III, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)	28
Grafik 2.8 – Perbandingan Realisasi BPP dan TKD, Triwulan III 2024	28
Grafik 2.9 – Porsi Realisasi BPP, Triwulan III 2024	29
Grafik 2.10 – Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	30
Grafik 2.11 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah 10 K/L Realisasi Terbesar, Triwulan III 2024	31
Grafik 2.12 – Pagu dan Realisasi Belanja TKD Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	32
Grafik 2.13 – Realisasi Belanja TKD per Pemda, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	32
Grafik 2.14 – Pagu dan Realisasi Belanja TKD per Jenis TKD, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	32
Grafik 2.15 – Pagu dan Realisasi PAD Triwulan III, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	39
Grafik 2.16 – Realisasi Pendapatan Asli Daerah per Jenis Penerimaan	39
Grafik 2.17 – Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	41
Grafik 2.18 – Pagu dan Realisasi LLPDiS Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	42
Grafik 2.19 - Indeks Kemandirian Fiskal I Tahunan, 2017 - 2023	42
Grafik 2.20 - Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) I, Triwulan III 2024	43
Grafik 2.21 – Indeks Kemandirian Fiskal II Tahunan, 2017 - 2023	44
Grafik 2.22 – Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) II, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	44
Grafik 2.23 – Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Triwulan III, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	46
Grafik 2.24 – Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Triwulan III, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	46
Grafik 2.25 – Pagu dan Realisasi Belanja APBD tiap Pemda per Jenis Triwulan III 2023 dan 2024	47
Grafik 2.26 – Pagu dan Realisasi Belanja Operasi Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	47
Grafik 2.28 – Pagu dan Realisasi Belanja Modal Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	48
Grafik 2.25 – Pagu dan Realisasi Belanja APBD tiap Pemda per Jenis Triwulan III 2023 dan 2024	47





# List of Graphs Daftar Grafik



Grafik 2.26 – Pagu dan Realisasi Belanja Operasi Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	47
Grafik 2.28 – Pagu dan Realisasi Belanja Modal Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	48
Grafik 3.1 – Penyaluran KUR per Skema s.d. 30 September 2024 (Rp miliar)	62
Grafik 3.2 – Debitur KUR per Skema s.d. 30 September 2024 (debitur)	62
Grafik 3.3 – Penyaluran KUR per Wilayah s.d. 30 September 2024 (Rp miliar)	63
Grafik 3.4 – Penyaluran KUR per Sektor	63
Grafik 3.5 – Penyaluran KUR per Lembaga Penyalur	63
Grafik 3.6 – Porsi Penyaluran UMi per Wilayah, s.d. 30 September 2024	64
Grafik 3.7 – Porsi Penyaluran UMi per Wilayah, s.d. 30 September	64
Grafik 3.8 – Kondisi UMKM Sebelum Diberikan Pemberdayaan, Kegiatan Pemberdayaan yang Telah Dilakukan, dan Kondisi UMKM Setelah Menerima Pemberdayaan	68
Grafik 4.1 - Perkembangan PAD Pemprov Kepri (dalam Miliar Rupiah)	80
Grafik 4.2 - Perkembangan PAD Konsolidasi Kab/Kota (dalam Miliar Rupiah)	80
Grafik 4.3 - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Konsolidasi (dalam Miliar Rupiah)	81
Grafik 4.4 - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Pemprov Kepri (dalam Miliar Rupiah)	81
Grafik 4.5 - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Kota Batam (dalam Miliar Rupiah)	82
Grafik 4.6 Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Kota Tanjungpinang (dalam Miliar Rupiah)	82
Grafik 4.7 - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Kab Bintan (dalam Miliar Rupiah)	82
Grafik 4.8 - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Kab Anambas (dalam Miliar Rupiah)	83
Grafik 4.9 - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Kab Lingga (dalam Miliar Rupiah)	83
Grafik 4.10 - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Kab Natuna (dalam Miliar Rupiah)	83
Grafik 4.11 - Perkembangan Local Tax Ratio Pemprov Kepri	85
Grafik 4.12 - Perkembangan Local Tax Ratio Konsolidasi Pemkab/Pemkot Kepri	86





# Abbreviations

## Daftar Istilah



**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBD, perubahan APBD (APBD-P), dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN (APBN-P), dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

**Badan Layanan Umum (BLU)** instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menggunakan langsung pendapatannya (tanpa harus menyetor ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN) dan menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Contoh: BLU Perguruan Tinggi Negeri, BLU Rumah Sakit Pemerintah, dan BLUD Pengelola Dana Bergulir).

**Bea Masuk (BM)/Impor Duty** adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Pengenaan bea masuk biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, memberikan proteksi terhadap produksi local, dan/atau untuk menghukum negara tertentu dengan mengenakan tarif yang sangat tinggi untuk negara tersebut.

**Bea Keluar (BK)/Export Duty** adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang keluar dari daerah pabean. Saat ini, pengenaan bea keluar sudah jarang diterapkan karena tidak sejalan dengan kebijakan berorientasi ekspor yang membutuhkan harga kompetitif di pasar internasional.

**Cukai** adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Contoh: minuman beralkohol dan tembakau).

**Cumulative to Cumulative (ctc)** adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis kumulatif waktu. (Contoh: penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2021)

**Dana Abadi Daerah** adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok

**Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)** dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik. (Contoh penggunaan: gedung sekolah, infrastruktur irigasi, energy skala kecil, prasarana pemerintah daerah, infrastruktur jalan, transportasi perdesaan sarpras pasar, dan lain sebagainya).





# Abbreviations

## Daftar Istilah



**Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)** dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan non fisik. (Contoh penggunaan: bantuan operasional sekolah (BOS), tunjangan profesi guru PNSD, bantuan operasional kesehatan, dan lain sebagainya).

**Dana Alokasi Umum (DAU)** adalah dana transfer yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

**Dana Bagi Hasil (DBH)** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

**Dana Desa** adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPB,

**Dana Insentif Daerah (DID)** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu

**Defisit/Surplus Anggaran** adalah kebijakan atau realisasi pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluaran lebih dari penerimaan disebut sebagai defisit anggaran, sedangkan pengeluaran lebih kecil dari penerimaan disebut sebagai surplus anggaran.

**Free Trade Zone (FTZ)/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas)** merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, PPN, PPhBM, dan Cukai.

**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKD)** merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta atau kelompok usaha masyarakat.

**High Base-effect** adalah kecenderungan pertumbuhan dari nilai yang kondisi awalnya tinggi.

**Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI)** menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

**Industri Kecil** adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Industri Menengah** adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.





# Abbreviations

## Daftar Istilah



**Inflasi** adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus- menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

**Inflasi Tahun Kalender** adalah perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Ini dihitung dari persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

**Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Special Economic Zone (SEZ)** adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu..

**Ketimpangan Fiskal Vertikal** adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara pemerintah pusat dengan tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

**Ketimpangan Fiskal Horizontal** adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya.

**Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPAD)** merupakan pos penganggaran penerimaan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKD. LLPAD meliputi jasa giro, bunga, tuntutan ganti rugi, denda pajak, denda retribusi, pendapatan BLUD, dan lain sebagainya.

**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD)** merupakan pos penerimaan Pemda untuk menampung penerimaan selain PAD dan Dana Perimbangan. Pos LLPD meliputi hibah, dana darurat, DBH dari provinsi, bantuan keuangan, dan lain sebagainya.

**Month to Month (mtm)** adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis bulanan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada bulan September 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada bulan Agustus 2022.

**Obligasi Daerah** adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

**Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Property Tax** adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

**Pajak Daerah/Local Tax** adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan Pemerintah Daerah. Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan sebagainya.

**Pajak Penghasilan (PPH)/Income Tax** adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

**Pajak Perdagangan Internasional (PPI)** adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

**Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Value Added Tax (VAT)/Goods and Services Tax (GST)** adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain





# Abbreviations

## Daftar Istilah



(pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

**Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

**Pembiayaan Utang Daerah** adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)** merupakan kelompok pendapatan pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan LLPAD.

**Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

**Pengeluaran Konsumsi - Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)** merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT.

**Pengeluaran Konsumsi – Rumah Tangga (PK-RT)** adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

**Pinjaman Daerah** adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

**Produk Domestik Bruto (PDB)** adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu negara pada periode waktu tertentu.

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pada periode waktu tertentu

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)** adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya berdasarkan harga berlaku.

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)** adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya dengan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Dengan kata lain, PDRB ADHK murni menghitung nilai tambah output tanpa memperhitungkan kenaikan/penurunan harga.

**Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB/Kapita)** merupakan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. PDRB/Kapita digunakan sebagai indikator standar hidup penduduk suatu wilayah.

**Quarter to Quarter (qtq)** mengacu pada perubahan atau pertumbuhan antara satu kuartal dengan kuartal sebelumnya. Contohnya adalah pada saat melihat pertumbuhan PDRB dari Triwulan II ke Triwulan III.

**Retribusi Daerah** merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau





# Abbreviations

## Daftar Istilah



badan. Retribusi daerah meliputi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi terminal dan sebagainya.

**Satuan Kerja (Satker)** adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dalam konteks akuntansi, kata Satker ini bisa dipersamakan dengan entitas.

**Scatterplot** adalah diagram matematika yang menggunakan koordinat Cartesian untuk menampilkan nilai dari dua variabel yang khas dalam satu kumpulan data.

**Sinergi Pendanaan** adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah.

**Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selisih positif (sisa lebih) dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran di tahun anggaran berikutnya.

**Skala Ekonomi/Economy of Scale** merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi (output). Dalam konteks industrialisasi, skala ekonomi menciptakan efisiensi bagi suatu unit produksi sampai dengan titik tertentu.

**Sukuk Daerah** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

**Tax Ratio** adalah rasio yang membandingkan antara realisasi pajak dengan PDB/PDRB pada periode yang sama. Rasio tersebut menjadi indikator keberhasilan penggalan potensi pajak.

**Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin/Head Count Index (HCI-Po)** adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK dihitung dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. TPT dihitung dengan cara membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

**Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)** adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak peluang pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah atau industri pada suatu waktu tertentu.

**Tugas Pembantuan (TP)** adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang





## Abbreviations Daftar Istilah

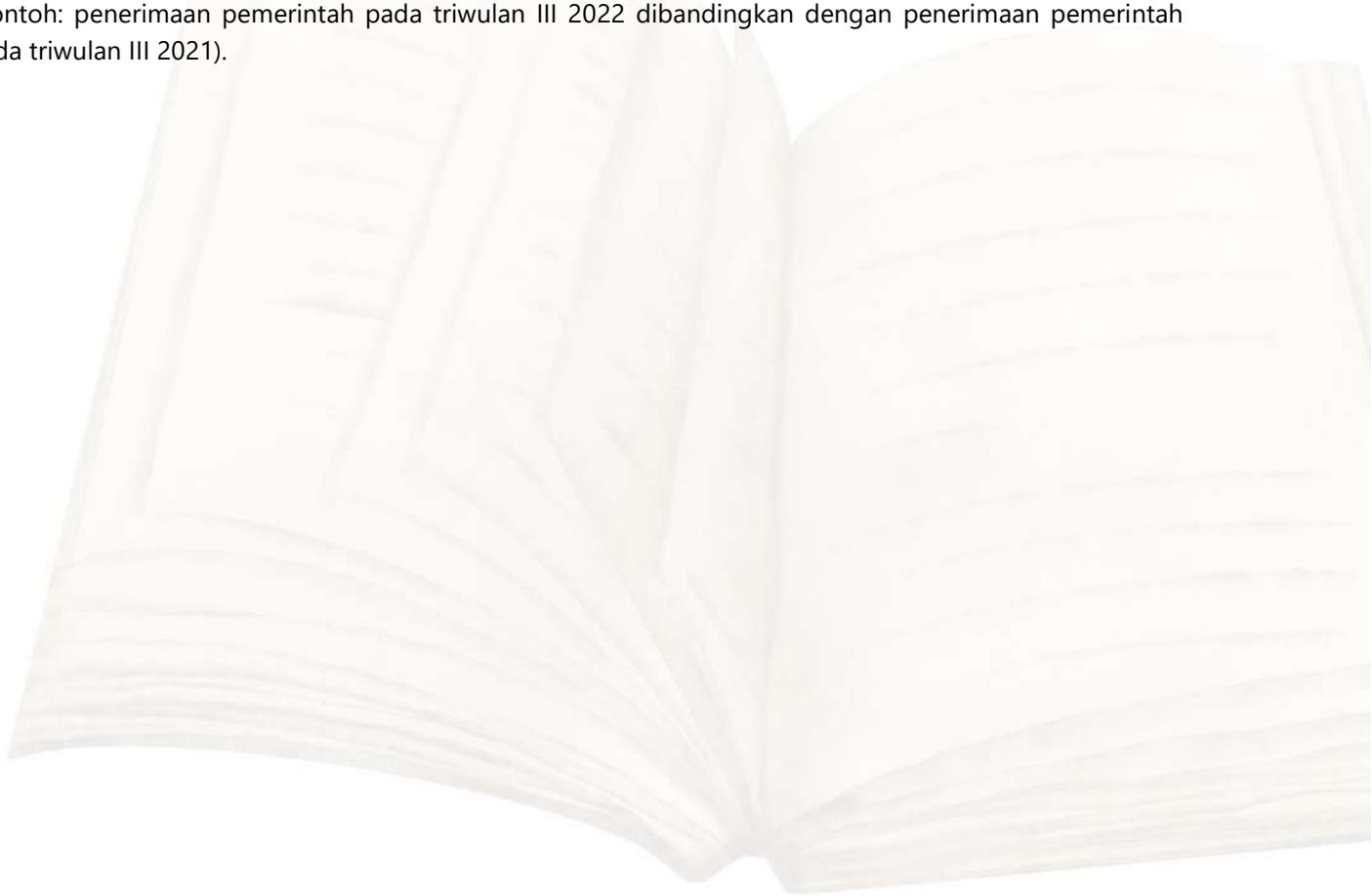


menugaskan. Untuk pelaksanaannya, diberikan dana tugas pembantuan dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran.

**Vokasional** dalam konteks pendidikan/pelatihan merupakan pendidikan/pelatihan yang lebih terfokus pada sisi keahlian atau kemahiran praktis dalam bekerja dibandingkan sisi akademik. Di era cepatnya perubahan teknologi seperti saat ini, kebutuhan akan keahlian seorang pekerja seringkali berubah-ubah sehingga permintaan akan pendidikan/pelatihan vokasional terus meningkat.

**Volatilitas/Volatility** dalam konteks ekonomi merupakan kecenderungan suatu variabel untuk berubah-ubah. Semakin tinggi volatilitas, semakin sering suatu variabel berubah-ubah.

**Year on Year (yoy)** adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis tahunan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan III 2021).



# Dashboard

## Perkembangan Ekonomi Regional



### Pertumbuhan Ekonomi

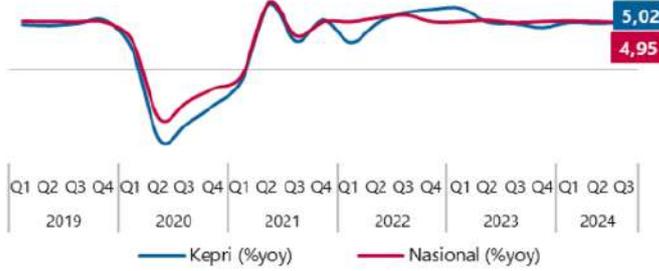
**5,02% yoy**

**0,53% qtr**

**4,98% ctc**

**3 %ctc**  
in Sumatera

### PERTUMBUHAN EKONOMI - Q3 2024



Distribusi PDRB di **Regional Sumatera**  
**7,00%**

### Share PDRB

Share by Production (%yoy)



**Industri Pengolahan**  
**40,80%**



**Konstruksi**  
**20,49%**



**Perdagangan Besar & Eceran**  
**9,46%**

Share by Expenditure (%yoy)



**PMTB**  
**45,11%**



**PK-RT**  
**42,55%**



**Net Ekspor**  
**8,33%**

**Nominal PDRB**  
Atas Dasar Harga **Berlaku Rp86.88 T**  
Atas Dasar Harga **Konstan Rp51,84 T**

### INFLASI, NTP & NTN - Sep 2024



#### Tingkat Inflasi

**2,53% yoy**

**0,14% mtm**



**Perhiasan Emas**  
**0,39%**



**Tarif Listrik**  
**0,26%**



**Beras**  
**0,24%**



#### Nilai Tukar Petani

**104,74**



#### Nilai Tukar Nelayan

**105,72**

### NERACA PERDAGANGAN - Q3 2024

#### Nilai Ekspor



**▼ 2,02 ctc**

**USD 14.134,93 juta**

#### Nilai Impor



**▼ 11,29 ctc**

**USD 12.212,17 juta**

#### Neraca Perdagangan Pangsa Ekspor Kepri



**▲ 191,38% ctc**  
**US\$1.922,77 juta**



**31,52%**



**20,95%**



**9,14%**

### INDIKATOR KESEJAHTERAAN

#### Tingkat Pengangguran Terbuka



**Aug 2024 6,39%**

**▼ 0,41 persen poin yoy**



#### Tingkat Ketimpangan



**0,349**



**▲ 0,009 persen poin yoy**

#### Tingkat Kemiskinan

**5,37%**

**▼ 0,32 persen poin yoy**



**Pedesaan: 9,94%**  
**26,03 Ribu Jiwa**  
**Perkotaan: 4,85%**  
**112,28 Ribu Jiwa**

#### Indeks Pembangunan Manusia 79,89



**▲ 0,81 persen poin yoy**

**3** in Indonesia

# Dashboard Kinerja Fiskal Regional

## PAGU DAN REALISASI APBN - Q3 2024



Rp10.048,29 M

66,43%

Target Rp15.126,38 M



Rp11.134,18 M

64,20%

Pagu Rp17.342,98 M



## PAGU DAN REALISASI APBD



Rp10.124,92 M

69,71%

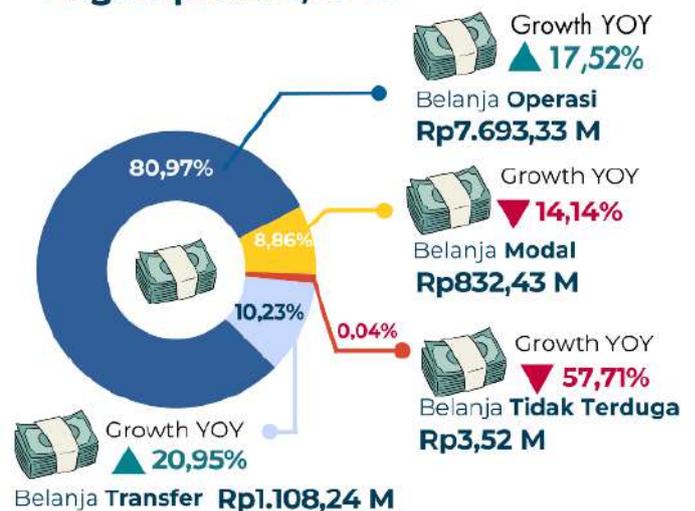
Target Rp14.524,05 M



Rp9.501,43 M

62,37%

Pagu Rp15.232,97 M



# Dashboard Gambaran UMKM Pengembangan Ekonomi Daerah

## PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: PEMBERDAYAAN UMKM KEPRI



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha pada tiap-tiap kategori. Berdasarkan data dari BPS Kepri, pada tahun 2022 tercatat jumlah IKM di Kepri sebanyak **17.039 usaha dan serapan tenaga kerja sebesar 26.216 orang**.



Pemerintah memberikan dukungan permodalan melalui KUR, yang telah menyalurkan Rp1.320,38 miliar kepada 16.765 debitur hingga 30 September 2024, dan Pembiayaan UMi sebesar Rp42,64 miliar kepada 7.959 debitur.



### Result..



Dukungan belanja K/L untuk pemberdayaan UMKM mencapai **Rp2,29 miliar** dengan realisasi **Rp0,68 miliar**, tersebar di Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta BPOM.

### Dukungan belanja TKD meliputi:

- 1 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM sebesar **Rp5,31 miliar (realisasi 62,76%)**
- 2 Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM sebesar **Rp8,66 miliar (realisasi 85,05%)**.

Dukungan belanja APBD untuk UMKM mencakup bantuan permodalan, pelatihan, dan pendampingan, dilakukan oleh pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kota/kabupaten di Kepri.

100% ORIGINAL

## PETA PROVINSI KEPRI: 98% LAUTAN



Sebaran **UMKM di Kepri terkonsentrasi di Kota Batam** (31,34% dari total UMKM), dengan sektor dominan pada makanan (63,29%).

### Pemerintah Daerah Perlu:

- ✓ Dinas Koperasi dan UKM perlu melakukan kerjasama pemberdayaan UMKM dengan melibatkan perbankan selaku lembaga penyalur KUR.
- ✓ Dinas KUKM Kepri perlu menginisiasi agar seluruh Dinas Koperasi Usaha Mikro di masing-masing kabupaten/kota dapat duduk bersama dan bertukar ide pemberdayaan yang sesuai bagi UMKM mengingat ada beberapa kabupaten/kota yang juga sudah sukses menyediakan subsidi margin, hibah alat, dan pendampingan namun masih ada kabupaten/kota lainnya yang bersifat pasif.

# Dashboard Analisis Tematik

## Penguatan *Local Taxing Power*

### ANALISIS TEMATIK: PENERAPAN UU HKPD DI PROVINSI KEPRI

**UU HKPD bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal,** artinya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri.



#### Pajak Hiburan

- Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pajak hiburan menjadi minimal 40% s.d. maksimal 75% **mendapatkan protes dari ASPEHINDO (Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia) pada masing-masing kabupaten/kota karena memberikan efek bagi pelaku usaha dan masyarakat.**
- Hal berbeda dilakukan oleh **Pemerintah Kabupaten Bintan yang menerapkan Pajak Hiburan sebesar 75% sebagai wujud dari Local Wisdom untuk menurunkan pertumbuhan tempat hiburan** Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar dan Mandi Uap yang dianggap memberikan dampak negatif bagi penduduk lokal.
- **Kebijakan merespon kenaikan pajak pada Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan insentif fiskal sebagai stimulus aktivitas bisnis sektor hiburan,** karaoke, klub malam dan Bar sebesar 37,5% dan insentif fiskal mandi uap sebesar 25%.



#### BPHTB

- Kebijakan penghapusan Biaya BPHTB bagi masyarakat **berpenghasilan rendah (MBR) yang baru akan memiliki rumah pertama,** dengan penghasilan maksimal Rp7 juta untuk individu tunggal dan Rp8 juta untuk keluarga.
- **Kebijakan ini dapat memberikan dampak positif meningkatnya potensi bagi MBR untuk dapat memiliki hunian pribadi dan menyederhanakan administrasi.** Namun, **kebijakan penghapusan BPHTB tersebut akan menurunkan pendapatan dari biaya BPHTB seperti Pemkot Tanjungpinang, Pemda Karimun dan Pemda Bintan yang gencar membangun rumah subsidi.**



#### Opsen Pajak PKB dan BBNKB

- Pengenaan Opsen Pajak PKB dan BBNKB yang dahulu dibagi rata sesuai proporsi provinsi dan kabupaten, saat ini telah dirubah oleh **UU HKPD yang memuat pembagian porsi PKB dan BBNKB sesuai dengan jumlah kendaraan yang terdaftar pada daerah tersebut.** Penerapan Opsen Pajak pada 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi Kabupaten Lingga, Anambas, dan Natuna karena memiliki dealer kendaraan yang sangat terbatas.
- **Bagi hasil baiknya dikenakan dengan perhitungan bahan bakar karena ada perbedaan kendaraan pada Provinsi Kepulauan (98% lautan) yang memiliki banyak transportasi laut, perbandingan kendaraan 1 motor 3 liter dengan kapal dihitung 1 kendaraan bisa mencapai 1000 liter.**



#### Hasil Evaluasi atas Pengaturan dalam Perda PDRD

- 1 Evaluasi/rekomendasi dari DJPK kurang konsisten,** seperti pada awal Pemkab Karimun mengajukan tarif pemanfaatan aset daerah berupa laboratorium direkomendasikan DJPK untuk dihapus, namun hal berbeda diberlakukan untuk Pemkot Tanjungpinang yang diperbolehkan menetapkan tarif.
- 2 Tindak lanjut evaluasi/rekomendasi yang disampaikan DJPK, memiliki perbedaan dengan tindak lanjut evaluasi dari Kemendagri.**
- 3 Hal ini menimbulkan kebingungan dari Pemda untuk mempedomani seperti Pemkot Tanjungpinang yang menetapkan labkesmas pada retribusi jasa umum, namun rekomendasi Kemendagri untuk dipindahkan ke jasa usaha, sedangkan rekomendasi DJPK kembali pada retribusi jasa umum.**  
**Perlunya penjelasan terkait Olahraga Golf yang masih menjadi perdebatan dikalangan pelaku usaha dan pemerintah daerah, para pelaku usaha merasa Golf bukanlah olahraga yang masuk kedalam kategori yang dapat dikenakan Pajak Hiburan karena tidak secara nyata tertulis dalam UU HKPD.**



# Ringkasan Eksekutif

## Executive Summary

### Analisis Ekonomi Regional

**K**inerja ekonomi Kepulauan Riau secara kumulatif (*ctc*) tumbuh positif dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera.

Indikator kesejahteraan rata-rata mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut:

**Pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat tumbuh 5,02 persen (yoy).** Pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan kestabilan perekonomian di Kepri yang tetap menunjukkan kinerja positif. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut menjadikan Kepri dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera (*ctc*). Pertumbuhan ekonomi ini dorong oleh fenomena meningkatnya jumlah kunjungan wisman dan wisnus yang meningkatkan permintaan barang dan jasa dan mendukung produktivitas ekonomi Kepri.

**Berdasarkan Pengeluaran,** akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kepri **didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** atau Investasi dengan share sebesar 45,11 persen. **Dari sisi Lapangan Usaha,** struktur PDRB Kepri masih didominasi sektor **industri pengolahan** dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 40,80 persen.

**Tekanan inflasi Kepri** pada Bulan September 2024 mencapai **2,53 persen (yoy), angka inflasi Kepri lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional** 1,84 (*yoy*), namun tetap stabil dan masih dalam rentang Target Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2024 sebesar  $3 \pm 1$  (*yoy*). Hal ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan iklim di daerah produsen beras yang menyebabkan gagal panen, sedangkan Provinsi Kepri masih mengimpor beras dari daerah produsen beras dalam negeri (pulau Jawa) dan luar negeri (Thailand).

**Neraca perdagangan luar negeri** Kepri bulan September 2024 menghasilkan Surplus Perdagangan sebesar US\$150,89 juta. Jika dihitung secara kumulatif, neraca perdagangan Kepri pada periode triwulan III 2024

juga mencapai Surplus Perdagangan sebesar US\$1.922,77 Juta. Angka tersebut diperoleh dari total nilai ekspor Kepri yang meningkat, khususnya dari golongan barang komoditas gas alam, hasil tambang dan hasil industri (non migas).

**Tingkat kemiskinan** di Kepri pada bulan Maret 2024 tercatat sebesar 138,30 ribu jiwa atau 5,37 persen dari total penduduk Kepri. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,32 persen bila dibandingkan dengan bulan Maret 2023 sebesar 142,50 ribu orang. Sementara itu **Gini Ratio** Kepri, per Maret 2024 tercatat sebesar 0,349, meningkat 0,009 persen dibandingkan Maret 2023 sebesar 0,340, angka tersebut masih dibawah angka Rasio Gini Nasional yang berada di angka 0,379. Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di Kepri tidak dirasakan secara merata.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** Kepri bulan Agustus 2024 tercatat 6,39 persen. Angka TPT tersebut turun sebesar 0,41 persen poin (*yoy*). Kepri berada pada peringkat pertama tertinggi di Regional Sumatera dan tertinggi ke-tiga tertinggi Nasional. Di sisi lain, persentase penurunan TPT Kepri juga menjadi yang terbesar di Sumatera. Adanya penurunan TPT tersebut menjadi sinyal positif bahwa masyarakat di Kepri telah memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian.

**NTP Kepri** pada bulan September 2024 sebesar 104,74 dan menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 0,50 persen (*yoy*). Angka NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (120,30). Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang memang belum optimal dijadikan sebagai lahan pertanian.

**NTN** Kepri pada September 2024 sebesar 105,72, lebih tinggi dibandingkan dengan NTN nasional dengan angka 102,27. Namun demikian, capaian NTN tersebut masih berada di bawah sasaran NTN Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri tahun 2024 ditargetkan

# Ringkasan Eksekutif

## Executive Summary

sebesar 116. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan belum optimalnya produksi para nelayan Kepri yang masih tradisional dan kurangnya akses terhadap metode teknologi perikanan modern.

**IPM Kepri** tahun 2024, yang dihitung dengan metode perhitungan baru sebesar 79,89, tumbuh sebesar 0,81 persen (yoy). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama enam tahun berturut-turut

### Analisis Fiskal Regional

**P**elaksanaan APBN Kepri Tunjukkan Kinerja Positif. Pertumbuhan tersebut didorong oleh *extra effort* yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menggali potensi pendapatan dan mengoptimalkan belanja APBN di Kepri.

**Alokasi Pendapatan APBN 2024** sebesar Rp15.126,38 miliar, terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp12.488,53 miliar dan PNBPNP Rp2.677,85 miliar. Hingga triwulan III 2024, realisasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp7.571,34 miliar, tumbuh 4,96% (yoy), terutama didorong oleh peningkatan PPh daerah sebesar 23,01% (yoy) dengan dominasi PPh 21 yang tumbuh 33,70% (yoy). Penerimaan PNBPNP tercatat Rp2.476,95 miliar, meningkat signifikan sebesar 66,36% (yoy).

**Alokasi Belanja APBN 2024** sebesar Rp18.409,13 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp10.325,16 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp8.083,97 miliar. Hingga triwulan III 2024, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp5.730,98 miliar, tumbuh 11,71% (yoy), dengan Belanja Pegawai mencapai 78,25% dari pagu (Rp1.697,37 miliar). Realisasi Belanja TKD, khususnya Dana Desa, mencapai Rp213,46 miliar (97,54% dari pagu) didorong oleh perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa dari tiga tahap menjadi dua tahap di 2024.

**Pelaksanaan APBD tingkat provinsi terus menggali potensi pendapatan daerah. Realisasi Pendapatan**

**Daerah** di triwulan III 2024 sebesar Rp10.124,92 miliar (69,71 persen dari Target), tumbuh 8,35 persen (yoy). Pendapatan daerah didominasi Pendapatan Transfer Rp6.234,57 miliar atau 61,58 persen dari total pendapatan daerah.

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)** sampai akhir September 2024 sebesar Rp3.327,73 miliar (69,17 persen dari Target), dengan kontribusi terbesar dari Pajak Daerah Rp2.745,02 miliar (82,49 persen). Pajak Daerah tumbuh 5,62 persen (yoy), dipimpin oleh Pajak Hiburan, BBNKB, PKB, dan BPHTB, meski beberapa komponen mengalami penurunan.

**Pada triwulan III 2024, realisasi Pendapatan Transfer sebesar** Rp6.779,91 miliar (70,55 persen dari Target), dengan DAU sebagai kontribusi terbesar Rp3.767,48 miliar (55,57 persen). Selanjutnya diperoleh **rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 1,16 persen**, naik 0,04 persen poin dari triwulan III 2023. **Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) I dan II menunjukkan Provinsi Kepri dan Kota Batam sebagai daerah mandiri, sementara mayoritas daerah masih menuju atau belum mandiri.**

**Realisasi Belanja Daerah pada triwulan III 2024 tercapai** sebesar Rp9.501,43 miliar (62,37 persen dari Pagu), tumbuh 13,46 persen (yoy), didorong oleh Belanja Operasi dan Belanja Transfer, meski Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga mengalami kontraksi.

**Konsolidasian pelaksanaan anggaran pusat dan daerah** lingkup Kepri menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Konsolidasi sebesar Rp13.969,57 miliar dan tumbuh 18,17 persen (yoy), jumlah Belanja Konsolidasi sebesar Rp15.169,63 miliar dan tumbuh 15,75 persen (yoy), sehingga terjadi Defisit sebesar Rp1.200,06 miliar. Jumlah Pembiayaan Konsolidasi sebesar Rp338,66 miliar sehingga terbentuk SiKPA sebesar Rp861,40 miliar.

# Ringkasan Eksekutif

## Executive Summary

### Pengembangan Ekonomi Daerah

**U**saha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha pada tiap-tiap kategori. Berdasarkan data dari BPS Kepri, pada tahun 2022 tercatat jumlah IKM di Kepri sebanyak 17.039 usaha dan serapan tenaga kerja sebesar 26.216 orang.

**Sebaran UMKM di Kepri terkonsentrasi di Kota Batam (31,34% dari total UMKM), dengan sektor dominan pada makanan (63,29%).** Pemerintah memberikan dukungan permodalan melalui KUR, yang telah menyalurkan Rp1.320,38 miliar kepada 16.765 debitur hingga 30 September 2024, dan Pembiayaan UMI sebesar Rp42,64 miliar kepada 7.959 debitur.

**Dukungan belanja K/L untuk pemberdayaan UMKM mencapai Rp2,29 miliar dengan realisasi Rp0,68 miliar,** tersebar di Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta BPOM. Dukungan belanja TKD meliputi Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM sebesar Rp5,31 miliar (realisasi 62,76%) dan Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM sebesar Rp8,66 miliar (realisasi 85,05%). Dukungan belanja APBD untuk UMKM mencakup bantuan permodalan, pelatihan, dan pendampingan, dilakukan oleh pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kota/kabupaten di Kepri.

Selain itu, Kantor Perwakilan BI Kepri dan OJK Kepri turut berperan melalui kebijakan keuangan, pengawasan, serta promosi produk UMKM di showcase nasional dan internasional.

### Analisis Tematik

**H**asil FGD dengan Bapenda dan BPKPD Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan bahwa **UU HKPD belum secara khusus mengatur potensi ekonomi maritim**

**daerah seperti Provinsi Kepri, yang terdiri dari 98 persen lautan.**

Hal tersebut membatasi potensi penerimaan pajak daerah. Kenaikan Pajak Hiburan hingga 40-75 persen berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga menimbulkan risiko penurunan aktivitas bisnis. Pajak hiburan untuk olahraga golf masih menjadi perdebatan karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU HKPD, meski Pasal 55 ayat 1 mengategorikan olahraga dengan peralatan sebagai jasa hiburan.

**Pendapatan PDRD di Provinsi Kepulauan meningkat berkat implementasi UU HKPD dan PP KUPDRD dibandingkan periode sebelumnya.** Pemerintah Provinsi Kepri diimbau untuk terus mendorong investasi PMDN dan PMA melalui regulasi yang mendukung dan promosi regional.

**Penerapan Opsen Pajak pada 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi Kabupaten Lingga, Anambas, dan Natuna karena kendaraan bermotor dibeli dari luar daerah.** Banyak perusahaan multinasional berinvestasi di Kepri, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan tenaga kerja asing dari negara asal. Evaluasi dan rekomendasi DJPK berbeda di setiap daerah, seperti dalam penetapan tarif aset daerah antara Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang, menimbulkan kebingungan di tingkat pemerintah daerah.

Selain itu, perbedaan tindak lanjut evaluasi DJPK dan Kemendagri, seperti dalam kasus labkesmas, menambah kompleksitas. Bagi hasil berdasarkan konsumsi bahan bakar menjadi tantangan di Provinsi Kepulauan yang didominasi transportasi laut, seperti di Natuna dan Anambas, yang sebelumnya mendapatkan puluhan miliar dari bagi hasil, kini hanya ratusan juta.

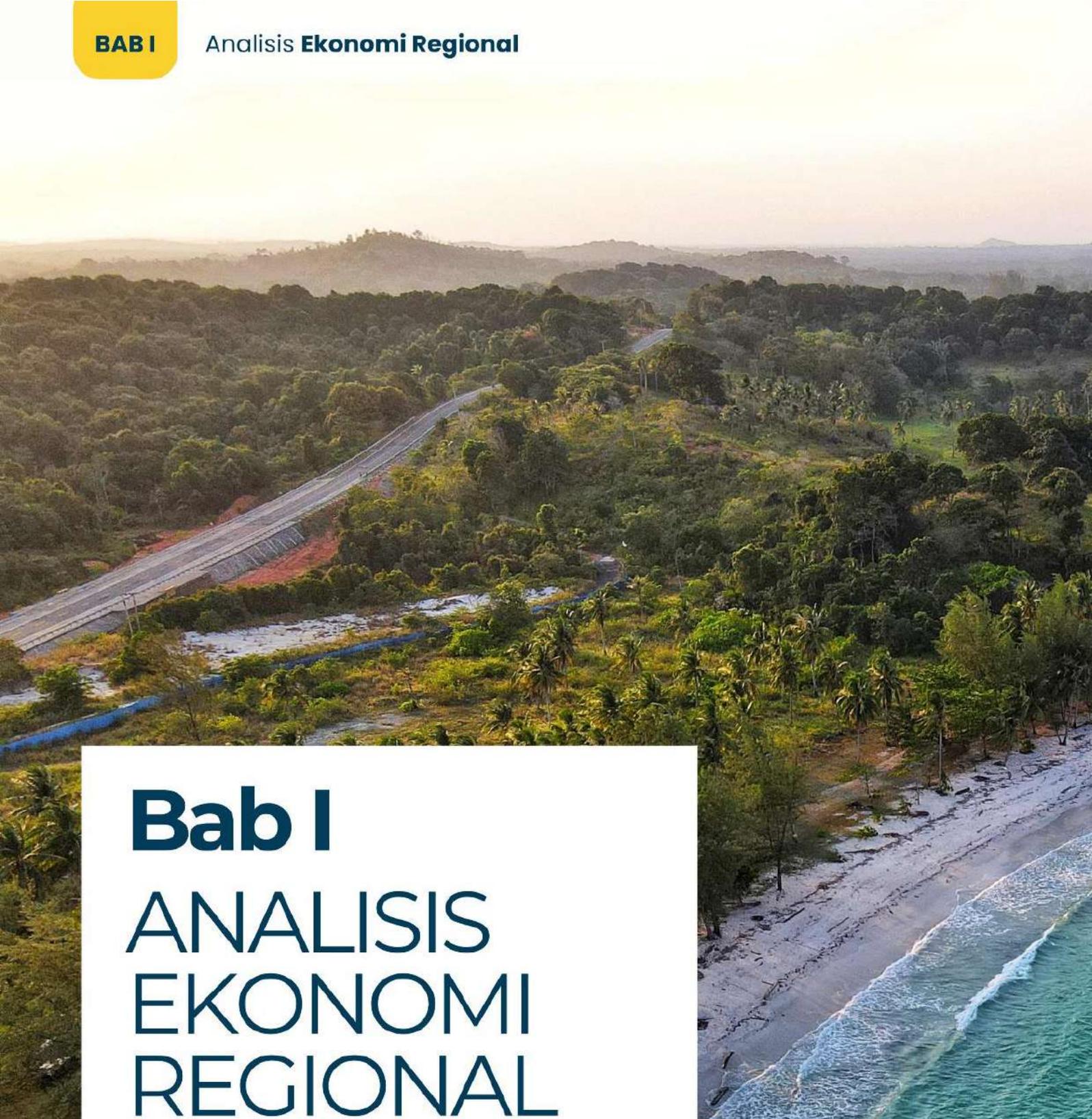
# *Selayang Pandang* Kepulauan Riau



Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah Barat.

Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km<sup>2</sup>, sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.





# Bab I

# ANALISIS EKONOMI REGIONAL

**Kemajuan ekonomi daerah** mendorong  
kesejahteraan masyarakat melalui  
pertumbuhan yang stabil dan inklusif.





Pantai Trikora, Bintan

## Regional Economic Review

- Produk Domestik Regional Bruto
- Kontribusi Fiskal
- Tingkat Inflasi
- Neraca Perdagangan
- Tingkat Kemiskinan
- Tingkat Pengangguran
- Rasio Gini
- Nilai Tukar Petani
- Nilai Tukar Nelayan
- Indeks Pembangunan Manusia



## 1. Analisis Ekonomi Regional

### 1.1 Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

#### 1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Pengeluaran dan Sektor/Lapangan Usaha

##### 1.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai tantangan dan tingginya ketidakpastian global seperti ketegangan geopolitik Timur Tengah, kontraksi manufaktur global, dan meningkatkan tensi perdagangan AS-Tiongkok menjadi risiko bagi perekonomian global di berbagai belahan dunia. Tidak hanya itu, risiko dinamika global lainnya seperti volatilitas harga komoditas energi dan pangan serta tekanan fiskal di banyak negara juga berpotensi menambah ketidakstabilan ekonomi di berbagai wilayah.

Di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi yang masih berlanjut, perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya ditulis Kepri) mampu menunjukkan ketangguhan dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten kuat di triwulan III 2024.

**Grafik 1.1** – Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepulauan Riau Tahun 2019 – Q3 2024 (%yoy)

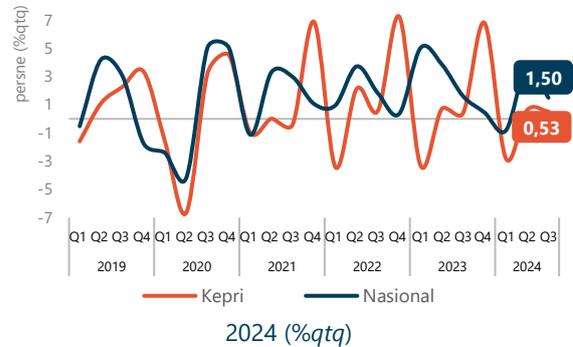


Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat tumbuh 5,02 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan kestabilan perekonomian di Kepri yang tetap menunjukkan kinerja positif. Di sisi lain, bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Nasional 4,95 persen (yoy), pertumbuhan ekonomi Kepri tumbuh lebih

cepat dibandingkan dengan pertumbuhan Nasional.

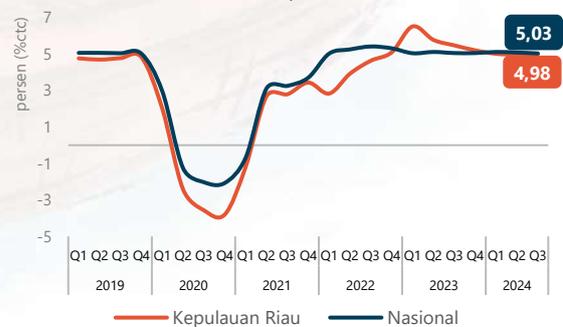
**Grafik 1.2** – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepulauan Riau Tahun 2019 – Q3



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

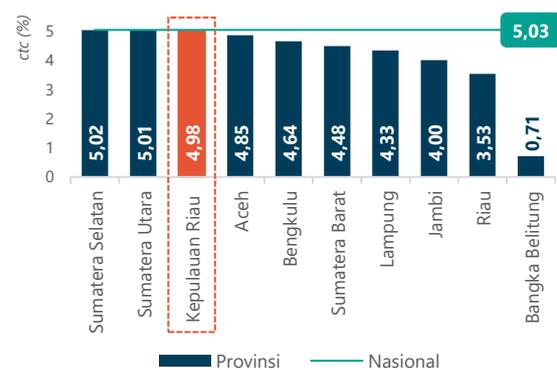
Jika melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi secara triwulanan, laju pertumbuhan ekonomi Kepri menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, perekonomian Kepri tumbuh 0,53 persen (qtq).

**Grafik 1.3** – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepulauan Riau Tahun 2019 - 2024 (%ctc)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

**Grafik 1.4** – Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan III 2024 (%ctc)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

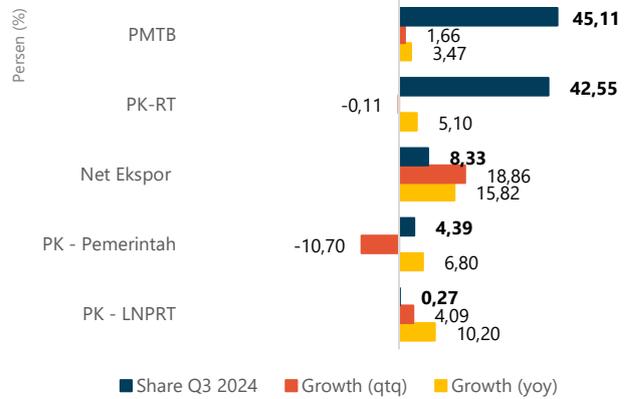
Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen (yoy), capaian kinerja ekonomi menjadikan Kepri sebagai Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi ke-3 di Sumatera dengan angka pertumbuhan 4,96 persen (ctc) setelah Provinsi Sumatera Selatan 5,02 persen (ctc) dan Provinsi Sumatera Utara dengan pertumbuhan 5,01 persen (ctc).

1.1.1.2 Nominal PDRB

Pertumbuhan ekonomi regional ditandai dengan adanya peningkatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara nominal, PDRB terbagi atas dua kategori, yaitu PDRB Angka Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

atau Investasi dengan share 45,11 persen dari total PDRB yang tumbuh 3,47 persen (yoy).

Grafik 1.6 – Share PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan III 2024 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Pada triwulan III 2024, perekonomian Kepri tumbuh 5,02 persen (yoy) dengan nominal PDRB ADHK sebesar Rp51.840,28 miliar dan PDRB ADHB sebesar Rp86.881,77 miliar. Perekonomian di Kepri pada triwulan III 2024 memberikan kontribusi 7,00 persen (ctc) dari total pertumbuhan ekonomi Regional Sumatera. Kontribusi tersebut turun 0,15 persen poin dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

PDRB berdasarkan Pengeluaran

PDRB berdasarkan Pengeluaran diukur dari penjumlahan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengguna akhir. Pada triwulan III 2024, PDRB Kepri dari sisi Pengeluaran secara signifikan didominasi oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pada triwulan III 2024 kontribusi dan pertumbuhan komponen PMTB mendominasi porsi PDRB Kepri dengan share 45,11 persen (yoy), berbeda dengan profil PDRB pada provinsi lain maupun nasional yang didominasi pengeluaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan kinerja positif investasi di Kepri yang terus tumbuh, baik dari sisi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

PMTB menjadi pengungkit perekonomian Kepri yang cukup rawan terimbas oleh negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. PMTB tumbuh positif

pada kelompok barang modal bangunan & konstruksi, mesin dan perlengkapan, serta alat transportasi. Pertumbuhan komponen PMTB juga tergambar melalui realisasi Belanja Modal APBN dan mengalami tumbuh positif sebesar 38,44 persen (yoy).

**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)**

**PK-RT pada triwulan III 2024 berkontribusi 42,55 persen dari PDRB dan tumbuh 5,19 persen (yoy).** Pertumbuhan ekonomi pada komponen PK-RT sejalan dengan meningkatnya mobilitas aktivitas ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh menggeliatnya jumlah kunjungan wisman dan wisnus di Kepri.

Hal tersebut turut mendorong peningkatan meningkatkan permintaan di berbagai sektor usaha karena tingginya mobilitas masyarakat sehingga menjadi stimulus aktivitas ekonomi, khususnya pada kelompok transportasi, komunikasi, serta hotel dan restoran. Pergerakan ekonomi pada PK-RT juga ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di bulan September 2024 yang terjaga pada angka 123,5.

**Net Ekspor**

**Komponen net ekspor pada triwulan III 2024 berkontribusi 8,33 persen (yoy)** dari total PDRB Kepri. Bila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, komponen net ekspor menjadi komponen dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sebesar 18,86 persen (qtq) dan 15,82 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut turut didorong oleh kembali bangkitnya kegiatan proyek migas (*on stream*) seperti hasil minyak dan minyak mentah di Kabupaten Natuna.

Selama periode triwulan III 2024, nilai ekspor Kepri sebesar US\$14.134,94 Juta, aktivitas tersebut didominasi oleh kelompok industri

dengan kontribusi sebesar 80,47 persen dari total nilai Ekspor. Pada sisi impor, sampai dengan triwulan III 2024 senilai US\$12.212,17 Juta. Capaian tersebut juga didominasi dari kelompok industri dengan kontribusi sebesar 86,39 persen.

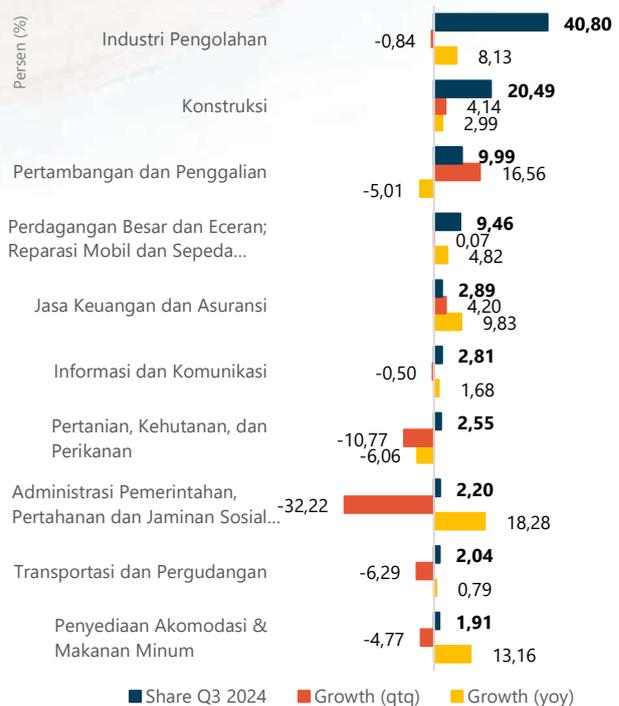
**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)**

**Pada periode triwulan III 2024, PK-P berkontribusi sebesar 4,39 persen (yoy)** dari total PDRB Kepri. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023, perekonomian dari komponen PKP tumbuh 6,80 persen (yoy). Pertumbuhan PKP tersebut menunjukkan komitmen satuan kerja dalam meningkatkan efisiensi belanja pemerintah dan mempercepat pelaksanaan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Sampai dengan triwulan III 2024 realisasi Belanja APBN telah mencapai Rp11.871,84 miliar dan tumbuh 8,34 persen (yoy). Realisasi Belanja APBD telah mencapai Rp9.500,22 miliar, tumbuh 24,74 persen (yoy).

**PDRB berdasarkan Lapangan Usaha**

**Grafik 1.7 – Share PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan III 2024 (%yoy)**



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)



PDRB menurut Lapangan Usaha (LU) dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh LU-LU yang mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pada triwulan III 2024, secara umum lapangan usaha di Kepri tumbuh positif (*yoy*).

Sebagai *leading sectors* perekonomian Kepri, LU industri pengolahan konsisten dalam menjadi LU dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kepri sebesar 40,80 persen (*yoy*) pada triwulan III 2024. Kontribusi terbesar lainnya disusul oleh LU konstruksi dan pertambangan dan penggalian yang masing-masing berkontribusi sebesar 20,40 persen (*yoy*) dan 9,99 persen (*yoy*).

### Industri Pengolahan

Pertumbuhan Industri Pengolahan ditopang dari masih kuatnya permintaan (*demand*) baik dari domestik dan mancanegara serta terus bergeraknya aktivitas produksi industri di Kepri. Hal tersebut sejalan dengan kinerja perekonomian industri pengolahan di Kepri yang terus tumbuh setiap tahunnya, dan **di triwulan III 2024 LU industri pengolahan tumbuh 8,13 persen (*yoy*)**.

Perkembangan LU industri pengolahan juga ditunjukkan dengan tumbuhnya penjualan listrik untuk konsumsi listrik segmen industri yang tumbuh 20,58 persen (*yoy*) di Triwulan III 2024 (PLN Batam, 2024). Investasi di LU industri pengolahan di Kepulauan Riau juga didorong oleh peran penting Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif fiskal, terutama di **Zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** serta perkembangan infrastruktur di Kepri. Hadirnya *Foreign Direct Investment* (FDI) dari negara tetangga, khususnya Singapura, Tiongkok, dan Jepang turut memeperkuat momentum perkembangan LU industri pengolahan di Kepri.

### Konstruksi

LU konstruksi pada triwulan III 2024 tumbuh 2,99 persen (*yoy*) dan berkontribusi 20,49 persen (*yoy*) terhadap PDRB.

Perkembangan LU Konstruksi di Kepri sejalan beberapa output strategis APBN di Kepri, seperti dilaksanakannya Pembangunan Rempang Eco City di Kota Batam, Pembangunan Jembatan Trans pada 18 pulau di Kabupaten Natuna, Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya di Kota Tanjungpinang, Pembangunan Bandar Udara Letung di Kabupaten Anambas yang telah memasuki tahap II serta proyek pembangunan strategis Kepri lain yang sedang dibangun.

Selanjutnya, di Kepri juga terdapat mega proyek Jembatan Batam-Bintan yang telah memasuki tahap pengeboran laut. Jembatan ini merupakan proyek besar yang berfungsi sebagai jalur transportasi dan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Batam dan Bintan.

### Pertambangan dan Penggalian

**LU pertambangan dan penggalian** menjadi LU dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Kepri di triwulan III 2024 dengan share sebesar 9,99 persen (*yoy*). Kinerja perekonomian pada pertambangan dan penggalian menjadi LU dengan pertumbuhan tercepat pada triwulan III 2024 yang tumbuh 16,56 persen (*qtq*). Hal tersebut didorong oleh perusahaan migas yang kembali beroperasi di Kabupaten Natuna.

### Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

**Kinerja LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor** berkontribusi 9,46 persen (*yoy*) terhadap PDRB Kepri pada triwulan III 2024 dan tumbuh 4,82 persen (*yoy*). LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor menjadi salah satu LU yang perlu diwaspadai akibat adanya penurunan *demand* dari negara mitra dagang utama seperti

China dan Singapura, yang dapat berdampak pada penurunan volume perdagangan dan konsumsi barang di Kepri.

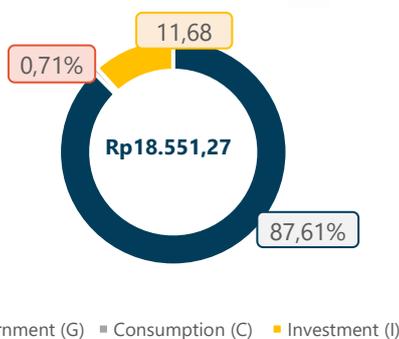
1.1.2 Kontribusi Fiskal

Dihadapkan dengan dinamika global, kontribusi fiskal berperan untuk menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang secara riil bergerak dalam membangun infrastruktur, peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan, serta aktivitas ekonomi lainnya.

Berdasarkan konsep *Keynesian*, nilai Pendapatan Daerah dipengaruhi oleh besarnya Pengeluaran Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Net ekspor (Y=C+I+G+NX). Artinya, setiap peningkatan pada permintaan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor akan turut meningkatkan pendapatan daerah. Kontribusi fiskal atau pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam pembentukan PDRB.

Berdasarkan hasil *mapping* atau *proxy* konsolidasi Belanja APBN dan APBD Regional Kepri periode triwulan III 2024, diperoleh kontribusi fiskal terhadap perekonomian sebesar Rp18.551,27 miliar. Apabila dirinci lebih lanjut, diperoleh hasil relasi kontribusi fiskal terhadap pembentukan PDRB pada sektor riil Kepri sebagai berikut:

Grafik 1.8 – Kontribusi Belanja APBN dan APBD Terhadap Sektor Riil Ekonomi Kepri Triwulan III 2024



Sumber: Laporan ALCo Regional Kepri September 2024, Kanwil DJPb Provinsi Kepri, (diolah)

Kontribusi fiskal yang berasal dari peran pemerintah pusat dan daerah tercermin melalui Belanja APBN dan Belanja APBD yang berfungsi sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pembentukan PDRB.

- 1) Belanja Pegawai, serta belanja lain seperti Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga/Belanja Lain-Lain, dan Transfer ke Daerah, yang berpotensi memberikan **kontribusi terhadap Pengeluaran Pemerintah (G) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp16.252,41 miliar (87,61 persen).**
- 2) Belanja Barang, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial yang berpotensi **memberikan kontribusi terhadap Konsumsi Pemerintah (C) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp131,61 miliar (0,64 persen).**
- 3) Belanja Modal yang berpotensi memberikan **kontribusi terhadap Investasi (I) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp2.167,25 miliar (11,68 persen).**

Tidak hanya melalui implementasi belanja APBN dan APBD, kontribusi fiskal terhadap perekonomian juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah yang memberikan dampak positif terhadap pemberian insentif pajak, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta peningkatan investasi infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di daerah tersebut.

1.1.3 Tingkat Inflasi

Grafik 1.9 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2024, (diolah)



Secara umum, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung selama periode tertentu. Analisis inflasi menjadi alat untuk memahami stabilitas ekonomi di suatu regional, khususnya dalam melihat kemampuan daya beli masyarakat, mendukung stabilitas perekonomian masyarakat, serta membantu pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pada tahun 2024, tekanan inflasi di Kepri dihitung dari 2 kota dan 1 kabupaten (Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun).

**Kepri mengalami inflasi sebesar 2,53 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,32.** Inflasi tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 2,76 persen dengan IHK sebesar 106,66 dan inflasi terendah terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 2,79 persen dengan IHK sebesar 106,08. Sementara untuk Kota Tanjungpinang inflasi tercatat sebesar 1,36 persen dengan IHK sebesar 105,33.

Seluruh kota dan kabupaten penyumbang inflasi, memiliki tingkat inflasi yang aman dan terjaga dalam sasaran inflasi Kepri tahun 2024 yaitu 3±1 persen

**Grafik 1.10** – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (mtm)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

**Tingkat inflasi Kepri secara month to month bulan September 2024 sebesar 0,14 persen (mtm),** inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,17 pada Agustus 2024 menjadi 106,32 pada September 2024. Sedangkan tingkat inflasi year to date sebesar 1,11 persen (ytd).

**Tabel 1.1** – Rincian Andil Infasi Bulan September 2024 per Komoditas (%yoy)

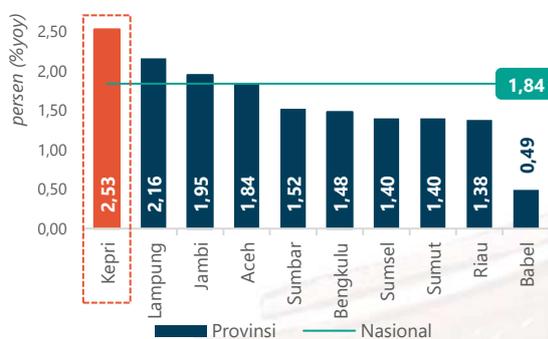
No.	Rincian	Inflasi Sep 2024 (%yoy)	Andil Inflasi Sep 2024 (%yoy)
<b>Inflasi Umum</b>		<b>2,53</b>	<b>2,53</b>
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	3,46	1,00
2	Transportasi	3,39	0,47
3	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	7,50	0,45
4	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	2,42	0,39
5	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,51	0,14
6	Kesehatan	3,62	0,09
7	Pakaian dan Alas Kaki	2,51	-0,02
8	Pendidikan	-1,92	-0,13
9	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,10	~0
10	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,04	~0
11	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,14	~0

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)



Pada bulan September 2024, inflasi yang terjadi di Kepri disebabkan oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya harga 6 (enam) indeks kelompok pengeluaran. Tiga kelompok terbesar yang menjadi penyumbang terbesar inflasi pada bulan September 2024 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau naik dengan andil 1,00 persen; kelompok transportasi dengan andil 0,47 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,45 persen.

**Grafik 1.11** – Inflasi pada Provinsi di Regional Sumatera per Maret 2024 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

**Inflasi di Kepri pada bulan September 2024** merupakan angka inflasi tertinggi **Regional Sumatera**. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan barang dan jasa, termasuk bahan pangan dan transportasi yang meningkat tajam di triwulan III 2024, serta terbatasnya komoditas pangan dan energi di Kepri yang merupakan wilayah Kepulauan, sehingga membutuhkan biaya lebih dalam melakukan distribusi barang/jasa.

Selanjutnya, jika dilihat dari rincian **komoditas dengan andil inflasi terbesar** bulan September 2024 (yoy) didominasi oleh Emas Perhiasan (0,39 persen), Tarif Listrik (0,26 persen), Beras (0,24 persen), Tarif Parkir (0,18 persen), dan Angkutan Udara (0,18 persen).

Dalam upaya mengendalikan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang merupakan sinergi antar instansi dan Lembaga Pemerintah melakukan kegiatan kerangka 4K yaitu, memastikan Keterjangkauan Harga,

Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, 2024).

Kegiatan tersebut antara lain Upaya pengendalian yang telah dilakukan antara lain:

#### A. Keterjangkauan Harga

- 1) Mengoptimalkan Gerai Pangan dan Koperasi mitra TPID untuk penjualan hasil panen petani seperti cabai merah dan sayuran, serta hasil ikan.
- 2) Melaksanakan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di berbagai titik di seluruh Kab/Kota di wilayah Kepri, penyelenggaraan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah sebanyak 128 kali pasar murah sejak awal tahun.

#### B. Ketersediaan pasokan

- 1) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan dan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Kepri bersama Ombudsman RI, Bapanas RI, Bulog, dan OPD Kepri.
- 2) Penanaman Serentak Gerakan Sekolah Menanam (GSM) Cabai di 100 SMA/SMK se-Kepri sebanyak 25.000 bibit.
- 3) Monitoring budidaya cabai merah di Koperasi Plasma Agri Kundur Kab. Karimun yang telah panen sebanyak 3,7 ton dan penanaman 3 ha kepada kelompok tani muda Kab. Natuna yang memasuki masa tanam seluas 4,5 ha.

#### C. Kelancaran Distribusi

- 1) Mengoptimalkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara lain melalui penguatan peran BUMD dalam pengendalian inflasi dengan mendatangkan cabai dari Sulawesi Utara.
- 2) Pengawasan dan pemantauan *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak goreng di tingkat provinsi maupun

- kabupaten/ kota serta pengawasan terhadap jalur distribusi.
- 3) Memastikan kelancaran transportasi laut dan melakukan pemantauan agar tidak terjadi spekulasi harga angkutan laut.
- 4) Dukungan prioritas bongkar muat kapal angkutan bahan pokok dan penjaminan sertifikasi komoditas pangan yang masuk ke wilayah Kepri dan melaksanakan *business matching* antara distributor di Kepri dengan produsen di daerah lain.

- 1) Melaksanakan koordinasi dan sinergi melalui kegiatan data *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi/Kota/Kab.
- 2) Melakukan pengendalian ekspektasi masyarakat dengan mendiseminasikan kecukupan pasokan, kewajaran harga serta mengkampanyekan Himbauan Belanja Bijak melalui TV, radio, media sosial, dan *flyer*.
- 3) Melaksanakan kelas digital (*smart agriculture*) kepada petani untuk memperluas edukasi budidaya tanaman pangan.

**D. Komunikasi efektif**

**1.1.4 Neraca Perdagangan**

**Neraca Perdagangan**



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Neraca perdagangan luar negeri Kepri hingga triwulan III 2024 menghasilkan Surplus Perdagangan sebesar US\$1.922,77 Juta, tumbuh 191,38 persen (*yoy*).

Angka tersebut diperoleh dari total nilai ekspor Kepri bulan Januari-September 2024 yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impornya, khususnya dari golongan barang bahan bakar mineral (non migas).

Pada bulan September 2024, secara bulanan, tercatat Surplus Perdagangan Internasional sebesar US\$150,89 miliar. Capaian tersebut tumbuh sebesar 12,74 persen (*yoy*).

Dalam upaya meningkatkan kinerja neraca perdagangan internasional, Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah Kepri terus

berupaya meningkatkan infrastruktur Hub Logistik di Kepri. Dukungan ini diharapkan dapat membentuk keseimbangan antara impor dan ekspor produk demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

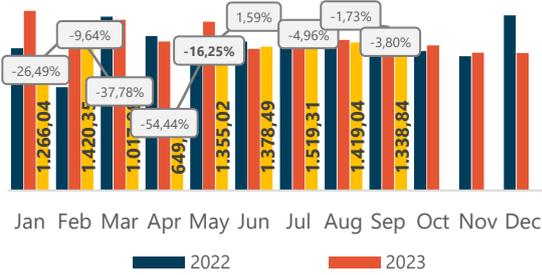
**Ekspor**

**Total nilai ekspor Kepri bulan Januari-September 2024 senilai US\$14.134,93 Juta.**

Nilai ekspor tersebut mengalami kontraksi sebesar 2,02 persen (*ctc*). Secara kumulatif, sektor Migas dan Non Migas mengalami kontraksi sebesar 12,81 persen (*ctc*) dan 1,57 persen (*ctc*) secara berturut-turut. Penurunan terbesar secara dominan dipengaruhi oleh turunnya hasil ekspor Hasil Minyak, Minyak Mentah, dan Hasil Tambang.



**Grafik 1.13** – Perkembangan Ekspor Kepri Bulanan Tahun 2022-2024 (mtm)

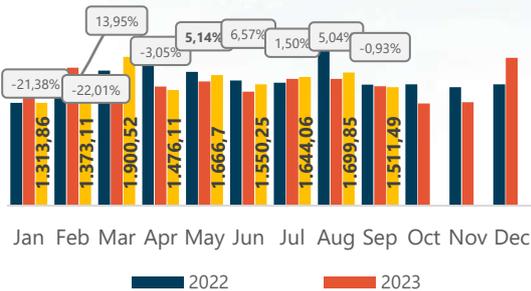


Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

**Pada bulan Januari-September 2024,** Singapura menjadi negara tujuan ekspor terbesar di Kepri dengan nilai ekspor US\$560,36 juta atau 31,52 persen dari total ekspor di Kepri. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh produk bahan bakar mineral 43,09 persen, mesin/peralatan listrik 28,83 persen, serta mesin-mesin/pesawat mekanik 9,81 persen, dan sisanya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share <7 persen.

Lebih lanjut, nilai ekspor yang mengalami pertumbuhan negatif juga berdampak pada sektor fiskal, khususnya terhadap Pendapatan Bea Keluar. Dari bulan Januari-September 2024, perolehan Bea Keluar mencapai Rp30,23 miliar atau terkontraksi sedalam 78,38 persen (yoy).

**Grafik 1.14** – Perkembangan Impor Provinsi Kepri Bulanan Tahun 2022-2024 (mtm)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

**Secara kumulatif, nilai impor Kepri bulan Januari-September 2024 sebesar US\$12.212,17 Juta.** Nilai impor tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 11,29 persen (ctc). Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan impor migas sebesar 42,51 persen

(ctc) dan sektor nonmigas juga mengalami penurunan sebesar 4,53 persen (ctc).

**Berdasarkan negara pemasok impor, impor di Kepri didominasi oleh Tiongkok** dengan nilai impor sebesar US\$3.887,82 juta atau 31,84% dari total impor di Kepri, kemudian disusul oleh Singapura dan Malaysia dengan peranan masing-masing 18,12 persen dan 7,29 persen dari total impor di Kepri.

Kemudian, apabila dilihat dari golongan penggunaan barang, impor di Kepri masih didominasi oleh barang baku dan penolong (78,54 persen), yang disusul oleh barang modal (17,80 persen) dan barang konsumsi (3,66 persen).

**Bahan baku dan penolong yang menjadi mayoritas produk impor ke Kepri** mencerminkan bahwa sektor unggulan di wilayah ini adalah industri manufaktur, terutama pada produk mesin dan peralatan listrik yang nantinya akan diekspor kembali ke luar negeri.

Penurunan nilai ekspor secara tidak langsung juga berdampak terhadap Pendapatan Negara. Hingga bulan September 2024 Pendapatan Bea Masuk di Kepri mencapai Rp290,48 miliar dan tumbuh negatif sebesar 49,31 persen (yoy).

## 1.2 Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan/Pembangunan

### 1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di suatu wilayah diukur berdasarkan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah batas minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, sehingga penduduk tidak dianggap sebagai miskin. Pada tahun 2024, garis kemiskinan di Kepri sebesar Rp787.211 per bulan per kapita. Garis tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44.685 atau 6,02 persen (yoy).

Hingga bulan Maret 2024, tingkat Kemiskinan Kepri bulan Maret 2024 sebesar 138,30 ribu jiwa atau 5,37 persen dari total penduduk Kepri. Turun sebesar 2,94 persen (yoy) atau menurun ±4.200 ribu jiwa (yoy).

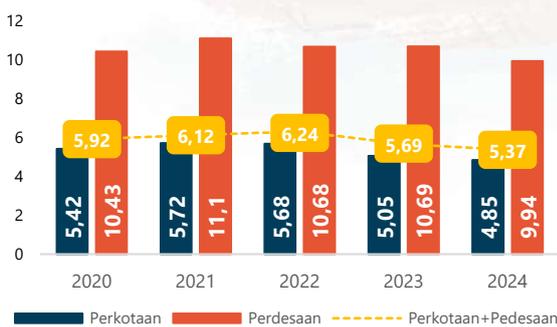
**Grafik 1.15** – Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kepri Tahun 2019-2024 (ribu jiwa)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

**Angka ini berada di bawah angka kemiskinan Nasional sebesar 9,03 persen.** Bila dibandingkan dengan target RPJMD Kepri yang menargetkan persentase penduduk miskin di Tahun 2024 sebesar 5,69 persen, persentase penduduk miskin di Kepri (5,37 persen) masih berada dalam rentang yang aman dan bahkan lebih baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

**Grafik 1.16** – Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan Kepri Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

**Sampai dengan bulan Maret 2024, penduduk miskin di perkotaan sejumlah 112,28 ribu atau 4,85 persen** dari total penduduk di perkotaan. Kemudian, jumlah penduduk miskin di Kepri yang tinggal di wilayah perdesaan sejumlah 26,03 ribu orang atau 9,94 persen dari total penduduk di perdesaan.

Pada tahun 2024, angka kemiskinan di perkotaan dan perdesaan tersebut turun sebesar 3,96 persen (yoy) dan 7,02 persen (yoy).

Selain persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan makro juga dapat dilihat dari Tingkat Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gap Index* (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Index* (P2). P1 menjelaskan tentang ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan, P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Grafik 1.17** – Perkembangan Indeks P1 dan P2 Kepri Tahun 2020-2024 (persen)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

**Pada bulan Maret 2024, Indeks Kedalam Kemiskinan (P1) di Kepri sebesar 0,70**, mengalami penurunan 14,63 persen (yoy). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kepri sebesar 0,15 juga turun 16,66 persen (yoy).

Penurunan pada P1 menggambarkan semakin dekatnya jarak antara rata-rata pengeluaran dengan garis kemiskinan. Kemudian, penurunan pada P2 menunjukkan semakin dekatnya nilai ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kepri.



**Grafik 1.18** – Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Regional Sumatera Tahun 2020-2024 (persen)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Regional Sumatera, Tingkat Kemiskinan Kepri pada bulan Maret 2024 menempati posisi terendah kedua sebelum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4,55 persen). Kemudian, bila dilihat secara Nasional, Tingkat Kemiskinan Kepri berada di urutan ke-33 se-Indonesia.

Hingga periode triwulan III 2024, Pemerintah Pusat melalui APBN yang berperan sebagai stabilisasi perekonomian telah menjalankan beberapa program yang dapat mengurangi kemiskinan, antara lain melalui Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Realisasi Rp5,56 miliar atau 71,10 persen dari Pagu 2024); Pemberian Program subsidi dengan UMKM, serta percepatan Belanja Pemerintah Pusat dalam membangun fasilitas umum yang memberikan *multiplier effects* bagi masyarakat.

Pemerintah Pusat juga turut berupaya untuk mengentaskan angka kemiskinan, salah satunya adalah dengan meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan melalui Dana Desa. Pada tahun 2024, alokasi Dana Desa di Kepri adalah sebesar Rp218,84 miliar yang diberikan kepada kepada 275 desa di 5 Kabupaten di Kepri (Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, dan Anambas).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengalokasian Dana Desa tersebut diprioritaskan atas **Dana Desa**:

- 1) **Earmark Bantuan Langsung Tunai (BLT)** sebesar Rp34,61 miliar, dengan realisasi di

bulan September 2024 sebesar Rp34,54 miliar atau 99,80 persen dari Pagu;

- 2) **Earmark Ketahanan Pangan** Rp47,45 miliar, dengan realisasi di bulan September 2024 sebesar Rp47,45 miliar atau 99,00 persen dari Pagu; dan
- 3) **Earmark Stunting** Rp30,76 miliar, dengan realisasi di bulan September 2024 sebesar Rp30,66 miliar atau 99,67 persen dari Pagu.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kepri juga menyiapkan 4 (empat) **upaya pengentasan kemiskinan** antara lain:

- 1) Penanganan Infrastruktur Dasar (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Sanitasi, Air Bersih, dan Listrik);
- 2) Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial (JKN, Pemberian Beras Bersubsidi, dan Program Keluarga Harapan (PKH));
- 3) Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Posyandu, RT/RW, BUMdes, UMKM, Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan).
- 4) Program Pemerian Beasiswa bagi Mahasiswa Kurang Mampu.

**1.2.2 Tingkat Pengangguran**

**Grafik 1.19** – Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri per Tahun 2020-2024



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

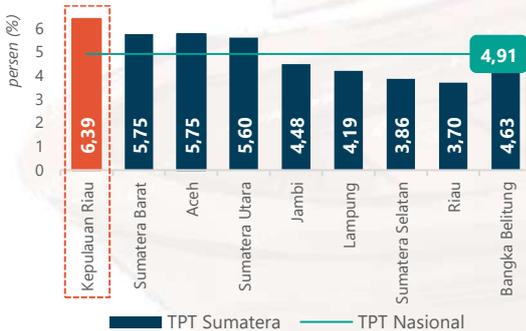
Penurunan tingkat pengangguran menjadi salah indikator dari perkembangan ekonomi di suatu regional. Pada bulan Agustus 2024, Kepri mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,39 persen atau turun 0,41 persen point (yoy) dibandingkan dengan



Agustus 2023. Angka tersebut juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan TPT Nasional sebesar 4,91 persen dan bahkan berada pada posisi tertinggi ke-tiga Nasional, selain empat provinsi baru, setelah Provinsi Jawa Barat (6,75 persen) dan Provinsi Banten (6,68 persen)

Sampai dengan periode Agustus 2024, jumlah angkatan kerja di Kepri tercatat mencapai 1.120,66 ribu orang atau 93,06 persen dari total penduduk usia kerja di Kepri. Dari jumlah angkatan kerja di Kepri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kepri bulan Agustus mencapai 69,17 persen dari total penduduk Kepri. Angka TPT tersebut tumbuh 0,49 persen poin dibanding dengan Agustus 2023 (yoy), hal tersebut mencerminkan adanya pemulihan yang berkelanjutan dalam sektor ketenagakerjaan di Kepri.

**Grafik 1.20** – Angka TPT Per Provinsi di Regional Sumatera bulan Februari 2024 (persen)

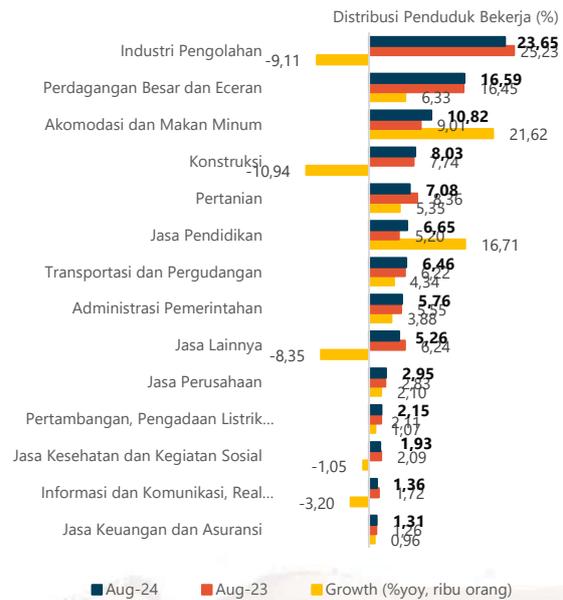


Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

**Pada bulan Agustus 2024, TPT** menjadi angka TPT tertinggi **di Regional Sumatera**. Namun demikian, persentase perubahan penurunan TPT Kepri juga menjadi yang tertinggi ke-dua di Regional Sumatera dengan penurunan angka pengangguran 0,41 persen poin (yoy), setelah Provinsi Riau yang berhasil menurunkan angka TPT 0,53 persen poin (yoy).

Penurunan TPT tersebut juga menjadi sinyal positif bahwa masyarakat di Kepri telah memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian.

**Grafik 1.21** – Porsi Penyerapan Tenaga Kerja per Lapangan Usaha di Kepri Tahun 2023-2024 (persen)



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024, **komposisi tenaga kerja yang ada di Kepri didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan usaha**, yaitu sektor Industri Pengolahan (23,65 persen), Perdagangan (16,59 persen) dan Akomodasi dan Makanan Minuman (10,82 persen).

**Sektor akomodasi dan makanan minuman** turut menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar selama periode Agustus 2023-Agustus 2024 dengan pertumbuhan 21,62 persen (yoy). Selanjutnya, sektor yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar di Kepri ada pada sektor konstruksi dengan pertumbuhan negatif 10,94 persen (yoy).

1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Grafik 1.22 – Rasio Gini di Kepri Tahun 2020-2024



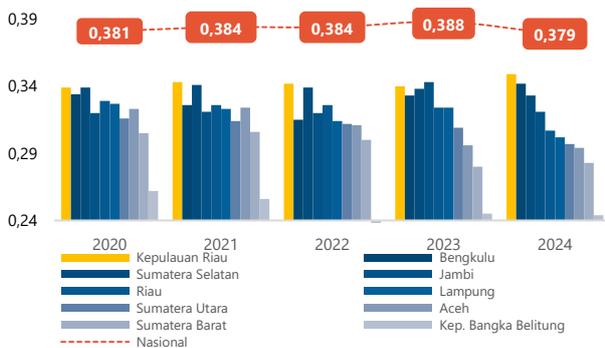
Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Pada bulan Maret 2024, Gini Ratio Kepri sebesar 0,349, masih dibawah angka Rasio Gini Nasional yang pada Maret 2023 berada di angka 0,379. Bila dibandingkan dengan periode Maret 2023, Rasio Gini Kepri tercatat meningkat sebesar 0,009 point (yoy).

Gini Rasio Kepri pada Maret 2024 (Semester I) menjadi gini rasio yang tertinggi di Regional Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya di Kepri yang pada periode Maret 2024 tidak dirasakan secara merata. Artinya, golongan masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kecepatan yang lebih rendah dalam menikmati "kue" suksesnya pertumbuhan ekonomi.

Grafik 1.23 – Ketimpangan di Regional Sumatera per Februari 2024 (persen)



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Dalam menjalankan peran Pemerintah untuk membantu masyarakat mengurangi ketimpangan pendapatan, terdapat beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Pemerintah Pusat (Pempus) dalam menurunkan rasio gini di Kepri.

Pemerintah melakukan beberapa upaya dalam mengurangi ketimpangan di daerah, di antaranya dengan tetap menyalurkan bantuan sosial, menciptakan lapangan kerja melalui akselerasi pembangunan, serta perbaikan standar pengupahan yang dibutuhkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam menyambut ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.

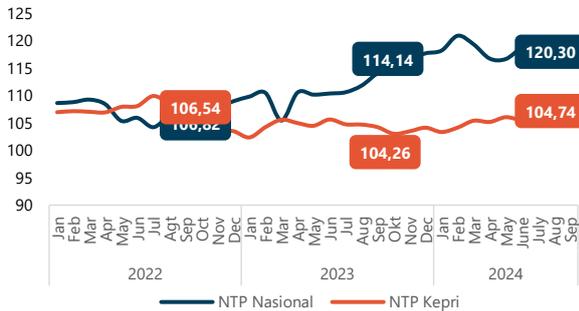
Pemerintah juga hadir dengan memberikan program pemberdayaan masyarakat melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan pada Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi, yang pada periode Januari-September 2024 telah direalisasikan sebesar Rp1.320,37 miliar.

**Program pemberdayaan UMKM** juga diberikan dalam pemberian subsidi pembiayaan usaha UMKM baik melalui KUR/UMi/dan Program Pembiayaan Bunga nol persen dari Pemprov Kepri. Kemudian, sebagai bantalan sosial, APBN juga telah memberikan BLT kepada para KPM baik melalui TKD ataupun belanja K/L. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan juga terus diberikan baik oleh Pempus maupun Pemda, salah satunya adalah melalui Balai Latihan kerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja lokal.



1.2.4 Nilai Tukar Petani (NTP)

Grafik 1.24 – Perkembangan NTP di Kepulauan Riau Tahun 2022 – Q3 2024



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

**NTP Kepri pada bulan September 2024 sebesar 104,74** menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 0,50 persen (yoy). Angka NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (120,30), yang disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang memang belum optimal untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Namun secara bulanan, Indeks Harga yang Diterima Petani (It) di Kepri bulan September 2024 mengalami pertumbuhan negatif 0,50 persen dibandingkan dengan Agustus 2024.

Pada periode September 2024 sebagian subsektor mengalami penurunan dan sebagian lagi mengalami peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It). **Subsektor yang mengalami penurunan NTP di Kepri** secara berturut-turut adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar -1,52 persen (yoy) dan holtikultura -1,05 persen (yoy). Kemudian subsektor peternakan tumbuh 0,28 persen (yoy) dan subsektor tanaman pangan tumbuh 0,1 persen (yoy).

**Beberapa tantangan dalam pengembangan sektor pertanian di Kepri** antara lain: (1) terbatasnya dukungan infrastruktur untuk kegiatan pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian; (2) belum optimalnya kemampuan petani dan pelaku usaha perkebunan karena kondisi geografis Kepri yang didominasi oleh lahan bakau dan tanah bauksit, sehingga membutuhkan sumber daya manusia

yang kompeten dalam mengelola pertanian; (3) serta perlunya peningkatan penggunaan teknologi pertanian, baik dalam proses pengolahan maupun untuk keberlanjutan pemasaran. Selain itu, keterbatasan luas lahan pertanian juga menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor ini di Kepri.

Pada tahun 2024 Pemerintah Pusat melalui APBN telah mengalokasikan Pagu Belanja pada Kementerian Pertanian sebesar Rp8.784,82 miliar yang hingga bulan September 2024 telah direalisasikan sebesar Rp4.462,88 miliar atau 52,94 persen dari Pagu 2024. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk melaksanakan kegiatan: (1) penguatan pembenihan tanaman perkebunan; (2) pengeolahan dan pemasaran hasil holtikultura; (3) penguatan perbenihan tanaman perkebunan; (4) pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan, dan beberapa kegiatan di bidang pertanian lainnya.

1.2.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Grafik 1.25 – Perkembangan NTN di Kepri Tahun 2022 – Q3 2024



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

**Provinsi Kepri merupakan provinsi maritim dengan 98% wilayahnya merupakan lautan.** Dengan bentuk geografis tersebut, tentunya Kepri menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.

**NTN Kepri di bulan September 2024 yang tergambar pada Grafik 1.25 sebesar 105,72.** Angka NTN tersebut mengalami penurunan sebesar 3,20 persen (yoy) namun tumbuh sebesar 0,49 persen (mtm) dan berada di atas angka NTN Nasional (102,27).



Namun demikian, **capaian NTN tersebut masih berada di bawah sasaran NTN Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri** yang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 116. Maka dari itu pemerintah akan terus meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan.

**Penurunan NTN di Kepulauan Riau pada September 2024 sebesar 3,20 persen (yoy) disebabkan oleh beberapa faktor**, diantaranya adalah persaingan di pasar ekspor yang berdampak pada berkurangnya daya saing harga produk hasil perikanan. Selain penurunan harga jual, kenaikan biaya operasional terutama terkait dengan biaya bahan bakar, alat tangkap dan kebutuhan pokok lainnya juga menjadi faktor yang menyebabkan penurunan margin keuntungan nelayan tangkap.

Kenaikan NTN pada bulan September 2024 dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga yang diterima nelayan tangkap sebesar 0,58 persen disebabkan antara lain oleh kenaikan harga 5 komoditi utama, antara lain cakalang sebesar 9,66 persen, kuwe sebesar 3,85 persen, kembung sebesar 3,51 persen, kakap sebesar 3,15 persen dan selar sebesar 2,45 persen.

Tantangan pengembangan sektor perikanan di Kepri meliputi: (1) IUU Fishing di pulau terluar seperti Natuna, yang mengurangi hasil laut bagi nelayan lokal; (2) pencemaran laut oleh limbah kapal internasional di Selat Malaka; (3) terbatasnya teknologi pengolahan perikanan yang belum berstandar ekspor; (4) cuaca buruk dan tantangan ekosistem perairan yang menurunkan volume tangkapan serta pendapatan nelayan.

Maka dari itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mengupayakan perkembangan sektor perikanan di Kepri yang dilaksanakan melalui beberapa program.

Pada tahun 2024, Pagu Belanja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kepri adalah sebesar Rp104,52 miliar. Sampai dengan akhir September 2024, Belanja tersebut telah direalisasikan sebesar Rp62,62 miliar atau 59,91 persen dari pagu TA 2024.

Beberapa kegiatan mendorong pengembangan sektor perikanan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1) fasilitasi dan pembinaan masyarakat/kelompok masyarakat; (2) operasi pengawasan sumber daya alam; (3) dukungan pembinaan UMKM; (4) fasilitasi dan pembinaan industri; (5) serta beberapa kegiatan lainnya yang membantu para nelayan untuk meningkatkan kualitas produksinya.

### 1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

**IPM** adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia dalam suatu wilayah atau negara. **IPM Provinsi Kepri pada tahun 2024 sebesar 79,89 atau tumbuh sebesar 0,81% point (yoy).**

**Grafik 1.26** - Perkembangan IPM Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2024



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Nasional dengan capaian indeks 75,02 di tahun 2024. Kemudian, IPM Kepri di tahun 2023 juga telah melampaui angka IPM yang ditargetkan dalam RPJMD Kepri 2021-2026 yaitu 78,47. Bahkan sejak tahun 2010, status pembangunan manusia di Kepri sudah berada di level "tinggi".

IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, IPM < 60 (rendah),  $60 \leq$  IPM < 70 (sedang),  $70 \leq$  IPM < 80 (tinggi), IPM  $\geq$  80 (sangat tinggi).

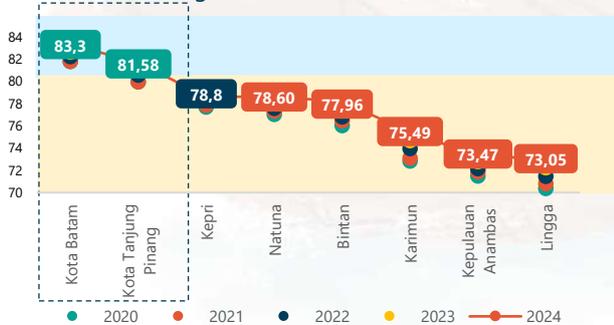
**Grafik 1.27** - Perkembangan IPM Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Regional Sumatera, **IPM Kepri berada pada peringkat tertinggi selama enam tahun berturut-turut.** Selanjutnya disusul oleh Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Aceh, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung secara berturut-turut. Capaian tersebut merupakan prestasi bagi **Kepri yang berhasil menjadi provinsi dengan IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama lima tahun berturut-turut.**

**Grafik 1.28** – Nilai IPM Kabupaten/Kota di Kepri per Kategori IPM Tahun 2020 – 2024



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Selanjutnya, berdasarkan kategori IPM yang terdapat pada Grafik 1.28, dapat dilihat bahwa profil IPM disepanjang tahun 2020-2024 pada seluruh kab/kota di Provinsi Kepri terbagi atas kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menjadi Kota dengan kategori IPM "Sangat Tinggi"  $\geq 80$  dengan IPM di tahun 2023 masing-masing sebesar 83,32 dan 81,58. Keberlanjutan peningkatan IPM Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat Kepri.

Unsur IPM terbentuk dari tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pendidikan (*knowledge*), serta standar hidup layak (*decent standard of living*).

Ketiga dimensi ini diukur menggunakan beberapa indikator: umur panjang dan hidup sehat diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH), dimensi pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sementara standar hidup layak diukur dari pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) di wilayah yang bersangkutan, atau melalui pengeluaran per kapita.

**UHH penduduk Kepri pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,29 persen (yoy)**, menjadi 75,12 dari sebelumnya 74,90. Peningkatan UHH ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 75,12 tahun.

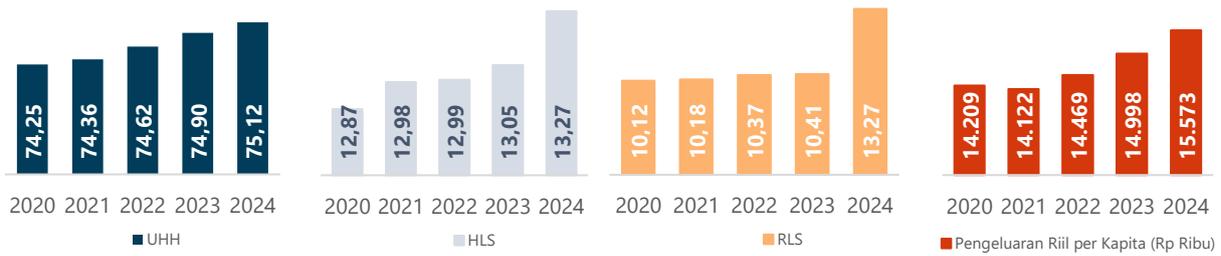
**HLS di Kepri pada tahun 2024 tumbuh 1,69 persen** menjadi 13,27 tahun dari yang sebelumnya 13,05 tahun. Peningkatan HLS ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,27 tahun.

Lebih lanjut, **RLS di Kepri tahun 2024 juga mengalami peningkatan yang telah mencapai 10,50 persen**, tumbuh 0,86 persen (yoy). Hal mengartikan bahwa terdapat perubahan sosial budaya dan ekonomi yang turut mendukung masyarakat untuk dapat memiliki akses ke pendidikan lebih lama, baik pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Hal mengartikan bahwa terdapat perubahan sosial budaya dan ekonomi yang turut mendukung masyarakat untuk dapat memiliki akses ke pendidikan lebih lama.

**Pengeluaran riil per kapita** di Kepri Tahun 2024 juga turut tumbuh sebesar 3,83 persen (yoy) di tahun 2024.



Grafik 1.29 – Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kepri Tahun 2020-2023



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Perbaikan kesejahteraan masyarakat Kepri yang tergambar melalui keempat indikator pembentuk IPM yang terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya kualitas hidup masyarakat Kepri yang semakin baik.

Pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk meningkatkan IPM di Kepri khususnya untuk mendukung Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan. Sampai dengan triwulan III 2024, **Belanja Fungsi Kesehatan** telah direalisasikan sebesar Rp138,92 miliar atau 64,11 persen dari Pagu tahun 2024. Belanja tersebut difokuskan pada Program Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan dan JKN, Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pada tahun 2024, **Belanja Fungsi Pendidikan** di Kepri difokuskan untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi. **Sampai dengan akhir bulan September 2024, Belanja Bidang Pendidikan telah direalisasikan sebesar Rp466,37** miliar atau mencapai 51,26 persen dari Pagu tahun 2024. Belanja tersebut difokuskan pada peningkatan Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Tinggi, serta Program Perpustakaan dan Literasi.

Selain itu, Pemerintah juga telah mengalokasikan **Belanja Transfer ke Daerah** (TKD), khususnya melalui DAK Non Fisik untuk

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dengan alokasi belanja masing-masing sebesar Rp594,55 miliar, Rp24,75 miliar, dan Rp12,24 miliar.

Sampai dengan triwulan III 2024, realisasi BOS telah mencapai Rp574,85 miliar atau 96,68 persen dari Pagu, realisasi Dana BOP PAUD telah terealisasikan sebesar Rp23,65 miliar atau 95,57 persen dari Pagu, dan realisasi Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp10,38 miliar atau 84,30 persen dari Pagu tahun 2024.

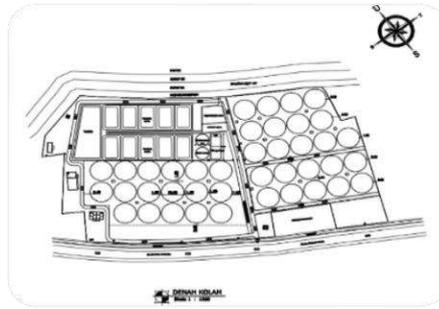
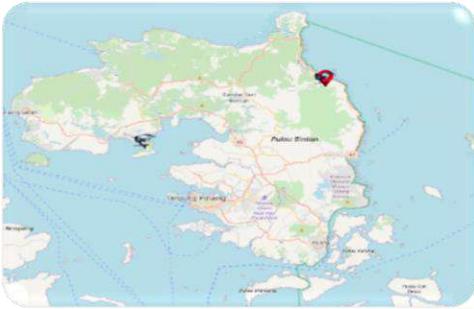
Pemerintah Daerah Kepri juga telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Kepri. Pada Renstra Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kepri tahun 2021-2024, sasaran peningkatan mutu pendidikan di Kepri berfokus pada beberapa program prioritas.

Program tersebut antara lain adalah percepatan pembentukan sekolah penggerak, penerapan kurikulum merdeka, dan transformasi digital dalam proses pembelajaran melalui optimalisasi *chromebook* dan akun belajar.id.

Pada tahun 2024, Pemprov Kepri memberikan SPP gratis bagi siswa SMAN/SMKN/SLBN di seluruh provinsi Kepri, di tahun yang sama, pemprov Kepri juga membuka program beasiswa kepada calon mahasiswa D3, DIV, dan S1 dengan total kuota sejumlah 1.500 penerima yang diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang kompetitif, produktif, dan inovatif.



## Peluang Investasi di Provinsi Kepri, The Largest Archipelagic Region in Indonesia - Pengembangan Budidaya Udang Vannamei di Wilayah Bintang Buyu, Teluk Bintang



Sumber: [https://bip.bintankab.go.id/kawasan\\_perikanan](https://bip.bintankab.go.id/kawasan_perikanan), 2024

### Latar Belakang

Provinsi Kepri merupakan wilayah yang potensial sebagai *archipelagic region*, memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional, yang menambah daya tarik sektor perikanan budidaya, khususnya perikanan laut. Sejak tahun 2010, kontribusi sektor ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan permintaan global akan hasil laut yang berkelanjutan.

Provinsi Kepri juga berkomitmen untuk mengembangkan sektor perikanan budidaya, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai program pelatihan dan fasilitasi teknis telah dilakukan, terutama dalam pengelolaan tambak udang vaname yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Potensi tambak udang di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, masih sangat besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. DPMPSTSP Kabupaten Bintang menyampaikan bahwa sedang menggagas proyek potensial terkait sektor perikanan khususnya Pengembangan Budidaya Udang Vannamei di wilayah Bintang Buyu, Teluk Bintang.

### Kendala dan Tantangan

1. **Modal awal yang relatif besar**, investasi awal dalam budidaya udang untuk pembangunan tambak, infrastruktur, dan peralatan, memerlukan modal yang besar.
2. **Kualitas air dan lingkungan, udang vaname sangat sensitif** terhadap perubahan kualitas air, termasuk suhu, pH, oksigen terlarut, dan kadar amonia. Pengelolaan lingkungan kolam yang tidak baik dapat menyebabkan kematian massal.
3. **Kesehatan udang**, penyakit seperti *Early Mortality Syndrome (EMS)*, *White Spot Syndrome Virus (WSSV)*, dan penyakit lainnya bisa menyebabkan kematian pada udang.
4. **Ketersediaan dan harga pakan, pakan** merupakan komponen biaya terbesar, dengan kontribusi sekitar 50-60% dari total biaya operasional. Apabila harga pakan meningkat, maka akan meningkatkan biaya budidaya secara signifikan bagi petani.

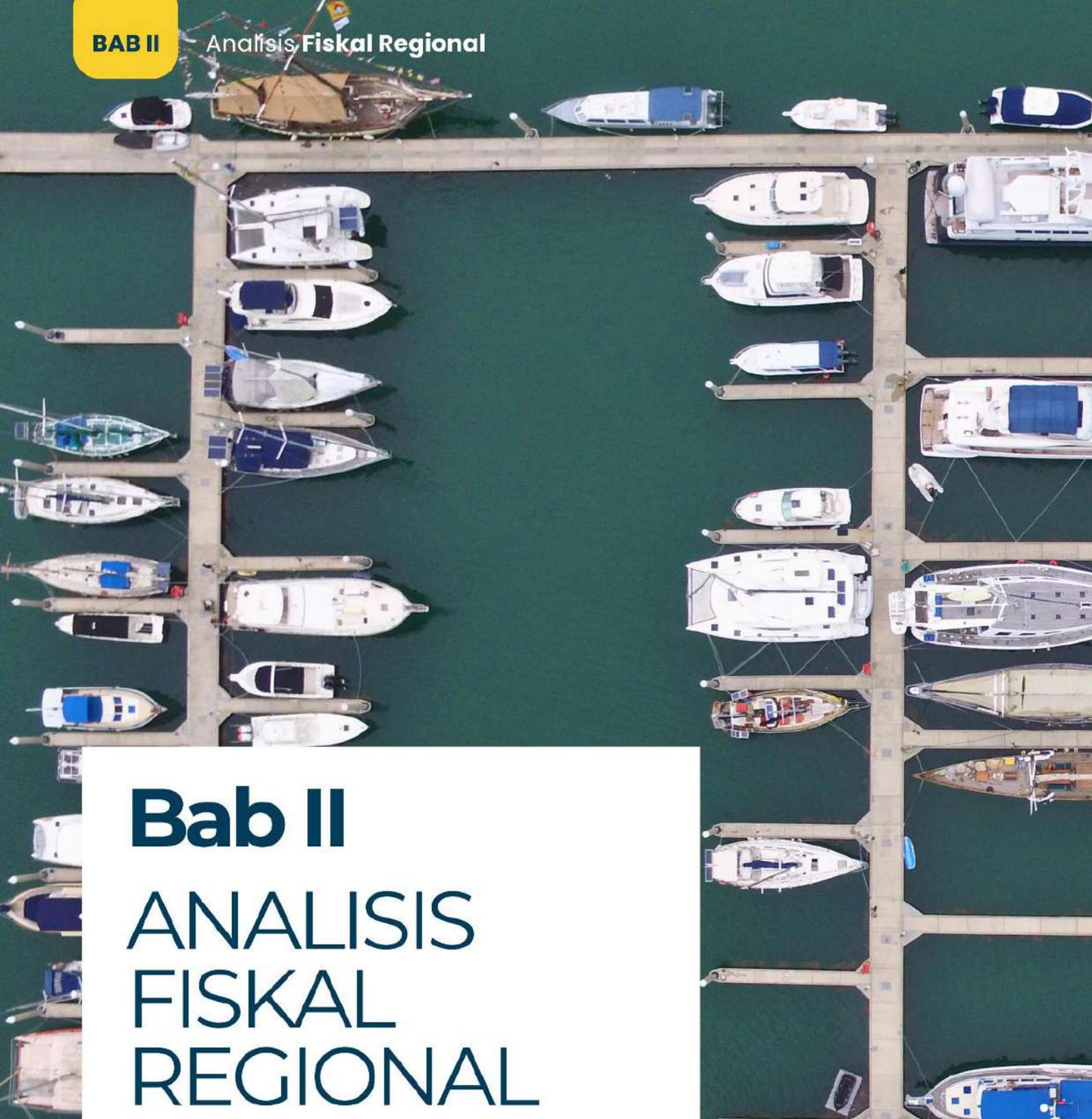
### Manfaat yang Akan Diperoleh

1. **Terbentuknya pemberdayaan masyarakat pesisir** dalam kegiatan budidaya ikan dan udang yang ramah lingkungan yang disertai pelatihan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam budidaya modern.
2. **Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah** dengan meningkatkannya taraf hidup nelayan dan pembudidaya lokal, khususnya di Kabupaten Bintang serta menciptakan lapangan kerja. Budidaya udang juga dapat menjadi alternatif pendapatan bagi petani dan nelayan, mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional.
3. **Pembangunan Infrastruktur:** Sektor budidaya udang mendorong perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan, yang juga menguntungkan sektor lain.
4. **Pengembangan Ekspor:** Peningkatan produksi udang Vannamei mendukung ekspor, memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan melalui pajak.

### Policy Responses

1. **Pemkab Bintang dan Pemerintah Pusat dapat menyediakan skema pembiayaan yang ramah petani**, seperti kredit bersubsidi atau pinjaman lunak dari pemerintah dan lembaga keuangan atau menawarkan subsidi untuk pembangunan infrastruktur awal dan peralatan budidaya.
2. **Pemkab Bintang dapat melaksanakan pelatihan untuk petani tentang teknik pengelolaan kualitas air dan praktik budidaya yang berkelanjutan.** Peningkatan kualitas air dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pemantauan kualitas air secara rutin di lokasi budidaya, dengan dukungan alat dan teknologi modern.
3. **Pemkab Bintang bekerja sama dengan pihak profesional untuk membangun program kesehatan udang** yang mencakup pemeriksaan rutin dan vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit, serta melakukan penyuluhan informasi tentang manajemen penyakit dan biosekuriti untuk melindungi kolam dari infeksi.
4. **Pemkab Bintang bekerja sama dengan pihak profesional melakukan penelitian dan pengembangan alternatif pangan lokal yang lebih terjangkau dan berkualitas**, serta bekerjasama dengan Pabrik Pakan untuk mendapatkan harga yang lebih ekonomis dan memastikan adanya pasokan yang stabil.



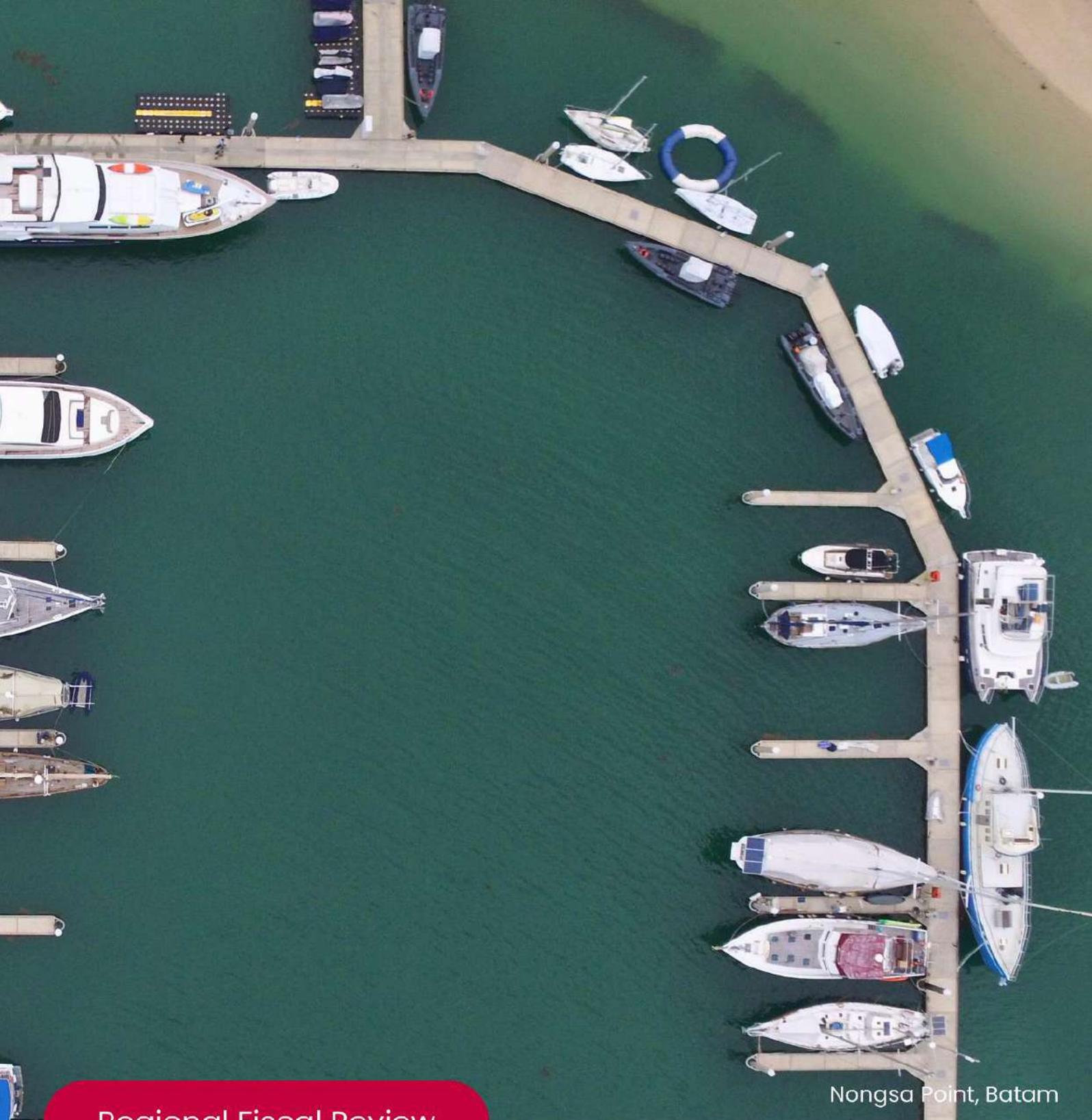


# Bab II

## ANALISIS FISKAL REGIONAL

**APBN dan APBD** berperan penting dalam mendorong pembangunan nasional dan daerah.





Nongsa Point, Batam

## Regional Fiscal Review

- Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Negara
- Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah
- Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
- Analisis Neraca Pemerintah Pusat - Tingkat Wilayah



## 2. Analisis Fiskal Regional

### 2.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

Sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjalankan tiga fungsi yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Fungsi stabilisasi dijalankan melalui **peran APBN sebagai shock absorber** untuk menstabilkan harga. Pada fungsi alokasi, APBN berperan untuk membuat ekonomi semakin efisien dan tidak distortif. Pada fungsi distribusi, APBN berperan sebagai alat

pemerataan keadilan. Ketiga fungsi tersebut tak hanya dijalankan dalam skala nasional, tetapi juga pada tingkat regional. APBN dianggarkan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan masyarakat Kepri yang sejahtera melalui peningkatan indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun perkembangan APBN di Kepri sampai dengan Triwulan III tergambar pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1** – Pagu dan Realisasi I-Account APBN di Kepri Triwulan III, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)

I-Account (Miliar Rupiah)	TA 2023			TA 2024			Growth 2023-2024
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	<b>12.533,49</b>	<b>8.702,71</b>	<b>69,44%</b>	<b>15.126,38</b>	<b>10.048,29</b>	<b>66,43%</b>	<b>15,46%</b>
Penerimaan Perpajakan	10.223,12	7.213,78	70,56%	12.448,53	7.571,34	60,82%	4,96%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.310,37	1.488,93	64,45%	2.677,85	2.476,95	92,50%	66,36%
<b>BELANJA NEGARA</b>	<b>19.198,56</b>	<b>10.958,03</b>	<b>57,08%</b>	<b>18.409,13</b>	<b>11.871,84</b>	<b>64,49%</b>	<b>8,34%</b>
<b>BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>9.898,10</b>	<b>5.130,29</b>	<b>51,83%</b>	<b>10.325,16</b>	<b>5.730,98</b>	<b>55,51%</b>	<b>11,71%</b>
Belanja Pegawai	2.072,02	1.508,69	72,81%	2.169,05	1.697,37	78,25%	12,51%
Belanja Barang	4.944,82	2.500,19	50,56%	4.766,76	2.642,85	55,44%	5,71%
Belanja Modal	2.630,22	1.000,59	38,04%	3.126,62	1.385,20	44,30%	38,44%
Bantuan Sosial	4,59	2,93	63,79%	7,82	5,56	71,10%	89,68%
Belanja Lainnya	246,44	117,89	47,84%	254,91	0,00	0,00%	-100,00%
<b>TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>9.300,45</b>	<b>5.827,74</b>	<b>62,66%</b>	<b>8.083,97</b>	<b>6.140,86</b>	<b>75,96%</b>	<b>5,37%</b>
<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>6.922,17</b>	<b>4.260,54</b>	<b>61,55%</b>	<b>5.883,54</b>	<b>4.626,17</b>	<b>78,63%</b>	<b>8,58%</b>
Dana Alokasi Umum	4.474,84	3.420,65	76,44%	4.817,40	3.888,52	80,72%	13,68%
Dana Bagi Hasil	2.447,33	839,88	34,32%	1.066,15	737,65	69,19%	-12,17%
<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>1.979,78</b>	<b>1.329,19</b>	<b>67,14%</b>	<b>1.887,60</b>	<b>1.238,87</b>	<b>65,63%</b>	<b>-6,79%</b>
Dana Alokasi Khusus Fisik	805,94	417,49	51,80%	648,36	289,39	44,63%	-30,68%
Dana Alokasi Khusus NonFisik	1.173,84	911,70	77,67%	1.239,24	949,48	76,62%	4,14%
<b>Dana Insentif Fiskal</b>	<b>166,77</b>	<b>52,75</b>	<b>31,63%</b>	<b>93,99</b>	<b>62,35</b>	<b>66,34%</b>	<b>18,20%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>225,94</b>	<b>185,27</b>	<b>82,00%</b>	<b>218,84</b>	<b>213,46</b>	<b>97,54%</b>	<b>15,22%</b>
<b>Transfer Hibah</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN</b>	<b>-6.665,07</b>	<b>-2.255,32</b>	<b>33,84%</b>	<b>-3.282,75</b>	<b>-1.823,55</b>	<b>55,55%</b>	<b>-19,14%</b>

Sumber: OMSPAN, GFS, ALCo Kanwil DJPb Kepri, Kanwil DJP Kepri, Kanwil DJBC Kepri, 2024 (diolah)

**Target Pendapatan Negara** pada tahun 2024 di Kepri sebesar Rp15.126,38 miliar, meningkat 20,69 persen (yoy) pada tahun 2024.

Penerimaan Perpajakan mendominasi pendapatan negara dengan target penerimaan sebesar Rp12.448,53 miliar. Target Penerimaan Perpajakan terdiri atas Pajak Dalam Negeri yang ditargetkan sebesar Rp11.797,69 miliar dan Pajak Perdagangan Internasional yang ditargetkan

sebesar Rp650,85 miliar. Tingginya target Penerimaan Perpajakan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024, terdapat kenaikan target PPh sebesar 14,0 persen dan tarif PPN dan PPnBM sebesar 13,0 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat menstimulus perkembangan ekonomi Kepri di berbagai sektor.

Target Pajak Dalam Negeri terdiri atas beberapa jenis pajak yaitu PPh (Rp10.485,11 miliar), PPN (Rp1.149,16 miliar), PBB (Rp20,12 miliar), Cukai (Rp21,95 miliar), dan Pajak Lainnya (Rp121,34 miliar).

Dari seluruh komponen Pajak Dalam Negeri, **penurunan target terbesar ada pada PBB sebesar minus 30,25 persen.** Hal ini dikarenakan terjadi pengurangan keluasaan dan perpindahan wajib pajak PBB P5L. Salah satu faktor utamanya diakibatkan oleh penurunan harga komoditas CPO dan perubahan lokasi ekspor pengolahan minyak Propana dan Butana PT. Pertamina ke Provinsi Aceh.

Penerimaan PNBP pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp2.677,85 miliar dan mengalami peningkatan 15,91 persen (yoy). PNBP terdiri atas PNBP BLU (Rp2.262,28 miliar) dan PNBP Lainnya (Rp415,57 miliar).

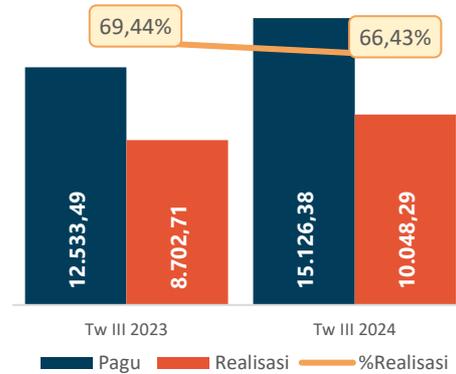
**Pagu Belanja Negara** pada tahun 2024 di Kepri sebesar Rp18.409,13 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10.325,16 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8.083,97 miliar.

Pagu Belanja Pemerintah Pusat terbagi menjadi Belanja Pegawai (Rp2.169,05 miliar), Belanja Barang (Rp4.766,76 miliar), Belanja Modal (Rp2.864,36 miliar), Belanja Bansos (Rp7,82 miliar), dan Belanja Lainnya (Rp254,91 miliar). Pada tahun 2024, **Belanja Modal difokuskan pada pembangunan Infrastruktur, sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan Investasi.**

Pagu Belanja TKD terdiri atas Dana Transfer Umum (Rp5.883,54 miliar), Dana Transfer Khusus (Rp1.887,60 miliar), Dana Insentif Fiskal (Rp93,99 miliar), dan Dana Desa (Rp218,84 miliar).

### 2.1.1 Analisis Realisasi dan Growth Pendapatan Negara dan Hibah

**Grafik 2.1** – Pagu dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Triwulan III, 2023 s.d. 2024



Sumber: OMSPAN, GFS, ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

**Pendapatan Negara dan Hibah** telah terealisasi sebesar Rp10.048,29 miliar (66,43 persen dari Pagu) meningkat 15,46 persen (yoy), menunjukkan kinerja yang positif sepanjang triwulan III 2024. Meskipun demikian, dari sisi persentase realisasi pada triwulan III 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (secara rinci pada Grafik 2.1 di atas).

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas Penerimaan Perpajakan sebesar Rp7.571,34 miliar dan PNBP sebesar Rp2.476,95 miliar. Rincian perbandingan antara tahun 2023 dan 2024 digambarkan pada Grafik 2.2 berikut.

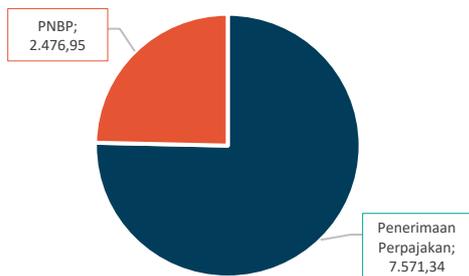
**Grafik 2.2** - Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Triwulan III, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: OMSPAN, GFS, ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Realisasi Penerimaan Negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan sebesar Rp7.571,34 miliar dan PNBPNP sebesar Rp2.476,95 miliar sehingga diketahui bahwa Penerimaan Perpajakan mendominasi realisasi Pendapatan Negara yaitu sebesar 75,35 persen apabila dibandingkan dengan realisasi PNBPNP sebesar 24,65 persen sebagaimana tersaji dalam Grafik 2.3 berikut.

**Grafik 2.3 – Porsi Realisasi Pendapatan Negara, Triwulan III 2024**



Sumber: OMSPAN, GFS, ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 60,82 persen dari Target, sedangkan PNBPNP menunjukkan kinerja yang lebih baik yaitu mampu terealisasi sebesar 92,50 persen dari Target.

Dari sisi penerimaan perpajakan, Persentase realisasi tertinggi ada pada Cukai sebesar 121,97 persen sedangkan nominal realisasi tertinggi ada pada PPh sebesar Rp6.461,67 miliar.

Dari sisi PNBPNP, tingginya lalu lintas keluar masuk Indonesia oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal berdampak pada realisasi PNBPNP Lainnya yang sudah melebihi Target yaitu Rp563,63 miliar atau 135,63 persen dari Target. Realisasi Pendapatan BLU Rp1.913,32 miliar atau 84,57 persen dari Target ditopang dengan semakin meningkatnya kinerja empat satker BLU, yaitu BP Batam, Poltek Negeri Batam, BLU RS Bhayangkara Batam dan BLU RSAL dr. Midiyato Tanjungpinang.

**2.1.1.1 Analisis Realisasi dan Growth Pendapatan Perpajakan**

**Tabel 2.2 – Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri Triwulan III, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar)**

I-Account (Miliar Rupiah)	2023			2024			% Growth 2023-2024
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>10.223,12</b>	<b>7.213,78</b>	<b>70,56%</b>	<b>12.448,53</b>	<b>7.571,34</b>	<b>60,82%</b>	<b>4,96%</b>
Pajak Dalam Negeri	9.542,56	6.499,39	68,11%	11.797,69	7.249,99	61,45%	11,55%
Pajak Perdagangan Internasional	680,56	714,39	104,97%	650,85	321,35	49,37%	-55,02%

Sumber: OMSPAN, GFS, ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

**Penerimaan Perpajakan** telah terealisasi sebesar Rp7.571,34 miliar (60,82 persen dari Target), meningkat 4,96 persen (yoy) sebagaimana tergambar pada Grafik 2.4 berikut.

Penerimaan Perpajakan terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. **Realisasi Pajak Dalam Negeri memberikan kontribusi terbesar** yaitu 95,76 persen atau Rp7.249,99 miliar, sedangkan

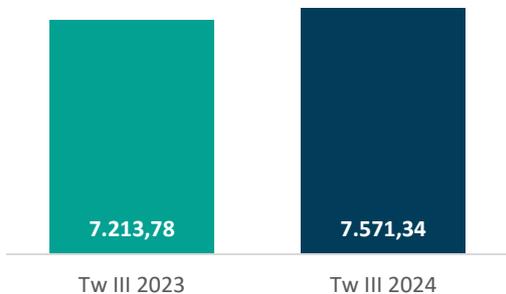
realisasi Pajak Perdagangan Internasional memberikan kontribusi sebesar 4,24 persen atau Rp321,35 miliar sebagaimana terlihat pada Grafik 2.5 berikut.

Pada triwulan III 2024, Penerimaan Perpajakan tumbuh sebesar 4,96 persen. Pertumbuhan terjadi pada Pajak Dalam Negeri sebesar 11,55 persen. Sedangkan **Pajak**



**Perdagangan Internasional** mengalami kontraksi sebesar 55,02 persen.

**Grafik 2.4** – Realisasi Penerimaan Perpajakan Triwulan III, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: OMSPAN, GFS, ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2024

Sampai dengan triwulan III 2024 **kinerja perpajakan didominasi oleh PPh** sebesar Rp6.461,67 miliar dan tumbuh 12,12 persen (yoy), disebabkan oleh penerapan peraturan penerapan tarif efektif PPh 21 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Selain PPh, realisasi perpajakan juga didominasi oleh PPN sebesar Rp689,04 miliar, meningkat 6,68 persen (yoy).

Peningkatan PPN didorong oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pasca pandemi COVID-19 dan penerapan kebijakan PPN 11 persen yang mulai berlaku sejak 1 April 2023.

**Grafik 2.5** – Porsi Penerimaan Perpajakan Triwulan III, 2024



Sumber: OMSPAN, GFS, ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2024

Meskipun demikian, kinerja Pajak Perdagangan Internasional mengalami kontraksi signifikan sebesar minus 55,02 persen yang dipengaruhi oleh turunnya kinerja ekspor impor serta kebijakan hilirisasi produk mentah menjadi produk olahan yang tidak terkena Bea Keluar.

**2.1.1.1 Analisis Kinerja Pendapatan Pajak Menurut Jenisnya**

**Tabel 2.3** – Perkembangan Perpajakan di Kepri Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

No	Jenis Pajak	Realisasi Tw III 2023	Realisasi Tw III 2024	Selisih (2024 – 2023)	% Growth	% Kontribusi
<b>1</b>	<b>PPh</b>	<b>6.153,79</b>	<b>7.570,06</b>	<b>1.416,27</b>	<b>23,01%</b>	<b>90,23%</b>
	PPh Migas	0,00	0,02	0,02	100%	0,00%
	PPh Non Migas	6.153,79	7.570,04	1.416,25	23,01%	90,23%
	PPh Pasal 21	1.892,13	2.529,85	637,72	33,70%	30,15%
	PPh Pasal 22	109,88	103,11	(6,77)	-6,16%	1,23%
	PPh Pasal 22 Impor	167,44	603,47	436,03	260,41%	7,19%
	PPh Pasal 23	372,75	373,54	0,79	0,21%	4,45%
	PPh Pasal 25/29 OP	131,72	151,65	19,93	15,13%	1,81%
	PPh Pasal 25/29 Badan	2.132,86	1.882,96	(249,90)	-11,72%	0,00%
	PPh Pasal 26	412,25	879,18	466,93	113,26%	0,00%
	PPh Final	934,77	1.046,26	111,49	11,93%	22,44%
	PPh Non Migas Lainnya	0,00	0,01	0,01	100%	10,48%
<b>2</b>	<b>PPN</b>	<b>733,92</b>	<b>747,40</b>	<b>13,48</b>	<b>1,84%</b>	<b>12,47%</b>
	PPN Dalam Negeri	699,09	681,09	(18,00)	-2,57%	0,00%
	PPN Impor	34,88	66,26	31,38	89,97%	8,91%
	PPN Lainnya	(0,05)	0,05	0,10	200,00%	8,12%
<b>3</b>	<b>PPnBM</b>	<b>0,68</b>	<b>0,17</b>	<b>(0,51)</b>	<b>-75,00%</b>	<b>0,79%</b>
	PPnBM Dalam Negeri	0,68	0,17	(0,51)	-75,00%	0,00%



No	Jenis Pajak	Realisasi Tw III 2023	Realisasi Tw III 2024	Selisih (2024 – 2023)	% Growth	% Kontribusi
	PPnBM Impor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PPnBM Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>PBB</b>	<b>12,02</b>	<b>5,33</b>	<b>(6,69)</b>	<b>-55,66%</b>	<b>0,00%</b>
	PBB Perkebunan	2,05	1,54	(0,51)	-24,88%	0,00%
	PBB Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PBB Pertambangan Minerba	6,54	3,05	(3,49)	-53,36%	0,00%
	PBB Pertambangan Migas	2,87	0,00	(2,87)	-100,00%	0,06%
	PBB Pertambangan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%
	PBB Lainnya	0,56	0,74	0,18	32,14%	0,00%
<b>5</b>	<b>Pajak Lainnya</b>	<b>62,94</b>	<b>67,21</b>	<b>4,27</b>	<b>6,78%</b>	<b>0,04%</b>
	<b>Total</b>	<b>6.963,35</b>	<b>8.390,16</b>	<b>1.007,19</b>	<b>1.426,81</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: ALCo DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Secara nominal, jenis pajak dengan selisih kenaikan tertinggi ada pada **PPH Pasal 21 sebesar Rp637,72 miliar**, PPh Pasal 26 sebesar Rp466,93 miliar, dan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp436,03 miliar. Peningkatan pada PPh Pasal 21 ini di dorong oleh penerapan tarif efektif PPh 21 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Adapun jenis pajak dengan *growth (yoy)* tertinggi juga terdapat pada **PPH Pasal 22 Impor sebesar 260,41 persen (yoy)**, kemudian diikuti oleh PPN Lainnya sebesar 200,00 persen (yoy), dan PPh Pasal 26 sebesar 113,26 persen (yoy).

Kanwil DJP Kepri melakukan beberapa *extra efforts* selama triwulan III berupa: (i) melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP - Polda - Dispenda berupa Pengawasan

PPNDN kendaraan bermotor pada FTZ Batam, yang dilaksanakan di unit SAMSAT Polda KEPRI dibawah Regident Direktorat Lalu Lintas; dan (ii) mengadakan edukasi tentang sistem perpajakan terbaru, Coretax, bagi wajib pajak dari 19 Agustus s.d. 5 September di Batam.

Jenis pajak yang mengalami penurunan signifikan salah satunya pajak **PPH Pasal 25/29 Badan yang menurun sebesar Rp249,90 miliar atau 0,69 persen (yoy)**. Adapun PPh 25 merupakan pembayaran angsuran bulanan atas PPh sedangkan PPh 29 merupakan kekurangan pembayaran PPh sehingga sifat dari kedua jenis

PPh ini insidental dan tidak dapat diprediksi. Terdapat isu pengembalian pajak pada bulan Juli sebesar Rp32,81 miliar dan penerimaan pajak pada bulan-bulan lainnya yang tidak setinggi di 2023.

### 2.1.1.1.2 Analisis Kinerja Perpajakan Sektoral

Tabel 2.4 – Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan di Kepri Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

No.	Nama Sektor	Tw III 2023	Tw III 2024	Selisih	%	%
					Growth	Kontrib.
1	Industri Pengolahan	2.858,90	3.245,72	386,82	13,53%	38,68%
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	947,01	1.462,69	515,68	54,45%	17,43%
3	Konstruksi	329,21	688,88	359,67	109,25%	8,21%
4	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,46	638,75	630,29	7448,01%	7,61%
5	Pengangkutan dan Pergudangan	408,82	536,57	127,76	31,25%	6,40%
6	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	235,07	349,36	114,29	48,62%	4,16%

7	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	2,25	221,75	219,5	9736,87%	2,64%
8	Pertambangan dan Penggalian	0	194,74	194,74	100%	2,32%
9	Real Estate	30,41	187,75	157,34	517,41%	2,24%
10	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	96,09	131,74	35,65	37,10%	1,57%
11	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	18,67	137,13	118,47	634,69%	1,63%
12	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	30,21	112,51	82,3	272,45%	1,34%
13	Aktivitas Jasa Lainnya	9,5	66,87	57,37	604,11%	0,80%
14	Informasi dan Komunikasi	34,45	104	69,55	201,89%	1,24%
15	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	39,67	37,69	-1,98	-5,00%	0,45%
16	Pendidikan	13,53	21,79	8,26	61,01%	0,26%
17	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,56	-9,24	-27,8	-149,80%	-0,11%
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	10,32	14,85	4,54	43,96%	0,18%
19	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	17,19	23,57	6,37	37,07%	0,28%
20	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	0,6	0,62	0,02	2,82%	0,01%
21	Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	0	222,44	222,44	100%	2,65%
22	KLU Tidak Diketahui	2.003,70	0	-2.003,70	-100,00%	0,00%
<b>Total</b>		<b>7.112,60</b>	<b>8.390,17</b>	<b>1.277,57</b>	<b>17,96%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: ALCo DJPb Kepri, 2024 (diolah)

**Sektor pajak di Kepri masih di dominasi oleh sektor Industri Pengolahan** dengan kontribusi sebesar 38,68 persen, sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) dengan kontribusi sebesar 17,43 persen, dan sektor Kontruksi sebesar 8,21 persen. Dominasi sektor-sektor tersebut di Kepri masih terus menguat, di dorong oleh berkembangnya kawasan industri di Kota Batam, Bintan, Kab. Karimun dan Kota Tanjungpinang.

Sektor dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor pajak Administrasi Pemerintahan Dan Jaminan Sosial Wajib yang meningkat sebesar Rp630,29 miliar, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang meningkat Rp515,68 miliar, dan sektor Industri Pengolahan yang meningkat Rp386,82 miliar

### 2.1.1.1.3 Analisis Kinerja Perpajakan Sektoral terhadap PDRB

**Tabel 2.5** - Kontribusi Realisasi Pajak Sektoral terhadap PDRB Kepri Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

No.	Nama Sektor	Pajak s.d. Tw III 2024	PDRB s.d. Tw III 2024	Kontribusi Pajak Terhadap PDRB
1	Jasa Perusahaan	0	7,88	0,00%
2	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23,57	254,51	9,26%
3	Transportasi dan Pergudangan	536,57	5.387,03	9,96%
4	Jasa lainnya	66,87	850,18	7,86%
5	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	638,75	6.728,84	9,49%
6	Pengadaan Listrik dan Gas	221,75	2.858,84	7,76%
7	Real Estate	187,75	2.891,81	6,49%
8	Jasa Keuangan dan Asuransi	349,36	7.243,31	4,82%

9	Perdagangan Besar - Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.462,69	24.052,29	6,08%
10	Industri Pengolahan	3.245,72	106.487,86	3,05%
11	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	112,51	4.950,61	2,27%
12	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37,69	2.228,92	1,69%
13	Informasi dan Komunikasi	104,00	7.278,85	1,43%
14	Konstruksi	688,88	52.452,56	1,31%
15	Pertambangan dan Penggalian	194,74	25.016,85	0,78%
16	Jasa Pendidikan	21,79	3.340,43	0,65%
17	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-9,24	7.210,60	-0,13%
<b>Total</b>		<b>7.883,39</b>	<b>259.241,37</b>	<b>3,04%</b>

Sumber: Kanwil DJP Kepri dan BPS Kepri, 2024 (diolah)

Meskipun Industri Pengolahan merupakan sektor dengan realisasi Penerimaan Perpajakan dan realisasi PDRB tertinggi, sektor dengan **rasio pajak terhadap PDRB tertinggi** terdapat pada **Transportasi dan Pergudangan**, sebesar 9,96 persen, kemudian disusul berturut-turut oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,49 persen dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,26 persen.

**Sektor transportasi dan pergudangan sangat potensial**, didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas ekspor impor yang terpusat di wilayah Kepri. Sektor ini akan menjadi salah satu sektor potensial dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sektor transportasi dan

pergudangan bergantung pada sektor perdagangan sebagai penunjang distribusi barang guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

### 2.1.1.2 Analisis Realisasi dan Growth Bea dan Cukai

Berdasarkan data dari Kanwil DJBC Khusus Kepri dan KPU BC Batam, **realisasi Bea dan Cukai di Kepri** sampai dengan triwulan III 2024 sebesar **Rp347,48 miliar**, mengalami kontraksi 52,46 persen (yoy). Realisasi ini terdiri atas Bea Masuk Rp290,48 miliar, Bea Keluar Rp30,23 miliar dan Cukai 26,77 miliar. Adapun rincian penerimaan Bea dan Cukai mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2024 sebagaimana Tabel 2.6.

**Tabel 2.6** – Perkembangan Bea dan Cukai di Kepri, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	Tw III 2023			Tw III 2024			Growth (2023-2024)
	Target	Real	%	Target	Real	%	
Bea Masuk	441,29	573,03	130%	288,42	290,48	100,71%	-49,31%
Bea Keluar	144,46	139,84	97%	185,09	30,23	16,33%	-78,38%
Cukai	9,64	18,03	187%	14,59	26,77	183,48%	48,47%
<b>Total</b>	<b>595,39</b>	<b>730,9</b>	<b>123%</b>	<b>488,1</b>	<b>347,48</b>	<b>71,19%</b>	<b>-52,46%</b>

Sumber: Kanwil DJPBC Kepri dan KPU BC Batam, 2024 (diolah)

**Growth realisasi Bea dan Cukai** cenderung menurun dengan kontraksi tertinggi terjadi pada Bea Keluar sebesar 78,38 persen (yoy), diikuti oleh penerimaan Bea Masuk sebesar 49,31 persen (yoy).

**Kontraksi pada Bea Masuk** disebabkan beberapa hal, yaitu: (i) penurunan aktivitas

importasi kebutuhan pembangunan KEK dikarenakan pembangunan KEK sudah hampir selesai berdampak pada menurunnya frekuensi dan volume impor; dan (ii) adanya pengembalian bea masuk kepada beberapa perusahaan.

**Kontraksi Bea Keluar** disebabkan penurunan tarif harga referensi Bea Keluar serta

penurunan volume ekspor Top 3 komoditi CPO dan turunannya, yaitu CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein.

**Realisasi Cukai** menjadi satu-satunya jenis penerimaan Bea dan Cukai yang mengalami pertumbuhan positif, sebesar 48,47 persen (yoy). Komponen penyumbang Cukai terbesar yaitu Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA), serta Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang didorong oleh peningkatan permintaan pita cukai (CK-1) dari beberapa perusahaan rokok/tembakau yang mengalihkan penjualan dari penjualan luar negeri ke penjualan di daerah lokal. Optimalisasi pendapatan Cukai Hasil Tembakau masih dapat

### 2.1.1.2.1 Analisis Kinerja Bea Masuk Sektoral

Sebagaimana pada Tabel 2.7, sektor dengan kontribusi tertinggi pada Bea Masuk di Kepri, yaitu pada **Industri Pengolahan** sebesar 47,28 persen dengan realisasi Rp135,74 miliar, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 19,43 persen dengan realisasi Rp55,78 miliar, dan Aktivitas/Jasa Lainnya sebesar 13,59 persen dengan realisasi Rp39,02 miliar.

Penerimaan Bea dan Cukai di Kanwil DJBC Provinsi Kepri, masih didominasi oleh produk mentah dan olahan makanan, serta minuman yang

**Tabel 2.7** - Realisasi Bea Masuk per Sektor Kanwil DJBC Kepri dan KPU BC Batam, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

No.	Nama Sektor	Kanwil BC Kepri	KPU BC Batam	Total Bea Masuk	Kontribusi
1	Industri Pengolahan	3,06	132,69	135,74	47,28%
2	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,49	2,09	3,58	1,25%
3	Industri Kimia	1,30	0,00	1,30	0,45%
4	Industri Tekstil dan Garmen	0,48	0,00	0,48	0,17%
4	Pertambangan dan Penggalian (Migas)	24,14	3,41	27,54	9,59%
5	Industri Perkapalan	1,87	0,00	1,87	0,65%
6	Konstruksi	1,21	1,42	2,63	0,91%
7	Pengangkutan dan Pergudangan	0,08	18,85	18,93	6,59%
8	Aktivitas / Jasa Lainnya	0,56	38,46	39,02	13,59%
9	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	0,00	55,78	55,78	19,43%
10	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	0,00	0,26	0,26	0,09%
11	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0,00	0,18	0,18	0,06%
<b>Total</b>		<b>34,18</b>	<b>252,95</b>	<b>287,14</b>	<b>100,00%</b>

dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melaksanakan koordinasi dan inpeksi terhadap pihak terkait dalam upaya pemberantasan maraknya peredaran rokok ilegal yang tidak

dikirimkan dari dan ke luar negeri seperti Malaysia, dan Singapura. Hal tersebut di dorong oleh letak geografis Kepri yang sangat berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.

**Tabel 2.8** - Kontribusi Realisasi Bea Keluar per Sektor Kanwil DJBC Kepri dan KPU BC Batam, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

No	Nama Sektor	Kanwil BC Kepri	KPU BC Batam	Total Bea Masuk	Kontribusi
1	Industri Pengolahan	-	33,45	33,45	99,63%
2	Pengadaan Air, Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	-	0,08	0,08	0,25%
3	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	0,04	0,04	0,12%
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>33,57</b>	<b>33,57</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kanwil DJPBC Kepri dan KPU BC Batam, 2024 (diolah)

### 2.1.1.2.2 Analisis Kinerja Bea Keluar Sektoral



Sebagaimana pada Tabel 2.8, sektor dengan kontribusi tertinggi pada Bea Keluar di Kepri, yaitu pada **Industri Pengolahan** sebesar 99,63 persen dengan realisasi Rp33,45 miliar, diikuti sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan

Pembersihan Limbah dan Sampah sebesar 0,25 persen dengan realisasi Rp0,08 miliar, dan Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,12 persen dengan realisasi Rp0,04 miliar.

### 2.1.1.3 Analisis Realisasi dan Growth Pendapatan PNBP

**Tabel 2.9** – Perkembangan PNBP KPKNL di Kepri Triwulan III, 2023 - 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	TW III 2023			TW III 2024			Growth (2023-2024)
	Target s.d. Tw III	Real s.d. Tw III	%	Target s.d. Tw III	Real s.d. Tw III	%	
PNBP Aset	104,59	119,02	113,81%	155,49	249,95	160,75%	110,00%
PNBP Piutang Negara	0,04	0,04	105,64%	0,05	0,06	115,24%	63,63%
PNBP Lelang	15,02	4,73	31,51%	14,22	18,78	132,05%	296,73%
<b>Total</b>	<b>119,64</b>	<b>123,80</b>	<b>103,47%</b>	<b>169,76</b>	<b>268,78</b>	<b>158,33%</b>	<b>117,12%</b>

Sumber: KPNKNL Batam, 2024 (diolah)

**Target PNBP yang dikelola oleh KPKNL** Batam cenderung meningkat mulai dari triwulan III 2023 sebesar 119,64 miliar, menjadi 169,76 miliar pada triwulan III 2024.

**Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp268,78 miliar** (158,33 persen dari Target). Kinerja realisasi Penerimaan PNBP cukup optimal apabila dibandingkan dengan triwulan III 2023 dengan pertumbuhan sebesar 117,12 persen (yoy).

Peningkatan tertinggi pada PNBP Lelang sebesar 296,73 persen (yoy), kemudian diikuti PNBP Aset dengan peningkatan sebesar 110,00 (yoy), dan PNBP Piutang Negara sebesar 63,63 persen (yoy).

### 2.1.1.4 Analisis Perkembangan Tax Ratio

**Tax ratio pemerintah pusat** mengalami pertumbuhan, yaitu pada triwulan III 2023 sebesar 2,92 persen menjadi 3,24 persen pada triwulan III 2024. Hal ini menandakan

peningkatan Pendapatan Perpajakan telah sejalan dengan peningkatan PDRB.

**Tabel 2.10** – Perkembangan Tax Ratio 2021 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi s.d. Tw III 2023	Realisasi s.d. Tw III 2024
Pendapatan Perpajakan	7.112,60	8.390,17
PDRB	243.921,84	259.241,37
<b>Tax Ratio Pempus</b>	<b>2,92%</b>	<b>3,24%</b>

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Tingginya kinerja perpajakan pemerintah pusat tersebut didorong oleh penerapan beberapa kebijakan seperti PPN 11 persen, tarif efektif baru PPh pasal 21 sejak 1 Januari 2024 (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023), serta *extra efforts* yang dilakukan Kanwil DJP Kepri, berupa penyuluhan perpajakan kepada beberapa perusahaan besar dan menggelar *Executive Dialogue* bersama dengan BP Batam, BPKP, serta Gubernur Provinsi Kepri.

### 2.1.1.5 Prognosis Pendapatan Negara s.d. Akhir Tahun

Tabel 2.11 – Prognosis Pendapatan Negara s.d. Akhir Tahun (dalam Miliar Rupiah)

TW	Pajak		Bea Cukai		PNBP	
	Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.
Tw I	2.271,09	2.362,64	157,43	104,01	28,30	63,99
Tw II	3.118,28	3.385,98	156,38	113,01	56,57	124,74
Tw III	2.638,42	2.641,54	234,96	136,15	84,89	30,63
<b>Total</b>	<b>8.027,79</b>	<b>8.390,16</b>	<b>548,77</b>	<b>353,17</b>	<b>169,76</b>	<b>219,37</b>
Tw IV	3.181,83	-	184,69	-	113,21	-

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

**Proyeksi Penerimaan Perpajakan** s.d. triwulan III sebesar Rp8.027,79 miliar. Atas proyeksi ini, Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar Rp8.390,16 miliar sehingga terjadi deviasi positif dengan ralisasi yang lebih tinggi dari target. Hal tersebut di dorong oleh kebijakan perpajakan berupa penerapan tarif PPN 11 persen dan tarif efektif baru PPh pasal 21 yang terbit di tahun 2023 dan 2024, serta *extra efforts* yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP dalam merealisasikan pendapatan perpajakan.

**Proyeksi Bea Cukai** s.d. triwulan III sebesar Rp548,77 miliar. Atas proyeksi ini, Bea Cukai terealisasi sebesar Rp353,17 miliar sehingga terjadi deviasi negatif.

**Penerimaan PNBP** yang dikelola oleh DJKN s.d. triwulan III diproyeksikan sebesar Rp169,76 miliar. Atas proyeksi ini, Penerimaan PNBP terealisasi sebesar Rp219,37 miliar sehingga terjadi deviasi positif.

Kinerja optimal realisasi perpajakan dan PNBP perlu untuk dijaga, sehingga realisasi pendapatan dapat mencapai kondisi optimal hingga akhir tahun anggaran.

#### 2.1.1.6 Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

1. Kanwil DJP Kepri agar meningkatkan **extra effort** melalui **edukasi, kerjasama, layanan langsung**, dan penyuluhan perpajakan yang difokuskan terhadap perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah pegawai yang banyak dalam rangka meningkatkan Pajak atas WP Orang Pribadi, serta berkolaborasi dengan

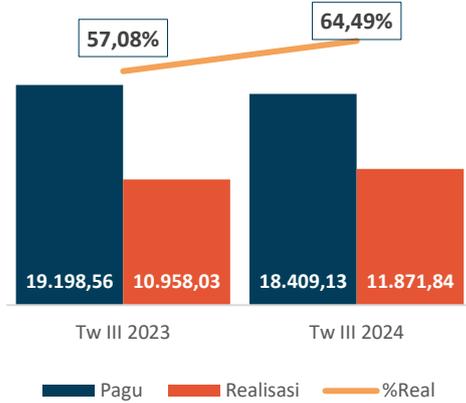
asosiasi industri dan bisnis untuk memastikan kepatuhan dan mendukung pengumpulan pajak

2. **Pendekatan dengan pihak swasta untuk meningkatkan penerimaan Bea Masuk**, seperti yang telah dilakukan oleh Kanwil DJBC khusus Provinsi Kepri yang telah melakukan pendekatan kepada PT Medco Energy untuk menggali Bea Masuk dari Impor BBM, agar terus diusahakan dalam **menggali potensi penerimaan perdagangan internasional**.
3. Dalam rangka optimalisasi penerimaan cukai khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT), Kanwil DJBC Khusus Kepri dan KPU BC Batam agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk **melaksanakan inspeksi dalam upaya pemberantasan maraknya peredaran rokok ilegal** tanpa cukai di wilayah Kepri yang sangat berpengaruh menyebabkan penurunan pendapatan dari CHT.
4. KPKNL Batam agar meningkatkan penerimaan PNBP melalui pengelolaan aset, **dengan melakukan identifikasi idle asset BMN**, serta menjaga koordinasi dengan BP Batam yang mengelola aset dalam jumlah besar di Kepri.

2.1.2 Analisis Realisasi Belanja APBN

**Realisasi Belanja Negara** sebesar Rp11.871,84 miliar (64,49 persen dari Pagu) dengan rincian sebagaimana tersaji dalam Grafik 2.6.

Grafik 2.6 – Pagu dan Realisasi Belanja Negara Triwulan III, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)

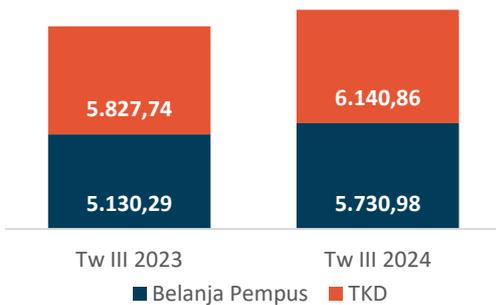


Sumber: Dit APK 2024 (diolah)

Persentase realisasi Belanja Negara pada triwulan III 2024 sebesar 64,20 persen mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan III tahun sebelumnya sebesar 57,08 persen. Hal ini menyebabkan terjadinya *growth* sebesar 1,61 persen (*yoy*), menunjukkan kinerja belanja K/L yang positif hingga triwulan III 2024.

Apabila dirinci lebih lanjut sesuai dengan Grafik 2.7, Belanja Pemerintah Pusat direalisasikan sebesar Rp5.730,98 miliar (55,51 persen dari Pagu) atau meningkat 4,31 persen (*yoy*). Sedangkan Belanja TKD direalisasikan sebesar Rp6.140,86 miliar (75,96 persen dari Pagu) atau meningkat 5,37 persen (*yoy*).

Grafik 2.7 – Realisasi Belanja Triwulan III, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Dit APK 2024 (diolah)

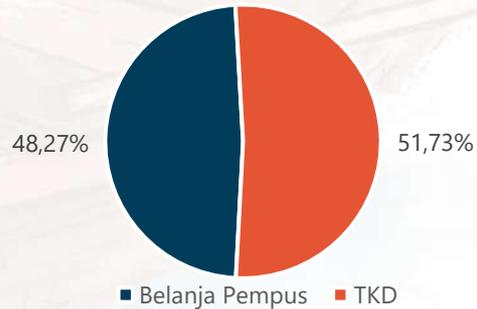
Sebagaimana tersaji pada Grafik 2.8, komposisi realisasi belanja APBN di dominasi oleh Belanja TKD sebesar 51,73 persen, sedangkan Belanja Pemerintah Pusat sebesar 47,27 persen. Hal ini membuktikan peran TKD yang lebih dominan pada komponen belanja di Kepri.

2.1.2.1 Analisis Belanja Pemerintah Pusat

Tingginya *growth* BPP sampai dengan triwulan III 2024 didorong oleh pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, pembayaran gaji dan THR. Selain itu peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang semakin baik juga mendorong realisasi anggaran belanja di awal tahun 2024.

2.1.2.1.1 Analisis Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Berdasarkan Jenis Belanja

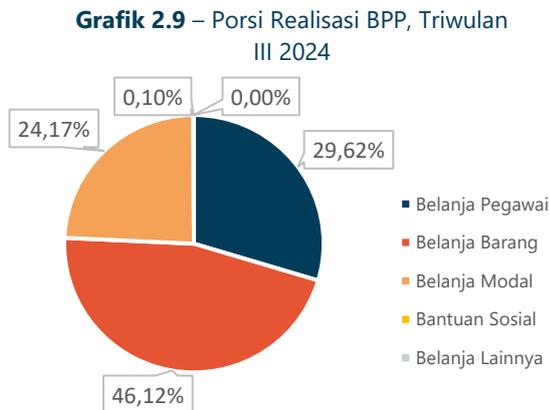
Grafik 2.8 – Perbandingan Realisasi BPP dan TKD, Triwulan III 2024



Sumber: Dit APK 2024 (diolah)

**Berdasarkan jenisnya, realisasi BPP secara berturut-turut** yaitu Belanja Barang Rp2.642,85 miliar (45,00 persen dari total realisasi); Belanja Pegawai Rp1.697,37 miliar (34,38 persen dari total realisasi); Belanja Modal Rp1.385,20 miliar (20,53 persen dari total realisasi); Belanja Bansos Rp5,56 miliar (0,09 persen dari total realisasi); dan Belanja Lainnya belum terdapat realisasi s.d. triwulan III 2024

yang secara lebih rinci dapat dilihat pada Grafik 2.9 berikut.



Sumber: Dit APK 2024 (diolah)

Hampir seluruh jenis BPP mengalami pertumbuhan (*yoy*) dengan rincian sebagai berikut.

- Pertumbuhan Belanja Pegawai (12,51 persen) dan Belanja Bansos (89,68 persen) didorong oleh pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, serta perayaan HBKN yang mendorong pembayaran gaji dan THR; dan

- Pertumbuhan Belanja Modal (38,44 persen) di dorong oleh percepatan pelaksanaan kegiatan terkait Belanja Modal yang sudah mulai dilaksanakan kontrak pada awal tahun 2024.

**Current Issue**

Di lingkup Kanwil DJPb Kepri, terdapat 71 satker pada 17 K/L yang menjalankan fungsi Ekonomi. Satker yang memiliki serapan rendah pada fungsi ekonomi adalah satker **Distrik Navigasi Tanjung Pinang**. Serapan rendah ini disebabkan oleh belum terselesainya proyek pembangunan Menara Suar Karang Singa dalam satu tahun anggaran karena terdapat kendala teknis pada pelaksanaan kontrak berupa *design* yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, terdapat kendala sedimentasi pada lokasi pembangunan yang telah ditetapkan di awal.

Oleh karena itu, lokasi pekerjaan harus diubah sehingga memerlukan tambahan waktu pekerjaan menjadi *multi years* dan tambahan anggaran untuk mengatasi permasalahan teknis yang ada.

**2.1.2.1.2 Analisis Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi**

**Tabel 2.12 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah per Fungsi, Triwulan III 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)**

Fungsi	2023			2024			Growth
	Pagu	Realisasi S.d. Tw II	%Real	Pagu	Realisasi S.d. Tw III	%Real	
Agama	90,31	68,94	76,34%	97,05	81,51	<b>83,99%</b>	18,23%
Ekonomi	4.798,68	1.879,39	39,16%	4.797,65	2.348,24	48,95%	24,95%
Kesehatan	221,07	134,50	60,84%	216,69	138,92	64,11%	3,28%
Ketertiban dan Keamanan	1.282,89	922,94	71,94%	1.341,85	1.020,19	76,03%	10,54%
Pariwisata	1,09	0,93	86,09%	1,54	0,90	58,81%	-3,35%
Pelayanan Umum	8.873,27	6.380,91	71,91%	9.497,71	<b>6.886,49</b>	72,51%	7,92%
Pendidikan	645,74	356,05	55,14%	909,89	466,37	51,26%	<b>30,98%</b>
Perlindungan Lingkungan Hidup	97,46	65,27	66,97%	101,20	71,10	70,26%	8,93%
Pertahanan	1.548,16	978,86	63,23%	1.223,73	902,22	73,73%	-7,83%
Perumahan dan Fasilitas Umum	286,55	189,18	66,02%	223,15	98,47	44,12%	-47,95%

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Belanja pemerintah terbagi ke dalam 10 fungsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.12. Berdasarkan jumlah Pagu maupun realisasi, terlihat bahwa Belanja Pemerintah didominasi oleh fungsi **Pelayanan Umum** dengan Pagu

Rp9.497,1 miliar dan realisasi Rp6.886,49 miliar. Belanja dengan pagu dan realisasi paling rendah ada pada fungsi Pariwisata dengan Pagu sebesar Rp1,54 miliar dan realisasi sebesar Rp0,90 miliar.

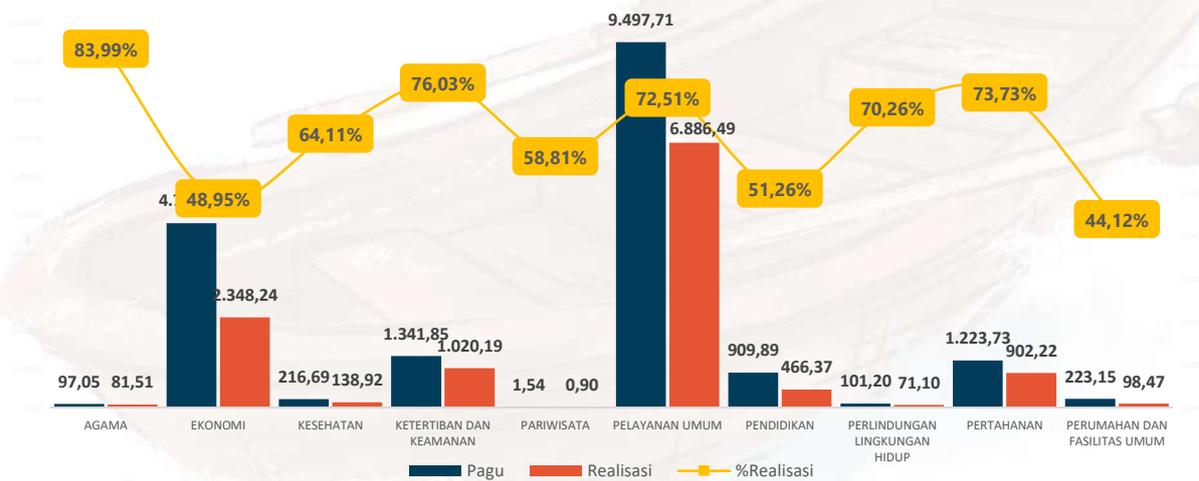
Belanja dengan persentase realisasi tertinggi ada pada fungsi **Agama**, yaitu 83,99 persen. Adapun persentase realisasi terendah ada pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 44,12 persen. Rendahnya realisasi pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum disebabkan satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau yang hanya merealisasikan 30,72 persen dari Pagu.

Dari sisi pertumbuhan, fungsi dengan pertumbuhan tertinggi yaitu fungsi **Pendidikan** sebesar 30,98 persen (yoy). Hal ini didorong oleh realisasi pada Kementerian Agama dan Kemendikbud Ristek untuk peningkatan layanan manajemen internal, pendidikan tinggi, serta

sarana prasarana pendidikan. Fungsi dengan persentase pertumbuhan terendah ada pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar minus 47,95 persen (yoy) sebagai dampak turunnya Pagu 2024 dibandingkan dengan 2023.

Berdasarkan Grafik 2.10 dibawah terlihat bahwa sebaran persentase Belanja per fungsi masih belum merata, dengan persentase tertinggi ada pada fungsi Agama (83,99 persen). Persentase realisasi Belanja fungsi Agama yang tinggi ini didominasi oleh **Belanja untuk layanan internal**, seperti Belanja kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN dan kegiatan Pembinaan Administrasi Umum.

Grafik 2.10 – Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Realisasi Belanja tertinggi ada pada fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp6.886,49 miliar. Realisasi ini didominasi oleh belanja dengan output Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya yang ada pada BPKPB Batam dengan realisasi Rp127,99 miliar, kemudian disusul belanja output Operasi Bidang Keamanan yang ada pada PSO BC Tanjung Balai Karimun sebesar Rp77,55 miliar, dan belanja output Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum oleh KPU Kota Batam sebesar Rp64,21 miliar.

Berdasarkan analisis pada realisasi belanja infrastruktur, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada satker lingkup Kanwil DJPb Kepri, yaitu kesulitan mobilisasi orang dan barang untuk pekerjaan fisik sebagai dampak cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi pada kegiatan pengadaan infrastruktur/proyek fisik lain yang dilaksanakan pada pulau terluar, sebagaimana terjadi pada satker Pelaksanaan Praskim, Penyediaan Perumahan, Disnav Tanjung Pinang, Pelaksanaan Jalan Nasional, dan SNVT PJSA.



2.1.2.1.3 Analisis Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Tabel 2.13 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah 10 K/L Realisasi Terbesar, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)

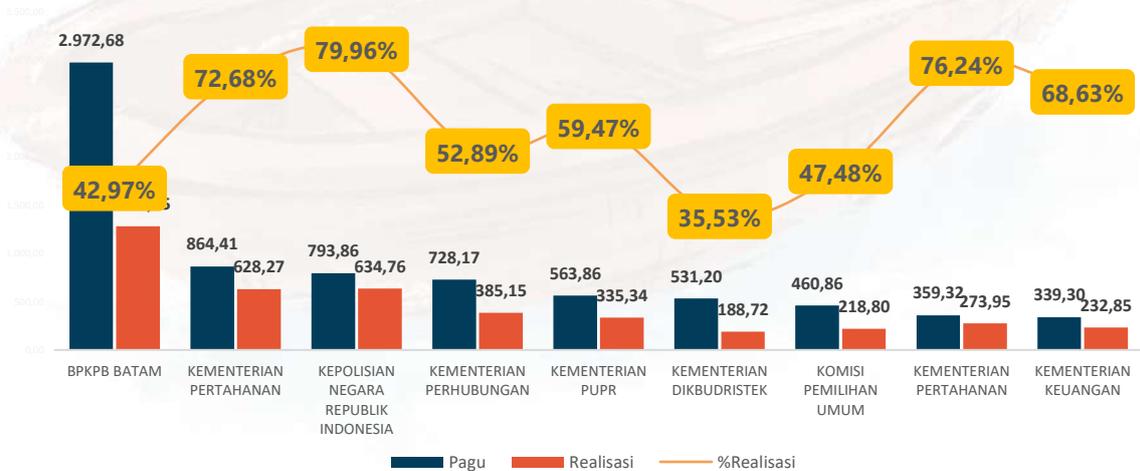
Kementerian/Lembaga	2023			2024			Growth
	Pagu	Realisasi S.d. Tw II	%Real	Pagu	Realisasi S.d. Tw II	%Real	
BPKPB Batam	2.639,12	948,25	35,93%	2.972,68	<b>1.277,45</b>	42,97%	34,72%
Kementerian Pertahanan	1.102,11	662,51	60,11%	864,41	628,27	72,68%	-5,17%
Kepolisian Negara Republik Indonesia	786,47	593,78	75,50%	793,86	634,76	<b>79,96%</b>	6,90%
Kementerian Perhubungan	503,05	323,26	64,26%	728,17	385,15	52,89%	19,15%
Kementerian PUPR	307,31	202,91	66,03%	563,86	335,34	59,47%	65,27%
Kementerian Dikbudristek	327,50	156,27	47,72%	531,20	188,72	35,53%	20,76%
Komisi Pemilihan Umum	141,81	97,95	69,07%	460,86	218,80	47,48%	<b>123,39%</b>
Kementerian Pertahanan	446,05	316,35	70,92%	359,32	273,95	76,24%	-13,40%
Kementerian Keuangan	293,18	182,50	62,25%	339,30	232,85	68,63%	27,59%
Kementerian Hukum Dan HAM RI	206,31	139,87	67,80%	263,32	171,94	65,30%	22,93%

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Berdasarkan 10 K/L dengan pagu Belanja terbesar di Kepri, **realisasi Belanja tertinggi** terdapat pada satker BPKPB Batam, sebesar Rp1.277,45 miliar. Sedangkan K/L dengan persentase realisasi Belanja tertinggi ada

pada Kepolisian Negara RI sebesar 79,96 persen. Lebih lanjut, pertumbuhan realisasi Belanja tertinggi ada pada satker Komisi Pemilihan Umum sebesar 123,39 persen (yoy) sebagai dampak Pemilu di tahun 2024.

Grafik 2.11 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah 10 K/L Realisasi Terbesar, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Jika dilihat pada Grafik 2.11, sebaran persentase realisasi Belanja antar-K/L masih

belum tersebar merata. K/L dengan persentase realisasi Belanja tertinggi yaitu

Kepolisian Negara RI (79,96 persen dari Pagu), disusul oleh Kementerian Pertahanan (76,24 persen dari Pagu), dan Kementerian Pertahanan (72,68 persen dari Pagu). Belanja pada Kepolisian Negara RI didominasi oleh Belanja pada kegiatan Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri.

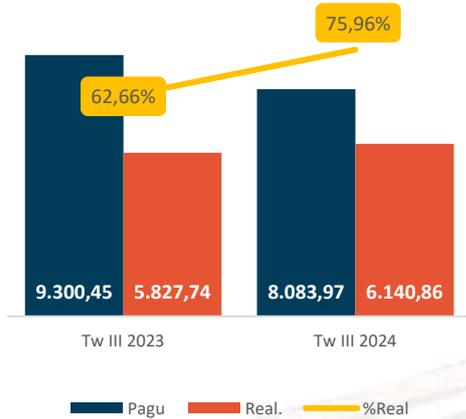
Realisasi Belanja tertinggi ada pada satker BPKPB Batam sebesar Rp1.277,45 miliar, kemudian disusul oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp628,27 miliar, dan Kepolisian RI sebesar Rp634,76 miliar.



2.1.2.2 Analisis Belanja Transfer ke Daerah (TKD)

Belanja TKD sampai dengan triwulan III 2024 telah terealisasi sebesar Rp6.140,86 miliar atau 75,96 persen dari Pagu sebesar Rp8.083,97 miliar. Realisasi ini meningkat 5,37 persen (yoy) sebagaimana tersaji pada Grafik 2.12.

Grafik 2.12 – Pagu dan Realisasi Belanja TKD Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Lebih lanjut, belanja TKD dapat dirinci menurut pemerintah daerah penerima TKD dan menurut jenis TKD.

2.1.2.2.1 Analisis Belanja TKD per Pemerintah Daerah

Menurut data GFS Kanwil DJPb Kepri yang diambil dari SIKRI, realisasi TKD per pemda sebesar total Rp6.234,57 miliar dengan rincian seperti yang tampak pada Grafik 2.13.

Grafik 2.13 – Realisasi Belanja TKD per Pemda, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)



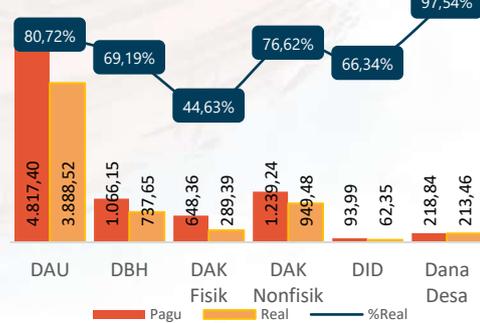
Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Realisasi TKD tertinggi terdapat pada Kota Batam (Rp1.480,47 miliar), kemudian diikuti oleh Pemprov Kepri (Rp758,51 miliar) pada peringkat kedua dan Kabupaten Karimun (Rp726,11 miliar) pada peringkat ketiga. Sedangkan realisasi terendah pada Kabupaten Kepulauan Anambas (Rp593,96 miliar).

2.1.2.2.2 Analisis Belanja TKD per Jenis TKD

Belanja TKD terbagi menjadi empat komponen, yaitu Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal, dan Dana Desa. TKD dengan persentase penyaluran tertinggi adalah Dana Desa sebesar Rp213,46 miliar (97,54 persen dari Pagu) didorong oleh perubahan mekanisme Dana Desa yang sebelumnya disalurkan 3 tahap pada tahun 2023, menjadi 2 tahap pada tahun 2024. Secara rinci Pagu, realisasi, dan persentase realisasi TKD per jenisnya terdapat pada Grafik 2.14.

Grafik 2.14 – Pagu dan Realisasi Belanja TKD per Jenis TKD, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Dit APK, 2024 (diolah)

TKD dengan persentase realisasi terendah pada salah satu komponen DTK, yaitu DAK Fisik sebesar 44,63 persen disebabkan realisasi yang baru dimulai pada triwulan II sebagai akibat dari juknis teknis dari K/L teknis dan juknis keuangan berupa Peraturan Menteri Keuangan tentang DAK Fisik yang baru diterbitkan pada bulan Mei 2024 serta penyaluran tahap III yang baru di mulai pada triwulan IV.

### 2.1.2.3 Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah Terhadap PDRB

Kontribusi Belanja Negara terhadap PDRB mengalami peningkatan. Pada triwulan III 2024, kontribusi Belanja Negara sebesar 4,29 persen, turun dibandingkan tahun 2023 yang memiliki kontribusi sebesar 4,49 persen. Penurunan kontribusi Belanja Negara pada PDRB disebabkan oleh peningkatan PDRB yang pesat dibandingkan peningkatan Belanja Negara. Belanja Negara tumbuh 1,61 persen (*yoy*), sedangkan PDRB (nominal) mengalami peningkatan 6,28 persen (*yoy*).

Pemerintah memberikan peran dalam roda perekonomian di Kepri sebesar 4,29 persen (Tabel 2.14).

**Tabel 2.14** – Kontribusi Belanja Pemerintah Triwulan III, 2023-2024 terhadap PDRB (dalam Miliar Rupiah)

Periode	Belanja Negara	PDRB	% Kntnb	Growth Belanja	Growth PDRB
S.d. Tw III 2023	10.958,03	243.921,84	4,49%		
S.d. Tw III 2024	11.134,18	259.241,37	4,29%	1,61%	6,28%

Sumber: Dit. APK dan BPS Kepri, 2024 (diolah)

Kontribusi belanja pemerintah pada PDRB pada triwulan III 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan triwulan III 2023. Percepatan realisasi belanja pemerintah harus menjadi perhatian dikarenakan pemerintah tidak hanya memiliki peran untuk memberikan layanan kepada masyarakat, namun juga membantu roda perekonomian melalui peran fiskal yang cukup besar.

### 2.1.2.4 Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah per Kapita

**Tabel 2.15** – Kontribusi Belanja Pemerintah per Kapita Triwulan III, 2023 – 2024 (dalam

Jumlah Kumulatif	TW II 2023	TW II 2024	Growth
PDRB (Rp juta)	243.921.840,00	259.241.370,00	6,28%
Belanja Negara (Rp juta)	10.958.030,00	11.134.180,00	1,61%
Penduduk (jiwa)	2.152.630	2.168.775	0,75%
<b>PDRB per Kapita (Rp juta/jiwa)</b>	113,31	119,53	5,49%
<b>Belanja Per Kapita (Rp juta/jiwa)</b>	<b>5,09</b>	<b>5,13</b>	<b>0,85%</b>

Sumber: Dit APK, GFS Kanwil DJPb Kepri, dan BPS, 2024 (diolah)

**Secara kumulatif, PDRB per Kapita di Kepri** sampai dengan triwulan III 2024 sebesar Rp119,53 juta, meningkat 5,49 persen (*yoy*).

**Belanja per kapita di Kepri triwulan III tahun 2024 sebesar Rp5,13 juta.** Belanja per kapita menunjukkan besarnya Belanja Negara di Kepri yang dikeluarkan untuk membiayai setiap penduduk yang ada di Kepri, jadi secara rata-rata Belanja Negara di Kepri dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp5,13 juta untuk setiap penduduk.

Belanja per kapita meningkat sebesar 0,85 persen (*yoy*), menunjukkan pertumbuhan realisasi Belanja dibandingkan dengan

pertumbuhan penduduk di Kepri. Semakin tinggi nilai belanja per kapita, menunjukkan semakin besarnya *support* yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Belanja ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan kesejahteraan yang lebih besar kepada masyarakat. Dengan semakin tingginya Belanja Negara yang didistribusikan kepada penduduk yang lebih sedikit, secara rata-rata *outcome* yang mungkin dirasakan masyarakat akan semakin besar.

### 2.1.2.5 Analisis Capaian Output Sektoral dan/atau Program Strategis Pemerintah

Terdapat tujuh program strategis pemerintah dalam bentuk belanja program Prioritas Nasional (PN) yaitu: i) PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; ii) PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; iii) PN 3: Meningkatkan Sumber

Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; iv) PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; v) PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; vi) PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan vii) PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Ketujuh PN ini tersaji secara rinci pada tabel 2.16 berikut.

**Tabel 2.16** – Capaian Output pada Belanja Sektoral/Program Strategis, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Program Prioritas Nasional	Kinerja Anggaran			Capaian Output		
	Pagu	Realisasi	%Real	Volume	Real Fisik	%Capaian
<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>	<b>51,56</b>	<b>23,25</b>	<b>45,10%</b>	<b>599.204</b>	<b>575.978,8</b>	<b>96,12%</b>
Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	11,75	6,90	58,73%	2	0	0,00%
Sertifikasi Produk	5,90	2,05	34,69%	34.491	78.763	228,36%
Data dan Informasi Publik	5,84	2,05	35,07%	54	14,85	27,50%
Program Lainnya	28,07	12,26	43,67%	564.657	497.200,95	88,05%
<b>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>	<b>721,71</b>	<b>317,75</b>	<b>44,03%</b>	<b>77.832</b>	<b>55.097,41</b>	<b>70,79%</b>
Sarana Pengembangan Kawasan	379,91	179,47	47,24%	2	0,91	45,50%
Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	246,06	130,22	52,92%	4	2,55	63,75%
Prasarana Bidang Konektivitas Laut	81,74	2,28	2,79%	2	1,25	62,50%
Program Lainnya	14,00	5,78	41,29%	77.824	55.092,7	70,79%
<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	<b>336,23</b>	<b>187,07</b>	<b>55,64%</b>	<b>126.608</b>	<b>111.719,88</b>	<b>88,24%</b>
Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	73,11	22,23	30,40%	2	1	50,00%
Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	69,47	64,60	92,99%	15	14,96	99,73%
Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	44,49	22,74	51,10%	14.845	11.558	77,86%
Program Lainnya	149,15	77,50	51,96%	111.746	100.145,92	89,62%
<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>	<b>44,42</b>	<b>31,09</b>	<b>70,00%</b>	<b>16.871</b>	<b>14.691,94</b>	<b>87,08%</b>
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	17,52	12,89	73,61%	5.098	5.047,34	99,01%
Pelayanan Publik Lainnya	5,55	4,68	84,33%	2	2	100,00%
Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	4,57	4,11	89,88%	6	0	0,00%
Program Lainnya	16,78	9,41	56,08%	11.765	9.642,6	81,96%
<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	<b>642,18</b>	<b>352,82</b>	<b>54,94%</b>	<b>4.388</b>	<b>2.475,34</b>	<b>56,41%</b>
Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	188,32	126,98	67,43%	22	0	0,00%
Pelayanan Publik Lainnya	96,58	40,83	42,28%	16	7	43,75%
Sarana Bidang Konektivitas Laut	90,00	10,28	11,43%	32	0	0,00%

Tabel 2.16 – Capaian Output pada Belanja Sektor/Program Strategis, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Program Prioritas Nasional	Kinerja Anggaran			Capaian Output		
	Pagu	Realisasi	%Real	Volume	Real Fisik	%Capaian
Program Lainnya	267,27	174,72	65,37%	4.318	2.468,34	57,16%
<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>	<b>15,29</b>	<b>8,79</b>	<b>57,46%</b>	<b>366.604</b>	<b>366.385</b>	<b>99,94%</b>
Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	6,86	4,37	63,77%	210	208	99,05%
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2,63	1,44	54,79%	55	120	218,18%
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1,85	1,46	79,05%	366.000	366.000	100,00%
Program Lainnya	3,95	1,51	38,20%	339	57	16,81%
<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>	<b>471,37</b>	<b>353,37</b>	<b>74,97%</b>	<b>10.355</b>	<b>9.239</b>	<b>89,22%</b>
Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	163,86	156,18	95,31%	145	57	39,31%
OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	113,36	73,28	64,64%	54	17	31,48%
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	88,02	60,84	69,12%	342	304	88,89%
Program Lainnya	106,12	63,07	59,44%	9.814	8.861	90,29%
<b>Total</b>	<b>2.282,76</b>	<b>1.274,15</b>	<b>55,82%</b>	<b>1.201,86</b>	<b>1.135,59</b>	<b>94,49%</b>

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

#### 2.1.2.5.1 Kinerja Anggaran

Belanja Prioritas Nasional (PN) dengan Pagu tertinggi terdapat pada PN **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**, dengan Pagu sebesar Rp721,71 miliar. Meskipun demikian, sampai dengan triwulan III realisasi anggaran yang tercapai masih Rp317,75 miliar (44,03 persen dari Pagu).

Dari sisi realisasi, PN dengan nominal dan persentase realisasi tertinggi terdapat pada **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik** sebesar Rp353,37 miliar atau 74,97 persen dari Pagu Rp471,37 miliar.

#### 2.1.2.5.2 Capaian Output

Volume capaian output tertinggi ada pada PN **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan** dengan jumlah 599.204 *output* dengan capaian 575.978,8 *output* atau 96,12 persen dari volume.

Persentase capaian output tertinggi terdapat pada PN **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim** sebesar 9,94 persen atau sebanyak 366.385 *output* dari volume sebanyak 366.604 *output*.

#### 2.1.2.5.3 Analisis Kinerja Anggaran dan Capaian Output

Dari ketujuh belanja PN yang ada, secara ringkas perbandingan kinerja anggaran dan capaian output disajikan pada Tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17 – Kinerja Anggaran dan Capaian Output pada Belanja PN, Triwulan III 2024

Kode PN	Kinerja Anggaran	Capaian Output
PN 1	45,10%	96,12%
PN 2	44,03%	70,79%
PN 3	55,64%	88,24%
PN 4	70,00%	87,08%
PN 5	54,94%	56,41%
PN 6	57,46%	99,94%
PN 7	74,97%	89,22%

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sampai dengan triwulan III, **belum ada satu pun PN yang merealisasikan anggaran di atas 75 persen**. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama khususnya dari sisi perencanaan dan penganggaran bulanan maupun triwulanan agar tidak terjadi penumpukan di akhir triwulan maupun kegagalan penyerapan anggaran.

Dari sisi capaian output, terdapat 5 dari 7 PN yang telah memiliki realisasi capaian output di atas 75 persen. Adapun PN yang belum mencapai 75 persen adalah PN 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dan PN 5 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar).

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kedua PN ini adalah belanja modal yang memiliki tantangan tersendiri di Kepri yang merupakan wilayah kepulauan dengan infrastruktur konektivitas dan moda angkut bahan baku/bahan bangunan yang lama dan mahal serta terdapat kendala cuaca pada beberapa waktu tertentu. Meskipun demikian, maksimalisasi capaian output masih tetap dapat dilakukan pada triwulan IV.

#### 2.1.2.5.4 Highlight Belanja Prioritas Nasional

Berikut disajikan beberapa *highlight* belanja prioritas nasional di Kepri.

##### 2.1.2.5.4.1 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan merupakan PN yang memiliki Pagu tertinggi (Rp721,71 miliar), meskipun demikian persentase realisasi masih sangat kecil sebesar Rp317,75 miliar (44,03 persen dari Pagu).

Salah satu *major projects* dari PN ini yaitu Sarana Pengembangan Kawasan dengan Pagu sebesar Rp379,91 miliar namun sampai triwulan

III hanya terealisasi sebesar Rp179,47 miliar (47,24 persen dari Pagu).

#### Current Issue

##### Efisiensi dan Efektifitas dalam Belanja Prioritas Nasional (PN) di Kepulauan Riau

Sampai dengan triwulan III 2024, terdapat dua PN yang memiliki selisih (*gap*) cukup jauh antara kinerja anggaran dan capaian *output*-nya. PN 1 memiliki capaian output 96,12 persen namun kinerja anggaran masih 45,10 persen, sedangkan PN 6 memiliki capaian output 96,94 persen namun kinerja anggaran masih 57,46 persen.

Meskipun terkesan efisien karena penggunaan anggaran yang sedikit telah mampu menghasilkan capaian output yang maksimal, hal ini menandakan kualitas perencanaan dan penganggaran yang kurang baik/efektif. Pada akhirnya, anggaran yang tidak terpakai akan menyebabkan *idle* dan adanya *opportunity cost* karena seharusnya anggaran tersebut dapat dipakai untuk hal lain maupun dapat dihemat.

Diharapkan ke depannya diharapkan stakeholders terkait dapat lebih baik dalam merencanakan dan menganggarkan belanja PN.

Rendahnya realisasi disebabkan oleh pembangunan jembatan melalui tahapan persiapan yang panjang, yaitu sejak Mei 2024 baru masuk ke tahap survei penyelidikan tanah, sehingga pelaksanaan pembangunan konstruksi ditargetkan pada 2025. Survei penyelidikan tanah diperkirakan memakan waktu enam bulan. Penyelidikan tanah awalnya akan dilakukan pada 2023. Namun, proses lelang survei itu memakan waktu cukup panjang sehingga survei baru bisa dilakukan Mei 2024.

Untuk tahap persiapan lainnya seperti Pembebasan tanah dan proses sertifikasi lahan yang dibutuhkan sebagai lokasi *landing point* jembatan di Pulau Batam, Tanjung Sauh, Buau, dan Bintan sudah rampung.

#### 2.1.2.5.4.2 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN dengan pagu terbesar kedua, yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Rp642,18 miliar) realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp352,82 miliar (54,94 persen dari Pagu).

PN ini berfokus pada konektivitas darat melalui *major projects* Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) dengan Pagu Rp188,32 miliar dan realisasi Rp126,98 miliar atau 67,43 persen dari Pagu, namun dari sisi capaian output masih nol persen. Hal ini perlu pendalaman lebih lanjut terkait Belanja yang telah direalisasikan namun *output* belum tercapai. Adapun permasalahan yang kerap timbul adalah permasalahan administrasi yaitu satker belum mencatatkan capaian output pada aplikasi.

#### 2.1.2.5.4.3 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PN dengan Pagu terbesar ketiga yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik memiliki Pagu sebesar Rp471,37 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp353,37 miliar (74,97 persen dari Pagu). Persentase realisasi pada PN ini merupakan tinggi dibandingkan PN lainnya, didorong oleh pelaksanaan pemilu 2024 yang terkait langsung dengan penguatan polhukam.

Salah satu fokus pada PN ini adalah Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum yang telah mencapai realisasi anggaran

95,31%. Meskipun demikian, capaian outputnya masih 39,31 persen. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut terkait nasib volume output yang belum tercapai di saat anggaran yang tersisa sudah sangat sedikit, apakah hal ini hanyalah permasalahan administratif (satker belum mencatatkan capaian output) atau ada faktor lain yang perlu diteliti lebih lanjut.

#### 2.1.2.6 Analisis Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2024

**Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat** sampai dengan triwulan III 2024 sebesar Rp4.997,46 miliar, dengan proyeksi triwulan I 2024 sebesar Rp1.031,66 miliar, triwulan II 1.858,86 miliar, dan triwulan III Rp2.106,95 miliar. Atas proyeksi ini, BPP telah terealisasi dengan deviasi positif yaitu sebesar Rp733,52 miliar atau 14,68 persen. Meskipun realisasi Belanja sampai dengan triwulan III 2024 telah menunjukkan kinerja yang positif, realisasi Belanja masih harus terus dikawal sehingga penyerapan, *output* dan *outcome* dapat berjalan dengan optimal.

**Transfer ke Daerah** sampai dengan triwulan III 2024 diproyeksikan sebesar Rp5.638,39 miliar, dengan proyeksi triwulan I 2024 sebesar Rp1.071,01 miliar dan triwulan II 2024 sebesar Rp2.082,96 miliar, dan triwulan III sebesar Rp1.854,42 miliar. Atas proyeksi ini, TKD telah direalisasikan dengan deviasi positif sebesar Rp507,77 miliar atau 27,38 persen.

Hal ini dipengaruhi oleh perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa dari yang di tahun 2023 disalurkan melalui 3 tahap, menjadi 2 tahap di tahun 2024 sesuai Peraturan TKD terbaru.

**Tabel 2.18** – Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Triwulan	Belanja Pemerintah Pusat (BPP)				Transfer ke Daerah (TKD)			
	Prog.	Real.	Dev.	% Dev.	Prog.	Real.	Dev.	% Dev.
Triwulan I	1.031,66	1.506,43	474,78	46,02%	1.701,01	1.953,35	252,34	14,83%
Triwulan II	1.858,86	1.963,23	104,37	5,61%	2.082,96	1.825,32	-257,6	-12,37%
Triwulan III	2.106,95	2.261,32	154,38	7,33%	1.854,42	2.362,18	507,77	27,38%
<b>Total</b>	<b>4.997,46</b>	<b>5.730,98</b>	<b>733,52</b>	<b>14,68%</b>	<b>5.638,39</b>	<b>6.140,86</b>	<b>502,47</b>	<b>8,91%</b>
Triwulan IV	3.558,64	-	-	-	2.307,54	-	-	-

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

### 2.1.2.7 Rekomendasi Kebijakan Belanja Pemerintah

1. Agar Kanwil DJPb Kepri, KPPN Batam, dan KPPN Tanjung Pinang mendorong satker yang belum mencairkan sisa anggaran kontraktual untuk melakukan percepatan realisasi anggaran.
2. Kanwil DJPb Kepri dan KPPN Batam agar mendorong satker BPKP Kepri untuk mencairkan sisa dana kontraktual untuk mempercepat realisasi anggaran.
3. Satker perlu lebih teliti dalam mencantumkan nomer CAN Kontraktual yang sesuai dengan addendum saat SPM pada SAKTI.
4. Kanwil DJPb Kepri dan KPPN agar lebih intensif dalam mendorong satker untuk mematuhi RPD halaman III DIPA. Kemudian satker PPJN agar mempercepat koordinasi bersama PLN Kepri dalam penyelesaian izin pembangunan Jembatan Batam-Bintan.
5. Satker yang memiliki Pagu Belanja Modal agar mempercepat proses pelaksanaan kontrak dan pengerjaan fisik, sehingga tidak menghadapi musim cuaca buruk di Kepri pada akhir tahun anggaran.
6. BPKAD, DPMD dan Inspektorat Daerah agar menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan baik dalam proses penyaluran TKD, khususnya DAK Fisik, baik dalam tahap perencanaan, penyaluran sampai dengan tahap pertanggungjawabannya.

## 2.2. Analisis Laporan Realisasi Anggaran APBD Konsolidasi di Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 2.19 - I-Account APBD Konsolidasi Provinsi Kepulauan Riau

URAIAN	2023			2024			Growth
	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>13.755,70</b>	<b>9.344,65</b>	<b>67,93%</b>	<b>14.524,05</b>	<b>10.124,92</b>	<b>69,71%</b>	<b>8,35%</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.268,11	3.118,67	73,07%	4.810,80	3.327,73	69,17%	6,70%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.757,44	5.702,40	65,11%	8.870,44	6.234,57	70,28%	9,33%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	684,04	505,63	73,92%	739,02	545,35	73,79%	7,86%
Lain-Lain Pendaptan Daerah Yang Sah	46,12	17,96	38,95%	103,79	17,27	16,64%	-3,86%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>14.432,58</b>	<b>8.373,97</b>	<b>58,02%</b>	<b>15.232,97</b>	<b>9.501,43</b>	<b>62,37%</b>	<b>13,46%</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>10.698,79</b>	<b>6.546,27</b>	<b>61,19%</b>	<b>11.719,57</b>	<b>7.693,33</b>	<b>65,65%</b>	<b>17,52%</b>
Belanja Pegawai	5.042,39	3.436,57	68,15%	5.623,84	4.166,87	74,09%	21,25%
Belanja Barang dan Jasa	4.936,86	2.708,57	54,86%	5.114,09	2.868,83	56,10%	5,92%
Belanja Bunga	13,14	6,75	51,39%	4,68	3,44	73,43%	-49,11%
Belanja Subsidi	2,45	1,81	73,90%	4,93	1,99	40,39%	9,98%
Belanja Hibah	690,36	387,94	56,19%	944,96	637,10	67,42%	64,22%
Belanja Bantuan Sosial	13,58	4,62	34,04%	27,07	15,10	55,77%	226,49%
<b>Belanja Modal</b>	<b>2.429,07</b>	<b>969,56</b>	<b>39,91%</b>	<b>2.116,19</b>	<b>832,43</b>	<b>39,34%</b>	<b>-14,14%</b>
Belanja Modal	2.429,07	969,56	39,91%	2.116,19	832,43	39,34%	-14,14%
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>93,05</b>	<b>8,33</b>	<b>8,96%</b>	<b>85,58</b>	<b>3,52</b>	<b>4,12%</b>	<b>-57,71%</b>
Belanja Tak Terduga	93,05	8,33	8,96%	85,58	3,52	4,12%	-57,71%
<b>Belanja Transfer</b>	<b>1.211,66</b>	<b>849,80</b>	<b>70,14%</b>	<b>1.311,64</b>	<b>972,14</b>	<b>74,12%</b>	<b>14,40%</b>
Belanja Bagi Hasil	679,43	523,64	77,07%	776,95	560,80	72,18%	7,10%
Belanja Bantuan Keuangan	532,23	326,16	61,28%	534,68	411,34	76,93%	26,12%
<b>SURPLUS/DESIFIT</b>	<b>-676,87</b>	<b>970,68</b>	<b>-143,41%</b>	<b>-708,93</b>	<b>623,49</b>	<b>-87,95%</b>	<b>-35,77%</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>676,87</b>	<b>502,79</b>	<b>74,28%</b>	<b>708,93</b>	<b>338,66</b>	<b>47,77%</b>	<b>-32,64%</b>
Penerimaan Pembiayaan	763,21	548,38	71,85%	804,48	407,62	50,67%	-25,67%
Pengeluaran Pembiayaan	86,34	45,59	52,80%	95,55	68,96	72,17%	51,27%
<b>SILPA/SIKPA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,47</b>		<b>0,00</b>	<b>962,15</b>		<b>-34,70%</b>

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Sampai dengan triwulan III 2024, realisasi APBD menunjukkan terdapat SiLPA Rp962,15 miliar. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp10.124,92 miliar (69,71 persen dari Target). Realisasi Pendapatan ini mengalami pertumbuhan sebesar 8,35 persen (yoy).

Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp9.501,43 miliar (62,37 persen dari Pagu). Realisasi ini meningkat 13,46 persen (yoy).

Realisasi Belanja yang lebih tinggi daripada Pendapatan mengakibatkan APBD mengalami Surplus sebesar Rp623,49 miliar dengan rincian sebagaimana tertera pada Tabel 2.19.

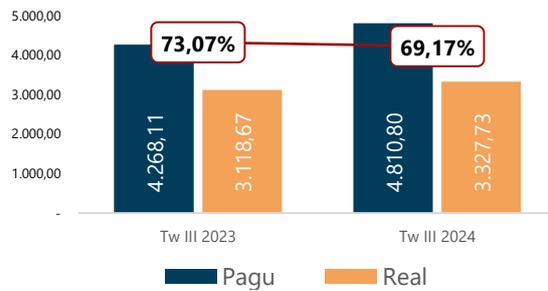
**2.2.1 Analisis Realisasi dan Growth Pendapatan Daerah**

Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp10.124,92 miliar (69,71 persen dari Target) dan mengalami pertumbuhan sebesar 8,35 persen.

penopang utama keuangan daerah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

**2.2.1.1 Analisis Pendapatan Asli Daerah**

**Grafik 2.15 – Pagu dan Realisasi PAD Triwulan III, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)**



Sumber: SIKRI, 2024 (diolah)

**Realisasi PAD** sebesar Rp3.327,73 miliar (69,17 persen dari Target). PAD terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Pendapatan Transfer masih mendominasi Realisasi Pendapatan Daerah di Kepri yaitu sebesar Rp6.234,57 miliar (70,28 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah) dibandingkan realisasi PAD sebesar Rp3.327,73 miliar (69,17 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengandalkan PAD sebagai

**PAD tumbuh sebesar 6,70 persen (yoy)** ditopang oleh Pajak Daerah sebesar Rp2.745,02 miliar yang tumbuh sebesar 5,62 persen. Pendapatan Retribusi Daerah Rp256,96 miliar tumbuh tertinggi 106,57 persen (yoy). Kontraksi terjadi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 21,48 persen (yoy) dan Lain-Lain PAD Yang Sah 17,20 persen (yoy).

**Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD yaitu Rp2.745,02 miliar** (82,49 persen dari total PAD). Kemudian, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar berturut-turut adalah Lain-lain PAD yang Sah (8,94 persen), Retribusi Daerah (7,72 persen), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (0,85 persen).

Sebagaimana terlihat pada Grafik 2.15 bahwa Pajak Daerah tertinggi di pemda Provinsi Kepri yaitu sebesar Rp1.269,57 miliar, kemudian diikuti Kota Batam sebesar Rp1.037,52 miliar, dan Kab. Karimun sebesar Rp198,95 miliar.

Retribusi Daerah dengan realisasi tertinggi terdapat di Kota Batam sebesar Rp127,00 miliar kemudian disusul oleh Kab. Karimun sebesar Rp64,40 miliar, dan Kota Tanjungpinang sebesar Rp45,59 miliar. Tingginya realisasi retribusi daerah di Kota Batam salah satunya didorong oleh penerimaan dari Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp30,52 miliar. Kota Batam sebagai daerah industri dan investasi asing memiliki tenaga kerja asing yang relatif banyak.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan tertinggi ada pada Kota Batam Rp7,94 miliar kemudian disusul oleh Kab. Bintan 7,89 miliar, dan Kab. Natuna Rp5,39 miliar.

Realisasi LLPADyS tertinggi ada pada Kota Batam Rp130,82 miliar kemudian diikuti oleh Provinsi Kepri Rp101,01 miliar, dan Kab. Natuna Rp26,60 miliar

### A. Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp2.745,02 miliar atau 74,16 persen dari Target. Pajak Daerah dengan realisasi terbesar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Rp426,27 miliar dengan kontribusi 15,53 persen terhadap total Pajak Daerah. Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi penumbang realisasi terbesar kedua yaitu Rp377,50 miliar dengan kontribusi 14,39 persen dari total Pajak Daerah, diikuti Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp366,57 miliar (13,35 persen dari total Pajak Daerah) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp364,87 miliar (13,29 persen dari total Pajak Daerah). Pajak Sarang Burung Walet menjadi pajak dengan kontribusi realisasi penyumbang Pajak Daerah terendah, dengan realisasi sebesar Rp0,08 miliar atau kurang dari 0,01 persen dari total Pajak Daerah.

Pajak Daerah tumbuh sebesar 5,62 persen (*yoy*) didorong oleh realisasi Pajak Hiburan yang tumbuh 16,81 persen (*yoy*), BBNKB 15,21 persen (*yoy*), PKB 14,92 persen (*yoy*), dan BPHTB 11,18 persen (*yoy*). Komponen Pajak Daerah yang mengalami kontraksi diantaranya, yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 12,43 persen (*yoy*), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 7,29 persen (*yoy*), dan Pajak Hotel 2,99 persen (*yoy*).

Kinerja pertumbuhan Pajak Daerah yang sangat signifikan merupakan bukti suksesnya penerapan perkara turunan baru terkait Pajak Daerah di masing-masing kabupaten/kota. Penerapan Perkada ini sebagaimana amanat UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD untuk menyelaraskan, memperkuat, dan mempermudah pengelolaan pajak daerah. Sehingga memperkuat *local taxing power* pemerintah daerah.

### B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dapat direalisasikan Rp256,96 miliar dengan pertumbuhan minus 7,72 persen (*yoy*). Retribusi Daerah dengan realisasi terbesar pertama adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu sebesar Rp113,17 miliar dengan kontribusi 44,04 persen dari total Retribusi Daerah. Kemudian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi penyumbang realisasi terbesar kedua Rp47,22 miliar dengan *share* 18,38 persen dari total Retribusi Daerah. Penyumbang retribusi terbesar ketiga yaitu Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp39,58 miliar dengan kontribusi 15,40 persen dari total Retribusi Daerah. Tingginya realisasi

IMTA di Kepri mengindikasikan banyaknya tenaga kerja asing (TKA), sehingga diperlukan peran pemerintah dalam pengendalian TKA.

Komponen Retribusi Daerah dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan yang meningkat 1370,94 persen (yoy) dipengaruhi oleh semakin optimalnya layanan dan penerimaan layanan kesehatan di Kepri yang sebagian besar sudah berstatus BLUD. Kemudian Retribusi IMTA yang meningkat tinggi 38,12 persen menunjukkan peran pemerintah daerah dalam pengendalian TKA melalui optimalisasi Retribusi IMTA. Kota Batam adalah kontributor terbesar bagi Retribusi IMTA karena Batam merupakan wilayah yang dikhususkan sebagai wilayah industri dan investor asing.

### C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp28,16 miliar (42,31 persen dari Target). Realisasi tersebut seluruhnya berasal dari Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Realisasi tersebut berkontraksi cukup tinggi 21,48 persen (yoy) dipengaruhi oleh rendahnya penerimaan dividen dari BUMD lingkup Kepri pada tahun ini.

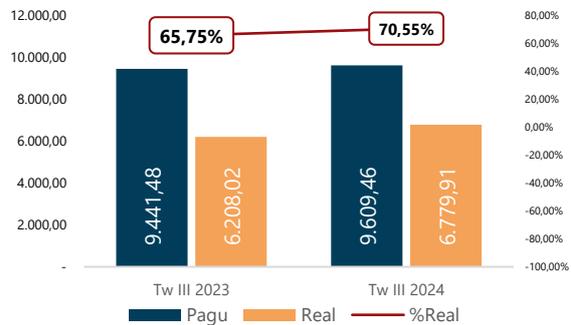
### D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) sebesar Rp297,59 miliar (43,37 persen dari Target). Realisasi LLPAD didominasi oleh Pendapatan BLUD dengan realisasi sebesar Rp228,58 miliar (76,81 persen dari total realisasi LLPAD). Komponen LLPAD yang menjadi penyumbang terbesar kedua yaitu Pendapatan Denda Pajak dengan kontribusi 6,44 persen dari total realisasi LLPAD.

Pendapatan LLPAD s.d. triwulan III tahun 2024 mengalami kontraksi cukup tinggi sebesar 17,20 persen (yoy). Kontraksi yang signifikan terdapat pada Pendapatans BLUD 22,52 persen (yoy) dipengaruhi oleh pelaporan penerimaan BLUD yang tidak segera dilakukan.

## 2.2.1.2 Analisis Pendapatan Transfer

Grafik 2.17 – Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

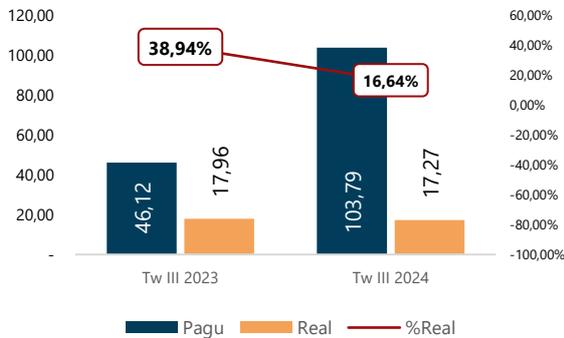
Realisasi Pendapatan Transfer di Kepri triwulan III 2024 sebesar Rp6.779,91 miliar (70,55 persen dari Target). Realisasi terbesar terdapat pada DAU Rp3.767,48 miliar dengan kontribusi 55,57 persen dari total realisasi Pendapatan Transfer. DAK menempati posisi kedua dengan realisasi sebesar Rp1.165,39 miliar atau 17,19 persen total realisasi Pendapatan Transfer. Kemudian realisasi DBH Rp1.009,54 miliar atau 14,89 persen dari total realisasi Pendapatan Transfer.

Realisasi pendapatan transfer antar daerah Rp505,63 miliar (73,79 persen dari Pagu). Realisasi ini mengalami pertumbuhan 7,86 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemprov Kepri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Realisasi Pendapatan Transfer tumbuh 9,21 persen (yoy) didorong oleh realisasi DAU yang tumbuh signifikan 12,25 persen (yoy). Tingginya pertumbuhan tersebut dipengaruhi *extra effort* percepatan realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah daerah dan KPPN lingkup Provinsi Kepri.

2.2.1.3 Analisis Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Grafik 2.18 – Pagu dan Realisasi LLPDyS Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Sampai dengan triwulan II 2024, Pendapatan Lainnya telah terealisasi sebesar Rp17,27 miliar (16,64 persen dari Target) yang terkontraksi 65,77 persen (yoy). Realisasi ini didominasi oleh Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp16,34 miliar (94,61 persen dari total Pendapatan Lainnya).

2.2.1.4 Analisis Perkembangan Tax Ratio

Tabel 2.20 – Perkembangan Local Tax Ratio Kepri

Uraian	Tw III 2023	Tw III 2024	Growth
Pendapatan PDRD	2.723,40	3.001,99	10,23%
PDRB	243.921,84	259.241,37	6,28%
<b>Tax Ratio</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,16%</b>	

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap PDRB pada triwulan III 2024 sebesar 1,16 persen. Rasio tersebut menunjukkan peningkatan 0,04 persen poin apabila dibandingkan dengan triwulan III 2023

yang sebesar 1,12 persen. Peningkatan rasio ini disebabkan pendapatan PDRD yang tumbuh signifikan 10,23 persen (yoy).

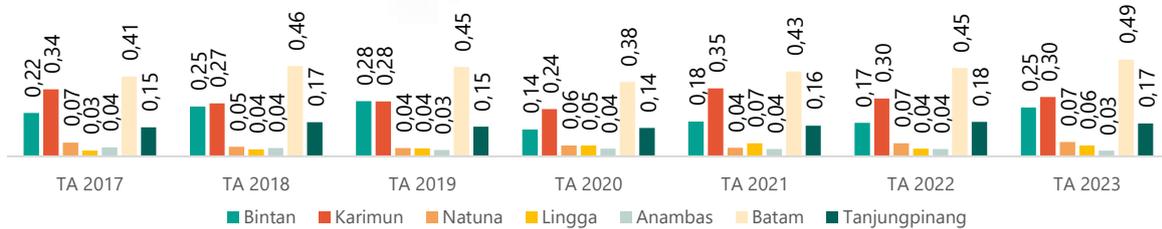
Pertumbuhan PDRD tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan pertumbuhan PDRB yang sebesar 6,28 persen (yoy). Penerapan UU HKPD memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan PDRD sejak mulai berlakukannya Perda Kepala Daerah tentang tarif PDRD sejak awal tahun 2024.

2.2.1.5 Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Otonomi daerah adalah pemberian kemandirian kepada pemerintah daerah, berupa wewenang mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara mandiri melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah. Peningkatan kemampuan fiskal daerah menjadi syarat utama untuk mendukung otonomi tersebut. Oleh karena itu diberikan perluasan desentralisasi fiskal untuk memperkuat kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Grafik 2.19 - Indeks Kemandirian Fiskal I Tahunan, 2017 - 2023



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Meskipun kewenangan dan perluasan desentralisasi fiskal telah diberikan kepada pemerintah daerah, mayoritas pemerintah daerah di Kepri masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat.

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai layanan publik secara mandiri belum sepenuhnya tercapai. Tak terkecuali pada Kepri, mayoritas Belanja Negara masih dibiayai oleh Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang akan dibagi ke dalam beberapa kluster sebagaimana Tabel 2.21.

$$[IKF I = PAD/Total\ Pendapatan]$$

$$[IKF II = (PAD+DBH)/Total\ Pendapatan]$$

IKF dihitung dengan membandingkan antara PAD dengan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sumber lain, seperti transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman.

Selain itu, terdapat cara lain untuk menghitung kemandirian daerah yaitu dengan memperhitungkan seluruh pendapatan yang dihasilkan dari suatu daerah, termasuk DBH.

Berikut tingkat kemandirian daerah tiap Kabupaten/Kota lingkup Kepri berdasarkan kedua indeks tersebut:

**A. Indeks Kemandirian Fiskal I**

Indeks Kemandirian Fiskal I (IKF I) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.

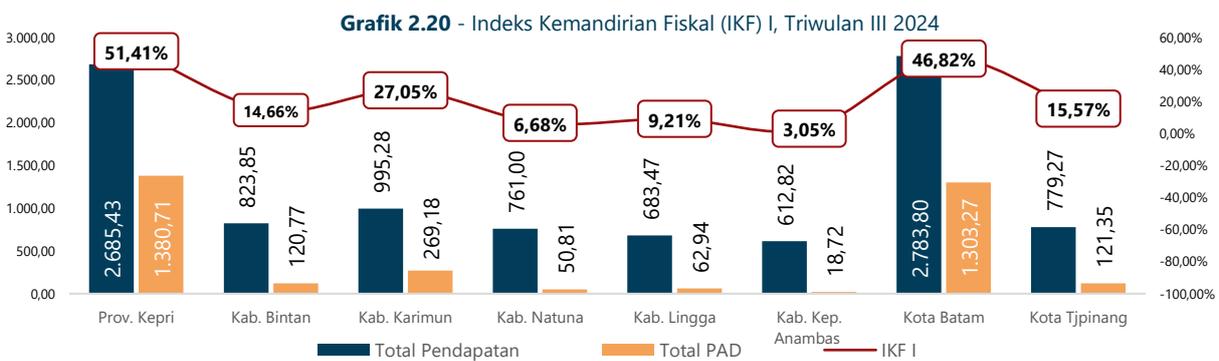
Hasil perhitungan IKF I Tahunan dari tahun 2017 s.d 2023 antara Kabupaten/Kota di Kepri akan berbeda, untuk itu perlu dibedakan hasil IKF per masing-masing Kabupaten/Kota. Grafik 2.21 menunjukkan bahwa 5 Kabupaten/Kota di lingkup Kepri masih berada pada kluster “Belum Mandiri”.

Sementara itu, Kota Batam dan Kabupaten Karimun berada pada kluster “Menuju Kemandirian”.

**Tabel 2.21** – Indeks Kemandirian Fiskal

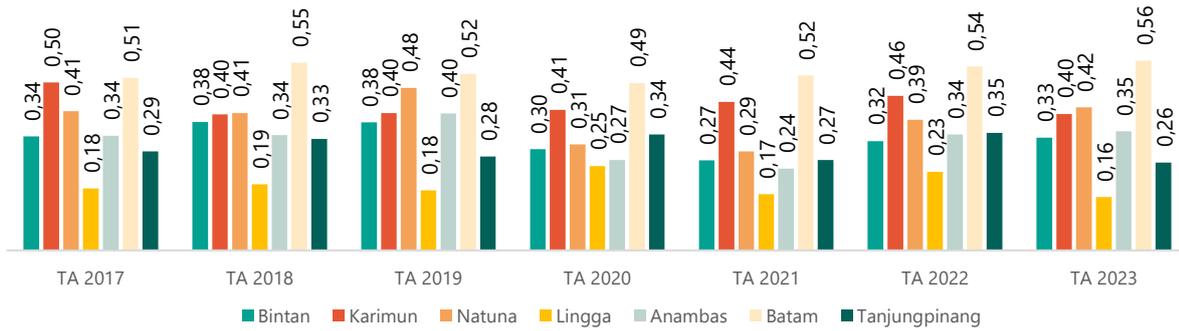
IKF	Kondisi
	Kemandirian Fiskal
0,75 ≤ IKF ≤ 1,00	Sangat Mandiri
0,50 ≤ IKF < 0,75	Mandiri
0,25 ≤ IKF < 0,50	Menuju Kemandirian
0,00 ≤ IKF < 0,25	Belum Mandiri

Walaupun Kabupaten Karimun berada pada kluster “Belum Mandiri” pada tahun 2020 karena IKF I sebesar 0,24. Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bintan masih berada pada kluster “Belum Mandiri”. Kabupaten Bintan sempat masuk kategori “Menuju Kemandirian” pada tahun 2019, namun tingkat IKF I turun drastis pada tahun 2020 hingga 2022, namun dapat kembali masuk kategori “Menuju Kemandirian” pada tahun 2023 dengan nilai 0,25.



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Grafik 2.21 – Indeks Kemandirian Fiskal II Tahunan, 2017 - 2023



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Tabel 2.22 - Perkembangan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) I Triwulan III 2023 dan Triwulan III 2024

Pemerintah Daerah	2023	2024	Δ (%)
1. Kabupaten Bintang	26,07%	14,66%	-11,41
2. Kabupaten Karimun	31,08%	27,05%	-4,03
3. Kabupaten Natuna	8,37%	6,68%	-1,69
4. Kabupaten Lingga	5,49%	9,21%	3,72
5. Kabupaten Anambas	3,33%	3,05%	-0,28
6. Kota Batam	49,82%	46,82%	-3
7. Kota Tanjungpinang	17,36%	15,57%	-1,79
<b>Gabungan Pemkabko</b>	<b>28,19%</b>	<b>26,17%</b>	<b>-2,02</b>
Pemprov Kepri	45,63%	51,41%	5,78
<b>Gabungan Pemda</b>	<b>33,37%</b>	<b>32,87%</b>	<b>-0,5</b>

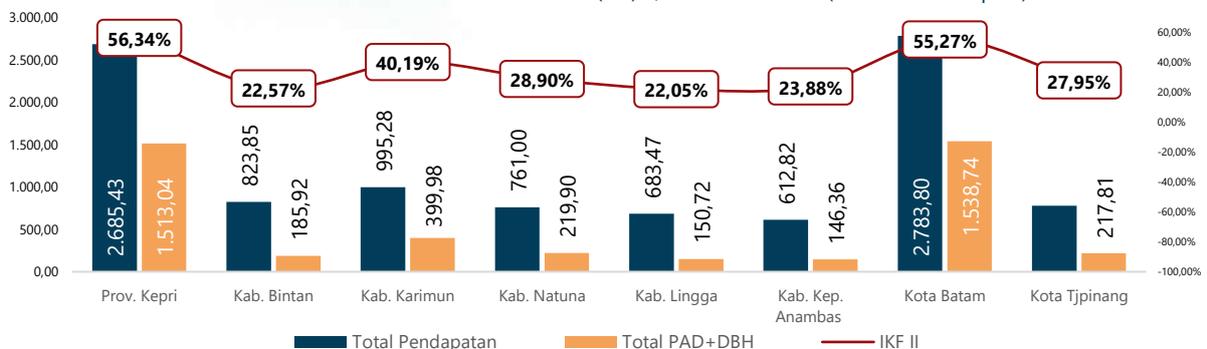
Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

keuangan sebesar 26,17 persen yang tergolong dalam kelompok dengan tingkat kemandirian keuangan sedang. Rasio Kemandirian ini mengalami penurunan 2,02 persen poin apabila dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 yang sebesar 28,19 persen.

Penurunan ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi Pendapatan Transfer yang meningkat 9,21 persen (yoy).

Pemerintah daerah dengan penurunan IKF tertinggi terdapat pada Kabupaten Bintang sebesar 11,41 persen poin apabila dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 26,07 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh realisasi PAD Kabupaten Bintang yang berkontraksi 68,08 persen (yoy). Kontraksi PAD tersebut dipengaruhi oleh penurunan penerimaan PBB 82,41 persen (yoy), BPHTB 85,48 persen (yoy), dan Pajak Hotel 36,05 persen (yoy).

Grafik 2.22 – Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) II, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

IKF Pemerintah kabupaten kota (pemkabko) di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan memiliki tingkat kemandirian

Pemprov Kepri menjadi pemerintah daerah dengan kategori mandiri yang memiliki rasio IKF 51,41 persen. Pemerintah daerah yang

termasuk kategori menuju mandiri, yaitu Kota Batam dengan rasio 46,82 persen dan Kabupaten Karimun 27,05 persen. Adapun pemerintah daerah lainnya masih tergolong belum mandiri dengan rasio IKF Kabupaten Anambas 3,05 persen, Kabupaten Natuna 6,68 persen, Kabupaten Bintan 14,66 persen, dan Kota Tanjungpinang 15,57 persen.

Tingginya rasio IKF Pemprov Kepri dipengaruhi oleh kekhususan penerimaan pajak daerah yang nantinya akan dibagikan ke daerah di bawahnya. Nilai kemandirian pemprov tersebut menyebabkan nilai kemandirian seluruh pemda di Kepulauan Riau termasuk dalam kategori menuju mandiri

### B. Indeks Kemandirian Fiskal II

Indeks Kemandirian Fiskal II (IKF II) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD ditambah Dana Bagi Hasil dengan Total Pendapatan.

Rasio IKF II tahunan dari tahun 2017 s.d. 2023 sebagaimana terlihat pada Grafik 2.22 menunjukkan bahwa Kota Batam berada pada klaster "Mandiri".

Lima Kabupaten/Kota lainnya berada pada klaster Menuju Kemandirian", yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, sedangkan Kabupaten Lingga masih berada pada klaster "Belum Mandiri".

Sebagaimana Grafik 2.22, Kota Batam memiliki rasio IKF II 55,27 persen dan Prov. Kepri 56,34 persen yang termasuk dalam kategori mandiri. Pemerintah daerah yang termasuk kategori menuju kemandirian, yaitu Kab. Karimun dengan rasio IKF II 40,19 persen, Kab. Natuna 28,90 persen, dan Kota Tanjungpinang 27,95 persen. Pemerintah Kab. Kep. Anambas memiliki rasio IKF II 23,88 persen, Kab. Lingga 22,05 persen, dan Kab. Bintan 22,57 persen termasuk pada kategori belum mandiri. Dari hasil IKF II periode triwulan II 2024, dapat disimpulkan

bahwa banyak kabupaten/kota termasuk pada klasifikasi menuju kemandirian dan belum mandiri.

Walaupun telah ditambahkan DBH, Kab. Bintan tetap berada pada level "Belum Mandiri". Kab. Bintan belum optimal dalam mengeksplorasi potensi sumber daya alam yang dapat mengangkat tingkat kemandirian.

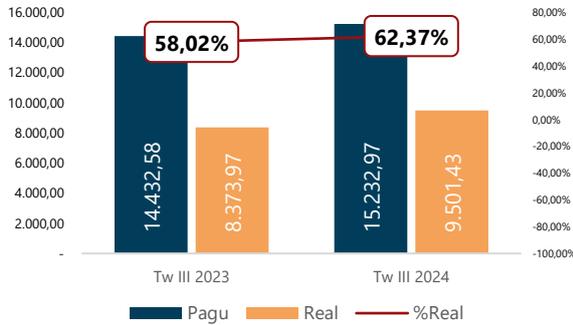
Sektor pariwisata merupakan sektor utama penopang pendapatan Kabupaten Bintan. Sektor tersebut tidak termasuk yang dibagikan karena merupakan kontributor secara langsung. Kabupaten Bintan tidak mempunyai potensi SDA yang dapat dieksplorasi dan eksploitasi sehingga dapat menambah pendapatan DBH. Oleh karena itu, Kabupaten Bintan seharusnya lebih berfokus pada peningkatan PAD untuk meningkatkan kemandirian Kab. Bintan.

#### 2.2.1.6 Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

1. Terkontraksinya pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 21,48 persen (yoy) dipengaruhi rendahnya penerimaan dividen dari BUMD. Sehingga pemerintah daerah perlu mengevaluasi kinerja BUMD lingkup Kepri agar mengoptimalkan potensi penerimaan.
2. Pendapatan LLPAD s.d. triwulan III tahun 2024 mengalami kontraksi cukup tinggi sebesar 17,20 persen (yoy) yang dipengaruhi terdapat pada kontraksi pendapatan BLUD 22,52 persen (yoy). BLUD lingkup Kepri agar mengoptimalkan potensi penerimaan melalui perluasan layanan dan optimalisasi *idle asset* untuk dikerjasamakan bersama pihak swasta.
3. Agar pemerintah daerah Kabupaten Bintan meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi daerah dan penguatan *local taxing power*. Sehingga IKF Kabupaten Bintan dapat kembali meningkat.

2.2.2 Analisis Realisasi dan Growth Belanja Daerah

Grafik 2.23 – Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Triwulan III, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp9.501,43 miliar atau 62,37 persen dari Pagu. Persentase realisasi ini lebih tinggi apabila dibandingkan triwulan II 2023 yang hanya sebesar 58,02 persen dari Pagu.

Secara komposisi, Realisasi Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp7.693,33 miliar (80,97 persen dari total Belanja Daerah), kemudian diikuti Belanja Transfer sebesar Rp972,14 miliar (10,23 persen dari total Belanja Daerah), Belanja Modal sebesar Rp832,43 miliar (8,76 persen dari total Belanja Daerah), dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2,24 miliar (0,04 persen dari total Belanja Daerah).

Realisasi Belanja Daerah tumbuh 13,46 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang tumbuhnya Belanja Operasi 17,52 persen (yoy) dan Belanja Transfer 14,40 persen (yoy). Adapun Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga mengalami kontraksi secara berturut-turut sebesar 14,14 persen (yoy) dan 57,71 persen (yoy).

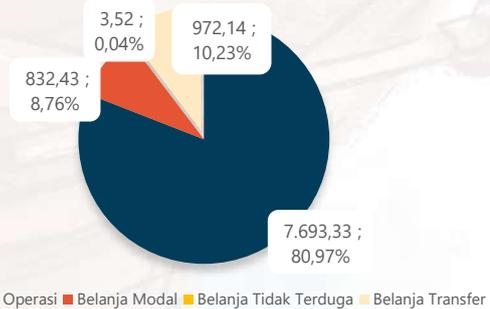
2.2.2.1 Analisis Belanja Daerah Berdasarkan Jenis

Realisasi Belanja Operasi tertinggi secara nominal terdapat pada Kota Batam sebesar Rp2.114,80 miliar. Kemudian diikuti Provinsi Kepri sebesar 1.949,40 miliar dan Kabupaten Karimun Rp781,68 miliar.

Sejalan dengan itu, realisasi Belanja Modal tertinggi terdapat di Kota Batam sebesar Rp323,06 miliar. Selanjutnya secara berturut-turut diikuti Provinsi Kepri dan Kabupaten Karimun dengan nominal Rp112,15 miliar dan 84,79 miliar.

Adapun Belanja Tidak Terduga tertinggi terdapat di Pemprov Kepri sebesar Rp1,62 miliar. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bintan dan

Grafik 2.24 – Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Triwulan III, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Kabupaten Karimun dengan realisasi masing-masing sebesar 0,57 miliar. Tidak terdapat realisasi Belanja Tidak Terduga di Kota Batam, dan Kabupaten Kepulauan Anambas s.d. triwulan III 2024.



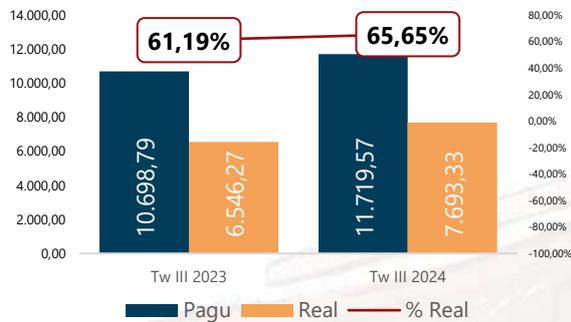
**Grafik 2.25 – Pagu dan Realisasi Belanja APBD tiap Pemda per Jenis Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)**



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

**A. Belanja Operasi**

**Grafik 2.26 – Pagu dan Realisasi Belanja Operasi Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)**



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Realisasi Belanja Operasi s.d. triwulan III 2024 sebesar Rp7.693,33 miliar (65,65 persen dari Pagu).

Persentase realisasi ini meningkat bila dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang baru mencapai 61,19 persen.

Belanja Operasi didominasi oleh Belanja Pegawai Rp4.166,87 (54,15 persen dari total Belanja Operasi) dan Rp2.868,83 (37,29 persen dari total Operasi).

Realisasi Belanja Operasi tumbuh 17,62 persen (yoy) didorong oleh pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial 226,49 persen (yoy), Belanja Hibah 64,22 persen (yoy), dan Belanja Pegawai 21,25 persen (yoy). Tingginya pertumbuhan Belanja Operasi ini didorong oleh percepatan belanja oleh pemerintah daerah lingkup Kepri.

**Grafik 2.27 – Pagu dan Realisasi Belanja Operasi per Jenis Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)**

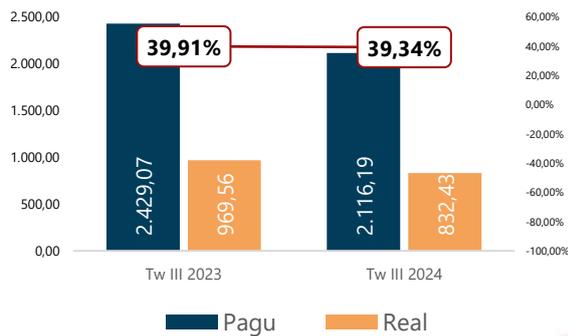


Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

**B. Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal s.d. triwulan III 2024 sebesar Rp832,43 miliar (39,34 persen dari Pagu). Persentase realisasi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang telah direalisasikan 39,91 miliar.

**Grafik 2.28** – Pagu dan Realisasi Belanja Modal Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Realisasi Belanja Modal didominasi oleh Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp390,54 miliar (46,92 persen dari total Realisasi Belanja Modal), Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp244,70 miliar (29,40 persen dari total Realisasi Belanja Modal), dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp158,20 miliar (19,00 persen dari total Realisasi Belanja Modal).

Belanja Modal mengalami kontraksi 14,14 persen (yoy). Kontraksi ini dipengaruhi oleh sebagian besar komponen Belanja Modal yang mengalami kontraksi. Belanja Modal Tanah mengalami kontraksi tertinggi 51,93 persen (yoy). Kemudian komponen Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan terkontraksi 24,87 persen (yoy). Belanja Modal Peralatan dan Mesin juga turun terkontraksi 19,44 persen (yoy). Satu-satunya komponen Belanja Modal yang mengalami pertumbuhan, yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7,15 persen (yoy).

**C. Belanja Tidak Terduga**

Realisasi Belanja Tidak Terduga mencapai Rp3,52 miliar (4,12 persen dari Pagu). Belanja ini mengalami kontraksi yang

cukup signifikan 57,71 persen (yoy). Meskipun rendah, realisasi Belanja Tidak Terduga merupakan pos pengeluaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan dan bersifat force majeure, misalnya penanggulangan bencana alam dll. Di sisi lain, rendahnya realisasi Belanja ini menunjukkan hal positif, yaitu tidak terdapat bencana atau hal-hal force majeure lainnya.

**D. Belanja Transfer**

Realisasi Belanja Transfer telah mencapai Rp972,14 miliar (74,12 persen dari Pagu) s.d. triwulan III 2024. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi Belanja Bagi Hasil Rp560,80 miliar atau 79,18 persen dari Pagu, sedangkan Belanja Bantuan Keuangan dapat direalisasikan sebesar Rp411,34 miliar atau 36,56 persen dari Pagu.

Belanja Transfer tumbuh 14,40 persen (yoy) dengan rincian Belanja Bagi Hasil tumbuh 7,10 persen (yoy) dan Belanja Bantuan Keuangan tumbuh 26,12 persen (yoy).

**2.2.2.2 Analisis Kontribusi Belanja Daerah Terhadap PDRB**

**Tabel 2.23** - Analisis Kontribusi Belanja Daerah Terhadap PDRB Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	TW III 2023	TW III 2024	Growt h
Belanja Daerah	8.373,97	9.501,43	13,46 %
PDRB	243.921,84	259.241,37	6,28%
<b>% Kontribusi Belanja</b>	<b>3,43%</b>	<b>3,67%</b>	

Sumber: BPS dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Kontribusi Belanja daerah terhadap PDRB pada triwulan II 2024 sebesar 3,67 persen. Kontribusi ini meningkat 0,24 persen poin apabila dibandingkan triwulan II 2023 yang sebesar 3,43 persen. Peningkatan ini disebabkan laju pertumbuhan PDRB 6,28 persen (yoy) lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan Belanja daerah 13,46 persen (yoy).



Peningkatan ini menunjukkan peran besar pemerintah daerah dalam mendorong perekonomian di Kepri. Peningkatan kontribusi belanja tersebut dipengaruhi oleh keseluruhan komponen belanja daerah. Belanja daerah dengan kontribusi peningkatan terbesar berturut-turut, yaitu Belanja Operasi yang tumbuh 17,52 persen (*yoy*) dan Belanja Transfer 14,40 persen (*yoy*). Pemerintah daerah Kepri membelanjakan anggaran belanja daerah tersebut dengan tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian regional, melalui berbagai program pembangunan yang mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan sektor-sektor unggulan di Kepri.

### 2.2.2.3 Analisis Belanja Daerah Perkapita

**Tabel 2.24** - Analisis Belanja Daerah Perkapita Triwulan III 2023 dan 2024

Uraian	TW III 2023	TW III 2024	Growth
Belanja Daerah (Rp Miliar)	Rp8.373,97	Rp9.501,43	13,46%
Jumlah Penduduk	2.152.630	2.183.290	1,42%
<b>Belanja Daerah Perkapita</b>	<b>3.890.113</b>	<b>4.351.884</b>	<b>11,87%</b>

Sumber: BPS dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Belanja daerah perkapita di Kepri s.d. triwulan III 2024 sebesar Rp4.351.884. Belanja daerah perkapita ini tumbuh 11,87 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya Rp3.890.113. Peningkatan belanja daerah perkapita tersebut dipengaruhi pertumbuhan belanja daerah 13,46 persen (*yoy*) yang lebih besar apabila dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduknya yang sebesar 1,42 persen (*yoy*). Peningkatan belanja daerah perkapita tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kepri.

### 2.2.2.4 Rekomendasi Kebijakan Belanja

1. Pemerintah Daerah perlu mendorong percepatan Belanja Modal, khususnya Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang merupakan layanan publik dasar. Pembangunan Jalan Irigasi, dan Jaringan

dapat meningkatkan konektivitas antar daerah yang memberikan *multiplier effect* dalam perekonomian.

2. Pemerintah daerah agar meanggarkan kebijakan belanja yang difokuskan pada infrastruktur konektivitas antar daerah. Infrastruktur konektivitas sangat diperlukan bagi Kepri sebagai daerah kepulauan yang terdiri dari 98 persen lautan.
3. Pemerintah daerah melalui dinas DPMPTSP dan Dinas KUKM agar mengembangkan potensi daerah seperti pariwisata, perikanan dan umkm yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal.

### 2.2.3 Analisis Optimalisasi Kas Pada RKUD Pemerintah Daerah

Manajemen kas pemerintah daerah memiliki risiko dalam pengelolaannya yaitu aliran kas *volatility* dan *timing mismatch* terkait pengumpulan pendapatan dan pembayaran belanja dan pembiayaan. Manajer kas yang dalam hal ini dilakukan oleh institusi BKAD/BPKAD/BPKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) perlu untuk mengatur berapa jumlah saldo kas untuk mengelola *mismatch* kas dan menjamin kesediaan kas pada rekening pemerintah daerah. Manajemen kas yang efektif menjadi penting pada kondisi ketidakpastian yang tinggi mengenai jumlah pendapatan dan periode penerimaannya, misalnya pada saat terjadi Pandemi COVID-19 lalu.

Metode untuk menghitung saldo kas dan melakukan optimalisasi kas sangat bervariasi. Kajian ini menyajikan dua pilihan metode yang bervariasi dari yang sederhana sampai ke metode yang lebih komprehensif. Kajian ini menggunakan data primer yang berasal dari data Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang diterima Kanwil DJPb Prov Kepri setiap bulan. Sedangkan prinsip pengelolaan *buffer cash* mengikuti alur berpikir yang ada pada *Note International Monetary Fund*

– *Fiscal Affairs Department* tahun 2020 dengan tema “*How to Set Up a Cash Buffer: A Practical Guide to Developing and Implementing a Cash Buffer Policy*” yang disusun oleh Yasemin Hürçan, Fatos Koç, and Emre Balibek.

Berdasarkan analisis menggunakan metode *moving average* dan *Miller and Orr Cash Model* yang telah dilakukan Kanwil DJPb Kepri terhadap optimalisasi kas di RKUD terdapat beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau cenderung memiliki realisasi surplus kas (Pendapatan Daerah lebih tinggi daripada Belanja Daerah) setiap periodenya, namun demikian terdapat

beberapa periode yang mengalami defisit kas (Pendapatan Daerah lebih rendah dibandingkan Belanja Daerah) yang perlu diantisipasi ketersediaan dana untuk membiayai Belanja Daerah tersebut yang bersumber dari surplus kas pada periode sebelumnya, atau menggunakan pencairan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

2. Pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau memiliki pola penerimaan dan penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun anggaran. Pola realisasi penerimaan dan penyerapan anggaran seperti ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah, agar terdapat kesediaan dana untuk membiayai Belanja Daerah di akhir tahun, sehingga tidak terdapat rencana belanja yang tidak dapat dilaksanakan.
3. Kajian ini memberikan alternatif metodologi bagi pemerintah daerah untuk menerapkan manajemen kas yang lebih modern untuk mengantisipasi *mismatch* dan memitigasi risiko Belanja Daerah tidak dapat dilaksanakan atau dibayarkan.

### 2.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian Triwulan III 2024

Tabel 2.25 - Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	TW III 2023	TW III 2024	Growth
<b>A. PENDAPATAN KONSOLIDASI</b>	<b>11.821,42</b>	<b>13.969,57</b>	<b>18,17%</b>
<b>Pendapatan Perpajakan Konsolidasi</b>	<b>9.812,78</b>	<b>10.316,36</b>	<b>5,13%</b>
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	9.089,39	9.995,01	9,96%
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	714,39	321,35	-55,02%
<b>Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>2.008,00</b>	<b>3.652,28</b>	<b>81,89%</b>
Pendapatan Sumber Daya Alam	0,00	0,00	-
Pendapatan Bagian Laba BUMN/ Kekayaan Negara Dipisahkan	35,86	28,16	-21,48%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	775,08	884,50	14,12%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	0,00	597,73	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	0,00	0,00	-
Bantuan Keuangan – LRA	8,22	0,00	-100,00%
Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	1.188,84	2.141,89	80,17%
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>0,64</b>	<b>0,93</b>	<b>45,54%</b>
Pendapatan Hibah Dalam Negeri	0,64	0,93	45,54%
<b>B. BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>13.106,06</b>	<b>15.169,63</b>	<b>15,75%</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.945,26</b>	<b>5.864,25</b>	<b>18,58%</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.208,76</b>	<b>5.511,68</b>	<b>5,82%</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>1.970,15</b>	<b>2.217,63</b>	<b>12,56%</b>
<b>Belanja Pembayaran Kewajiban Utang</b>	<b>6,75</b>	<b>3,44</b>	<b>-49,11%</b>
<b>Belanja Subsidi</b>	<b>1,81</b>	<b>1,99</b>	<b>9,98%</b>
<b>Belanja Hibah</b>	<b>387,94</b>	<b>637,10</b>	<b>64,22%</b>
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>7,56</b>	<b>20,66</b>	<b>173,42%</b>
<b>Belanja Lain-lain</b>	<b>126,23</b>	<b>3,52</b>	<b>-97,21%</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah</b>	<b>120,32</b>	<b>482,57</b>	<b>301,09%</b>
1. Dana Bagi Hasil	0,00	290,62	-
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	99,59	-
3. DAK Fisik	0,00	0,00	-
4. Dana Insentif Daerah	0,00	3,00	-
5. DAK Non Fisik	69,59	73,57	5,72%
6. Dana Desa	50,72	15,79	-68,88%
<b>Transfer Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>331,28</b>	<b>426,79</b>	<b>28,83%</b>
1. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	6,12	17,49	185,77%
2. Transfer Bantuan Keuangan	325,16	409,30	25,88%
3. Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
<b>C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN</b>	<b>(1.284,64)</b>	<b>(1.200,06)</b>	<b>-6,58%</b>
<b>D. PEMBIAYAAN</b>	<b>502,79</b>	<b>338,66</b>	<b>-32,64%</b>
Penerimaan Pembiayaan	548,38	407,62	-25,67%

Pengeluaran Pembiayaan	45,59	68,96	51,27%
<b>E. SILPA/SIKPA (D+C)</b>	<b>(781,84)</b>	<b>(861,40)</b>	<b>10,17%</b>

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

### 2.3.1 Analisis Pendapatan Konsolidasian

Realisasi Pendapatan Konsolidasi s.d. triwulan III 2024 mencapai Rp13.969,57 miliar. Realisasi ini mengalami pertumbuhan 18,17 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang sebesar Rp11.821,42 miliar. Pendapatan Konsolidasi didominasi oleh Pendapatan Perpajakan Konsolidasi yang mencapai Rp10.316,36 miliar (83,01 persen dari total Pendapatan Konsolidasi). Adapun realisasi PNPB mencapai Rp3.652,28 miliar (16,99 persen dari total Pendapatan Konsolidasi).

Keseluruhan komponen Pendapatan Konsolidasi tersebut mengalami pertumbuhan apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Pendapatan PNPB tumbuh 81,89 persen (*yoy*) didorong oleh realisasi pendapatan BLU dan BLUD lingkup Kepri. Selanjutnya Pendapatan Perpajakan Konsolidasi mengalami pertumbuhan 5,13 persen (*yoy*) dipengaruhi peningkatan realisasi perpajakan pemerintah pusat, pajak pemerintah daerah, dan retribusi daerah.

### 2.3.2. Analisis Belanja Konsolidasian

Sampai dengan triwulan III 2024, realisasi Belanja Konsolidasi mencapai Rp15.169,63 miliar. Belanja Konsolidasi didominasi oleh Belanja Pegawai yang mencapai Rp5.864,25 miliar (38,66 persen dari total Belanja Konsolidasi), Belanja Barang dan Jasa Rp5.511,68 miliar (36,33 persen dari total Belanja Konsolidasi), dan Belanja Modal Rp2.217,63 miliar (14,62 persen dari total Belanja Konsolidasi).

Belanja Konsolidasi mengalami pertumbuhan 15,75 persen (*yoy*) didorong oleh pertumbuhan Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah 301,09 persen (*yoy*), Belanja Hibah 64,22 persen (*yoy*), Belanja Pegawai 18,58 persen (*yoy*), serta Belanja Barang dan Jasa 5,82 persen (*yoy*). Pertumbuhan seluruh jenis belanja tersebut menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kepri.

### 2.3.3 Analisis Surplus/Defisit Konsolidasian

Defisit Konsolidasi di Kepri s.d. triwulan III 2024 mencapai Rp1.200,06 miliar, berdasarkan Pendapatan Konsolidasi Rp13.969,57 miliar dan Belanja Konsolidasi Rp Rp15.169,63 miliar. Defisit tersebut mengalami penurunan Rp84,58 miliar apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.284,64 miliar.

### 2.3.4 Analisis Pembiayaan Konsolidasian

Realisasi Pembiayaan Konsolidasi di Kepri mencapai Rp338,66 miliar yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Rp407,62 miliar, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp68,96 miliar. Pembiayaan tersebut mengalami kontraksi 32,64 persen (*yoy*) apabila dibandingkan realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp502,79 miliar.

## 2.4. Analisis Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah

Tabel 2.26 - Analisis Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	TW III 2023	TW III 2024	Penambahan/ Pengurangan	Growth
<b>ASET</b>	<b>82.469,22</b>	<b>84.014,52</b>	<b>1.545,30</b>	<b>1,87%</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>4.941,12</b>	<b>5.866,16</b>	<b>925,05</b>	<b>18,72%</b>
Kas dan Setara Kas	2.248,44	2.891,42	642,99	28,60%
Investasi Jangka Pendek	0,00	12,00	12,00	-
Belanja Dibayar di Muka	3,28	3,90	0,62	18,82%
Uang Muka Belanja	4,73	15,71	10,97	231,85%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	12,96	7,84	-5,12	-39,52%
Piutang	1.232,75	883,15	-349,60	-28,36%
Persediaan	1.392,93	2.051,93	659,00	47,31%
Persediaan yang Belum Diregister	46,03	0,22	-45,81	-99,53%
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>76.575,56</b>	<b>77.369,07</b>	<b>793,50</b>	<b>1,04%</b>
Tanah	47.359,50	47.638,21	278,71	0,59%
Peralatan dan Mesin	20.082,08	21.154,03	1.071,95	5,34%
Gedung dan Bangunan	8.810,56	9.795,11	984,55	11,17%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.709,22	18.690,71	-18,51	-0,10%
Aset Tetap Lainnya	1.115,73	556,61	-559,12	-50,11%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.992,95	2.422,52	429,57	21,55%
Aset Tetap Lainnya yang Belum Diregister	82,38	16,41	-65,97	-80,08%
Aset Konsesi Jasa	3.317,39	4.720,42	1.403,03	42,29%
Akumulasi Penyusutan	-24.894,26	-27.624,95	-2.730,69	10,97%
<b>PROPERTI INVESTASI</b>	<b>121,43</b>	<b>153,83</b>	<b>32,40</b>	<b>26,68%</b>
Properti Investasi	121,43	154,08	32,65	26,88%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		-0,24	-0,24	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>0,001</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,001</b>	<b>-100,00%</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>831,11</b>	<b>625,46</b>	<b>-205,65</b>	<b>-24,74%</b>
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	39,02	402,19	363,18	930,84%
Aset Tidak Berwujud	863,08	305,96	-557,12	-64,55%
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	2,94	0,80	-2,14	-72,76%
Aset Lain-lain	507,49	420,31	-87,17	-17,18%
Aset Lainnya yang Belum Diregister	1,78	0,00	-1,78	-100,00%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	-583,20	-503,81	79,39	-13,61%
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>4.438,23</b>	<b>4.816,66</b>	<b>378,43</b>	<b>8,53%</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>4.435,25</b>	<b>4.479,83</b>	<b>44,57</b>	<b>1,00%</b>
Utang Kepada Pihak Ketiga	442,78	444,26	1,48	0,33%
Utang Transfer	76,72	42,60	-34,12	-44,47%
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	24,09	239,68	215,59	895,12%
Pendapatan Diterima di Muka	3.857,06	3.701,32	-155,74	-4,04%
Utang Jangka Pendek Lainnya	34,57	51,97	17,40	50,33%
Hibah Yang Belum Disahkan	0,04	0,00	-0,04	-100,00%
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>2,98</b>	<b>336,84</b>	<b>333,85</b>	<b>11.194,04%</b>
Kewajiban Konsesi Jasa	2,98	336,84	333,85	11.194,04%
<b>EKUITAS</b>	<b>78.030,99</b>	<b>79.197,86</b>	<b>1.166,87</b>	<b>1,50%</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN</b>	<b>82.469,22</b>	<b>84.014,52</b>	<b>1.545,30</b>	<b>1,87%</b>

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

### 2.4.1 Analisis Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

#### 2.4.1.1 Analisis Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan Aset pemerintah pusat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.545,30 miliar, atau 1,87 persen (yoy). Nilai Aset pemerintah pusat s.d. triwulan III 2024 sebesar Rp84.014,52 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp82.469,22 pada tahun 2023. Nilai pertumbuhan yang tinggi aset pemerintah dipengaruhi oleh perubahan pola belanja pemerintah yang mengoptimalkan pembangunan fisik infrastruktur dibandingkan Belanja Barang habis pakai.

Pertumbuhan tertinggi secara nominal terjadi pada Aset Tetap sebesar Rp793,50 miliar atau 1,04 persen (yoy). Nilai Aset Tetap pada tahun 2024 sebesar Rp77.369,07 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp76.575,56 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan Aset Tetap tertinggi terdapat pada Aset Konsesi Jasa 42,29 persen (yoy) yang dipengaruhi semakin optimalnya pemanfaatan aset pemerintah oleh swasta dalam peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Kemudian Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) turut mengalami pertumbuhan 21,55 persen (yoy), mengindikasikan banyaknya pembangunan fisik yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau, terutama pembangunan Gedung dan Bangunan. Aset Gedung dan Bangunan sendiri mengalami pertumbuhan 11,17 persen (yoy). Pertumbuhan nilai Aset Tetap tersebut, sejalan dengan pertumbuhan realisasi Belanja Modal tahun 2023, dan tahun 2024.

Pertumbuhan Aset tertinggi secara persentase terdapat pada Aset Lancar, dengan pertumbuhan sebesar Rp925,05 miliar, atau 18,72 persen (yoy). Nilai Aset Lancar pada tahun 2024 sebesar Rp5.866,16 miliar, dari tahun 2023 sebesar Rp4.941,12 miliar. Tingginya pertumbuhan Aset Lancar didorong oleh pertumbuhan Persediaan sebesar Rp659,00 miliar, atau 47,31 persen (yoy). Kemudian juga

terjadi pertumbuhan yang signifikan pada Kas dan Setara Kas, sebesar Rp642,99 miliar, atau 28,60 persen (yoy). Peningkatan Persediaan, serta Kas dan Setara Kas di Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh percepatan realisasi yang terjadi s.d. triwulan III 2024. Namun perlu diperhatikan agar, besarnya *idle cash* dan Persediaan yang dimiliki oleh satuan kerja dapat optimal digunakan dengan segera untuk memberikan *output* dan *outcome* kepada masyarakat.

Nilai Properti Investasi di Kepri s.d. triwulan III 2024 mencapai Rp121,38 miliar. Nilai Properti Investasi tersebut mengalami pertumbuhan 32,40 miliar, atau 26,68 persen (yoy). Menunjukkan semakin optimalnya pemerintah dalam memanfaatkan *idle asset* untuk memperoleh PNBPNP.

Penurunan Aset tertinggi terdapat pada Aset Lainnya, mengalami penurunan sebesar Rp205,65 miliar, atau 24,74 persen (yoy). Nilai Aset Lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp625,46 miliar, dari sebelumnya Rp831,11 miliar pada tahun 2023. Penurunan tertinggi terdapat pada Aset Tak Berwujud sebesar Rp557,12 miliar, atau 64,55 persen (yoy).

#### 2.4.1.2 Analisis Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Liabilitas

Kewajiban pemerintah lingkup wilayah Provinsi Kepri mengalami pertumbuhan signifikan sebesar Rp378,43 miliar, atau 8,53 persen (yoy). Nilai Kewajiban pada tahun 2024 sebesar Rp4.479,83 miliar, dari sebelumnya Rp4.435,25 miliar. Pertumbuhan Kewajiban tertinggi terdapat pada Kewajiban Jangka Panjang, sebesar Rp333,85 miliar, atau 11.194,04 persen (yoy). Nilai Kewajiban Jangka Panjang pada tahun 2024 sebesar Rp336.84 miliar, dari sebelumnya Rp2,98 miliar.

Kewajiban Jangka Panjang yang mengalami pertumbuhan, yaitu Kewajiban Konsesi Jasa Rp333,85 miliar, atau 11.194,04 persen (yoy). Pertumbuhan signifikan tersebut

sejalan dengan semakin meningkatnya Aset Konsesi Jasa di Kepri yang bertumbuh 42,29 persen (yoy), atau Rp1.403,03 miliar dalam rangka peningkatan layanan publik kepada masyarakat Kepri.

Kewajiban Jangka Pendek di Kepri tumbuh Rp44,47 miliar, atau 1,00 persen (yoy). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan yang meningkat signifikan Rp215,59 miliar, atau tumbuh 895,12 persen (yoy). Adapun kontraksi terjadi pada Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp155,74 miliar, atau terkontraksi 4,04 persen (yoy).

#### 2.4.1.3 Analisis Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Ekuitas

Nilai Ekuitas pemerintah di Provinsi Kepri sebesar Rp79.197,86 miliar, berdasarkan jumlah Aset sebesar tahun 2024 Rp84.014,52 miliar, dan nilai Kewajiban sebesar Rp4.816,66 miliar. Nilai Ekuitas ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2023 yang memiliki nilai Ekuitas sebesar Rp78.030,99 miliar, atau meningkat Rp1.166,87 miliar atau 1,50 persen (yoy). Peningkatan Ekuitas yang cukup tinggi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Aset yang tinggi dibandingkan peningkatan Kewajiban, menunjukkan kinerja pemerintah yang optimal dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk menghasilkan Aset Tetap di Kepri.

#### 2.4.2 Kontribusi Belanja Pemerintah Dalam Pembentukan Aset Tetap (Barang Milik Negara) dari Belanja Modal.

Nilai Aset pemerintah pusat s.d. triwulan III 2024 sebesar Rp84.014,52 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp82.469,22 pada tahun 2023. Nilai pertumbuhan yang tinggi aset pemerintah dipengaruhi oleh perubahan pola belanja pemerintah yang mengoptimalkan pembangunan fisik infrastruktur dibandingkan Belanja Barang habis pakai.

Pertumbuhan tertinggi secara nominal terjadi pada Aset Tetap sebesar Rp793,50 miliar atau 1,04 persen (yoy). Nilai Aset Tetap pada tahun 2024 sebesar Rp77.369,07 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp76.575,56 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan Aset Tetap tertinggi terdapat pada Aset Konsesi Jasa 42,29 persen (yoy) yang dipengaruhi semakin optimalnya pemanfaatan aset pemerintah oleh swasta dalam peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Kemudian Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) turut mengalami pertumbuhan 21,55 persen (yoy), mengindikasikan banyaknya pembangunan fisik yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau, terutama pembangunan Gedung dan Bangunan. Aset Gedung dan Bangunan sendiri mengalami pertumbuhan 11,17 persen (yoy). Pertumbuhan nilai Aset Tetap tersebut, sejalan dengan pertumbuhan realisasi Belanja Modal tahun 2023, dan tahun 2024.

**Tabel 2.27** - Belanja Modal Triwan IV 2023 s.d. Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Belanja Modal	Tw IV 2023 (a)	s.d. Tw III 2024 (b)	(a+b)	Porsi Belanja
Belanja Modal Tanah	42,97	9,14	52,12	1,98%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94,17	112,80	206,97	7,87%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180,55	177,80	358,35	13,63%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	352,30	667,31	1.019,62	38,78%
Belanja Modal Fisik Lainnya	2,07	1,81	3,89	0,15%
Belanja Modal BLU	597,13	391,04	988,18	37,59%
<b>Jumlah</b>	<b>1.269,20</b>	<b>1.359,91</b>	<b>2.629,11</b>	

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Berdasarkan nilai pertambahan Aset sebesar Rp793,50 miliar, terdapat peran Belanja Modal Pemerintah yang mendorong pertumbuhan aset infrastruktur sebesar Rp2.629,11 miliar. Belanja Modal sebagian besar digunakan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.019,62 miliar (38,78 persen dari total Belanja Modal). Namun demikian pada Neraca terdapat penurunan atas nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan, hal tersebut sebesar Rp18,51 miliar yang diakibatkan sebagian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut di reklasifikasikan ke dalam Aset Konsesi Jasa.

Peningkatan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp984,55 miliar salah satunya dipengaruhi oleh Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp358,35 miliar, atau 36,40 persen dari pertumbuhan Aset. Menunjukkan peran yang signifikan dari Belanja Modal

Pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur layanan publik berupa Gedung dan Bangunan.

Dalam peningkatan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.071,95 miliar salah satunya dipengaruhi oleh Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp206,97 miliar, atau 19,31 persen dari pertumbuhan Aset. Menunjukkan peran yang signifikan dari Belanja Modal Pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur layanan publik berupa Peralatan dan Mesin.

Adapun belanja modal BLU sebesar Rp988,18 miliar merupakan Belanja Modal yang dikelola oleh BP Batam dalam meningkatkan infrastruktur di Kota Batam. Belanja Modal tersebut dimanfaatkan oleh BP Batam dalam peningkatan seluruh aspek infrastruktur, mulai dari Jalan, Irigasi, dan Jembatan, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Aset Tetap infrastruktur lainnya, dalam upaya peningkatan layanan publik kepada masyarakat Kota Batam.

## 2.4.3 Realisasi PNBPN dan potensi PNBPN dari BMN

### 2.4.3.1 Analisis Realisasi PNBPN

**Tabel 2.28** - Realisasi PNBPN KPKNL Batam Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	TW III 2023			TW III 2024			Growth (2023-2024)
	Target s.d. Tw III	Real s.d. Tw III	%	Target s.d. Tw III	Real s.d. Tw III	%	
PNBPN Aset	104,59	119,02	113,81%	155,49	249,95	160,75%	110,00%
PNBPN Piutang Negara	0,04	0,04	105,64%	0,05	0,06	115,24%	63,63%
PNBPN Lelang	15,02	4,73	31,51%	14,22	18,78	132,05%	296,73%
<b>Total</b>	<b>119,64</b>	<b>123,80</b>	<b>103,47%</b>	<b>169,76</b>	<b>268,78</b>	<b>158,33%</b>	<b>117,12%</b>

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Realisasi PNBPN yang dikelola oleh KPKNL Batam mencapai Rp268,78 miliar (158,33 persen dari Target). Realisasi PNBPN tersebut terdiri dari PNBPN Aset Rp249,95 miliar (92,99 persen dari total PNBPN), PNBPN Lelang Rp18,78 miliar (6,99 persen dari total PNBPN), dan PNBPN Piutang Negara Rp0,06 miliar (0,02 persen dari total PNBPN).

Penerimaan PNBPN s.d. triwulan III 2024 mengalami pertumbuhan signifikan 145,00 miliar, atau 117,12 persen (yoy). Pertumbuhan

tertinggi secara nominal pada PNBPN Aset yang mencapai Rp130,93 miliar, atau 110,00 persen (yoy). Adapun pertumbuhan tertinggi secara persentase pada PNBPN Lelang 296,73 persen (yoy).

Peningkatan PNBPN Aset yang signifikan menunjukkan semakin optimalnya pengelolaan *idle asset* oleh pemerintah lingkup Kepri dalam memperoleh PNBPN. Pemanfaatan aset tersebut seperti pemanfaatan lahan tidur, gedung, atau infrastruktur-infrastruktur yang tidak terpakai.

Dengan pemanfaatan yang lebih efektif, aset-aset ini dapat dimanfaatkan untuk

menghasilkan pendapatan negara berupa PNBP.

### 2.4.3.2 Analisis Potensi PNBP dari BMN

**Tabel 2.29** Realisasi PNBP KPKNL Batam Triwulan III 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)

ASET TETAP	76.575,56	77.369,07	793,50	1,04%
Tanah	47.359,50	47.638,21	278,71	0,59%
Peralatan dan Mesin	20.082,08	21.154,03	1.071,95	5,34%
Gedung dan Bangunan	8.810,56	9.795,11	984,55	11,17%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.709,22	18.690,71	-18,51	-0,10%
Aset Tetap Lainnya	1.115,73	556,61	-559,12	-50,11%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.992,95	2.422,52	429,57	21,55%
Aset Tetap Lainnya Yang Belum Diregister	82,38	16,41	-65,97	-80,08%
Aset Konsesi Jasa	3.317,39	4.720,42	1.403,03	42,29%
Akumulasi Penyusutan	-24.894,26	-27.624,95	-2.730,69	10,97%

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Nilai Properti Investasi di Kepri yang mencapai Rp153,83 miliar, atau 0,20 persen dari total Aset Tetap masih terbilang kecil apabila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap yang dimiliki oleh pemerintah pusat sebesar Rp77.369,56 miliar. Masih rendahnya nilai Aset yang tergolong menjadi Properti Investasi ini perlu didorong oleh Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki idle Aset yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh PNBP.

Aset yang besar dan terus bertumbuh dari tahun ke tahun perlu dimanfaatkan dengan optimal, terutama *idle asset* yang tidak dimanfaatkan langsung dalam pelayanan publik. Beberapa jenis aset yang dapat dimanfaatkan dalam memperoleh PNBP diantaranya yaitu Gedung dan Bangunan, Tanah, serta Peralatan dan Mesin.

Beberapa bentuk pemanfaatan BMN lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja K/L adalah dengan melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Beberapa mekanisme ini dapat dilakukan oleh satuan kerja K/L dalam pemanfaatan idle Asetnya.



## Komparasi Studi - Pajak Daerah di China

### Teori dan Pengukuran Kapasitas Pajak dan Upaya Pemungutan Pajak



**Pajak adalah salah satu kegiatan kuno dalam sejarah manusia.** Pengumpulan pajak atau bentuk lainnya menjadi model kunci perkembangan peradaban selama ribuan tahun. Dalam teori ekonomi, pajak didefinisikan sebagai pungutan wajib yang ditetapkan pemerintah terhadap pendapatan, pengeluaran, dan kekayaan seseorang, di mana hasilnya tidak diterima secara personal oleh pemberi pajak (James & Nobes, 2012, 2013; Lymer and Oats, 2013, 2014).

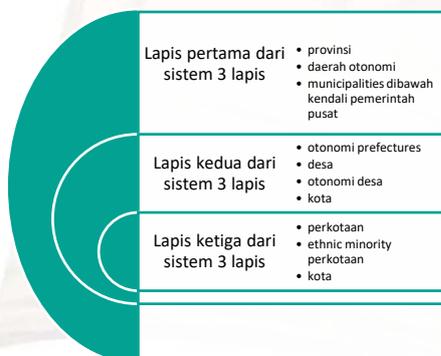
Pajak menjadi sumber dukungan keuangan bagi suatu negara untuk menjalankan fungsinya. Pajak adalah elemen penting dalam pemerintahan, terutama di negara berkembang seperti Tiongkok. Isu utamanya bukan pada kinerja pendapatan pemerintah, melainkan seberapa besar potensi pendapatan pajak dalam sistem perekonomian. Oleh karena itu, pengukuran kapasitas pajak dan upaya pajak (tax effort) sangat menarik untuk dianalisis.

**Tiongkok, sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi terbesar di dunia** dan salah satu penguasa ekonomi global selain Amerika Serikat, **menarik untuk dilihat apakah pemerintahnya berhasil mengukur kapasitas pajak** dan potensi pajak guna mengembangkan ekonominya yang besar.

#### Sistem Administrasi Pajak di China

**Sistem administrasi di China terbagi dalam tiga lapis sistem** dimana tiap lapis masih terbagi lagi ke dalam beberapa kategori. Banyaknya lapisan tersebut disebabkan luasnya daerah dan banyaknya jumlah penduduk di China. Pada lapis pertama terdiri dari 3 kategori yaitu 1) Provinsi; 2) daerah otonomi; 3) kecamatan dibawah kendali pemerintah pusat. Di lapis kedua terdapat 4 kategori yaitu 1) otonomi prefectures; 2) desa; 3) otonomi desa; 4) kota. Dan lapis yang ketiga terdiri atas 3 kategori yaitu: 1) townships; 2) etnik minoritas townships dan 3) kota.

**Isu strategis pajak daerah di Cina adalah dua jenis pendapatan pajak yaitu pendapatan pajak dan non-pajak** (Wong & Bird, 2008). Kita definisikan pendapatan pajak dan penggunaannya lebih terorganisir dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan, non pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah (selanjutnya disingkat Pemda), tidak transparan dan tanpa dasar hukum yang jelas.



Provinsi	Anhui, Fujian, Gansu, Goangdong, Guizhou, Hainan, Helongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Kianing, Qinghai, Shaanxi, Shandoong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, and Zhejiang
Daerah otonomi	Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia, Tibet, dan Xinjiang
Municipalities	Beijing, Chongqing, Shanghai, dan Tianjin

#### Reformasi Sistem Perpajakan di China

Di awal tahun 1950an, Cina menggunakan sistem ekonomi terencana dimana pemerintah mengendalikan seluruh produksi dan alokasi semua sumber daya (Yueh, 2010) sehingga peran pajak sangat kecil dalam aktivitas ekonomi Cina. Sejak **implementasi Open Door Policy** di tahun 1978 dimana pemerintah memasuki reformasi ekonomi terbuka (market-oriented), inilah periode dimulai sistem perpajakan di Cina (Lin, 2000). Reformasi Kembali terjadi di tahun 1994, awal periode reformasi sistem perimbangan pajak antara pemerintah pusat dan daerah (Shen, Zhao & Zou, 2014).

Kemudian pendapatan pajak menjadi bagian utama untuk membiayai pengeluaran pemerintah pada seluruh level di Cina (Lu & Guo, 2012).

**Indonesia juga mengalami reformasi perpajakan, implementasi desentralisasi fiskal sejak tahun 2004 atau 10 tahun setelah Cina menjadi cikal bakal berlanjutnya "The Big Bang" otonomi daerah di Indonesia.** Sistem perimbangan perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah terus diperbaharui. Salah satunya dengan diterbitkannya UU HKPD no. 1 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan yang lebih luas untuk meningkatkan local taxing power ke pemerintah daerah di Indonesia.





## Komparasi Studi - Pajak Daerah di China

### Teori dan Pengukuran Kapasitas Pajak dan Upaya Pemungutan Pajak

#### Teori Kapasitas Pajak (*Tax Capacity*) dan Upaya Pemungutan Pajak (*Tax Effort-TE*)

- Studi Terkait Pengukuran Upaya Pajak.** Menurut banyak peneliti seperti Badu & Li, 1994; Wang et al., 2009; Chaudhry & Munir, 2010; Huang et al, 2012, setiap daerah atau negara memiliki perbedaan dalam penerapan perpajakannya maka tidak ada "standar" yang dapat menjelaskan karakteristik khusus dalam mengukur model *tax effort index*.
- Permasalahan dasar adalah bagaimana agar pajak dapat mendukung pertumbuhan ekonomi?** Untuk menyelesaikan pertanyaan tsb, kita harus mengukur kapasitas pajak (*tax capacity*) suatu daeah. Selain itu, kita juga harus mengukur tax effort yang sangat terkait dengan konsep kapasitas pajak. Salah satu alat untuk mengukur **tax capacity** dan **tax effort** adalah menggunakan metode regresi:

**Cara mengukur tax effort** adalah total realisasi penerimaan pajak dibagi *tax capacity*. *Tax capacity* adalah tarif pajak dikali dasar tarif pajak.

$$\text{Formula: } te = \frac{tr}{tc}$$

Dimana: *te* adalah *tax effort*  
*tr* adalah *actual tax ratio collection*  
*tc* adalah *tax capacity*

**Kapasitas Pajak** adalah kemampuan dari otoritas pajak untuk mengumpulkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah berdasarkan dasar pajak (Wu, 2002; Teera & Hudson, 2004; Wang et al.,2009; Le et al., 2012). Kapasitas pajak dapat diukur dengan menggunakan formula berikut:

$$\text{Formula: } \text{tax capacity} = \text{legal tax rate} + \text{legal tax base}$$

- Hincrichs (1966) mencari hubungan antara ukuran dan struktur penerimaan pemerintah and perkembangan social ekonomi menggunakan pendekatan pada 60 negara.** Dia menemukan bahwa tingkat keterbukaan yang diukur dengan rasio import terhadap GNP adalah faktor determinan yang signifikan terhadap *tax ratio* dibanding pendapatan per kapita di negara berkembang. Sementara di negara maju dan transitional yang signifikan terhadap *tax ratio* adalah GNP per kapita.

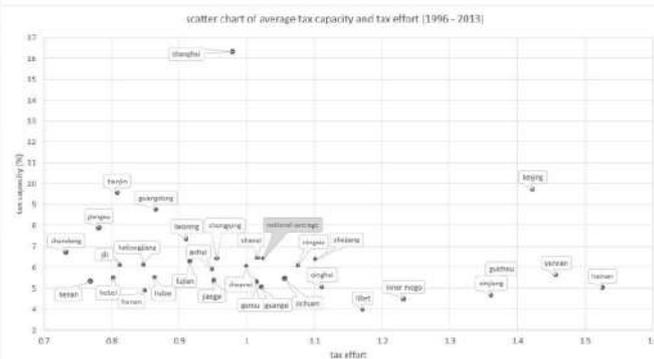


Shanghai City



Skyline at Shanghai City

- Jiang, 2017 pada disertasinya menemukan peta kapasitas pajak dan usaha pajak di Cina** menggunakan metode regresi seperti terlihat pada scatter plot di bawah. Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Shanghai menunjukkan kapasitas pajak tertinggi dibandingkan provinsi lain karena kekhususan posisi ekonomi dan politik serta tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi. Namun, usaha pajaknya masih lebih rendah dibanding rata-rata nasional.



Sebagai kesimpulan temuannya, terlihat **adanya hubungan negatif antara usaha pajak dan kapasitas pajak**. Provinsi dengan kapasitas pajak yang lebih tinggi cenderung untuk memiliki usahan pajak yang lebih rendah, dan sebaliknya. **Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya tingkat efisiensi yang rendah di kinerja pajak**. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada pemerintah provinsi yang efisien, kapasitas pajak yang besar akan menghasilkan usaha pajak yang juga lebih tinggi.

Di Cina, provinsi Tianjin, Guangdong, Jiangsu, Liaoning dan Shandong adalah contoh 4 province yang memiliki kapasitas pajak yang tinggi namun usaha pajaknya rendah. Rekomendasi untuk posisi seperti itu maka meningkatkan usaha pengumpulan pajak dan menegakkan hukuman oleh kantor pajak dapat menghasilkan kinerja Perpajakan yang lebih baik.

#### Map of Mainland China, Region and Provinces



Kondisi yang lain terjadi pada provinsi Hainan, Yunnan, Guizhou, Xinjiang, Inner Mongolia dan Tibet. Usaha Pajak yang dilakukan oleh kantor pajak sudah sangat kuat namun provinsi tersebut tidak mampu menghasilkan pendapatan pajak karena rendahnya kapasitas pajak provinsi tersebut.





# Bab III

## PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

**Pemberdayaan UMKM:** Menghadapi tantangan, mendorong pertumbuhan, dan menggerakkan ekonomi lokal melalui dukungan pemerintah.





Pasar Bintan Center,  
Tanjungpinang

## Local Economic Development Review

- Gambaran Umum UMKM di Wilayah Kepri
- Dukungan Pemerintah Terhadap UMKM di Wilayah Kepri
- Inventarisasi Kendala yang Dihadapi UMKM



### 3. Pengembangan Ekonomi Daerah: Pemberdayaan UMKM Kepri

#### 3.1 Gambaran Umum UMKM di Kepulauan Riau

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha pada tiap-tiap kategori. Klasifikasi UMKM menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM disebutkan bahwa: i) Usaha Mikro memiliki kriteria yaitu kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000; ii) Usaha Kecil memiliki kriteria yaitu kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000; dan iii) Usaha Menengah memiliki kriteria yaitu kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2022, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta, dengan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto nasional sebesar 60,5 persen dan total investasi UMKM nasional sebesar 60 persen. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, rata-rata sekitar 98 persen perusahaan di Indonesia dikategorikan sebagai UMKM dan hanya kurang dari 2 persen perusahaan di Indonesia yang termasuk usaha besar.

##### 3.1.1 Sebaran UMKM di Kepulauan Riau per Kabupaten/Kota

Berdasarkan data dari BPS Kepri, pada tahun 2022 tercatat jumlah IKM di Kepri

sebanyak 17.039 usaha. Jumlah tersebut secara mayoritas berada di Batam dengan total jumlah IKM sebanyak 5.340 usaha kemudian dilanjutkan secara berturut-turut yaitu Natuna (2.572), Karimun (2.325), Tanjungpinang (2.283), Lingga (2.195), Bintan (1.873), dan Kepulauan Anambas (451).

Geliat perekonomian yang dinamis namun tetap *sustainable* di Kota Batam menjadi penyebab banyaknya pelaku UMKM disana. Batam memiliki beberapa keunggulan dibanding daerah lain, yaitu pertumbuhan ekonomi yang paling baik di Kepri, lapangan pekerjaan yang terbuka luas, dan jumlah masyarakat yang tinggi sehingga membuat UMKM juga tumbuh di kota tersebut. Adapun rincian sebaran UMKM per wilayah seperti pada Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1** – Sebaran UMKM per Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, 2019-2022

Kab/Kota	Jumlah Usaha			
	2019	2020	2021	2022
Karimun	2.995	2.465	2.668	2.325
Bintan	1.582	1.464	1.578	1.873
Natuna	2.401	2.185	2.280	2.572
Lingga	2.412	2.120	1.797	2.195
Kepulauan Anambas	1.225	1.144	1.379	451
Batam	3.918	2.595	6.138	5.340
Tjpinang	2.498	1.806	2.185	2.283
<b>Jumlah</b>	<b>17.031</b>	<b>13.779</b>	<b>18.025</b>	<b>17.039</b>

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

##### 3.1.2. Serapan Tenaga Kerja UMKM per Kabupaten/Kota

Serapan tenaga kerja UMKM pada tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 26.216 orang, mayoritas ada di wilayah Batam yaitu 9.839 orang. Serapan terkecil ada di Anambas sebesar 758 orang dan secara lebih rinci tersaji dalam Tabel 3.2 berikut.

**Tabel 3.2** – Serapan Tenaga Kerja UMKM per Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, 2019-2022

Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kerja			
	2019	2020	2021	2022
Karimun	5.357	4.354	4.964	3.516
Bintan	2.198	2.399	2.465	2.632
Natuna	3.620	3.471	3.757	2.935
Lingga	3.774	3.355	2.851	3.072
Kepulauan Anambas	1.547	1.804	2.103	758
Batam	8.720	5.743	10.654	9.839
Tjpinang	3.925	3.181	3.550	3.464
<b>Jumlah</b>	<b>29.141</b>	<b>24.328</b>	<b>30.344</b>	<b>26.216</b>

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

### 3.1.3 Sebaran UMKM di Kepulauan Riau per Sektor/Klasifikasi Industri

Jika melihat menurut klasifikasi industri, IKM di Kepri didominasi oleh **sektor Makanan** sebanyak 10.818 usaha lalu disusul oleh Pakaian Jadi sebanyak 2.018 UMKM, serta Kayu, Barang dari Kayu, dan Gabus dengan jumlah total sebanyak 1.211 UMKM. Tingginya jumlah IKM sektor Makanan, Pakaian Jadi, dan Olahan Kayu di Kepri menandakan **tingginya permintaan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan**. Tingginya permintaan ini kemudian diikuti munculnya penawaran melalui usaha-usaha UMKM. Adapun rincian sebaran UMKM per sektor usaha seperti pada Tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3** – Sebaran UMKM per Sektor/Klasifikasi Industri di Kepulauan Riau, 2020-2022

Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan		
	2020	2021	2022
Makanan	8.335	11.469	10.818
Minuman	591	787	675
Tekstil	131	161	123
Pakaian Jadi	1.473	2.084	2.018
Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	0	23	15
Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, Anyaman Bambu	1.513	1.089	1.211
Percetakan dan Reproduksi Media	101	67	103
Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	16	54	29
Farmasi, obat kimia, dan obat tradisional	68	108	133
Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	2	0	21
Barang Galian Bukan Logam	404	431	639
Barang Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	573	869	425
Mesin dan Perlengkapan	9	3	18
Kendaraan Bermotor, Trailer, Semi Trailer	0	3	0
Alat Angkutan Lainnya	274	152	204
Furnitur	165	387	428
Pengolahan Lainnya	122	165	164
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	16	173	15
<b>Jumlah</b>	<b>13.793</b>	<b>18.025</b>	<b>17.039</b>

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

### 3.1.4 Serapan Tenaga Kerja UMKM per Sektor/Klasifikasi Industri

Serapan tenaga kerja UMKM pada tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 26.216

orang dengan **mayoritas ada pada sektor Makanan yaitu 16.021 orang**. Serapan terkecil ada di Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki sebesar 15 orang.



Jumlah serapan tenaga kerja ini berbanding lurus dengan jumlah UMKM di sektor tersebut, yakni UMKM paling banyak berada di sektor Makanan dan paling sedikit ada di Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki.

Secara lebih rinci jumlah serapan tenaga kerja tersaji pada Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4 – Serapan Tenaga Kerja UMKM per Sektor/Klasifikasi Industri di Kepulauan Riau, 2020-2022**

Klasifikasi Industri	Jumlah Tenaga Kerja		
	2020	2021	2022
Makanan	13.857	18.669	16.021
Minuman	1.084	1.686	1.351
Tekstil	302	246	169
Pakaian Jadi	2.769	2.834	2.673
Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	0	46	15
Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, Anyaman Bambu	2.497	1.845	1.845
Percetakan dan Reproduksi Media	196	198	266
Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	42	108	41
Farmasi, obat kimia, dan obat tradisional	100	160	169
Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	2	0	26
Barang Galian Bukan Logam	900	1.014	1.083
Barang Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	1.446	1.692	1.014
Mesin dan Perlengkapan	54	26	19
Kendaraan Bermotor, Trailer, Semi Trailer	0	12	0
Alat Angkutan Lainnya	380	286	288
Furnitur	462	1.018	946
Pengolahan Lainnya	185	303	258
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	52	201	32
<b>Jumlah</b>	<b>24.328</b>	<b>30.344</b>	<b>26.216</b>

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

### 3.2 Kendala yang Dihadapi UMKM dan Pemberdayaan yang Sesuai bagi UMKM

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau (Dinas KUKM) dan hasil kurasi data dengan pelaku UMKM secara langsung, terdapat **beberapa kendala UMKM** dalam pengembangan usaha sebagai berikut:

1. Pada sektor kuliner, produk ekspor terkendala pada periode **kadaluarsa produk yang masih pendek (mudah basi)** dan tingginya biaya membeli kemasan sesuai standar karena ongkos kirim dari produsen di pulau Jawa ke Kepri relatif mahal.
2. **Persyaratan administratif yang rumit untuk ekspor** produk membuat pelaku

UMKM menitipkan produk ekspor ke perusahaan yang telah biasa melakukan ekspor. Sebagai konsekuensi, produk yang dititipkan tidak diekspor dengan merk aslinya (produk tanpa merk atau diganti merk lain) yang harga jualnya lebih rendah.

3. **UMKM terkendala agunan** dalam pengajuan kredit yang disediakan oleh pemda. Gubernur telah membuat kebijakan strategis untuk memberikan bantuan subsidi bunga untuk pembiayaan, namun karena syarat pengajuan kredit memerlukan agunan, fasilitas tersebut jadi kurang efektif.
4. **Pelaku UMKM yang merupakan ibu rumah tangga masih cenderung ingin melakukan semua pekerjaan sendiri**, mulai dari produksi, manajemen,

keuangan, hingga pemasaran. Hanya sedikit pelaku UMKM yang memiliki admin khusus. Hal ini juga karena keterbatasan biaya untuk mempekerjakan admin.

5. **UMKM belum memiliki rekening usaha yang terpisah** dan belum memiliki QRIS usaha.
6. Banyak **pelaku UMKM yang baru merintis** dan belum memiliki pasar yang luas karena jarang ikut bazaar dan tidak aktif di media sosial

Berdasarkan kendala-kendala ini, dapat dipetakan **bentuk pemberdayaan yang sesuai bagi UMKM di Kepri** yaitu sebagai berikut.

- a. Pengadaan alat sealer dan pelatihan *packaging* yang higienis dan tahan lama.
- b. Pendampingan tata cara ekspor produk.
- c. Sosialisasi bantuan permodalan KUR dan umi yang bebas agunan.
- d. Pelatihan pembukuan sederhana.
- e. *Workshop photography* dan desain media sosial.
- f. Pendampingan pembukaan rekening terpisah dan pembuatan QRIS.
- g. Mengadakan bazaar dan pelatihan digital *marketing*.

### 3.3 Dukungan Pemerintah terhadap Pemberdayaan UMKM

#### 3.3.1 Dukungan Pembiayaan: Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pemerintah berkomitmen mendukung pemberdayaan UMKM melalui bantuan permodalan kepada pelaku usaha. Saat ini terdapat dua bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah yaitu **Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)**. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program pemerintah yang bertujuan membantu pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan pembiayaan.

#### 3.3.1.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sesuai dengan Permenko 1 Tahun 2023, Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. **Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:** i) meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; ii) meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan iii) mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

**KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang disalurkan melalui perbankan dan lembaga keuangan.** Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam program KUR yaitu pemberian subsidi bunga. KUR memiliki plafon sebesar Rp10juta sampai dengan Rp500juta yang terbagi ke dalam tiga skema besar yaitu: i) KUR Super Mikro memiliki jumlah plafon pinjaman paling banyak Rp10.000.000,00 dan Suku Bunga/Margin sebesar 3% efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara; ii) KUR Mikro memiliki jumlah plafon pinjaman diatas Rp10.000.000,00 dan paling banyak Rp100.000.000,00 dan Suku Bunga/Margin sebesar 6%-9% efektif per tahun yang disesuaikan dengan frekuensi peminjaman; dan iii) KUR Kecil memiliki jumlah plafon pinjaman diatas Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp500.000.000,00 dan Suku Bunga/Margin sebesar 6%-9% efektif per tahun yang disesuaikan dengan frekuensi peminjaman.

Sejak 30 Mei 2024 terjadi pembaharuan kebijakan penyaluran KUR dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Peraturan ini memberikan beberapa perubahan atas peraturan sebelumnya yang telah berlaku selama dua tahun, yakni mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Perubahan kebijakan KUR bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

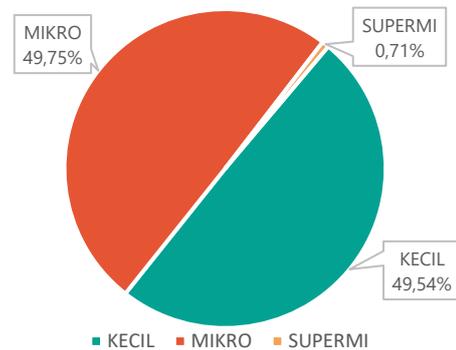
Aturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mengalami beberapa perubahan, di antaranya:

i) **KUR Mikro, KUR Super Mikro, dan KUR Kecil: Tidak dipersyaratkan agunan tambahan**, kecuali agunan pokok berupa usaha yang dibiayai; ii) KUR Khusus: Diperluas komoditasnya, sehingga bisa mencakup perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain; iii) Calon Penerima KUR: Diperbolehkan menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar, seperti KUR pada Penyalur KUR yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif, atau kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun; iv) Calon Penerima KUR Kecil: Diperbolehkan ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan; dan v) KUR Mikro untuk Petani: Diberikan insentif dengan pengecualian dari ketentuan pembatasan.

### Perkembangan Penyaluran KUR

Berdasarkan Aplikasi SIKP, tercatat **penyaluran KUR sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp1.320,38 miliar kepada 16.765 debitur**. Kinerja penyaluran mengalami peningkatan sebesar 7,06 persen (yoy) dari September tahun sebelumnya sebesar Rp71.233,28 miliar. Di sisi lain, terjadi penurunan debitur yaitu sebesar minus 14,01 persen (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 19.496 debitur.

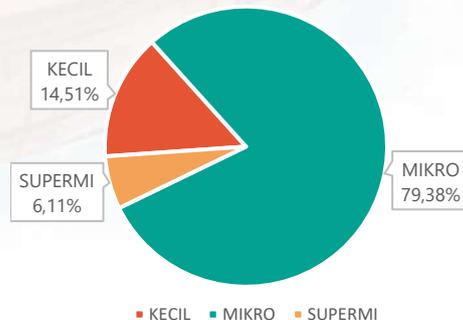
**Grafik 3.1** – Penyaluran KUR per Skema s.d. 30 September 2024 (Rp miliar)



Sumber: SIKP, 2024 (diolah)

Sampai dengan 30 September 2024, dari sisi **penyaluran, KUR didominasi oleh skema Mikro sebesar Rp656,90 miliar (49,75 persen)** kemudian dilanjutkan dengan skema Kecil sebesar Rp654,15 miliar (49,54 persen) dan terakhir Super Mikro sebesar Rp9,32 miliar (0,71 persen) yang secara rinci tersaji pada Grafik 3.1 berikut.

**Grafik 3.2** – Debitur KUR per Skema s.d. 30 September 2024 (debitur)



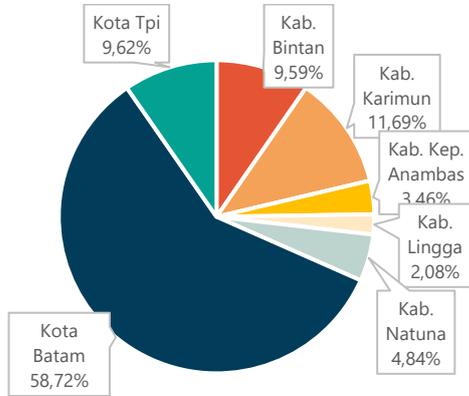
Sumber: SIKP, 2024 (diolah)

Penyaluran KUR Skema Supermi mendapatkan tantangan karena terdapat pembiayaan lain dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan skema yang mirip yaitu pembiayaan UMi dan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Kepri. **Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan akses permodalan nol persen dari pemerintah daerah dengan plafon lebih tinggi yaitu maksimal Rp40 juta**



membuat pelaku usaha memiliki banyak pilihan pada sektor supermikro dan bahkan mikro.

**Grafik 3.3 – Penyaluran KUR per Wilayah s.d. 30 September 2024 (Rp miliar)**



Sumber: SIKP, 2024 (diolah)

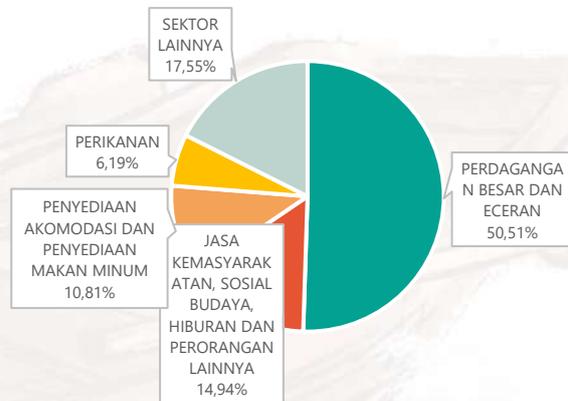
Dari sisi **debitur**, sebagaimana tersaji pada Grafik 3.2, **KUR didominasi oleh skema Mikro sebesar 13.308 debitur (79,38 persen)** kemudian dilanjutkan dengan skema Kecil sebesar 2.432 debitur (14,51 persen) dan terakhir Super Mikro sebesar 1.025 debitur (6,11 persen).

Sampai dengan 30 September 2024, sebagaimana tersaji dalam Grafik 3.3, **penyaluran KUR per wilayah paling banyak tersalur di Kota Batam**, yaitu sebesar Rp775,32 miliar kepada 8.623 debitur atau 58,72 persen dari total penyaluran KUR. Hal ini dikarenakan posisi Batam sebagai pusat kegiatan perekonomian UMKM sektor perdagangan di Kepri dengan porsi pelaku UMKM sebesar 31,34 persen atau sebanyak 5.340 pelaku UMKM dari total 17.039 pelaku UMKM lingkup Prov. Kepri.

**Posisi kedua penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten Karimun** sebesar Rp154,39 miliar kepada 2.074 debitur, lalu dilanjutkan berturut-turut: Kota Tanjungpinang Rp126,97 miliar (1.759 debitur); Kabupaten Bintan Rp126,67 miliar (1.928 debitur); Kabupaten Natuna Rp63,91 miliar (1.097 debitur); Kabupaten Kepulauan Anambas Rp45,69 miliar (860 debitur); dan Kabupaten Lingga Rp27,44 miliar (424 debitur).

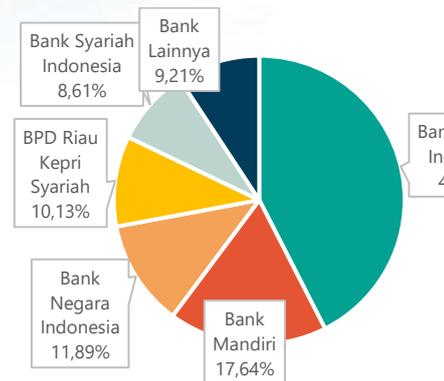
Sebagai wilayah dengan pusat perekonomian berada di sektor perdagangan dan industri, **penyaluran KUR per sektor** di Kepri juga didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp666,90 miliar dengan porsi 50,51 persen. Lebih lanjut penyaluran KUR per sektor berturut-turut, yaitu: Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya (Rp197,24 miliar); Akomodasi dan Makan Minum (Rp142,78 miliar); Perikanan (Rp81,74miliar); dan Sektor Lainnya (Rp231,71 miliar). Rincian penyaluran KUR per sektor tersaji pada Grafik 3.4 berikut.

**Grafik 3.4 – Penyaluran KUR per Sektor**



Sumber: SIKP, 2024 (diolah)

**Grafik 3.5 – Penyaluran KUR per Lembaga Penyalur**



Sumber: SIKP, 2024 (diolah)

Penyaluran KUR sampai dengan 30 September 2024 didominasi oleh bank BUMN dengan **penyaluran tertinggi dilakukan oleh Bank BRI** sebesar Rp561,39 miliar dengan porsi 42,52 persen. Lebih lanjut penyaluran berturut



turut dilakukan oleh lembaga keuangan berikut: Mandiri (Rp232,88 miliar); BNI (Rp157,02 miliar); BRK Syariah (Rp133,75 miliar); BSI (Rp113,68 miliar); Pegadaian (Rp43,02 miliar); BTN (Rp36.97 miliar); dan lembaga keuangan lainnya (Rp41,68 miliar) yang telah tersaji pada Grafik 3.5 berikut.

**3.3.1.2 Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)**

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan pemerintah menjadi kemandirian usaha kepada **usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR)**. Pembiayaan UMi memberikan fasilitas permodalan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

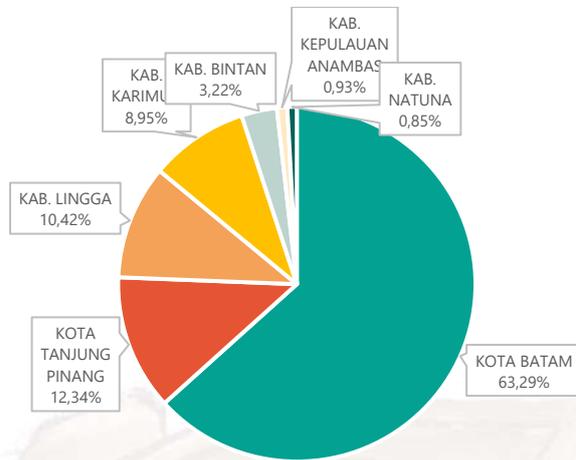
Berdasarkan Pasal 2 PMK No.193/PMK.05/2020, Pembiayaan UMi bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah.

Berdasarkan data SIKP-UMi, sampai dengan 30 September 2024, **pembiayaan UMi di Kepri telah menjangkau 7.959 debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp42,64 miliar**. Dari sisi nominal, penyaluran UMi tumbuh sebesar 9,58 persen (yoy) sedangkan dari sisi debitur, jumlah debitur UMi tetap.

Dari sisi wilayah, sejalan dengan Grafik 3.6, secara berturut-turut penyaluran UMi per wilayah yaitu Kota Batam Rp26,99 miliar (63,29 persen), Kota Tanjungpinang Rp5,26 miliar (12,34 persen), Kabupaten Lingga Rp4,44 miliar (10,42 persen), Kabupaten Karimun Rp3,82 miliar (8,95 persen), Kabupaten Bintan Rp1,37 miliar (3,22 persen), Kabupaten Kepulauan

Anambas Rp0,40 miliar (0,93 persen), dan Kabupaten Natuna Rp0,36 miliar (0,85 persen).

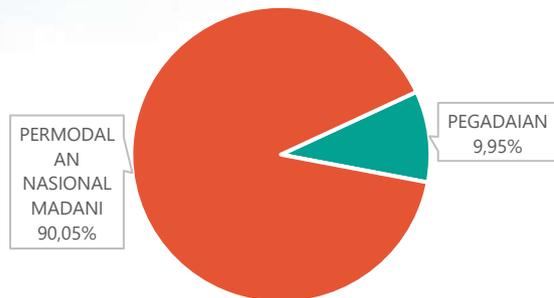
**Grafik 3.6** – Porsi Penyaluran UMi per Wilayah, s.d. 30 September 2024



Sumber: SIKP-UMi, 2024 (diolah)

Program Pembiayaan UMi telah tersebar di seluruh Kota/Kabupaten di Prov. Kepri, namun penyebarannya masih terpusat di Kota Batam. Hal ini sejalan dengan **jumlah sebaran UMKM di Provinsi Kepri yang berpusat di kota Batam** sehingga Pembiayaan UMi dapat tersalurkan dengan maksimal di Kota Batam.

**Grafik 3.7** – Porsi Penyaluran UMi per Wilayah, s.d. 30 September 2024



Sumber: SIKP-UMi, 2024 (diolah)

Dari sisi lembaga penyalur, sebagaimana tersaji pada Grafik 3.7, UMi disalurkan oleh dua lembaga penyalur dengan **realisasi penyaluran tertinggi oleh PNM sebesar Rp38,40 miliar kepada 7.570 debitur**. Sesuai dengan Grafik 3.7, secara berturut-turut



penyaluran UMI per lembaga penyalur yaitu PNM Rp38,40 miliar (90,05 persen) dan Pegadaian Rp4,24 miliar (9,95 persen).

### 3.3.2 Dukungan Belanja KL untuk Pemberdayaan UMKM

Pada tahun 2024, terdapat **dukungan Belanja K/L untuk pemberdayaan UMKM dengan nilai Pagu sebesar Rp2,29 miliar** dan terbagi ke dalam 3 K/L, yaitu: Kementerian Perindustrian (Rp0,67 miliar), Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil (Rp1,49 miliar), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rp0,14 miliar).

Dari pagu tersebut, sampai dengan November 2024 telah terealisasi belanja sebesar Rp0,68 miliar atau 29,48 persen sedangkan anggaran yang diblokir yaitu sebesar Rp0,02 miliar atau 0,80 persen dari Pagu. Rincian belanja K/L dalam pemberdayaan UMKM tersaji pada Tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3.5 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L untuk Pemberdayaan UMKM**

No.	Nama K/L	Output	Suboutput	Pagu	Realisasi
1.	Kementerian Perindustrian	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi, dan Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan	Rp212.377.000	Rp180.445.400
2.	Kementerian Perindustrian	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Tugas Pembantuan	Rp459.404.000	Rp382.738.735
3.	Kementerian Koperasi dan UKM	Bantuan Peralatan / Sarana	Pengembangan Rumah Kemasam bagi Usaha Mikro	Rp1.484.990.000	-
4.	B POM	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp104.368.000	Rp92.103.354
5.	B POM	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp34.327.000	Rp21.492.700
<b>Jumlah</b>				<b>Rp2.297.336.000</b>	<b>Rp676.780.189</b>

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

### 3.3.3. Dukungan Pemberdayaan UMKM melalui belanja TKD

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, pemerintah juga memberikan dukungan melalui belanja **DAK Non Fisik Lainnya** yang terdapat pada TKD tahun 2024. Dukungan pemberdayaan UMKM diwujudkan melalui belanja pada jenis Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK serta Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM. Kedua jenis belanja TKD ini terdapat di 6 dari 8 pemerintah daerah yang ada di Kepri.

#### 3.3.3.1 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Pada jenis belanja **Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil** terdapat total pagu belanja sebesar Rp5,31 miliar dan sampai dengan tahap 2 sudah tersalur sebesar Rp3,33 miliar atau 62,76 persen dengan rincian sebagaimana Tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.6** – Pagu dan Realisasi Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM di Kepri (dalam Miliar Rupiah)

Nama Pemda	Pagu Total	Total Salur	%Salur
Kepri	3,56	1,63	45,92%
Bintan	0,55	0,54	98,33%
Natuna	0,36	0,31	87,63%
Lingga	0,48	0,48	100,00%
Kep. Anambas	0,36	0,36	100,00%
<b>Total</b>	<b>5,31</b>	<b>3,33</b>	<b>62,76%</b>

Sumber: OM-SPAN TKD, 2024 (diolah)

Dari sisi wilayah, **persentase penyaluran tertinggi terdapat pada Kab. Lingga dan Kab. Kep. Anambas** yang menyalurkan 100 persen. Prov. Kepri sebagai daerah dengan penerima Pagu terbanyak yaitu Rp3,56 miliar justru memiliki persentase penyaluran terendah yaitu 45,92 persen.

### 3.3.3.2 Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pada jenis belanja Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah terdapat total pagu belanja sebesar Rp8,66 miliar dan sampai dengan tahap 2 sudah tersalur sebesar Rp7,37 miliar atau 85,05 persen dengan rincian sebagaimana Tabel 3.7 berikut.

**Tabel 3.7** – Pagu dan Realisasi Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM di Kepri (dalam Miliar Rupiah)

Nama Pemda	Pagu Total	Total Salur	%Salur
Bintan	2,29	2,29	100,00%
Natuna	1,97	1,31	66,19%
Lingga	2,68	2,68	100,00%
Tanjung Pinang	1,72	1,09	63,46%
<b>Total</b>	<b>8,66</b>	<b>7,37</b>	<b>85,05%</b>

Sumber: OM-SPAN TKD, 2024 (diolah)

Dari sisi wilayah, persentase penyaluran tertinggi terdapat pada Kab. Bintan dan Kab. Lingga yang menyalurkan 100 persen.

Persentase penyaluran terendah ada di Kota Tanjungpinang yaitu 63,46 persen.

### 3.3.4 Dukungan Pemberdayaan UMKM melalui belanja APBD

Pemerintah daerah melalui belanja APBD memberikan berbagai dukungan pemberdayaan UMKM dalam bentuk bantuan akses permodalan, pelatihan, *business matching*, pendampingan langsung.

Kanwil DJPb Kepri melaksanakan FGD bersama dengan dinas terkait dari masing-masing pemda lingkup Kepri dengan hasil sebagai berikut.

#### 3.3.4.1 Pemprov Kepri

Beberapa aktivitas pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemprov Kepri khususnya Dinas KUKM yaitu: i) **pemberian pinjaman permodalan dengan bunga nol persen bekerja sama dengan BRK Syariah Kepri dan anggaran subsidi margin di tahun 2024 sebesar Rp1 miliar**; ii) roadshow pelatihan keterampilan vokasional ke seluruh kabupaten/kota di Kepri; iii) penyediaan tenaga pendamping di masing-masing kabupaten/kota di Kepri; dan iv) bekerja sama dengan koperasi-koperasi dari Malaysia melakukan *business matching* produk UMKM dengan pembeli dari delapan negara.

#### 3.3.4.2 Pemko Tanjungpinang

Beberapa aktivitas pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang khususnya DTKKUM yaitu pendampingan, sosialisasi, dan **bantuan alat dukung usaha kepada UMKM dengan pagu Rp0,37 miliar dan sudah direalisasikan 66,63 persen dari Pagu.**

#### 3.3.4.3 Pemko Batam

Beberapa aktivitas pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemko Batam khususnya DKUMPP yaitu **fasilitas kemudahan perizinan usaha bagi pelaku**

**UMKM dan percepatan waktu pengurusan izin dengan pagu Rp0,6 miliar.**

#### 3.3.4.4 Pemkab Bintan

Beberapa aktivitas pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemkab Bintan khususnya DKUMPP yaitu: **i) pemberian pinjaman permodalan dengan bunga nol persen yang sudah dijalankan sejak tahun 2021 dengan anggaran subsidi bunga di tahun 2024 sebesar Rp1,25 miliar dan bekerja sama dengan BPR Bintan; ii) pemberian bantuan hibah alat produksi kepada 50 kelompok usaha dari berbagai sektor; iii) pendampingan legalitas usaha dan peningkatan kualitas SDM; dan iv) penyusunan rencana UMKM Bintan sebagai rantai pasok industri di Batam dan Bintan tahun 2025.**

#### 3.3.4.5 Pemkab Natuna

Beberapa aktivitas pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemkab Natuna khususnya DKUMPP yaitu: **i) mendukung program akses permodalan nol persen dari Pemprov Kepri; ii) program bantuan bagi UMKM terdampak bencana alam; dan iii) pendampingan produk UMKM unggul seperti tika pandan, kerupuk atom, kerupuk ikan, peda, dan ikan asap.**

#### 3.3.4.6 Pemkan Kep. Anambas

Beberapa aktivitas pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemkab Anambas khususnya DKUMPP yaitu: **i) pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UMK; dan ii) pendampingan UMKM unggul dan potensial untuk memasarkan produknya ke luar Anambas, seperti kerupuk atom dan rendang cumi.**

Aktivitas pemberdayaan ini menggunakan pagu dari APBD sebesar **Rp0,7 miliar** dengan realisasi sudah 47,78 persen dari Pagu.

#### 3.3.4.7 Pemkab Karimun

Pemkab Karimun belum menyajikan data dan belum hadir dalam sesi FGD.

#### 3.3.4.8 Pemkab Lingga

Pemkab Lingga belum menyajikan data dan belum hadir dalam sesi FGD.

### 3.3.5 Dukungan Kebijakan Pemberdayaan UMKM Lainnya

#### 3.3.5.1 Pemberdayaan UMKM oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri

Berdasarkan hasil FGD, dalam mendukung pemberdayaan UMKM, Kantor Perwakilan BI Kepri memiliki Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah - Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif, dan Syariah. Tim ini melaksanakan berbagai kegiatan berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, yaitu: **i) mengatur rasio pembiayaan inklusif perbankan; ii) penyediaan informasi database profil UMKM; iii) menyertakan produk UMKM Kepri dalam beberapa pameran** (pengisian booth oleh-oleh di Terminal 3 Bandara Soetta, showcase di Hotel Borobudur, dan pameran internasional); **iv) TOT kepada pendamping UMKM yang ada di Dinas KUKM Kepri terkait aplikasi SiAPIK; v) bantuan CSR kepada UMKM dalam bentuk sarana dan prasarana dengan realisasi sudah 96 persen; dan vi) pengembangan ekosistem halal value chain melalui usaha syariah dan program keuangan syariah.**

#### 3.3.5.2 Pemberdayaan UMKM oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Kepri

Berdasarkan hasil FGD, dalam mendukung pemberdayaan UMKM, OJK Kepri melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: **i) pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang rutin melaksanakan monev terkait keuangan daerah; ii) pembentukan ekosistem keuangan inklusif melalui bussiness matching** antara pelaku



UMKM dengan lembaga jasa keuangan; dan iii) pembentukan Satgas Pasti (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) untuk menghentikan aktivitas pinjaman online ilegal.

### 3.4 Analisis Kendala UMKM, Kebutuhan Pemberdayaan UMKM, dan Dukungan Pemberdayaan yang Diberikan oleh Pemerintah

Pada bagian ini akan disajikan kesesuaian antara dukungan yang diberikan pemerintah terhadap kebutuhan pemberdayaan UMKM, selain itu juga akan diidentifikasi kebutuhan Pemberdayaan UMKM yang belum di-support oleh pemerintah.

#### 3.4.1 Analisis Efektifitas Pemberdayaan UMKM yang Telah Dilakukan oleh Kanwil DJPb Kepri

Sesuai dengan amanah baru yang diberikan kepada Kanwil DJPb Kepri melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbandaharaan

Nomor KEP-112/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan UMKM Lingkup DJPb, maka Kanwil DJPb Kepri telah melakukan beberapa bentuk **pemberdayaan UMKM yaitu profiling/kurasi kebutuhan pemberdayaan UMKM, pelatihan, pendampingan, hingga bazaar**. Melalui serangkaian pemberdayaan ini, dapat dipetakan dampak yang dirasakan oleh UMKM binaan sebagaimana tersaji pada Grafik 3.8.

Melalui Grafik 3.8 dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Kepri berdampak langsung pada peningkatan kapasitas usaha dari para pelaku UMKM. Lebih lanjut, penerima manfaat dari kegiatan pemberdayaan ini tidak hanya UMKM binaan Kanwil DJPb Kepri, tetapi juga pelaku UMKM umum yang bersifat rintisan dan tersebar di Tanjungpinang, Bintan, hingga Batam.

**Grafik 3.8** – Kondisi UMKM Sebelum Diberikan Pemberdayaan, Kegiatan Pemberdayaan yang Telah Dilakukan, dan Kondisi UMKM Setelah Menerima Pemberdayaan



### 3.4.2 Analisis Efektifitas Pemberdayaan UMKM yang Telah Dilakukan oleh K/L

Di Kepri terdapat **tiga K/L yang memiliki belanja terkait pemberdayaan UMKM, yaitu Kementerian Perindustrian, Kemenkop UKM, dan BPOM**. Ketiga K/L ini menggunakan belanja terkait pemberdayaan UMKM untuk beberapa suboutput yaitu pendampingan sertifikasi dan pengembangan produk UMKM, pelatihan kewirausahaan dan produksi, pengembangan rumah kemasan, dan pemenuhan standar produk.

Bentuk suboutput yang dilaksanakan oleh ketiga K/L ini bermanfaat bagi pengembangan kapasitas UMKM dan sesuai dengan kondisi UMKM di Kepri yang menghadapi tantangan terkait perizinan, sertifikasi, kewirausahaan, dan standarisasi produk.

Persentase realisasi belanja yang masih 29,48 persen dari Pagu perlu menjadi perhatian bersama mengingat anggaran tersebut akan sangat bermanfaat bagi pengembangan kapasitas UMKM.

### 3.4.2 Analisis Efektifitas Pemberdayaan UMKM yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah melaksanakan beberapa kegiatan **pemberdayaan UMKM mulai dari bantuan permodalan nol persen, pelatihan, *bussiness matching*, pelatihan pengembangan** kapasitas usaha, bantuan hibah alat produksi, hingga penyediaan pendamping UMKM.

Hal ini tentunya bermanfaat bagi pengembangan kapasitas usaha UMKM. Meskipun demikian, kegiatan yang dilakukan oleh pemda masih terbatas dari sisi penerima manfaat. **Pemda cenderung memberdayakan hanya UMKM binaan yang terdaftar dan tidak mengikutsertakan pelaku UMKM**

**umum** sehingga manfaat hanya dirasakan oleh sebagian UMKM dan cenderung UMKM yang itu-itu saja. Hal ini baik karena adanya pendalaman ilmu dan keterampilan, namun hanya dirasakan oleh beberapa UMKM saja.

Lebih lanjut, perlu dilaksanakan pemberdayaan UMKM yang lebih inklusif dan menjangkau banyak UMK sehingga manfaat yang dirasakan dapat lebih luas.

### 3.4.2 Analisis Efektifitas Pemberdayaan UMKM yang Telah Dilakukan oleh Stakeholders Lainnya

BI dan OJK sebagai lembaga pengawas perekonomian, moneter, dan aktivitas keuangan sangat aktif dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka **pemberdayaan UMKM meliputi perumusan kebijakan terkait pemberian pinjaman produktif kepada UMKM, pelatihan dan pendampingan, pengawasan aktivitas keuangan usaha, hingga *showcase*/pameran** produk. Selain itu, BI dan OJK juga aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan masalah/*current issue* melalui forum TPAKD dan TPID.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BI dan OJK sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM dalam hal pengembangan kapasitas usaha dan inklusi keuangan usaha.





## Pajak Daerah – Studi Komparasi Internasional Penerapan di Beberapa Negara OECD

### Abstrak

**UU HKPD di Indonesia seharusnya memberikan batasan yang lebih fleksibel kepada pemda untuk menentukan jenis pajak, tarif pajak dan bagaimana penerapan terbaik sesuai dengan karakteristik dan faktor lainnya yang sangat spesifik dan berbeda di tiap daerah.** Provinsi Kepulauan Riau misalnya mengalami beberapa masalah karena keunikan karakteristiknya sebagai provinsi kepulauan. Oleh karena itu, **perlu untuk melihat apakah ada ukuran yang ideal untuk menentukan jenis pajak, tarif pajak dan implementasi yang ideal dengan mempelajari (benchmarking) dengan negara-negara lain seperti OECD.**

Implementasi pajak pada negara-negara OECD sangat bervariasi. **Pajak Daerah yang diimplementasikan oleh masing-masing negara tidak dapat diambil pola yang konsisten untuk ditiru atau dipelajari oleh negara lain.** Maka dapat disimpulkan bahwa **tidak ada ukuran ideal terkait jenis pajak dan tarif pajak** karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM, program prioritas yang sedang dibangun pemda, jenis pajak yang diberikan kepada daerah, persyaratan yang kompleks dan lainnya.

### Latar Belakang

**Pemerintah Indonesia mengatur pembagian kewenangan terkait Perpajakan baik pajak pusat maupun pajak daerah melalui penerbitan UU No. 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Melalui UU HKPD ini berbagai fleksibilitas Pengaturan dan kewenangan yang lebih luas diberikan kepada daerah untuk meningkatkan derajat otonomi daerah dari waktu ke waktu.

Tentunya tidak semua klausul Pengaturan akan memberikan dampak yang sama antara satu daerah dengan daerah yang lain setelah menerapkan UU HKPD ini. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik wilayah, geografis, keluasan otonomi daerah dan faktor lainnya.

**Kepulauan Riau adalah provinsi yang sangat strategis dari letak geografis yang memiliki karakteristik sebagai provinsi Kepulauan yang luasan lautannya 98% dan daratan 2%.** Setelah terbitnya UU HKPD, implementasi klausul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kepri.

Untuk itu, perlu untuk memahami karakter suatu daerah dengan cara mempelajari berbagai jenis implementasi pajak daerah. Kajian ini melakukan studi komparasi penerapan pajak daerah dari beberapa negara sehingga diharapkan hasil dari kajian ini dapat membuka wawasan yang lebih luas mengenai keberagaman penerapan pajak sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para penyusun Peraturan terkait pajak daerah.

### Pajak Daerah di Berbagai Negara: Kajian Komparasi Internasional

Penulis: Harry Kitchen (*Department of Economics, Trent University*)

### Jenis Pajak Daerah yang ada di negara-negara OECD adalah:

1. Pajak pendapatan (Pajak Badan dan Pajak Penghasilan-pribadi) adalah sumber pajak daerah yang paling penting pada 14 negara (lihat tabel), yaitu: Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, Luksemburg, dan Republik Ceko. Pada negara tersebut, pajak pendapatan menghasilkan kurang lebih 9% dari penerimaan daerah. Sedangkan di Australia, Kanada, Meksiko, Perancis, Mesir, Hungaria, Irlandia, Belanda, Selandia Baru dan Inggris sebagai perbandingannya, negara-negara ini tidak memiliki penerimaan pajak penghasilan.
2. Pajak penjualan daerah atau pajak yang biasanya dipotong dari penjualan barang dan jasa, dapat menghasilkan antara 20% s.d 76% dari total penerimaan pajak daerah pada 10 negara (lihat table). Sedangkan 12 negara menghasilkan kurang dari 10% dari total penerimaan. Berbeda dengan negara lain, lima negara tidak mengenal adanya pajak penjualan daerah.
3. Pajak properti untuk lima negara maju seperti Australia, Kanada, Irlandia, Selandia Baru dan Inggris sangat besar yaitu 90% dari total pendapatan pajak. Sementara, pemda pada 10 negara hanya menghasilkan kurang dari 10%.
4. Pemda di Perancis, Itali, Mesir dan Turki sangat tergantung pada pajak lainnya (lihat kolom) yaitu yang berasal dari bisnis.
5. Tabel dibawah akan menyajikan ukuran terkait pentingnya pajak daerah dengan cara mengukur pajak daerah sebagai persentase dari PDB.
6. Selain cara diatas, kita juga bisa melihat pentingnya pajak daerah dengan mengukur persentase pajak daerah dibandingkan total penerimaan pajak termasuk pajak pusat. Dengan menggunakan ukuran ini, hasilnya sangat bervariasi pada beberapa negara. Contohnya pada negara federal, pajak daerah hanya kurang dari 1% dari total pajak di Meksiko (terendah) dan 14% di Swiss (tertinggi), sehingga rata-ratanya adalah 7,5%. Sementara itu, untuk negara lain, ukurannya bervariasi mulai dari kurang dari 1% di Mesir sampai dengan 33% di Denmark sehingga rata-ratanya adalah 12,7%.





## Pajak Daerah – Studi Komparasi Internasional Penerapan di Beberapa Negara OECD

Tabel Jenis Pajak Daerah yang ada di negara-negara OECD

Pajak Daerah di Negara OECD						
Negara	Sumber Pajak Sebagai Persentase dari Total Pendapatan Pajak Daerah				Share Pajak Daerah pada PDB	Share Pajak Daerah Pada Total Penerimaan Pajak
	PPH	Penjualan	Properti	Lainnya		
Australia	0.0	0.0	100	0.0	1.0	3.0
Austria	55.3	29.7	9.9	5.1	4.4	10.1
Kanada	0.0	1.9	91.3	6.8	2.9	8.1
Meksiko	0.0	2.6	86.7	10.8	0.1	0.8
Swiss	84.4	0.3	15.3	0.0	5.0	14.0
Amerika Serikat	6.5	21.8	71.8	0.0	3.5	11.5
Rep Ceko	90.8	4.2	4.6	0.4	4.8	12.4
Denmark	93.4	0.1	6.5	0.0	15.9	32.9
Finlandia	95.4	0.0	4.4	0.1	9.9	21.2
Perancis	0.0	11.5	48.2	40.4	4.4	9.7
Mesir	0.0	46.3	0.0	53.8	0.4	1.0
Irlandia	0.0	0.0	100	0.0	0.6	1.8
Luxemburg	92.9	1.3	5.6	0.3	2.4	5.9
Belanda	0.0	44	56	0.0	1.4	3.4
Selandia Baru	0.0	9.7	90.3	0.0	1.8	5.8
Turki	24.7	31.5	6.5	37.3	4.3	13
Inggris	0.0	0.0	99.5	0.5	1.5	4.1

Peta Negara-Negara OECD



Sebagai simpulan dari tabel diatas, pada negara OECD tidak ditemukan pola yang sama tentang penerapan pajak daerah atau suatu simpulan tentang apakah satu jenis pajak lebih baik dibanding jenis lainnya. Data dari tabel diatas juga tidak bisa menyimpulkan bahwa salah satu pemda lebih efisien atau tidak atau ukuran level efektif dan akuntabilitas.

Simpulan kedua, keputusan pemda untuk fokus pada satu jenis pajak atau lainnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk kapasitas SDM pajak, program prioritas yang sedang dibangun pemda, jenis pajak yang diberikan kepada daerah, persyaratan yang kompleks dan lainnya.



# Bab IV

## ANALISIS TEMATIK

”  
**Strategi Penguatan *Local Taxing Power* Sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD untuk optimalkan pendapatan daerah.**



Bawah Reserve, Anambas

## Thematic Analysis

- Perkembangan Penyelesaian Perda PDRD oleh Pemda
- Reviu Strategi Daerah dalam Penguatan *Local Taxing Power*
- Ringkasan Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Pengaturan Perda PDRD



# Special Box for Thematic Analysis

## Implementasi Strategi Penguatan LTP

Sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD

### Perlunya Pengaturan Khusus Ekonomi Maritim bagi Daerah Kepulauan

**U**ndang-undang HKPD belum mengakomodir potensi ekonomi daerah Kepulauan sehingga sulit mengakselerasi pendapatan asli daerah dan menyebabkan horizontal imbalances yang lebar di Kepri.

Berdasarkan *Focus Group Discussion* dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) lingkup Provinsi Kepulauan Riau disampaikan bahwa Kepulauan Riau sebagai **Archipelagic Region**, memiliki kondisi yang berbeda dari daerah lain di Indonesia, karena hanya memiliki **2% daratan dan 98% lautan**. Kondisi tersebut menimbulkan keterbatasan penggalian potensi penerimaan pajak daerah yang berada di daratan.

**UU HKPD saat ini belum secara spesifik mengatur potensi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dari sektor ekonomi maritim.** Sejatinya, sektor maritim memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama bagi daerah kepulauan atau daerah yang memiliki garis pantai yang panjang. Kurangnya pengaturan yang komprehensif ini menjadi kendala dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor yang sangat strategis ini.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain adalah **identifikasi objek pajak yang spesifik dari sektor maritim, penetapan tarif pajak yang adil dan efisien, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.**

Dengan demikian, perlu adanya kajian lebih lanjut dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait untuk memastikan bahwa potensi ekonomi maritim dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Potensi pajak dari sektor perikanan** misalnya, dapat berasal dari hasil tangkapan ikan, perizinan penangkapan, hingga pengolahan hasil perikanan. Selain itu, **sektor kelautan juga menawarkan potensi pajak** dari kegiatan pertambangan mineral di laut, dan energi laut. Namun, kurangnya pengaturan yang spesifik ini membuat potensi penerimaan daerah dari sektor maritim belum tergarap secara optimal.



## 4. Analisis Tematik

### 4.1 Pendahuluan

UU HKPD adalah aturan yang mengatur bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) di Indonesia. **UU HKPD bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal**, artinya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri.

UU ini mengatur mengenai **lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah** yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, **Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi** dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. UU HKPD memiliki tujuan utama meliputi:

1. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat** dengan cara memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah;
2. **Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan** secara lebih efisien, efektif dan akuntabel;
3. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal** dengan pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama** yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

**Penguatan Local Taxing Power** menjadi dasar bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah dan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam UU HKPD dan PP KUPDRD diarahkan untuk menurunkan administration dan *compliance cost*, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain. Beberapa **highlight pengaturan PDRD dalam UU HKPD** antara lain mencakup:

1. Perluasan basis dan objek pajak antara lain:
  - a. Pengenaan Opsen (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan).
  - b. Pajak rokok pada objek bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai.
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
2. Restrukturisasi dan Integrasi Pajak Daerah.
3. Rasionalisasi jenis retribusi.
4. **Penguatan peran and pengawasan pemerintah pusat** dalam Evaluasi Raperda dan Perda PDRD serta sinergitas data dan informasi PDRD.

Lebih lanjut, dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan terkait PDRD pada UU HKPD, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD). PP KUPDRD **memuat kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi Pemerintah daerah** dalam menerbitkan Perda, Perkada dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi, yang mencakup:

1. **Simplifikasi dan integrasi data** dengan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi wajib pajak pemerintah daerah.
2. **Peningkatan akuntabilitas** melalui penyesuaian karakteristik pungutan serta pertanggungjawaban pembayaran dan pelaporan pajak oleh WP melalui pencatatan/pembukuan dalam rangka mendukung kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Melaksanakan **Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan kerjasama optimalisasi pemungutan pajak** dan pemanfaatan data dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan pihak ketiga.
4. **Sinergi pemungutan pajak daerah** provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota melalui opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB.

Provinsi **Kepulauan Riau sebagai Archipelagic Region dengan geografis 98% lautan dan 2% daratan** memiliki potensi ekonomi dan sumber daya laut yang besar. Terbatasnya penggalan potensi ekonomi di daratan menyebabkan **rendahnya kemandirian fiskal Kepri**. Hal ini dapat dilihat dari dua indikator yaitu PAD yang kecil dan

ketergantungan pada TKD sangat tinggi (rata-rata 95% terhadap total pendapatan daerah).

**UU HKPD belum mengakomodir pemanfaatan ekonomi maritim** pada daerah Kepulauan, hal ini menyebabkan sulitnya meningkatkan PAD pada daerah dengan daratan yang terbatas. Bukan tanpa alasan, potensi SDA laut dan perikanan belum mampu dioptimalkan di Kepri karena pengaturan Pemerintah Pusat yang belum mengakomodir karakteristik daerah kepulauan. Pemerintah Kepri berharap UU HKPD mengatur pendapatan daerah melalui potensi ekonomi maritim pada daerah kepulauan.

#### 4.2 Perkembangan Penyelesaian Perda PDRD oleh Pemerintah Daerah

UU HKPD adalah aturan yang mengatur bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) di Indonesia. UU ini bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal, artinya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri, namun tetap dalam koridor yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. UU HKPD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemanfaatan sumber daya alam dan infrastruktur digunakan untuk pemerataan pembangunan dan menurunkan ketimpangan.

Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan *Focus Group Discussion* dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) lingkup Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka menggali data dan informasi mengenai perkembangan penyusunan regulasi PDRD pada pemerintah daerah, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.1 - Perkembangan Penyelesaian Perda PDRD oleh Pemerintah Daerah

No.	Pemerintah Daerah	Status Penyelesaian Perda PDRD	Waktu Implementasi Perda PDRD	Perkada Turunan Perda PDRD		
				Jumlah Perkada Turunan	Telah ditetapkan	Masih proses pembahasan
1	Provinsi Kepulauan Riau	Selesai	Perda No. 1 2024/ Implementasi 4 Januari 2024	7 (tujuh) Perkada	-	7 (tujuh) Perkada dalam proses: 1. PBB; 2. BPHTB; 3. PKB 4. BBNKB; 5. PAP; 6. Retribusi Daerah; 7. Tata cara Penagihan Pajak
2	Kota Tanjung Pinang	Selesai	Perda No. 1 2024/ Implementasi 5 Januari 2024	12 (dua belas) Perwako	-	12 (dua belas) Perwako dalam proses: 1. PBB; 2. BPHTB; 3. PBJT; 4. Hotel 5. Restoran; 6. Hiburan 7. Reklame; 8. Penerangan Jalan; 9. Sarang Burung Walet; 10. MBLB 11. PAT, Parkir; 12. Penagihan Pajak
3	Kota Batam	Selesai	Perda No. 1 2024/ Implementasi 5 Januari 2024	11 (sebelas) Perwako	9 (sembilan) Perwako ditetapkan	2 (dua) Perwako masih proses Harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi
4	Kabupaten Bintan	Selesai	Perda No. 1 2024/ Implementasi 30 Januari 2024	14 (empat belas) Perkada	5 (lima) Perkada ditetapkan	2 (dua) Perkada menunggu ttd, 7 (tujuh) perkada lainnya sedang proses
5	Kabupaten Karimun	Selesai	Perda No. 9 2023 – 1 Des 2023/ Implementasi 1 Januari 2024	13 (tiga belas) perkada	13 (tiga belas) Perkada ditetapkan: 1. PBB; 2. BPHTB; 3. PAT; 4. PBJT; 5. Reklame; 6. PAT; 7. MBLB; 8. Sarang Burung Walet; 9. Jasa Umum; 10. Jasa Usaha; 11. Perzininan tertentu; 12. Jasa Pemeriksaan Pajak daerah; 13. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah	-
6	Kabupaten Lingga	Selesai	Perda No. 9 2023 – 29 Des 2023/ Implementasi 5 Januari 2024	5 (lima) Perkada	2 (dua) perkada ditetapkan: 1. Reklame; 2. BPJT	5 (lima) Perkada dalam proses: 1. Sarang Burung Walet; 2. BPHTB 3. PAT; 4. MBLB; 5. Opsen
7	Kabupaten Anambas	Selesai	Perda No. 1 2024/ Implementasi 12 Februari 2024	5 (lima) Perkada	-	5 (lima) Perkada dalam proses
8	Kabupaten Natuna	Selesai	Perda No. 15 2023 – 28 Des 2023/ Implementasi 28 Desember 2023	10 (sepuluh) Perkada	10 (sepuluh) Perkada ditetapkan: 1. PBB; 2. bphtp 3. BPJP; 4. reklame 5. PAT; 6. burung wallet 7. MBLB; 8. RD; 9. Pemeriksaan pajak daerah; 10. pembayaran dan pengawasan pajak secara elektronik	-

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) lingkup Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan bahwa **seluruh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten telah menetapkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan mengimplementasikan perda tersebut sejak awal tahun 2024.**

FGD Kanwil DJPb Provinsi Kepri bersama dengan Bapenda dan BPKPD menghasilkan beberapa *current issue* dari penerapan perda PDRD yang dijelaskan pada poin-poin berikut:

**1) Peningkatan Pajak Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Bar, Karaoke dan Mandi Uap atau SPA Mendapatkan Protes dari Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia (ASPEHINDO)**

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan **tarif pajak hiburan menjadi minimal 40% s.d. maksimal 75% mendapatkan protes dari ASPEHINDO** pada masing-masing kabupaten/kota karena memberikan efek bagi pelaku usaha dan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, kenaikan pajak hiburan memberikan pengaruh sebagai berikut:

**a. Dampak Positif**

- 1) **Peningkatan Penerimaan Daerah:** kenaikan pajak berpotensi meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat digunakan untuk pembangunan daerah.
- 2) **Pengembangan Destinasi Wisata:** peningkatan pendapatan dari pajak hiburan dapat digunakan untuk mempromosikan Provinsi Kepri sebagai destinasi wisata aman dan nyaman.
- 3) **Pengelolaan dan Regulasi Tempat Hiburan lebih baik:** Dengan pajak yang lebih tinggi, memungkinkan pemda memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola dan mampu meningkatkan standar kenyamanan, keamanan dan ketenangan.
- 4)

**b. Dampak Negatif**

- 1) **Penurunan Aktivitas Bisnis:** Kenaikan pajak yang signifikan dapat menyebabkan beberapa tempat hiburan mengalami penurunan pendapatan, yang mungkin mengakibatkan penutupan bisnis. Hal ini bisa berdampak negatif pada lapangan kerja di sektor hiburan dan mengurangi pendapatan daerah.
- 2) **Pengembangan Kenaikan Harga Layanan:** Bisnis hiburan mungkin menaikkan harga layanan untuk menutupi biaya pajak yang lebih tinggi, dapat mengurangi kunjungan pelanggan.
- 3) **Perpindahan Bisnis ke Wilayah Lain:** Tempat hiburan mungkin mencari lokasi di wilayah lain yang mampu memberikan biaya, yang bisa mengurangi pendapatan pajak di daerah tersebut.

**Policy Response:**

Pemerintah Kabupaten Karimun bersama Biro Hukum Provinsi dan Dinas Perhubungan Kepri menyusun peraturan **insentif fiskal terkait pajak hiburan** yang telah diterbitkan melalui Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2024 pada tanggal 1 Maret 2024, sebagaimana berikut:

- a) **Pemberian Insentif Fiskal Pajak Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam dan Bar.** Bupati memberikan Insentif Fiskal berupa pengurangan untuk PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar sebesar **37,5%**.

**Rumus:  $(Rp \text{ Pendapatan} \times 40\%) - \text{Insentif } 37,5\% = 25\%$**

**Dengan adanya insentif fiskal,** pengenaan Tarif Pajak Hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar mengalami penurunan menjadi **25%**.

- b) **Pemberian Insentif Fiskal Pajak Mandi Uap/Spa**

Bupati memberikan Insentif Fiskal berupa pengurangan untuk PBJT atas jasa hiburan pada mandi uap/spa sebesar **50%**.

**Rumus:  $(Rp \text{ Pendapatan} \times 40\%) - \text{Insentif } 50\% = 20\%$**

Dengan adanya insentif fiskal, penerapan Tarif Pajak Hiburan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar mengalami penurunan menjadi **20%**.

Hal berbeda diterapkan pada **Pemerintah Kabupaten Bintan** sebagai kabupaten yang dikembangkan dengan konsep **Special Economic Zone for Tourism** menerapkan pajak hiburan **70%** untuk pengusaha diskotek, klub malam dan bar dengan tujuan *local wisdom* untuk menghambat suburnya perkembangan usaha sektor khusus tersebut sesuai kesepakatan dengan DPRD Bintan. Namun demikian, konsekuensi logis disadari oleh Bapenda Kab. Bintan dengan fenomena stagnansi usaha di bidang hiburan tersebut dan banyak pengusaha yang membatalkan pembangunan di bidang hiburan tersebut.

## 2) Penghapusan Biaya BPHTB Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Baru Akan Memiliki Rumah Pertama

**Kebijakan penghapusan Biaya BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah** yang baru akan memiliki rumah pertama, dengan penghasilan maksimal Rp7 juta untuk individu tunggal dan Rp8 juta untuk keluarga; luas lantai maksimal 36 meter/rumah umum/susun, sementara 48 meter rumah swadaya (Keputusan Menteri PUPR No. 22 tahun 2023). Kebijakan ini dapat memberikan dampak bagi penerimaan PDRD di daerah sebagai berikut:

### a) Dampak Positif

1. Meningkatnya potensi bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memiliki hunian pribadi yang sesuai syarat rumah layak huni

2. **Penghapusan biaya BPHTB dapat menyederhanakan proses administrasi** dan pengurusan dokumen sehingga berkurangnya biaya transaksi berpotensi meningkatkan permintaan untuk tanah dan bangunan.

### b) Dampak Negatif

Pemerintah Kabupaten/Kota yang **gencar melaksanakan program rumah subsidi akan kehilangan pendapatan dari biaya BPHTB**, hal ini terjadi paling banyak berada pada Pemkot Tanjungpinang, Pemda Karimun dan Pemda Bintan.

### Policy Response:

Pemerintah daerah perlu mengkaji **perencanaan dan Pengelolaan Anggaran** yang sesuai untuk memastikan bahwa pengurangan pendapatan dari pembebasan biaya BPHTB dapat disubstitusi dari pendapatan lain sehingga tidak mengganggu kualitas penganggaran.

## 3) Perubahan Mekanisme Pengenaan Pajak PKB dan BBNKB

Pengenaan Pajak PKB dan BBNKB yang dahulu dibagi rata sesuai proporsi provinsi dan kabupaten, saat ini telah dirubah oleh UU HKPD yang memuat **pembagian porsi PKB dan BBNKB sesuai dengan jumlah kendaraan yang terdaftar** pada daerah tersebut. Sehingga memberikan dampak pada Kabupaten Lingga, Anambas, dan Natuna yang dealer kendaraan bermotornya sangat sedikit. Dimana pada kabupaten tersebut kendaraan bermotor dibeli dan terdaftar di Kota Batam.

### Policy Response:

Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk menjajaki **kemudahan perpindahan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor** dengan harapan dapat menambah potensi penerimaan dari Opsen Pajak PKB pada tahun 2025.

4) Penurunan Tarif Pajak Parkir

**Pegenaan Tarif Pajak Parkir dari sebelumnya 20%-25% turun menjadi 10%**, tentunya akan langsung mengurangi pendapatan daerah, terutama bagi daerah yang memiliki jumlah kendaraan dan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi seperti di Kota Batam, diikuti Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun dan Bintan.

**Policy Response:**

**Menyesuaikan kebijakan pajak atau mencari sumber pendapatan alternatif** untuk menutupi potensi kekurangan pendapatan. Memastikan bahwa meskipun tarif pajak parkir diturunkan, infrastruktur parkir tetap terjaga dengan baik agar tidak mempengaruhi kualitas pelayanan.

5) Keadilan Perolehan Opsen MBLB antar Daerah

Pemerintah Daerah yang memiliki potensi daerah MBLB merasa pembagian porsi opsen yang tidak lebih baik dibandingkan pengaturan PDRD sebelum UU HKPD, karena cukup mengurangi pendapatan daerah mereka.

Disisi lain ada ketimpangan untuk daerah lain yang tidak memiliki potensi MBLB.

**Policy Response:**

Agar Pemerintah Provinsi menaungi Pemerintah Daerah dalam **Penyeragaman Perkada terkait Opsen MBLB**, Kebutuhan untuk keseragaman perhitungan dan penyusunan perda opsen antar pemda di level Provinsi dan Kabupaten kota, agar terjadi pemerataan pembagian porsi opsen MBLB.

**4.3 Ringkasan Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Pengaturan dalam Perda PDRD beserta tindak lanjut Pemerintah Daerah**

Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan **Focus Group Discussion bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD)** lingkup Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka menggali data dan informasi mengenai tindak lanjut evaluasi/rekomendasi DJPK atas Perda PDRD, dengan hasil sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.2 - Ringkasan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Pengaturan Perda PDRD Lingkup Kepri**

No	Permasalahan	Rekomendasi/Hasil Evaluasi Kementerian Keuangan	Tindak Lanjut Pemerintah Daerah
1.	<b>Pemkab Karimun</b> 1. Pelayanan yang diberikan oleh BLUD 2. Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya Pasal 88. 3. Tarif Pemanfaatan aset daerah berupa Laboratorium konstruksi PU dan Laboratorium Kesehatan Hewan. 4. Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF	1. Melakukan penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD pada pasal 64 ayat (4) sebagaimana dimaksud pada ND DJPK. 2. Melakukan penyesuaian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ND DJPK. 3. Dihapus 4. Melakukan penyesuaian dengan mengacu pada PP KUPDRD sebagaimana dimaksud pada ND DJPK.	Ditindaklanjuti kedalam usulan perubahan/penghapusan: 1. Perda Kab. Karimun No 9 Tahun 2023 telah disesuaikan dengan hasil evaluasi dari Kemendagri. sedangkan dari Kemenkeu ada penyempurnaan kalimat 2. Akan dipelajari dan ditindaklanjuti 3. Tarif pemanfaatan aset daerah berupa Laboratorium di perda kab. Karimun dihapus sedangkan kab/kota lainnya diperbolehkan, hal ini menghilangkan potensi 4. Hasil evaluasi dari kemenkeu sudah ada di pasal 87 ayat (6)
2.	<b>Pemko Tanjung Pinang</b> 1. Pengecualian Objek BPHTB, nilai jual tenaga listrik, pemungutan Opsen PKB, Wajib Pajak Opsen BBNKB, tarif retribusi jasa usaha, pengaturan formula untuk Bangunan Gedung, besaran Retribusi Perizinan Tertentu, Ketentuan peralihan, tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan	1. Melakukan penyesuaian/perubahan pada pasal sebagaimana dimaksud pada ND DJPK. 2. Melakukan penyesuaian pada pasal 62 sebagaimana dimaksud pada ND DJPK. 3. Melakukan perubahan pada pasal 66 sebagaimana dimaksud pada ND DJPK.	1. Akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyusunan Raperda Perubahan dan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan OPD terkait apabila diperlukan. 2. Untuk huruf a dan huruf c akan kami tindak lanjuti dengan melakukan penyusunan Ranperda Perubahan, untuk huruf b: sudah, tariff BLUD RSUD sudah kami tuangkan di lampiran.



No	Permasalahan	Rekomendasi/Hasil Evaluasi Kementerian Keuangan	Tindak Lanjut Pemerintah Daerah
	<p>Kesehatan, dst sebagaimana dalam ND DJPK.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Objek retribusi jasa umum.</li> <li>Objek retribusi jasa usaha.</li> <li>Lampiran struktur dan besaran tarif untuk Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tarif Retribusi Pengujian Laboratorium, seyogyanya direposisi ke retribusi jasa umum atas pelayanan Kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk huruf a, untuk Kota Tanjungpinang, tidak ada BLUD di Retribusi jasa Usaha, namun jika nanti ada, akan kami atur pada lampiran perda seperti yang kami lakukan untuk BLUD RSUD, dan untuk huruf b akan kami tindak lanjuti dengan melakukan</li> <li>Labkesmas, pada awalnya berada pada retribusi jasa umum, namun rekomendasi kemendagri harus dipindahkan ke retribusi jasa usaha, sedangkan kemenkeu menyarankan kembali retribusi jasa umum</li> </ol>
<b>3</b>	<b>Pemkab Natuna</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan tarif utk pelayanan kesehatan khususnya di muatan pelayanan administrasi.</li> <li>Tarif utk pelayanan kesehatan khususnya di muatan pelayanan administrasi</li> <li>Struktur dan besaran Perizinan tertentu</li> <li>Lampiran I</li> <li>Lampiran II</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tarif Retribusi Jasa Umum pada angka Pelayanan Kesehatan, seyogyanya jasa pelayanan resume dan buku tidak dikenakan retribusi</li> <li>Tarif Retribusi Jasa Umum pada angka Pelayanan Kesehatan seyogyanya surat tanda dirawat dan kelahiran tidak dikenakan retribusi</li> <li>Tarif Retribusi Perizinan Tertentu, seyogyanya perlu penyesuaian atau penambahan terhadap beberapa jenis prasarana, bangunan dan satuan pada tabel</li> <li>Tarif Retribusi Jasa Umum pada angka Pelayanan Kesehatan, seyogyanya jasa pengolahan limbah B3 agar direposisi pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan</li> <li>Tarif Retribusi Jasa Usaha pada angka 6 (enam), Pelayanan Jasa Kepelabuhan, seyogyanya sewa kantin/kios/lahan tempat usaha di pelabuhan agar direposisi pada objek Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak dipungut lagi, RSUD Kabupaten Natuna tidak memasukan tarif utk pelayanan administrasi</li> <li>Tidak dipungut lagi, diatur kembali ke dalam Peraturan Kepala Daerah t</li> <li>akan kami tindaklanjuti kedalam usulan oerubahan Perda</li> <li>Terkait hal ini, mengapa limbah B3 ini menjadi bagian dari pelayanan kesehatan dan menjadi tanggungjawab RSUD memiliki prosedur internal.</li> <li>Untuk saat ini, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kabupaten Natuna saat memiliki area pelabuhan yang lebih sempit dan tidak memungkinkan untuk dibangun kantin/kios/lahan tempat usa</li> </ol>
<b>4</b>	<b>Pemkab Lingga</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada pasal 7 ayat (1), (2), (11), pasal 23 ayat (1), pasal 34 ayat (2), pasal 52, pasal 53, pasal 111, penambahan satu rumusan pasal, pasal 173, pasal 124, pasal 180 (2), pasal 188, dst sebagaimana dalam ND DJPK.</li> <li>Pengaturan tarif PBB P-2</li> <li>Batas peredaran usaha yang dikecualikan dari PBJT.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Penyesuaian/Perubahan/ Penambahan/Pengapusan pada pasal sebagaimana dimaksud pada ND DJPK.</li> <li>Pengaturan Pasal 8 huruf c mengenai Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak seharusnya ditetapkan lebih rendah dari lahan lainnya</li> <li>Batas peredaran usaha yang dikecualikan dari PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman hanya sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akan dipelajari dan ditindaklanjuti bersama pihak-pihak terkait.</li> <li>Tarif di dalam Perda yang telah ditetapkan sudah lebih rendah dari tarif di dalam UU Nomor 1 tahun 2022 pada pasal 41 ayat (1) dan (2).</li> <li>Kondisi usaha dibidang jasa makanan dan minuman di Kabupaten Lingga untuk peredaran usaha berskala besar tidak banyak, sehingga dikhawatirkan jika batas peredaran usaha ditetapkan lebih tinggi, potensi pendapatan yang diterima akan kecil dan tidak dapat mendukung PAD.</li> </ol>
<b>5.</b>	<b>Pemkab Anambas</b>		
	<p>Sesuai hasil evaluasi DJPK yang merekomendasikan menambah, mengatur menghapus dan menyempurnakan pasal pada Perda PDRD.</p>	<p>Pengaturan, mengenai ketentuan pengenaan tarif PBB-P2, MBLB, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan dst.</p>	<p>Akan ditindak lanjuti dengan melakukan penyusunan Ranperda Perubahan dan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan OPD terkait apabila diperlukan</p>
<b>6.</b>	<b>Pemkab Bintan</b>		
	<p>Sesuai hasil evaluasi DJPK yang merekomendasikan menambah, mengatur, menghapus dan menyempurnakan pasal pada Perda PDRD.</p>	<p>Pengaturan, mengenai ketentuan pengenaan tarif PBB-P2, MBLB, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan dst.</p>	<p>Akan ditindak lanjuti dengan melakukan penyusunan Ranperda Perubahan dan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan OPD terkait apabila diperlukan</p>
<b>7.</b>	<b>Pemko Batam</b>		
	<p>Sesuai hasil evaluasi DJPK yang merekomendasikan menambah, mengatur</p>		



No	Permasalahan	Rekomendasi/Hasil Evaluasi Kementerian Keuangan	Tindak Lanjut Pemerintah Daerah
	menghapus dan menyempurnakan pasal pada Perda PDRD.	Pengaturan, mengenai ketentuan pengenaan tarif PBB-P2, MBLB, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan dst.	Akan ditindak lanjuti dengan melakukan penyusunan Ranperda Perubahan dan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan OPD terkait apabila diperlukan
<b>8.</b>	<b>Pemprov Kepulauan Riau</b>		
1.	Sesuai hasil evaluasi/rekomendasi DJPK merekomendasikan menambah, mengatur menghapus dan menyempurnakan pasal pada Perda PDRD.	1. Merubah rujukan ayat pada Pada pasal 8 ayat (1) karena kesalahan rujukan, yang ditulis "ayat (2)" seharusnya yang benar "ayat (3). 2. Tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum belum ditetapkan secara definitive.agar ditetapkan tarif secara definitive paling tinggi 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. 3. Pasal 37 Perda mengenai Opsen Pajak MBLB, agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 82 huruf c UU HKPD dengan mengapus ketentuan ayat (1). 4. Agar menambahkan 1 (satu) ayat pada Pasal 26 ayat (3) PP KUPDRD mengenai pengecualian Retribusi Jasa Umum. 5. Menyesuaikan Tarif Retribusi Jasa Umum pada tarif Visit dan Konsultasi DPJP agar tidak dibedakan per kelas rawatan. 6. Penyesuaian pada pengaturan Tarif Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha.	Evaluasi Perda PDRD baru keluar pada Minggu kedua bulan November 2024, saat ini Pemprov Kepri sedang mempelajari dan membahas dengan pihak terkait.
2.	Penetapan tarif PBBKB		
3.	Penyesuaian Tarif Retribusi		

Terdapat beberapa *highlights* tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DJPK atas Perda PDRD pemerintah daerah lingkup Kepri sebagai berikut:

- Perbedaan evaluasi/rekomendasi dari DJPK**, pada awal Pemkab Karimun mengajukan tarif pemanfaatan aset daerah berupa laboratorium direkomendasikan DJPK untuk dihapus, namun hal berbeda diberlakukan untuk Pemkot Tanjungpinang yang diperbolehkan menetapkan tarif pemanfaatan aset daerah berupa laboratorium.
- Tindak lanjut evaluasi/rekomendasi yang disampaikan DJPK, memiliki perbedaan dengan tindak lanjut evaluasi dari Kemendagri.** Hal ini menimbulkan kebingungan dari Pemda untuk mempedomani, seperti Pemkot Tanjungpinang yang menetapkan labkesmas pada retribusi jasa umum, namun rekomendasi Kemendagri untuk dipindahkan ke jasa usaha, sedangkan rekomendasi DJPK kembali pada retribusi jasa umum.

- Olahraga Golf masih menjadi perdebatan dikalangan pelaku usaha dan pemerintah daerah**, para pelaku usaha merasa Golf bukanlah olahraga yang masuk kedalam kategori yang dapat dikenakan Pajak Hiburan karena tidak secara nyata tertulis dalam UU HKPD, sementara didalam UU HKPD dijelaskan pada Pasal 55 ayat I bahwa "olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran" termasuk kedalam Jasa Kesenian dan Hiburan".
- Bagi hasil baiknya dikenakan dengan perhitungan bahan bakar karena ada perbedaan kendaraan pada Provinsi Kepulauan** (98% lautan) yang memiliki banyak transportasi laut, perbandingan kendaraan 1 motor 3 liter dengan kapal dihitung 1 kendaraan bisa mencapai 1000 liter. Contohnya Pemkab Natuna dan Anambas dulu mendapatkan ratusan miliar, sekarang hanya ratusan juta, karena hanya pulau kecil dan laut lebih mendominasi.



#### 4.4 Reviu Strategi Daerah dalam Penguatan *Local Taxing Power*

Reviu strategi daerah dalam penguatan *Local Taxing Power* merupakan langkah penting dalam mengevaluasi dan memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Penguatan *Local Taxing Power* menjadi salah satu pilar utama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang bertujuan untuk memberikan

kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola PAD melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah. Strategi ini tidak hanya berfokus pada perluasan basis dan objek pajak, tetapi juga pada penyederhanaan administrasi perpajakan, penguatan pengawasan, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Berikut reviu strategi daerah dalam penguatan *local taxing power* di Kepri:

**Tabel 4.3** - Strategi Pemerintah Daerah Lingkup Kepri Dalam Penguatan *Local Taxing Power*

No	Komponen Check List	Progress	Tantangan	Strategi Implementasi
1	Penyelesaian Regulasi yang dibutuhkan dalam optimaslisasi PDRD pasca UU HKPD dan PP KU PDRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh Pemda di lingkup Provinsi Kepri (1 Provinsi, 5 Kabupaten dan 2 Kota) telah mengimplementasikan Perda PDRD di awal tahun 2024.</li> <li>Pemkab Karimun dan Pemkab Natuna telah menyelesaikan Perkada Turuan Perda PDRD. Sedangkan Pemda lainnya masih dalam proses harmonisasi dengan biro hukum/menunggu fasilitas tanda tangan kepala daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Resistensi Perubahan dari <i>stakeholders</i> yang mungkin tidak nyaman dengan perubahan oleh regulasi baru.</li> <li>Belum terdapat kepastian terkait apakah Olahraga Golf merupakan kegiatan hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan.</li> <li>Ugensi ektentifikasi pengenaan retribusi di daerah, pengenaan tarif terhadap pengurusan pelayanan administrasi yang seharusnya dapat ditarik sebagai retribusi daerah justru belum diberlakukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menjelaskan manfaat regulasi baru. Pemkab Natuna juga akan memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha.</li> <li>Akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian keuangan dan dilakukan kajian pendalaman mengenai status hukum perlakuan pajak atas <i>Golf Sport</i>.</li> <li>Melakukan inventarisasi layanan administrasi yang dapat dikenakan retribusi dan menentukan tarif yang sesuai dengan layanan.</li> </ol>
2	Penyiapan Implementasi Pemungutan Opsen Pajak Daerah <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan mengenai opsen pajak daerah dalam Perda</li> <li>Penyiapan Perkada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh pemda telah menyiapkan regulasi tentang opsen pajak daerah.</li> <li>Seluruh Pemda Provinsi/Kab/Kota telah memasuki proses harmonisasi dengan biro hukum/menunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan terkait pemerataan pembagian porsi opsen yang tidak lebih baik dibandingkan pengaturan PDRD sebelum UU HKPD. Hal tersebut dikarenakan adanya ketimpangan jumlah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah perlu mengakomodir keunikan provinsi Kepulauan pada Peraturan pemerintah terkait perimbangan PDRD di Kepulauan Riau.</li> <li>Perlu identifikasi dan analisis atas kebutuhan pemda kab/kota di Kepri serta</li> </ol>

No	Komponen Check List	Progress	Tantangan	Strategi Implementasi
	<p>mengenai tata cara pemungutan dan sinergi opsen</p> <p>3. Koordikasi dengan pihak terkait (Antar Provinsi dan Kab/Kota, dengan Kepolisian (Samsat), denan perbankan untuk sistem setor dan <i>split payment</i>)</p> <p>4. Penyiapan &amp; Peningkatan Kualitas Administrasi</p> <p>5. Penyiapan Strategi Komunikasi Publik</p>	<p>fasilitasi tanda tangan kepala daerah.</p> <p>3. Antar pemda sedang melakukan keseragaman perhitungan dan penyusunan perda opsen antar pemda di level Provinsi dan Kab/Kota. Pemda juga telah berkoordinasi dengan Samsat di wilayah masing-masing kab/kota.</p> <p>4. Pemda sedang melakukan kajian dan pembahasan terkait indikator kualitas administrasi dari penerapan regulasi Opsen.</p> <p>5. Seluruh pemda telah melakukan strategi komunikasi kepada publik, baik melalui <i>one on one meeting, site visit, FGD,</i> maupun sosialisasi kepada stakeholders dan masyarakat.</p>	<p>penduduk yang cukup besar dan akses transportasi yang menyulitkan adanya penjualan kendaraan di Kabupaten terluar (Lingga, Anambas, Natuna)</p> <p>2. Terkait progres perkada turunan, progres harmonisasi perlu dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehati-hatian dan keadilan bagi setiap pemda sehingga butuh waktu yang cukup panjang.</p> <p>3. Adanya perbedaan data, kebijakan, dan metodologi perhitungan antar Kabupaten/kota.</p> <p>4. Adanya kompleksitas dari perbedaan geografis yang ada di kabupaten kota, khususnya di wilayah terluar yang memiliki kesulitan aksesibilitas.</p> <p>5. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi, serta adanya kemungkinan resistensi atas perubahan opsen dari pihak pemda.</p>	<p>pengembangan kerangka kerja yang dapat diterapkan di seluruh kab/kota.</p> <p>3. Perlunya koordinasi yang lebih intens antara pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menentukan standar data dan <i>sharing best practice</i> dalam optimalisasi implementasi opsen.</p> <p>4. Perlu adanya studi kelayakan terkait kondisi wilayah dan pembangunan yang berprioritas pada pengembangan infrastruktur dasar (transportasi dan jaringan komunikasi) untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.</p> <p>5. Dapat dilakukan <i>multi-platform communication</i> yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Perlu juga adanya peningkatan kapasitas pemda agar dapat menyampaikan komunikasi secara efektif.</p>
3	<p>Isu Strategis Penguatan <i>Local Taxing Power</i> Lainnya</p>	<p>Tingginya Pajak Hiburan Berdampak pada Stagnansi Sektor Pariwisata di Kabupaten Bintan yang Memiliki <i>Core Pendapatan Daerah</i> dari Sektor Pariwisata. Kabupaten Bintan sebagai kabupaten yang dikembangkan dengan konsep <i>Special Economic Zone in Tourism</i> menerapkan pajak hiburan 70% untuk pengusaha karaoke dll, dengan tujuan untuk menghambat suburnya perkembangan usaha sektor khusus tsb sesuai kesepakatan dengan DPRD Bintan. Namun demikian, konsekuensi logis disadari oleh Bapenda Kab. Bintan dengan fenomena stagnansi usaha di bidang hiburan tersebut dan banyak</p>	<p>a. Pemda juga dapat memberikan fasilitasi berupa insentif bagi pengusaha yang ingin berinvestsasi di sektor hiburan dengan tetapp mengedepankan <b>Local Wisdom</b> yang ada di Kepulauan</p> <p>b. Pemda di Kabupaten Bintan dapat melakukan</p>	



No	Komponen Check List	Progress	Tantangan	Strategi Implementasi
		pengusaha yang membatalkan pembangunan di bidang tersebut.		diversifikasi Pendapatan pada sektor lain seperti ekowisata maupun budaya untuk mengurangi ketergantungan pada pajak hiburan.

### 4.5 Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah: Realisasi PAD dan Local Tax Ratio (LTR) sejak 2017 s.d. September 2024

#### 4.5.1 Perkembangan Total PAD Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota - PAD Kepri Terus Tumbuh

##### 4.5.1.1 Perkembangan Total PAD Konsolidasian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



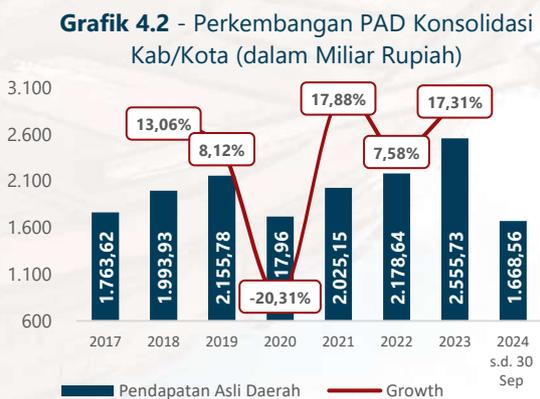
Sumber: Direktorat APK, 2024 (diolah).

Pemerintah Provinsi Kepri menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengelola PAD, s.d. September 2024, memiliki tren pertumbuhan dari tahun 2017 Rp1.094,70 miliar menjadi Rp1.806,97 miliar pada tahun 2023 atau tumbuh 65,05 persen, peningkatan yang tertinggi pada tahun 2022, sebesar 21,79 persen (yoy), atau meningkat Rp299,84 miliar.

Peningkatan realisasi PAD mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi, memperbaiki kompetensi SDM, menggali sumber PAD baru

dan memaksimalkan potensi ekonomi daerah. Potensi peningkatan pendapatan daerah didorong oleh *economic recovery* yang ditunjukkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi meliputi, PKB, BBNKB, dan Retribusi Daerah.

##### 4.5.1.2 Perkembangan Total PAD Konsolidasian Pemerintah Kabupaten/Kota



Sumber: Direktorat APK, 2024 (diolah).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Konsolidasi Kabupaten/Kota lingkup Kepri s.d. September 2024, memiliki tren pertumbuhan dari tahun 2017 Rp1.763,62 miliar menjadi Rp2.555,73 miliar pada tahun 2023 atau tumbuh 44,91 persen, peningkatan yang tertinggi pada tahun 2021 sebesar 17,88 persen (yoy), atau meningkat Rp307,19 miliar.

Peningkatan realisasi konsolidasian PAD ini menunjukkan *economic recovery* yang positif dari pemerintah kabupaten/kota lingkup Kepri setelah mengalami kontraksi penerimaan PAD yang cukup dalam sebesar 20,31 persen (yoy) akibat pandemic Covid-19.



Potensi peningkatan pendapatan daerah didorong pertumbuhan kegiatan ekonomi yang beriringan dengan meredanya pandemi Covid-19, hal ini ditunjukkan dengan tumbuhnya aktivitas perdagangan masyarakat di pusat keramaian, meningkatnya kunjungan wisata hiburan, hotel, restoran, optimalisasi kekayaan alam sehingga mendorong kegiatan ekonomi regional.

4.5.1.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Pemerintah Daerah Lingkup Kepri

1) Konsolidasi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 4.3 - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Konsolidasi (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat APK, 2024 (diolah).

Penerimaan PDRD pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 19,91 persen (yoy) untuk periode s.d. 30 September 2024.

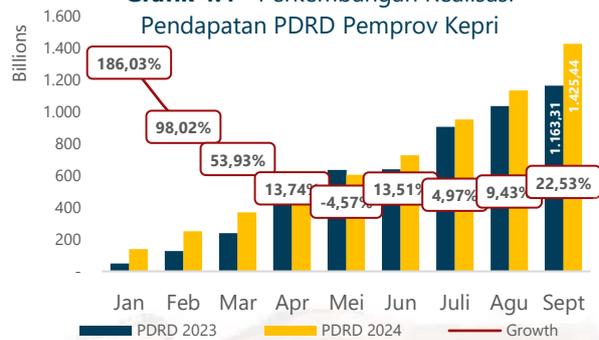
Komponen PDRD yang mengalami peningkatan tertinggi secara nominal terdapat pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp89,46 miliar. Kemudian diikuti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp89,40 miliar, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan peningkatan sebesar Rp80,90 miliar.

Pertumbuhan tertinggi secara persentase terdapat pada Retribusi Jasa Umum 213,24 persen (yoy). Kemudian diikuti Retribusi Jasa Usaha 111,25 persen (yoy) dan Pajak Rokok 64,94 persen (yoy).

Komponen PDRD yang mengalami kontraksi tertinggi terdapat pada Pajak Mineral Bukan Logam sebesar Rp67,87 miliar, atau 33,00 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh periode perizinan yang baru diperpanjang pada triwulan III 2024.

2) Pemerintah Provinsi Kepri

Grafik 4.4 - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Pemprov Kepri



Sumber: Direktorat APK, 2024 (diolah).

PDRD Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan sebesar 22,53 persen (yoy) atau meningkat Rp262,13 miliar.

Pertumbuhan PDRD tertinggi terdapat pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 27,28 persen (yoy) atau Rp64,54 miliar, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 25,39 persen (yoy) atau Rp89,46 miliar.

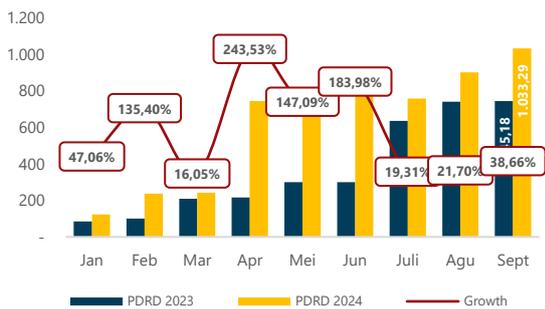
Pertumbuhan tersebut dikarenakan semakin patuhnya wajib pajak setelah sebelumnya terdapat penghapusan BBNKB II dan Pajak Progresif. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tersebut mendorong penerimaan PDRD dari sektor BBNKB dan PKB di Provinsi.

3) Kota Batam

Peningkatan PDRD di Kota Batam tumbuh signifikan sebesar 38,66 persen (yoy) s.d. triwulan III 2024.



**Grafik 4.5** - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Kota Batam (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat APK, 2024 (diolah).

Komponen PDRD dengan peningkatan tertinggi terdapat pada BPHTB sebesar Rp101,85 miliar atau tumbuh 50,48 persen (yoy), Pajak Penerangan Jalan meningkat Rp43,42 miliar atau tumbuh 27,86 persen (yoy), PBBP2 meningkat Rp43,22 miliar atau tumbuh 27,86 persen (yoy), Pajak Hotel meningkat Rp30,56 miliar atau tumbuh 42,29 persen (yoy), dan Pajak Restoran meningkat Rp26,23 miliar atau tumbuh 36,50 persen (yoy). Pertumbuhan realisasi PDRD didorong oleh semakin menggalatnya industri dan optimalnya tarif PDRD di Kota Batam. Pada triwulan I 2024 penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Batam mencapai Rp 1,71 triliun. Realisasi ini salah satunya yang terbesar, didukung oleh perkembangan sektor properti yang turut mendorong realisasi BPHTB dan PBBP2

**4) Kota Tanjungpinang**

**Grafik 4.6** Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Kota Tanjungpinang (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat APK, 2024 (diolah).

Pendapatan PDRD mengalami pertumbuhan 63,53 persen (yoy) atau meningkat Rp37,84 miliar di Kota Tanjungpinang.

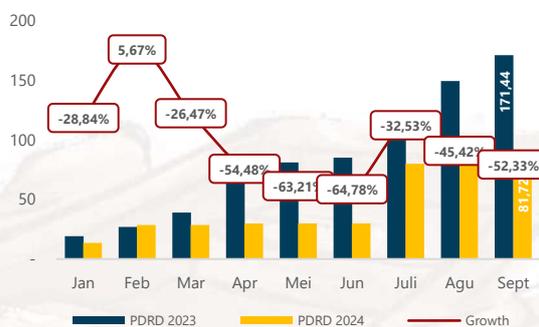
Pertumbuhan PDRD ini didorong oleh peningkatan PPJ sebesar Rp3,78 miliar, atau

tumbuh 30,70 persen (yoy), PBBP2 Rp2,12 miliar, atau 26,01 persen (yoy), dan BPHTB sebesar Rp1,86 miliar, atau tumbuh 31,20 persen (yoy).

Peningkatan pada penerimaan Pajak Penerangan Jalan dikarenakan adanya peningkatan tarif pajak yang lebih tinggi menjadi 10 persen untuk listrik dari PLN, 7 persen untuk sumber lain, dan listrik dihasilkan sendiri sebesar 1,5 persen.

**5) Kabupaten Bintan**

**Grafik 4.7** - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Kab Bintan (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat APK, 2024 (diolah).

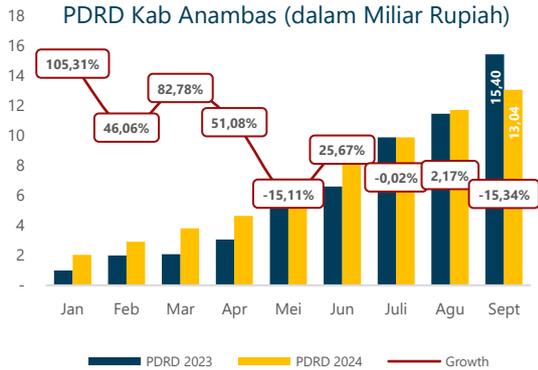
Realisasi PDRD di Kabupaten Bintan mengalami kontraksi 55,23 persen (yoy) atau menurun Rp89,72 miliar.

Kontraksi penerimaan PDRD ini dipengaruhi penurunan BPHTB sebesar Rp15,43 miliar atau 85,25 persen (yoy). Potensi Kab. Bintan sebagai *Special Ekonomi Zone in Tourism* tidak dapat berkembang dengan tingginya penetapan tarif Pajak Hiburan pada UU HKPD (Pajak Hiburan Karaoke Mandi Uap/Spa sebesar 40 persen dan Pajak Dikotek, Klub Malam dan Bar sebesar 70 persen).



6) Kabupaten Kepulauan Anambas

Grafik 4.8 - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Kab Anambas (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat APK, 2024 (diolah).

Realisasi PDRD di Kabupaten Anambas mengalami kontraksi 15,34 persen (yoy) atau meningkat Rp2.36 miliar bila dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Beberapa komponen pendapatan PDRD yang mengalami pertumbuhan diantaranya Pajak Hotel Rp0,54 miliar, atau 16,66 persen (yoy), dan Pajak Restoran sebesar Rp0,43 miliar, atau tumbuh 7,26 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah wisatawan dalam negeri dan mancanegara ke Kabupaten Anambas, dengan diadakannya beberapa festival di awal tahun 2024, yaitu Padang Melang International Folklore Festival dan Festival Padang Melang 2024.

7) Kabupaten Lingga

Grafik 4.9 - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Kab Lingga (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat APK, 2024 (diolah).

Pendapatan PDRD Kabupaten Lingga mengalami pertumbuhan 91,01 persen (yoy)

atau meningkat Rp16,79 miliar s.d. triwulan III 2024.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp19,40 miliar atau tumbuh 187,27 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan yang merupakan sektor dominan pembentuk PDRB di Kabupaten Lingga yang terus meningkat.

8) Kabupaten Natuna

Grafik 4.10 - Perkembangan Realisasi Pendapatan PDRD Kab Natuna (dalam Miliar)



Sumber: Direktorat APK, 2024 (diolah).

Realisasi PDRD di Kabupaten Natuna mengalami kontraksi 58,74 persen (yoy) atau menurun Rp21.27 miliar bila dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Kontraksi penerimaan PDRD ini dipengaruhi penurunan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp17,47 miliar, atau 74,51 persen (yoy).

4.5.2 Perkembangan Realisasi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pajak Daerah Terus Tumbuh Mendorong Peningkatan Pendapatan Daerah-Analisis Deskriptif

4.5.2.1 Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



Tabel 4.4 - Pendapatan PDRD Pemerintah Provinsi Kepri (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>980,68</b>	<b>1.099,14</b>	<b>1.185,27</b>	<b>1.033,43</b>	<b>1.191,20</b>	<b>1.492,76</b>	<b>1.631,49</b>	<b>1.415,96</b>
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	365,84	421,98	409,13	378,58	454,24	493,29	535,90	460,87
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	219,58	256,13	324,60	200,66	233,75	351,55	443,09	417,07
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	286,99	315,45	351,65	316,53	372,02	487,70	492,26	371,70
Pajak Air Permukaan	2,59	2,55	1,25	0,88	0,90	0,97	0,99	0,80
Pajak Rokok	105,68	103,03	98,65	136,77	130,29	159,26	159,25	165,52
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>3,19</b>	<b>13,54</b>	<b>7,16</b>	<b>5,73</b>	<b>12,27</b>	<b>6,86</b>	<b>12,20</b>	<b>9,48</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,71	11,16	4,94	1,64	1,66	3,16	3,08	1,91
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,01		0,27	0,43	1,67	1,76	2,17	1,94
Retribusi Penyeberangan Air	0,47		0,56	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00				0,06	0,13	0,06	0,05
Retribusi Izin Gangguan	0,00				0,57	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Trayek	0,01	0,30	0,34		1,51	0,48	0,57	0,02
Retribusi Izin Perikanan	0,77	0,93	0,82	1,48	0,00	1,32	1,46	0,00
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,00	0,61		0,69	6,81	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,22	0,54	0,23	0,75	0,00	0,00	4,88	5,57

1. Pendapatan dan *share* Komponen Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kepri s.d. September 2024 didominasi oleh pendapatan PKB Rp460,87 miliar dengan *share* terbesar 32,55 persen. **Hal yang menarik adalah Pendapatan Pajak Rokok s.d. September 2024 telah melampaui pendapatan Pajak Rokok Selama tahun 2023**, dengan pendapatan Rp165,52 miliar atau lebih tinggi Rp6,27 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan pita cukai rokok di Provinsi Kepri akibat dari extra effort yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Kepri dalam melaksanakan penindakan rokok ilegal.
2. Pendapatan dan *Share* Komponen Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi s.d Sept 2024 **mayoritas berasal dari pendapatan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp5,57 miliar dengan share 58,75 persen**, pendapatan IMTA dominan

- diperoleh dari kota batam yang dinobatkan sebagai kota industri di Kepri.
3. Struktur Pendapatan Daerah pasca terbitnya Perda PDRD menunjukkan pembagian kewenangan yang terinci dan detail, sehingga **mendorong keeluasaan pemda untuk menggali penerimaan PDRD** dari potensi baru, terlihat pada realisasi PDRD Pajak Rokok dan Retribusi IMTA yang telah memberikan hasil optimum.
  4. Potensi **peningkatan PAD menunjukkan sinyal positif terlebih pada pendapatan Pajak Rokok** s.d Sept 2024 yang telah melampaui total penerimaan pajak rokok pada tahun 2023.
  5. Terdapat penurunan signifikan, pada penerimaan retribusi Izin Trayek 96,49 persen disebabkan tidak ada lagi pungutan pada retribusi tersebut, sebagaimana amanat UU HKPD.

4.5.2.2 Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Konsolidasian Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 4.5 - Pendapatan PDRD Konsolidasian Lingkup Pemerintah Kab/Kota (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>1.264,11</b>	<b>1.459,10</b>	<b>1.647,05</b>	<b>1.194,13</b>	<b>1.357,06</b>	<b>1.612,36</b>	<b>1.950,69</b>	<b>1.257,97</b>
Pajak Penerangan Jalan	209,11	222,02	265,75	274,90	283,75	320,11	347,58	241,38
Pajak Parkir	8,19	12,35	10,65	6,82	6,38	10,52	12,86	7,78
Pajak Air Tanah	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,10	0,16	0,11
Pajak Sarang Burung Walet	0,10	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,14	0,07
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	288,44	257,46	264,78	199,61	290,96	263,67	328,88	137,79
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	157,86	195,69	195,63	209,65	269,42	267,97	278,48	202,10
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	247,74	346,69	406,22	283,73	321,69	412,52	474,77	327,00
Pajak Hotel	187,64	224,03	243,29	79,21	58,94	158,89	264,94	167,09
Pajak Restoran	121,29	144,70	191,23	106,00	98,24	133,44	173,46	126,11
Pajak Hiburan	32,20	40,46	53,29	19,89	12,80	30,75	43,36	32,50
Pajak Reklame	11,44	15,47	15,99	14,09	14,64	14,24	26,05	16,03
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>116,52</b>	<b>118,09</b>	<b>124,06</b>	<b>112,87</b>	<b>117,17</b>	<b>116,83</b>	<b>173,38</b>	<b>198,57</b>
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	36,83	2,49	16,61	33,69	24,58	15,45	38,07	29,15
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	29,91	32,53	35,37	35,02	36,01	37,66	39,78	26,91
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung	19,51	49,05	30,72	16,74	29,14	22,17	52,29	40,89
Retribusi Pelayanan Kesehatan	4,92	6,48	8,74	6,48	8,31	9,32	12,58	81,43
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6,74	8,95	1,84	6,14	6,01	6,55	6,88	8,19
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	4,91	4,87	6,18	5,45	4,84	12,37	8,13	0,00
Lainnya	13,70	13,70	24,59	9,35	8,28	13,30	15,65	11,99

1. Pendapatan dan share Komponen Pajak Daerah Pemerintah Kab/Kota s.d. Sept 2024 didominasi oleh penerimaan BPHTB Rp327 miliar dengan share terbesar 25,99 persen, hal ini **didorong oleh massive nya pembangunan di Batam yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus**, diikuti oleh penerimaan Pajak Penerangan Jalan Rp241,38 miliar dengan share 19,19 persen, penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan Rp202,10 miliar dengan share 16,07 persen penerimaan Pajak Hotel, Pajak MBLB dan dan Pajak restoran dengan share secara berurutan sebesar 13,28 persen, 10,95 persen dan 10,03 persen. Disisi lain, penerimaan Pajak Hiburan, Reklame, Parkir, Air Tanah dan Sarang Burung

Walet masing-masing memiliki share dibawah 3 persen.

Grafik 4.11 - Perkembangan Local Tax Ratio Pemprov Kepri



Sumber: Direktorat APK, 2024 (diolah).

2. Pendapatan dan Share Komponen Retribusi Daerah Pemerintah Kab/Kota s.d Sept 2024 **mayoritas berasal dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp81,43 miliar dengan share 41,01 persen**. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan



- tersebut meningkat 547 persen dibandingkan tahun 2023 dengan retribusi terbesar dari Kota Batam, diikuti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung Rp40,89 miliar dengan share 20,59 persen, Retribusi Perpanjangan IMTA Rp29,15 miliar dengan share 14,68 persen, Retribusi Pelayanan Kebersihan Rp26,91 miliar dengan share 13,55 persen, Retribusi Pelayanan Parkir dan Retribusi Lainnya masing-masing memiliki share 4,13 persen dan 6,04 persen.
- Struktur Pendapatan Daerah pasca terbitnya Perda PDRD mendorong **upaya yang dilakukan pemda dalam menggali pendapatan PDRD dari potensi baru**, terlihat pada realisasi PDRD Retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah memberikan hasil optimal.
  - Potensi peningkatan PAD menunjukkan penguatan, terlebih **pada penerimaan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan s.d Sept 2024 yang telah melampaui pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2023**. Potensi terbesar berasal dari Kota Batam yang dikenal dengan kota industri, FTZ dan KEK, hal ini mendorong tingginya investasi yang dilakukan asing dengan syarat turut mempekerjakan TKA sehingga berefek pada peningkatan pendapatan retribusi IMTA.

#### 4.5.3 Perkembangan *Local Tax Ratio* (LTR) Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota

##### 4.5.3.1 Perkembangan *Local Tax Ratio* (LTR) Pemerintah Provinsi

- Local Tax Ratio* (LTR) Pemprov Kepri terus **menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya**.
- Pada tahun 2017 **LTR Pemprov Kepri terbilang cukup rendah sebesar 0,59 persen**, kemudian terus meningkat hingga mencapai 0,82 persen pada tahun 2023.

- Sampai dengan periode September 2024, LTR Pemprov Kepri masih menunjukkan tren positif dengan LTR mencapai 1,43 persen. Namun demikian ini **dipengaruhi oleh belum rilisnya PDRB Kepri triwulan III 2024**, sehingga pembagi LTR masih menggunakan PDRB s.d. triwulan II 2024.
- Pada tahun 2020, LTR Pemprov Kepri sempat **mengalami kontraksi sebesar 0,07 persen yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19**.

##### 4.5.3.2 Perkembangan *Local Tax Ratio* (LTR) Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota

**Grafik 4.12** - Perkembangan *Local Tax Ratio* Konsolidasi Pemkab/Pemkot Kepri



Sumber: Direktorat APK, 2024 (diolah).

- LTR Pemerintah Kab/Kota lingkup Kepri juga **turut menunjukkan tren positif**.
- Pada tahun 2017 LTR Pemerintah Kab/Kota lingkup Kepri sebesar 0,93 persen, kemudian **terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 1,08 persen pada tahun 2023**.
- LTR Pemprov Kepri sempat **mengalami kontraksi sebesar 0,24 persen yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020**.
- Penurunan ini cukup signifikan, serta **membutuhkan waktu recovery yang lama**, bila dibandingkan penurunan LTR Pemprov Kepri.

#### 4.6 Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Menggunakan Analisis *Spearman Correlation* dan *Pearson Correlation*

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Kepri. **PDRD, sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), berperan signifikan** dalam membiayai pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Analisis ini menggunakan metode *Spearman Correlation* dan *Pearson Correlation* untuk mengukur sejauh mana hubungan antara PDRD terhadap PDRB serta tingkat pertumbuhan ekonomi di Kepri. Metode analisis ini dipilih untuk melihat baik korelasi linier maupun non-linier antara variabel-variabel tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi sektor pajak dan retribusi terhadap perekonomian daerah. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting bagi kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif dalam mendorong peningkatan ekonomi regional.

##### 4.6.1 Hubungan PDRD Terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan analisis menggunakan metode *Spearman* dan *Pearson Correlation* tersebut terlihat bahwa **PDRD pemerintah daerah berkontribusi positif dan signifikan terhadap angka PDRB** Provinsi Kepri. Hal ini berdasarkan koefisien korelasi yang memiliki nilai positif 0,849 pada analisis *Pearson Correlation* dan 0,600 pada analisis *Spearman Correlation*.

Covariance Analysis: Ordinary  
Date: 09/19/24 Time: 09:20  
Sample: 2017 2023  
Included observations: 49

Correlation Probability	PAJAK	PDRB
PAJAK	1.000000 ----	
PDRB	0.849875 0.0000	1.000000 ----

Covariance Analysis: Spearman rank-order  
Date: 09/19/24 Time: 09:26  
Sample: 2017 2023  
Included observations: 49

Correlation Probability	PAJAK	PDRB
PAJAK	1.000000 ----	
PDRB	0.600612 0.0000	1.000000 ----

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa **PDRD memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap angka PDRB di Kepri**, ditunjukkan dengan nilai P-Value sebesar 0.0000 (<0,05). Pengaruh positif ini mengindikasikan setiap peningkatan dalam realisasi PDRD akan diikuti dengan peningkatan PDRB, yang berarti ekonomi daerah semakin berkembang seiring dengan meningkatnya pendapatan PDRD. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pajak yang terkumpul dari berbagai sektor ekonomi akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta pemberdayaan sektor-sektor ekonomi regional. Dengan adanya investasi dalam infrastruktur yang lebih baik, aksesibilitas antar wilayah yang meningkat, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, maka ekonomi regional akan semakin tumbuh dan berdaya saing.

Korelasi dan pengaruh yang signifikan positif tersebut mencerminkan bahwa setiap peningkatan realisasi PDRD di Kepri turut menunjukkan peningkatan angka PDRB. Peningkatan PDRD, terutama dari sektor-sektor

yang memiliki potensi besar seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor digital, dapat menciptakan siklus positif bagi perekonomian Kepri. Dengan pengelolaan pajak yang lebih efektif, maka potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan.

Sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan mendorong produktivitas dan daya saing Kepri.

#### 4.6.2 Hubungan PDRD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan analisis menggunakan metode *Spearman* dan *Pearson Correlation* tersebut terlihat bahwa PDRD pemerintah daerah berkontribusi positif dan signifikan terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kepri. Hal ini berdasarkan koefisien korelasi yang memiliki nilai positif 0,409 pada analisis *Pearson Correlation* dan 0,409 pada analisis *Spearman Correlation*.

Covariance Analysis: Spearman rank-order  
Date: 09/19/24 Time: 09:28  
Sample: 2017 2023  
Included observations: 49

Correlation Probability	PAJAK	PDRB2
PAJAK	1.000000 ----	
PDRB2	0.409388 0.0035	1.000000 ----

Hasil juga menunjukkan bahwa PDRD memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, di Kepri dengan nilai *p-value* 0.003 (<0,05). Memberikan bukti empiris yang kuat bahwa PDRD merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara substansial. PDRD merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya.

Covariance Analysis: Ordinary  
Date: 09/19/24 Time: 09:28  
Sample: 2017 2023  
Included observations: 49

Correlation Probability	PAJAK	PDRB2
PAJAK	1.000000 ----	
PDRB2	0.409020 0.0035	1.000000 ----

Peningkatan pendapatan PDRD memberikan pemerintah kapasitas yang lebih besar untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur fisik (jalan, pelabuhan, bandara) dan non-fisik (teknologi, sistem informasi, dan lainnya). Dengan infrastruktur yang lebih baik dan layanan publik yang lebih efektif, kegiatan ekonomi di Kepri menjadi lebih efisien dan produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan output perekonomian.

#### Fenomena Kenaikan Pajak Hiburan di Kepri

**Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pajak hiburan menjadi minimal 40% s.d. maksimal 75%** mendapatkan protes dari ASPEHINDO. **Pemerintah Kabupaten Karimun** bersama Biro Hukum Provinsi dan Dinas Perhubungan Kepri menyusun peraturan **insentif fiskal untuk menstimulasi aktivitas bismis terkait pajak hiburan** pada diskotek, karaoke, klub malam, dan bar sebesar **37,5%** dan jasa hiburan pada mandi uap/spa sebesar **50%**.

Hal berbeda diterapkan pada **Pemerintah Kabupaten Bintan** sebagai kabupaten yang dikembangkan dengan konsep *Special Economic Zone for Tourism* **menerapkan pajak hiburan 70% untuk pengusaha dikotek, klub malam dan bar dengan tujuan local wisdom untuk menghambat suburnya perkembangan usaha sektor khusus tersebut** sesuai kesepakatan dengan DPRD Bintan. Namun demikian, konsekuensi logis disadari oleh Bapenda Kab. Bintan dengan fenomena stagnansi usaha di bidang hiburan tersebut dan banyak pengusaha yang membatalkan pembangunan di bidang hiburan tersebut.





**If you set your goals  
ridiculously high and it's a  
failure, you will fail above  
everyone else's success.**

**-James Cameron**





## Analysis Of The Relationship

### Between Local Taxes, Investment, And Government Spending on Regional Gross Domestic Product Of The Tourism Sector In The Riau Islands



#### Literature Review

Based on the research by Nauli et al. (2024), it shows that hotel taxes and restaurant taxes influence the original revenue of Bekasi City, and this opinion aligns with the study by Nusr & Hazwani (2020), which states that taxes sourced from the culinary and hospitality sectors are the main contributors to the original revenue of Polewali Mandar Regency. According to research carried out by Puspitasari, et.al (2023) suggested that regional tax variables do not affect capital spending but have an impact on regional gross domestic product. By maximizing available resources and implementing maximum local taxes, economic growth can significantly increase. This research aligns with the findings of SOEWARDI et al. (2017), which used the TSLs model to show that local taxes and economic growth in East Java are pro-cyclical.

#### Background

This study will use a quantitative approach by analyzing annual panel data. The data used include GRDP data, local taxes in the tourism sector, and other control variables such as local investment, and government spending. Data analysis will be carried out using a panel data econometric model, namely a random effects model. The model's selection will be based on the results of the Chow Test, Hausman Test and Lagrange Multiplier Test.



#### Model and Regression Specifications

$$PDRBper\ Capita_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln pajak_{it} + \beta_2 \ln LI_{it} + \beta_3 \ln BM_{it} + \varepsilon_{it}$$

#### Regression Findings

$$PDRBpercapita_{it} = 9.812 + 0.036 \ln pajak_{it} + 0.244 \ln LI_{it} + 0.018 \ln BM_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

#### Background

Based on theoretical and empirical evidence, this study concludes that regional taxes in the tourism sector such as hotel, restaurant and entertainment taxes and local investment significantly affect GDP per capita, in contrast to government spending which does not have a significant influence on GDP per capita. This capital expenditure is for infrastructure that has the potential to have an impact on economic growth, but because of its long-term nature and time lag, this effect is frequently not immediately apparent. Therefore, capital expenditure is crucial as a basis for long-term economic development even when it has little effect in the short term.

Furthermore, there is a random component that has a significant effect on GDP per capita. This random component explains the variability between districts/cities that cannot be explained by independent variables in the model but can exert an influence on GDP per capita such as geographical location, culture or regional policies.

To encourage tourism to become one of the leading sectors in the context of increasing economic growth, it cannot only be left to one agency or institution, the role of the central government, local governments, stakeholders, business associations, tourism professions, media, investors and the community must contribute according to their respective roles. **The key to the success of developing the tourism sector lies in the synergy of the central and regional governments** with infrastructure improvements, policies that encourage the acceleration of the tourism sector such as adjustments to changes in tax rates based on regional characteristics, providing incentives to business actors, improving transportation ticket prices and adjusting VOA (Visa on Arrival) rates.

#### Descriptive Analysis

Variable	Average	Std. Dev	Min	Max	Source
<b>Dependent Variable</b>					
PDRB per capita (in million Rupiah)	106.98	82.77	29.94	316.15	GFS
<b>Independent Variables (in billion Rupiah)</b>					
Local Tax	49.34	74.81	1.03	289.21	GFS
Loval Investment	10,129.03	15,708.98	981.82	54,335.40	BPS
Capital Expenditure	1,184.96	609.90	634.99	3,042.35	GFS
<b>Parameter</b>					
Intercept	9.812	2.648	3.705	0.0002113 ***	
Ln Pajak	0.036	0.018	2.054	0.0399400 *	
Ln Investasi Lokal	0.244	0.088	2.766	0.0056816 **	
Ln Belanja Modal	0.018	0.025	0.696	0.4864943	
R <sup>2</sup> : 26,2%, p-value: 0.0011443					

#### Result and Discussion

#### The Impact of Local Taxes on Regional Gross Domestic Product (PDRB) per Capita

The result of this study shows that local taxes (hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax) have a positive and significant impact on PDRB per capita ( $\beta = 0.036268$ ,  $p = 0.0399$ ). As the local taxes increase in 7 regencies/cities in the Riau Island, PDRB per capita experiences increased as well during the time period 2017 to 2023.

The positive relationship between local taxes and regional economic growth is aligned with studies conducted by Nauli et al. (2024) and Nusr & Hazwani (2020) which stated that the taxes from hospitality and culinary have a significant and positive impact on local revenue (PAD-pendapatan asli daerah) in Bekasi City and Polewali Mandar Regency. Hospitality and culinary plays significant roles in tourism industry as they become drivers of the regional economy, particularly in the Riau Island province, where tourism play a crucial role in the local development. Puspitasari et al. (2023) also found that a significant impact of local taxes to the PDRB. By optimizing taxation from tourism sector such as hotels, restaurants, and entertainment, local governments in the Riau Islands Province can stimulate economic growth which impact the regional GDP per capita.

Aligned with this findings, Soewardi (2017) stated that **when policy makers of local government want to push the economy to grow higher, the thing to do is to increase the local tax**. Study conducted by Soewardi (2017) found that when the local governments increased their own tax capacity, they could also increase their economic growth or their macroeconomic stability. Therefore, in Riau Islands province, the local government should widen the tax base and increase the local tax to increase the local tax revenue and enhancing the economic activity especially in tourism sector.

This study highlights the importance of optimizing the taxation aspect of the tourism sector, particularly in tourist destination like the Riau islands. Through UU HKPD, there are adjustments in tax regulation that aimed at increasing local revenue and creating fiscal independence for local governments.



# Bab V

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

**Optimalisasi Kebijakan Fiskal:** ”  
Mengakselerasi Pembangunan Daerah  
untuk Pertumbuhan Ekonomi yang  
Berkelanjutan.





Anmon Resort, Bintan

## Conclusions and Recommendations

- Kesimpulan Kajian Fiskal Regional
- Rekomendasi bagi Pemerintah Pusat
- Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah
- Rekomendasi bagi Stakeholders Lainnya



## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

### 5.1 Kesimpulan

**Kesimpulan** yang dapat diambil dari Laporan Kajian Fiskal Regional Provinsi Kepulauan Riau periode triwulan III 2024 sebagai berikut:

#### Analisis Ekonomi Regional

Kinerja ekonomi Kepulauan Riau secara kumulatif (*ctc*) tumbuh positif dan menjadi provinsi dengan **pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera**. Indikator kesejahteraan rata-rata mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat tumbuh 5,02 persen (yoy).** Pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan kestabilan perekonomian di Kepri yang tetap menunjukkan kinerja positif. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut menjadikan Kepri dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera (*ctc*), setelah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi ini dorong oleh fenomena meningkatnya jumlah kunjungan wisman dan wisnus yang meningkatkan permintaan barang dan jasa dan mendukung produktivitas ekonomi Kepri. **PDRB** triwulan III 2024 ADHB (ADHB) menyentuh angka Rp86,88 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp51,84 triliun. Dari sisi PDRB berdasarkan Pengeluaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kepri didominasi oleh komponen **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** dengan *share* sebesar 45,11 persen dari total PDRB, tumbuh 3,47 persen (*yoy*). Dari sisi Lapangan Usaha, struktur PDRB Kepri didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama, yakni **sektor industri pengolahan** dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 40,80 persen, kemudian disusul oleh sektor konstruksi sebesar (20,49 persen) dan sektor pertambangan dan pengalihan (9,99 persen).
2. Tingkat **inflasi** Kepri pada Bulan Septemebr 2024 mencapai 2,53 persen (*yoy*). Angka inflasi ini diperoleh berdasarkan perhitungan tekanan inflasi pada 2 (dua) kota dan 1 (satu) kabupaten (kota Batam, kota Tanjungpinang dan kabupaten karimun). tingkat inflasi terbesar di september 2024 masih didominasi oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil inflasi sebesar 1 persen (*yoy*). **Meningkatnya harga tampak jelas terlihat pada komoditas emas perhiasan (0,39 persen), tarif listrik (0,26 persen), dan beras (0,24 persen). Hal tersebut** dipengaruhi oleh ketidakstabilan iklim di daerah produsen beras yang menyebabkan gagal panen, sedangkan Provinsi Kepri masih mengimpor beras dari daerah produsen beras dari dalam negeri (pulau jawa) dan luar negeri (Thailand).
3. **Neraca perdagangan Kepri** Kepri pada bulan September 2024 menghasilkan Surplus Perdagangan sebesar US\$150,89 juta. Jika dihitung secara kumulatif, neraca perdagangan Kepri pada periode triwulan III 2024 juga mencapai Surplus Perdagangan sebesar US\$1.922,77 Juta. Angka tersebut diperoleh dari total nilai ekspor Kepri yang meningkat, khususnya dari golongan barang komoditas gas alam, hasil tambang dan hasil industri (non migas).
4. Angka **kemiskinan** di Kepri pada bulan Maret 2024 tercatat sebesar 138,30 ribu jiwa atau 5,37 persen dari total penduduk Kepri, lebih baik dibandingkan dengan Target RPJMD Kepri tahun 2024 sebesar 6,69 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,32 persen apabila dibandingkan dengan bulan Maret 2023 sebesar 142,50 ribu orang.
5. Tingkat ketimpangan Kepri yang diukur dengan **gini ratio** tercatat 0,349 di bulan Maret 2024. Gini rasio tersebut meningkatkan 0,009 persen poin (*yoy*), angka gini rasio tersebut dibawah angka rasio gini nasional yang berada di angka 0,379. **Angka gini ratio Kepri per Maret 2024 berada pada peringkat pertama tertinggi di regional Sumatera.** Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa



kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya di Kepulauan Riau tidak dirasakan secara merata. Hal ini disebabkan majunya kota Batam sebagai pusat bisnis kurang mampu memberikan efek domino peningkatan aktivitas ekonomi pada kabupaten lainnya.

6. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** Kepri bulan Agustus 2024 tercatat 6,39 persen; dengan **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** mencapai 69,17 persen. Angka TPT tersebut turun sebesar 0,41 persen poin (*yoy*). Provinsi Kepri masih berada pada peringkat pertama tertinggi di Regional Sumatera dan tertinggi ke-tiga tertinggi Nasional, setelah Provinsi Jawa Barat (6,75 persenan Provinsi Banten (6,68 persen). Di sisi lain, **persentase TPT Kepri juga menjadi yang terbesar di Sumatera**. Adanya penurunan TPT tersebut menjadi sinyal positif bahwa masyarakat di Kepri telah memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian.
7. **NTP** Kepri pada bulan Septembr 2024 sebesar 104,74 dan menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 0,50 persen (*yoy*). Angka NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (120,30), hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang memang belum optimal dijadikan sebagai lahan pertanian.
8. **NTN** Kepri pada September 2024 sebesar 105,72. NTN tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan NTN nasional dengan angka 102,27. Namun demikian, capaian NTN tersebut masih berada di bawah sasaran NTN Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri yang pada tahun 2024 di targetkan sebesar 116. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan belum optimalnya produksi para nelayan Kepri yang masih tradisional dan kurangnya akses terhadap metode teknologi perikanan modern.
9. Berdasarkan data IPM dengan metode perhitungan baru, **angka IPM Kepri pada tahun 2024 dengan tingkat IPM tertinggi ke-tiga Nasional** sebesar 79,89 dan tumbuh sebesar 0,81 persen (*yoy*). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama enam tahun berturut-turut.

### Analisis Fiskal Regional

#### Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

1. **Alokasi Pendapatan APBN** tahun 2024 sebesar Rp15.126,38 miliar, terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp12.488,53 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.677,85 miliar.
  - **Realisasi Penerimaan Perpajakan** sampai dengan triwulan III 2024 sebesar Rp7.571,34 miliar mengalami pertumbuhan 4,96 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut didorong oleh *extra effort* yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menggali potensi PPh di daerah yang tumbuh 23,01 persen (*yoy*). Penerimaan PPh tersebut didominasi oleh pengenaan tarif progresif PPh 21 tumbuh 33,70 persen (*yoy*)
  - **Realisasi Pendapatan PNBP** sampai dengan triwulan III 2024 sebesar Rp2.476,95 miliar tumbuh signifikan sebesar 66,36 persen (*yoy*).
2. **Alokasi Belanja APBN** tahun 2024 sebesar Rp18.409,13 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp10.325,16 miliar, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8.083,97 miliar.
  - **Realisasi Belanja Pemerintah Pusat** sampai dengan triwulan III 2024 sebesar Rp5.730,98 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 11,71 persen (*yoy*). Persentase realisasi belanja tertinggi ada pada Belanja Pegawai sebesar 78,25 persen dari Pagu, atau sebesar Rp1.697,37 miliar secara nominal.

- **Realisasi Belanja TKD** dengan persentase penyaluran tertinggi adalah Dana Desa sebesar Rp213,46 miliar (97,54 persen dari Pagu) didorong oleh perubahan mekanisme Dana Desa yang sebelumnya disalurkan 3 tahap pada tahun 2023, menjadi 2 tahap pada tahun 2024.

### Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

1. **Pendapatan Daerah** dapat direalisasikan sebesar Rp10.124,92 miliar atau 69,71 persen dari Target dan mengalami peningkatan 8,35 persen (*yoy*). Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yaitu sebesar Rp6.234,57 miliar (61,58 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah). Sementara itu realisasi PAD sebesar Rp3.327,73 miliar (32,87 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu berupaya menggali potensi daerah lainnya agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mencapai kemandirian fiskal di Provinsi Kepri.
2. **Pendapatan Asli Daerah** dapat direalisasikan sebesar Rp3.327,73 miliar atau 69,17 persen dari Target realisasi. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD yaitu Rp2.745,02 miliar atau 82,49 persen dari total PAD. Kemudian, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar berturut-turut adalah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 297,59 miliar, Retribusi Daerah sebesar 256,96 miliar dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 28,16 miliar. Pemerintah daerah perlu memperhatikan potensi daerah demi meningkatkan PAD.
3. **Pajak Daerah** tumbuh sebesar 5,62 persen (*yoy*) didorong oleh realisasi Pajak Hiburan yang tumbuh 16,81 persen (*yoy*), BBNKB 15,21 persen (*yoy*), PKB 14,92 persen (*yoy*), dan BPHTB 11,18 persen (*yoy*). Namun demikian terdapat beberapa komponen Pajak Daerah yang mengalami kontraksi diantaranya, yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 12,43 persen (*yoy*), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 7,29 persen (*yoy*), dan Pajak Hotel 2,99 persen (*yoy*).
4. **Pendapatan Transfer** dapat direalisasikan sebesar Rp6.779,91 miliar atau hanya 70,55 persen dari Target. Realisasi terbesar terdapat pada DAU yaitu sebesar Rp3.767,48 miliar atau 55,57 persen dari total realisasi Pendapatan Transfer. DAK menempati posisi kedua dengan realisasi sebesar Rp1.165,39 miliar atau 17,19 persen total realisasi Pendapatan Transfer, dan DBH pada posisi ketiga sebesar Rp1.009,54 miliar atau 14,89 persen dari total realisasi Pendapatan Transfer. **Pendapatan Lainnya** telah terealisasi sebesar Rp17,27 miliar atau 16,64 persen dari Target.
5. **Rasio Perpajakan Daerah terhadap PDRB (Tax Ratio)** sebesar 1,16 persen. Rasio tersebut menunjukkan peningkatan 0,04 persen poin apabila dibandingkan dengan triwulan III 2023 yang sebesar 1,12 persen.
6. **Indeks Kemandirian Fiskal I** (PAD/Total Pendapatan) terdapat satu daerah yang berada pada klasifikasi mandiri, yaitu Pemprov Kepri dengan rasio IKF mencapai 51,41 persen. Kemudian Pemerintah daerah yang termasuk kategori menuju mandiri, yaitu Kota Batam dengan rasio 46,82 persen dan Kabupaten Karimun 27,05 persen. Adapun pemerintah daerah lainnya masih tergolong belum mandiri dengan rasio IKF Kabupaten Anambas 3,05 persen, Kabupaten Natuna 6,68 persen, Kabupaten Bintan 14,66 persen, dan Kota Tanjungpinang 15,57 persen. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas daerah pada triwulan III 2024 berada pada klasifikasi "Belum Mandiri." **Indeks Kemandirian Fiskal II** (PAD+DBH/Total Pendapatan) Kota Batam memiliki rasio IKF II 55,27 persen dan Prov. Kepri 56,34 persen yang termasuk dalam kategori mandiri. Adapun Kab. Karimun dengan rasio IKF II 40,19 persen, Kab. Natuna 28,90 persen, dan Kota Tanjungpinang 27,95 persen berada pada klasifikasi menuju kemandirian sedangkan Kab. Kep. Anambas 23,88 persen, Kab. Lingga 22,05 persen, dan Kab. Bintan 22,57 persen termasuk pada kategori belum mandiri. Dari hasil IKF II



periode triwulan III 2024, dapat disimpulkan bahwa banyak kabupaten/kota berada pada klasifikasi menuju kemandirian dan belum mandiri.

7. **Belanja Daerah** dapat direalisasikan Rp9.501,43 miliar atau 62,37 persen dari Pagu. Belanja Daerah tumbuh 13,46 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya Belanja Operasi 17,52 persen (*yoy*) dan Belanja Transfer 14,40 persen (*yoy*). Sementara itu Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga mengalami kontraksi masing-masing 14,14 persen (*yoy*) dan 57,71 persen (*yoy*). **Belanja Operasi** merupakan belanja dengan realisasi berdasarkan nominal tertinggi yaitu sebesar Rp7.693,33 miliar. **Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB** meningkat 0,24 persen poin pada triwulan III 2024 yang sebesar 3,16 persen dibandingkan dengan triwulan III 2023 sebesar 2,70 persen (*yoy*). **Belanja perkapita** Rp4.351.884 mengalami pertumbuhan 11,87 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya Rp3.890.113.

### Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi

**Hasil konsolidasi** antara pelaksanaan anggaran pusat dan daerah lingkup Kepri menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Konsolidasi sebesar Rp13.969,57 miliar dan tumbuh 18,17 persen (*yoy*), jumlah Belanja Konsolidasi sebesar Rp15.169,63 miliar dan tumbuh 15,75 persen (*yoy*), sehingga terjadi Defisit sebesar Rp1.200,06 miliar. Jumlah Pembiayaan Konsolidasi sebesar Rp338,66 miliar sehingga terbentuk SiKPA sebesar Rp861,40 miliar.

### Analisis Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah

1. Pertumbuhan aset pemerintah pusat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.545,30 miliar, atau 1,87 persen (*yoy*). Pertumbuhan tertinggi secara nominal terjadi pada Aset Tetap sebesar Rp793,50 miliar atau 1,04 persen (*yoy*). Pertumbuhan Aset tertinggi secara persentase terdapat pada Aset Lancar, dengan pertumbuhan sebesar Rp925,05 miliar, atau 18,72 persen (*yoy*). Penurunan Aset tertinggi terdapat pada Aset Lainnya, yang mencapai Rp205,65 miliar, atau 24,74 persen (*yoy*).
2. Kewajiban pemerintah lingkup wilayah Provinsi Kepri mengalami pertumbuhan signifikan sebesar Rp378,43 miliar, atau 8,53 persen (*yoy*). Pertumbuhan Kewajiban tertinggi terdapat pada Kewajiban Jangka Panjang, sebesar Rp333,85 miliar, atau 11.194,04 persen (*yoy*) yang terjadi pada Kewajiban Konsesi Jasa. Adapun Kewajiban Jangka Pendek di Kepri tumbuh Rp44,47 miliar, atau 1,00 persen (*yoy*).
3. Nilai Ekuitas pemerintah di Provinsi Kepri sebesar Rp79.197,86 miliar, berdasarkan jumlah Aset sebesar tahun 2024 Rp84.014,52 miliar, dan nilai Kewajiban sebesar Rp4.816,66 miliar. Nilai Ekuitas ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2023 yang memiliki nilai Ekuitas sebesar Rp78.030,99 miliar, atau meningkat Rp1.166,87 miliar atau 1,50 persen (*yoy*).
4. Berdasarkan nilai pertambahan Aset sebesar Rp793,50 miliar, terdapat peran Belanja Modal Pemerintah yang mendorong pertumbuhan aset infrastruktur sebesar Rp2.629,11 miliar. Sebagian besar Belanja Modal digunakan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.019,62 miliar (38,78 persen dari total Belanja Modal).
5. Realisasi PNBPN yang dikelola oleh KPKNL Batam mencapai Rp268,78 miliar (158,33 persen dari Target). Realisasi PNBPN tersebut terdiri dari PNBPN Aset Rp249,95 miliar (92,99 persen dari total PNBPN), PNBPN Lelang Rp18,78 miliar (6,99 persen dari total PNBPN), dan PNBPN Piutang Negara Rp0,06 miliar (0,02 persen dari total PNBPN). Penerimaan PNBPN s.d. triwulan III 2024 mengalami pertumbuhan signifikan 145,00 miliar, atau 117,12 persen (*yoy*).
6. Nilai Properti Investasi di Kepri yang mencapai Rp153,83 miliar, atau 0,20 persen dari total Aset Tetap masih terbilang kecil apabila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap yang dimiliki oleh



pemerintah pusat sebesar Rp77.369,56 miliar. Masih rendahnya nilai Aset yang tergolong menjadi Properti Investasi ini perlu didorong oleh Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki idle Aset yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh PNBPNP.

### Pengembangan Ekonomi Daerah

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha pada tiap-tiap kategori. Berdasarkan data dari BPS Kepri, pada tahun 2022 tercatat jumlah IKM di Kepri sebanyak 17.039 usaha dan serapan tenaga kerja sebesar 26.216 orang.
2. Sebaran UMKM di Kepri berpusat di Kota Batam (31,34 persen dari total UMKM di Kepri) dengan sektor dominan pada Makanan (63,29 persen dari total UMKM di Kepri).
3. Pemerintah memberikan dukungan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Berdasarkan data pada aplikasi SIKP, tercatat penyaluran KUR sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp1.320,38 miliar kepada 16.765 debitur. Sedangkan Pembiayaan UMi di Kepri telah menjangkau 7.959 debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp42,64 miliar.
4. Dukungan Belanja K/L untuk pemberdayaan UMKM memiliki nilai Pagu sebesar Rp2,29 miliar dan realisasi sebesar Rp0.68 miliar. Belanja ini tersebar di tiga K/L, yaitu: Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. Dukungan Belanja TKD untuk pemberdayaan UMKM terbagi pada jenis belanja Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dengan Pagu sebesar Rp5,31 miliar (tersalur Rp3,33 miliar atau 62,76 persen dari Pagu) dan Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan Pagu Rp8,66 miliar (tersalur sebesar Rp7,37 miliar atau 85,05 persen dari Pagu)
6. Dukungan Belanja APBD untuk pemberdayaan UMKM tersebar di pemprov dan seluruh pemko/pemkab di Kepri. Pemerintah daerah melalui belanja APBD memberikan berbagai dukungan pemberdayaan UMKM dalam bentuk bantuan akses permodalan, pelatihan, bussiness matching, pendampingan langsung.
7. Dukungan pemberdayaan UMKM juga dilakukan oleh Kantor Perwakilan BI Kepri dan OJK Kepri melalui kebijakan keuangan, pengawasan aktivitas keuangan, penyertaan produk UMKM pada *showcase* nasional dan internasional, serta sinergi bersama stakeholders melalui forum TPAKD dan TPID.

### Analisis Tematik

1. Hasil FGD dengan Bapenda dan BPKPD lingkup Provinsi Kepulauan Riau disampaikan bahwa **UU HKPD belum mengatur secara khusus potensi ekonomi maritim daerah Kepulauan** seperti Provinsi Kepri yang hanya memiliki 2 persen daratan dan sisanya 98 persen lautan, menimbulkan keterbatasan penggalian potensi penerimaan pajak daerah yang berada di daratan
2. **Kenaikan Pajak Hiburan menjadi 40 persen - 75 persen** memberikan potensi peningkatan Pajak Daerah, namun juga dapat menurunkan aktivitas bisnis (*gulung tikar*) karena berdampak pada kenaikan harga layanan yang menyebabkan sepi tempat usaha.
3. **Olahraga Golf masih menjadi perdebatan dikalangan pelaku usaha dan pemerintah daerah**, para pelaku usaha merasa Golf bukanlah olahraga yang masuk kedalam kategori yang dapat dikenakan Pajak Hiburan karena tidak secara nyata tertulis dalam UU HKPD, sementara didalam UU HKPD dijelaskan pada Pasal 55 ayat 1 bahwa "olahraga permainan dengan menggunakan

tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran” termasuk kedalam Jasa Kesenian dan Hiburan.

4. **Pendapatan PDRD di Provinsi Kepulauan mengalami peningkatan** melalui implementasian UU HKPD dan PP KUPDRD apabila dibandingkan periode sebelumnya.
5. **Pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau agar senantiasa mendorong investasi PMDN dan PMA** dalam mendorong sektor industri (Menyiapkan regulasi yang tepat dan mudah, mempromosikan kondisi regional yang kondusif untuk investasi).
6. **Penerapan Opsen Pajak mulai tahun 2025 dikhawatirkan dapat menyebabkan kontraksi pada Kabupaten Lingga, Anambas, dan Natuna** yang sebagian besar kendaraan bermotor merupakan pembelian dari Kota Batam atau Tanjung Pinang, sehingga daerah asal tidak menerima Opsen Pajak tersebut.
7. **Banyak perusahaan multinasional menanamkan modal (FDI) di Kepri, terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor industri, pariwisata, dan digital**, seringkali membawa serta TKA dari negara asal untuk menjalankan operasional perusahaan.
8. **Perbedaan evaluasi/rekomendasi dari DJPK untuk perihal yang sama**, seperti pada awal Pemkab Karimun mengajukan tarif pemanfaatan aset daerah berupa laboratorium direkomendasikan DJPK untuk dihapus, namun hal berbeda diberlakukan untuk Pemkot Tanjungpinang yang diperbolehkan menetapkan tarif pemanfaatan aset daerah berupa laboratorium.
9. **Tindak lanjut evaluasi/rekomendasi yang disampaikan DJPK, memiliki perbedaan dengan tindak lanjut evaluasi dari Kemendagri**. Hal ini menimbulkan kebingungan dari Pemda untuk mempedomani, seperti Pemkot Tanjungpinang yang menetapkan labkesmas pada retribusi jasa umum, namun rekomendasi Kemendagri untuk dipindahkan ke jasa usaha, sedangkan rekomendasi DJPK kembali pada retribusi jasa umum.
10. **Bagi hasil baiknya dikenakan dengan perhitungan bahan bakar karena ada perbedaan kendaraan pada Provinsi Kepulauan (98 persen lautan)** yang memiliki banyak transportasi laut, perbandingan kendaraan 1 motor 3 liter dengan kapal dihitung 1 kendaraan bisa mencapai 1000 liter. Contohnya Pemkab Natuna dan Anambas dulu mendapatkan puluhan miliar, sekarang hanya ratusan juta, karena hanya pulau kecil dan laut lebih mendominasi.

## 5.2 Rekomendasi

### Analisis Ekonomi Regional

1. **Pemerintah daerah agar meningkatkan belanja pada sektor Industri Pengolahan, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)** dalam rangka mengoptimalkan perekonomian PMTB Bruto (investasi) yang memiliki kontribusi paling besar yaitu 45,11 persen terhadap PDRB Kepri, sehingga dapat lebih mempercepat pertumbuhan Kepri di triwulan IV 2024 . Pemda Kepri agar menambah alokasi belanja pada sektor strategis pendukung PDRB diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan aktivitas ekonomi kedepannya.
2. **TPID** diharapkan memperkuat **kolaborasi antar instansi pusat dan daerah di Kepri dalam rangka menjaga kestabilan Target inflasi** dengan menerbitkan kebijakan dan program yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan moneter, melalui berbagai upaya meliputi operasi pasar murah untuk mengatur keterjangkauan harga, pemantauan kesediaan pasokan pada Bulog, distributor serta pasar, pelaksanaan program budidaya pertanian dan memastikan kelancaran rantai distribusi bahan pangan.

3. **Surplus perdagangan luar negeri** dapat ditingkatkan melalui upaya **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** dalam menggencarkan pemasaran yang lebih agresif dan partisipasi dalam pameran dagang internasional untuk menarik pasar ekspor potensial baru khususnya komoditas gas alam, hasil tambang dan hasil industri (non migas) yang menjadi produk ekspor andalan.
4. **Pemerintah daerah** agar melaksanakan **Program pengentasan kemiskinan** dengan cara:
  - a. Dinas Sosial perlu **memperkuat Jaring Pengaman Sosial dengan mengintegrasikan data penerima bantuan sosial** di daerah dengan data pusat agar pelaksanaan penyaluran Bansos dapat menjangkau keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran.
  - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar **melaksanakan pelatihan keterampilan wirausaha dan pendampingan** untuk memunculkan umkm baru yang akan meningkatkan pendapatan rumah tangga (mandiri secara ekonomi) dan meningkatkan UMKM naik kelas.
5. Aspek pemerataan menjadi fokus pemerintah daerah, **Pemprov Kepri agar melakukan upaya memperkecil ketimpangan (gini ratio)** dengan cara meningkatkan Belanja Infrastruktur dan kegiatan perdagangan untuk menstimulus aktivitas ekonomi pada daerah terpencil/pedesaan. Di sisi lain, pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan pemprov dalam menumbuhkan program pelatihan kerja, *entrepreneurship*, serta menambahkan alokasi fasilitas pinjaman Pemprov Kepri dengan bunga 0 (nol) persen kepada pelaku usaha.
6. **Pemerintah daerah** agar lebih **menggencarkan program pemberdayaan ekonomi untuk menurunkan tingkat pengangguran** melalui pelatihan keterampilan, memudahkan akses terhadap modal usaha, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan UMKM. **Pemerintah Kota Batam** yang masih memiliki isu tingkat pengangguran yang tinggi diharapkan untuk menyediakan lebih banyak sekolah vokasi setingkat SMK dan Politeknik, melakukan kerja sama dengan industri (program *link and match industry*) sehingga tercipta kualitas tenaga kerja *high-skilled worker* yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kota Batam.
7. Dalam upaya **meningkatkan NTP, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan** agar menyediakan akses petani terhadap teknologi pertanian modern dengan tambahan insentif berupa benih unggul, pupuk organik, dan teknik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga meningkatkan nilai jual.
8. Untuk **meningkatkan NTN** agar **Dinas Kelautan dan Perikanan** membentuk koperasi nelayan atau kelompok usaha bersama dengan memfasilitasi akses nelayan ke pasar yang lebih besar dan stabil. Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu mempromosikan produk ikan lokal, dan membuka akses ke pasar ekspor membangun kemitraan dengan sektor swasta, termasuk perusahaan pengolahan ikan, restoran, hotel, dan ritel, untuk memastikan pasokan ikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
9. Dalam rangka **meningkatkan angka angka IPM, Pemprov Kepri** agar meningkatkan formasi tenaga pendidik (guru) sampai ke pulau perintis, kesehatan (fasilitas kesehatan sampai ke pelosok) dan penguatan keterampilan lapangan usaha sesuai dengan kondisi daerah kepulauan, seperti pelatihan budidaya rumput laut, perikanan dan sektor kelautan.

### Analisis Fiskal Regional

#### Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

1. Kanwil DJP Kepri agar meningkatkan extra effort melalui edukasi, kerjasama, layanan langsung, dan penyuluhan perpajakan yang difokuskan terhadap perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah pegawai yang banyak dalam rangka meningkatkan Pajak atas WP Orang Pribadi, serta berkolaborasi dengan asosiasi industri dan bisnis untuk memastikan kepatuhan dan mendukung pengumpulan pajak



2. Pendekatan dengan pihak swasta untuk meningkatkan penerimaan Bea Masuk, seperti yang telah dilakukan oleh Kanwil DJBC khusus Provinsi Kepri yang telah melakukan pendekatan kepada PT Medco Energy untuk menggali Bea Masuk dari Impor BBM, agar terus diusahakan dalam menggali potensi penerimaan perdagangan internasional.
3. Dalam rangka optimalisasi penerimaan cukai khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT), Kanwil DJBC Khusus Kepri dan KPU BC Batam agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan inspeksi dalam upaya pemberantasan maraknya peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah Kepri yang sangat berpengaruh menyebabkan penurunan pendapatan dari CHT.
4. KPKNL Batam agar meningkatkan penerimaan PNPB melalui pengelolaan aset, dengan melakukan identifikasi idle asset BMN, serta menjaga koordinasi dengan BP Batam yang mengelola aset dalam jumlah besar di Kepri
5. Agar Kanwil DJPb Kepri, KPPN Batam, dan KPPN Tanjung Pinang mendorong satker yang belum mencairkan sisa anggaran kontraktual untuk melakukan percepatan realisasi anggaran.
6. Kanwil DJPb Kepri dan KPPN Batam agar mendorong satker BPKP Kepri untuk mencairkan sisa dana kontraktual untuk mempercepat realisasi anggaran.
7. Satker perlu lebih teliti dalam mencantumkan nomer CAN Kontraktual yang sesuai dengan addendum saat SPM pada SAKTI.
8. Kanwil DJPb Kepri dan KPPN agar lebih intensif dalam mendorong satker untuk mematuhi RPD halaman III DIPA. Kemudian satker PPJN agar mempercepat koordinasi bersama PLN Kepri dalam penyelesaian izin pembangunan Jembatan Batam-Bintan.
9. Satker yang memiliki Pagu Belanja Modal agar mempercepat proses pelaksanaan kontrak dan pengerjaan fisik, sehingga tidak menghadapi musim cuaca buruk di Kepri pada akhir tahun anggaran.
10. BPKAD, DPMD dan Inspektorat Daerah agar menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan baik dalam proses penyaluran TKD, khususnya DAK Fisik, baik dalam tahap perencanaan, penyaluran sampai dengan tahap pertanggungjawabannya.

### Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu mencapai **kemandirian fiskal**, atas dasar tersebut pemerintah daerah dapat melakukan upaya sebagai berikut:

1. **Mengoptimalkan PAD dari Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** mengingat realisasi masih rendah sampai dengan triwulan III, yaitu masing-masing sebesar 53,83 miliar (8,07 persen dari Target) dan 15,66 miliar (23,53 persen dari Target), atau hanya memberikan kontribusi 3,7 persen terhadap PAD. Pemda daerah perlu memetakan BUMD yang belum optimal dalam menghasilkan profit dan menemukan permasalahan serta solusi konkrit hingga menghasilkan profit yang akhirnya dapat memberikan dividen bagi pemda.
2. **Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LLPAD)** mengalami kontraksi 33,37 persen (yoy), Penurunan ini terjadi disebabkan oleh penurunan pendapatan BLUD sebagai kontributor mayoritas pada LLPAD yaitu sebesar 68,13 persen. **Pemerintah daerah agar memetakan BLUD yang mengalami penurunan pendapatan dan menemukan permasalahan** serta solusi konkrit. Hal tersebut penting dilakukan mengingat seharusnya BLUD merupakan salah satu penyumbang potensial pendapatan bagi pemerintah daerah.
3. **Penurunan penerimaan pajak hotel pada Kabupaten Bintan** disebabkan oleh menurunnya wisman singapura yang menjadi kontributor terbesar mencapai 60,62 persen wisman di Provinsi Kepri. Penurunan kunjungan wisman Singapura mencapai tersebut disebabkan oleh **kenaikan**

**harga tiket ferry Singapura-Batam** sebesar 66,67 persen, menjadi Rp840 ribu (tiket pp). Selanjutnya, **Pengajuan Visa on Arrival (VoA) Kepri belum di setujui** Kemenparekraf dan Ditjen Imigrasi. Skema baru VoA memberi pilihan bagi wisman non-ASEAN yang hanya ingin berkunjung singkat untuk menggunakan *short term visa* selama 7 hari dengan tarif Rp100 ribu dibandingkan harus mengurus visa 30 hari dengan tarif Rp500 ribu.

4. Dinas DPMPSTSP berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lingga agar **menyusun mapping terhadap potensi sumber daya alam** yang dapat ditawarkan kepada investor sehingga mampu memberikan bagi hasil kepada Kabupaten Lingga. Masih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil karena Pemprov Kepri, Pemko Tanjungpinang, KPP dan KPPN **belum rutin melakukan rekonsiliasi pajak sebagai syarat salur** DBH Pajak.
5. Untuk meningkatkan rasio PAD terhadap PDRB, pemerintah daerah agar melakukan **diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui pengembangan sektor potensial** dengan memberikan insentif kepada investor, mendukung pengembangan UMKM meningkatkan promosi produk lokal.
6. Berdasarkan **Indeks Kemandirian Fiskal I dan II**, Pemerintah Kabupaten Bintan masuk kedalam kategori 'Belum Mandiri'. Hal ini disebabkan penurunan kunjungan wisatawan Singapura ke Bintan akibat kenaikan tiket ferry Singapura-Batam, penurunan BPHTB karena program gratis bagi rumah subsidi dan kenaikan Pajak Hiburan membuat beberapa tempat hiburan menutup perusahaannya. **Pemerintah Kabupaten Bintan agar menyusun insentif fiskal jangka pendek untuk menstimulus aktivitas perdagangan di wilayahnya**
7. Dalam rangka meningkatkan realisasi Belanja Daerah, pemerintah daerah agar **menyusun rencana kerja secara matang dengan prioritas daerah** melalui analisis kebutuhan, konsultasi dan koordinasi kepada semua OPD untuk mendiskusikan rencana bersama menggapai tujuan, sasaran dan tahapan realisasi yang tepat waktu.
8. **Surplus sebesar Rp242,27 miliar** merupakan **peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik atau membiayai proyek-proyek strategis daerah** sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah. Pemerintah daerah perlu membuat perencanaan yang matang dalam penggunaan surplus tersebut.

### Pengembangan Ekonomi Daerah

1. K/L yang memiliki pagu terkait pemberdayaan UMKM perlu melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih matang sehingga penyerapan/realisasi tidak tertumpuk di akhir triwulan;
2. Pemerintah daerah penerimaan anggaran TKD terkait pemberdayaan UMKM perlu melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih matang sehingga penyerapan/realisasi tidak tertumpuk di akhir triwulan
3. Pemerintah daerah c.q. Dinas Koperasi dan UKM perlu melakukan kerjasama pemberdayaan UMKM dengan melibatkan perbankan selaku lembaga penyalur KUR. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir keterbatasan APBD yang dimiliki oleh pemda, serta dapat digunakan sebagai wadah untuk mencari calon debitur KUR potensial yang akan meminjam ke perbankan;
4. Dinas KUKM Kepri perlu menginisiasi agar seluruh Dinas Koperasi Usaha Mikro di masing-masing kabupaten/kota dapat duduk bersama dan bertukar ide pemberdayaan yang sesuai bagi UMKM mengingat ada beberapa kabupaten/kota yang juga sudah sukses menyediakan subsidi margin, hibah alat, dan pendampingan namun masih ada kabupaten/kota lainnya yang bersifat pasif.
5. BI dan OJK agar terus memperkuat sinergi pemberdayaan UMKM dengan Kanwil DJPb Kepri, pemda, dan pihak lainnya melalui forum TPAKD dan TPID

### Analisis Tematik

1. **Agar Kemendagri dan DJPK bersama dengan DPR mengkaji lebih lanjut dan penyempurnaan UU HKPD untuk memastikan potensi ekonomi maritim** pada daerah kepulauan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
2. **Agar Pemerintah Daerah memonitoring situasi iklim usaha, apabila kenaikan pajak menurunkan aktivitas bisnis, Pemda dapat memberikan insentif fiskal** untuk menstimulasi aktivitas pada usaha 'Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam dan Bar'.
3. **Agar DJPK memberikan penjelasan resmi melalui surat formal** yang menyatakan kepastian kategori usaha Olahraga Golf.
4. **Agar pemerintah daerah mempercepat implementasi UU HKPD dan PP KUPDRD** secara menyeluruh melalui penetapan perkara turunannya.
5. **Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan properti selain pada rumah bersubsidi**, seperti mendorong pembangunan pabrik-pabrik industri melalui PMDN atau PMA, dan perumahan komersil.
6. **Agar Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah Kepri mempermudah regulasi balik nama kendaraan bermotor antar daerah** sehingga tidak memberikan dampak negatif pada daerah yang tidak memiliki dealer kendaraan bermotor.
7. **Agar Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/kota terus mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah izin mempekerjakan TKA**, mengingat Kepri sebagai daerah industri dan tujuan investasi asing perlu mengendalikan TKA dengan penerapan tarif yang lebih optimal sehingga dapat membatasi jumlah TKA dan mengoptimalkan pendapatan daerah.
8. **Pemerintah daerah yang mendapatkan evaluasi/rekomendasi dari DJPK agar segera melaksanakan telaah dan tindak lanjut** terhadap rekomendasi tersebut, sehingga rancangan perubahan Perda dapat segera dirumuskan apabila dibutuhkan perubahan terhadap Perda yang telah ditetapkan.
9. **Agar membangun sinergi antara DJPK dengan Kemendagri** dalam merumuskan hasil evaluasi/rekomendasi atas Perda PDRD.
10. **Agar DJPK dan Kemendagri mengkaji penerapan kebijakan perhitungan dana bagi hasil**, diharapkan menggunakan acuan bahan bakar yang dikonsumsi pada daerah khusus kepulauan yang memiliki banyak kapal (transportasi laut).
11. **Agar Pemprov Kepri terus mengoptimalkan penerimaan Pajak PKB, BBNKB, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor** yang mendominasi penerimaan pajak di Kepri.
12. **Agar Pemkab dan Pemko di Kepri terus mengoptimalkan penerimaan Pajak yaitu BPHTB, Pajak Penerangan Jalan, dan PBBP2** yang menjadi kontributor penerimaan pajak terbesar bagi pemerintah daerah.

### *Policy Response by Local Expert: Kajian Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah – Dr Suyono Saputra*

1. Agar Optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui **peningkatan sosialisasi kesadaran membayar pajak**.
2. **Perbaiki pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana** untuk mendukung aktivitas ekonomi di daerah, serta **sistem dan prosedur** yang mengarah kepada sistem yang mempermudah pelayanan dan mendorong efektivitas dalam pengawasannya
3. **Peningkatan sistem aplikasi berbasis online** guna mencegah kebocoran database.
4. Bekerjasama dengan lintas sektoral dalam upaya **menggali potensi redistribusi daerah serta PAD lain yang sah**.
5. Meningkatkan **sinergitas antar instansi** yang terkait dengan pengelolaan pajak.



# List of Reference Daftar Pustaka



## Peraturan

Kementerian Sekretariat Negara. 2022. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

------. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016*. Berita Negara RI Tahun 2015, No. 1181. Jakarta: Kementerian Keuangan.

------. 2014. Surat Edaran Nomor SE-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-112/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan UMKM Lingkup DJPb

## Laporan dan Buku

Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

------. 2021. *Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

------. 2021. *Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Pusat Statistik. 2023. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2023. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

------. 2024. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.





# List of Reference

## Daftar Pustaka



- , 2024. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2024. *PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan III 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2024. *Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan III 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2024. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2024. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2024. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2024. *Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2024. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2023. *Perkembangan Nilai Tukar Petani Kepulauan Riau September 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2024. *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah September 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2024. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2022. *Laporan Inflasi IHK Bulan September 2024*. Batam: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

### Jurnal

Haryono, S., & P. Wardoyo. 2012. *Struktural Equation Modelling Untuk Penelitian Manajemen Menggunakan Amos 18.00*. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama.

Kline, R. B. (2015). *Principles and practice of structural equation modeling*. Guilford Publications.

Cahyo, R. D. (2016). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, 95 Dan Rata-Rata Lama Prndidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2009-2014*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(2).

Ramiayu, D.D. (2016). *Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Jawa Timur*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4 (2), 1-16.

### Berita

1. <https://bpmpkepri.kemdikbud.go.id/aksi/detailkabar.php?id=288>
2. <https://bpbatam.go.id/en/kepala-bp-batam-bangun-22-infrastruktur-jalan-hingga2024-mendatang/>





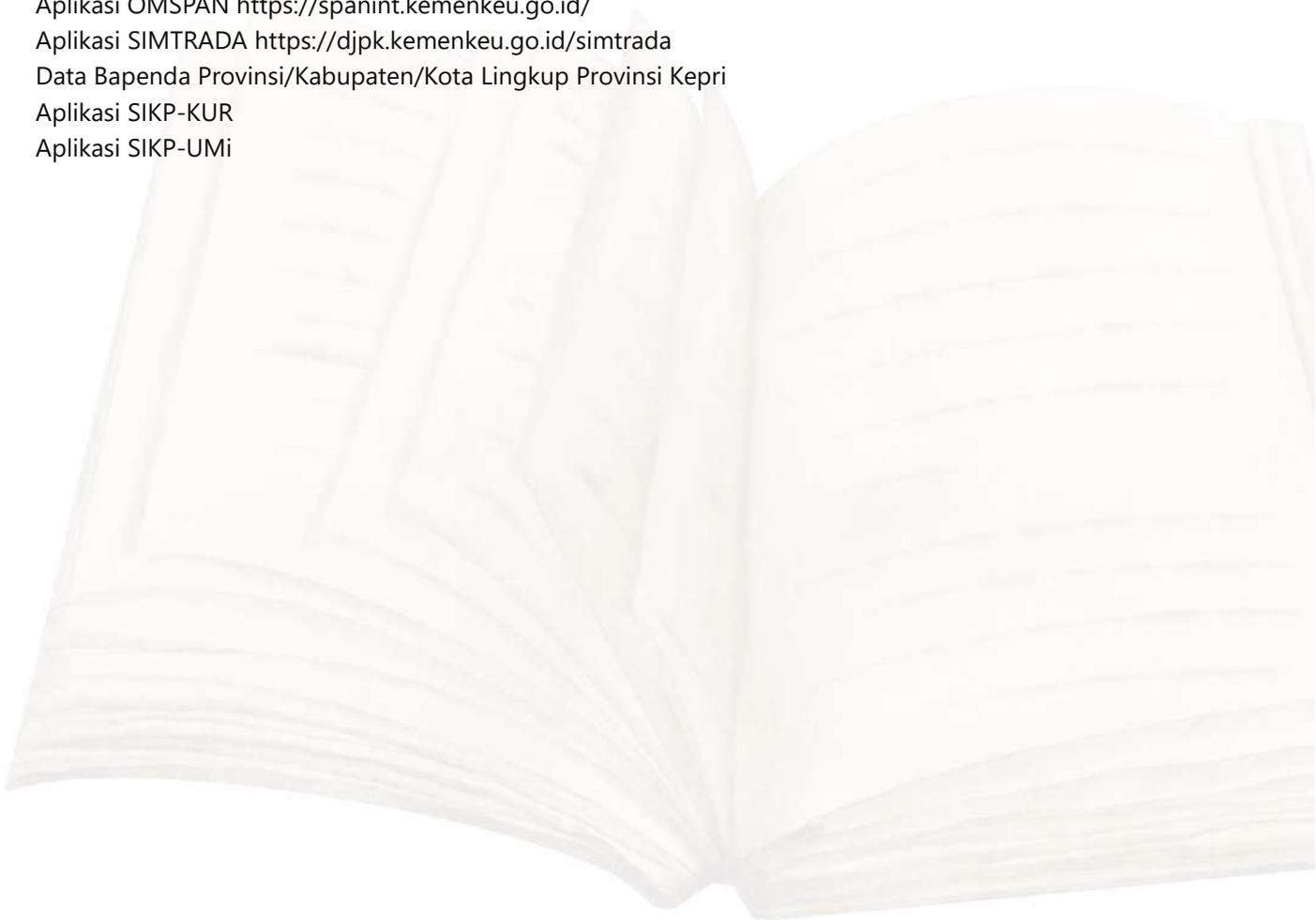
# List of Reference Daftar Pustaka



3. <https://kepri.batampos.co.id/pemprov-siapkan-empat-program-strategis-utnuk-tekan-angka-kemiskinan/>
4. <https://kepriprov.go.id/berita/pendidikan/program-gubernur-ansar-gratiskan-spp-untuk-anak-anak-sma-smk-dan-slb-teralisasi>

## Sumber Lain

SIKRI (Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia)  
Aplikasi MEBE dan SINTESA <https://ditpa.kemenkeu.go.id/>  
Aplikasi OMSPAN <https://spanint.kemenkeu.go.id/>  
Aplikasi SIMTRADA <https://djpgk.kemenkeu.go.id/simtrada>  
Data Bapenda Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Kepri  
Aplikasi SIKP-KUR  
Aplikasi SIKP-UMi





# Kajian Fiskal Regional

Provinsi Kepulauan Riau

Triwulan III

2024

 Kanwil DJPb Kepulauan Riau

 @djpbkepri

 @djpbkepri

Konten Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2024 dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Kanwil DJPb Kepri. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin dari Kanwil DJPb Provinsi Kepri.

